

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023-2043

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang berada di wilayah pantai timur Pulau Sumatera. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau. Luas wilayahnya 96% berupa lautan dan hanya 4 persen merupakan daratan berupa pulau-pulau, diantara adalah Pulau Bintan, Pulau Batam, Pulau Rempang dan Galang, Pulau Karimun, Kepulauan Natuna, dan lainnya. Wilayah Kepulauan Riau berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat, serta berbatasan secara langsung dengan 4 negara tetangga yaitu Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.055.278 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,66%.

Pemerintah telah membangun Batam sebagai pusat industri dan perdagangan dunia. Hal ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2021 mencapai rata-rata Rp.179,275 triliun. Dengan PDRB ini pendapatan per kapita Provinsi Kepulauan Riau terkategori sangat tinggi yaitu lebih dari Rp 87 juta. Tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi ini juga tinggi. Berdasarkan PDRB harga konstan pada tahun 2019-2021 pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau berturut-turut 4,83%, -3,80%, dan 3,43%.

PDRB ini didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor industri pengolahan 42,03 %, sektor konstruksi 18,75 % dan sektor pertambangan dan penggalian 13,16 %. Sektor industri tanpa migas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 didominasi oleh 2 kelompok besar :

- (a) industri barang logam, komputer, dan elektronika; dan
- (b) industri logam dasar, besi dan baja.

Berikut ini beberapa permasalahan yang menjadi isu utama pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kurangnya pengembangan industri pengolahan untuk mendukung penciptaan nilai tambah (*added value*) hasil-hasil pertanian dan kelautan yang merupakan sumberdaya alam lokal potensial;
2. Masih belum optimalnya kondusifitas iklim usaha dan investasi sektor industri secara berkelanjutan; dan
3. Masih belum optimalnya kualitas produksi yang berdaya saing tinggi dari produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah.

Disamping itu, beberapa faktor masih merupakan penghambat pembangunan Industri di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, khususnya Batam, dan wilayah lainnya;
2. Rendahnya kualitas SDM (khususnya SDM industri) sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
3. Masih belum optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;
4. Masih rendahnya konektivitas di semua daerah;
5. Masih rendahnya infrastruktur akses sumber energi (gas) untuk pengembangan jaringan kelistrikan dan gas;
6. Masih rendahnya infrastruktur jaringan air bersih untuk mendukung sektor industri;
7. Masih belum optimalnya pengendalian atas berbagai pencemaran dan kegiatan lainnya yang merusak sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dalam RPJM dan RPJP Provinsi Kepulauan Riau tercantum Visi yang mengedepankan pembangunan kemaritiman, juga Misi yang menegaskan pengembangan ekonomi berbasis industri dengan memanfaatkan bahan baku lokal, namun potensi sumberdaya alam lokal termasuk kemaritiman ini belum terkelola dengan maksimal.

Disisi yang lain, untuk industri yang sudah berkembang kuat akan selalu membutuhkan kondusifitas iklim usaha yang harus terus terjaga, juga untuk peningkatan investasi. Industri-industri unggulan utama yang sudah

berkembang harus terus didukung dengan iklim usaha dan investasi yang selalu kondusif. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pembangunan industri di Kepulauan Riau adalah masih kurangnya kapasitas IKM dalam menghasilkan produk industri yang berdaya-saing. Untuk itu, perlu untuk terus meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dari berbagai analisis di atas, dan dengan memperhatikan permasalahan sektor industri dalam RPJM dapat ditarik permasalahan utama pembangunan industri di Kepulauan Riau, yang berikutnya digunakan untuk penentuan program prioritas pembangunan industri Provinsi. Permasalahan utama ini adalah:

1. Kurangnya pengembangan sektor tersier (industri pengolahan) untuk mendukung nilai tambah (*value added*) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasil pertanian/perkebunan dan kelautan/perikanan (potensi sumberdaya alam lokal potensial).
2. Bagaimana menjaga kondusifitas iklim usaha dan investasi sektor industri secara berkelanjutan.
3. Bagaimana meningkatkan kontribusi IKM sektor industri melalui peningkatan kualitas produksi yang berdaya saing tinggi.

Dengan berbagai permasalahan ini, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mengurai dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan di atas serta memberi dampak pada pembangunan industri yang lebih maju.

Disamping itu, sesuai amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- Potensi sumberdaya industri daerah;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Provinsi;

- Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Kabupaten/Kota; serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Potensi Umum pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada:

1. Mendorong pengembangan wilayah Laut dan sektor-sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Keterkaitan Antar Daerah (*Connectivity*).
3. Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Terdepan/Terluar.
4. Mendorong Pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Batam dengan tetap menjaga momentum Pertumbuhan di wilayah Batam.
5. *Pro Growth, Pro Jobs, Pro Environment*.
6. Keterkaitan antara target nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal Pertumbuhan Ekonomi dengan target diatas 8 persen, Pengurangan angka kemiskinan dibawah 10 persen dan pengurangan pengangguran dibawah 4 persen.

Oleh karena itu, dalam pembangunan industri maka dilakukan analisis sumber daya melalui pendekatan *resources based view* yaitu analisis sumber daya *tangible* dan *intangible*, berikut disajikan sumberdaya daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ada, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Berwujud

Sumber Daya Berwujud	
Sumber daya keuangan	Kapasitas daerah untuk meminjam atau memperolehnya dari sumber luar, APBN dan lainnya Kemampuan daerah untuk menghasilkan dana internal, PAD Kepri sebesar 8 – 10 %
Sumber daya organisasi	Struktur pelaporan formal daerah Kepri dan perencanaan formalnya, sistem kontrol dan sistem koordinasi yang ada Kecanggihan dan lokasi strategis Provinsi Kepri berupa jajaran pulau-pulau dan berhadapan

Sumber Daya Berwujud	
	dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk
Sumber daya fisik	Akses ke bahan mentah, dan potensi SDA unggulan yang ada yaitu perikanan dan perkebunan kelapa
Sumber daya teknologi	Persediaan teknologi industri, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang. dan rahasia dagang yang dimiliki

Sumber: Diadaptasi dari J.B Barney, 1991, *Firm resources and Sustained competitive advantage*, *Journal of management*,17:101;R.M.Grant, 1991, *Contemporary Strategy Analysis* (Combridge, U.K.:Black Business),100-102.

Tabel 1.2 Sumber Daya Tidak Berwujud

Sumber Daya Tidak Berwujud	
Sumber daya manusia	Ilmu pengetahuan yang dimiliki Kepercayaan Kapabilitas manajerial Rutinitas organisasi kerja daerah
Sumber daya inovasi	Gagasan Kapabilitas keilmuan Kapabilitas untuk melakukan inovasi
Sumber daya reputasi	Raputasi daerah dalam hal pengembangan industri dapat dibuktikan eksisnya industri di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Citra daerah dalam hal iklim investasi dengan adanya berbagai insentif dan tarif yang ada di lingkungan FTZ BBK Persepsi terhadap kualitas, daya tahan, dan reliabilitas kebijakan yang ada Reputasi dengan para investor

Sumber: Diadaptasi dari R.Hall, 1992, *The Strategic of intangible resources*, *Strategic Management Journal*, 13:136-139;R.M. Grant, 1991, *Contemporary Strategic Analysis* (Co,bridge, U.K:Blackwell Business), 101-104.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP Kepulauan Riau ini adalah :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Pasal 4 bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
 - c. Potensi sumber daya industri daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
 - f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.

8. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 – 2041.
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 – 2034.
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari Tahun 2018 – 2038.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2040.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2041.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011 - 2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Anambas Tahun 2011 - 2031.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

- **Bab 1 Pendahuluan**

- I.1. Latar Belakang

- Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri provinsi.

I.2. Dasar Hukum

Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Riau.

I.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika dalam penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Riau.

• **Bab 2 Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri**

2.1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

2.2 Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam yang dilihat dari produksi komoditas dan cadangan sumber daya alam, lembaga diklat dan litbang serta sumber pembiayaan industri.

2.3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan.

- **Bab 3 Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah**

- 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026. RPIP Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

- 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Menguraikan tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau, sebagai penjabaran lebih lanjut, visi dan misi pembangunan Kepulauan Riau dalam bidang industri.

- 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

- **Bab 4 Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi**

- 4.1. Kriteria Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Menjelaskan tentang kriteria penentuan industri unggulan provinsi berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional.

- 4.2. Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Menjelaskan tentang pemilihan Industri Unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan sektor, subsektor dan produk industri unggulan daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan analisis Location Quotient meliputi Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ), analisis Shift Share. Pemilihan Industri unggulan didasarkan kepada: industri yang telah memiliki kinerja yang baik/signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Industri Prioritas Nasional dari komoditas/industri yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, industri unggulan bangkitan daerah dari luar kelompok industri prioritas serta industri yang menunjang visi misi pembangunan Provinsi Kepri.

- 4.3. Program Pembangunan Industri.

1. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
Penjelasan mengenai sasaran pengembangan Industri Unggulan dan serta program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Pengembangan Perwilayahan Industri.
Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Pembangunan Sumber Daya Industri.
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.
5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

- **Bab 5 Penutup**

Bab ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab 1 s/d Bab 4 dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT

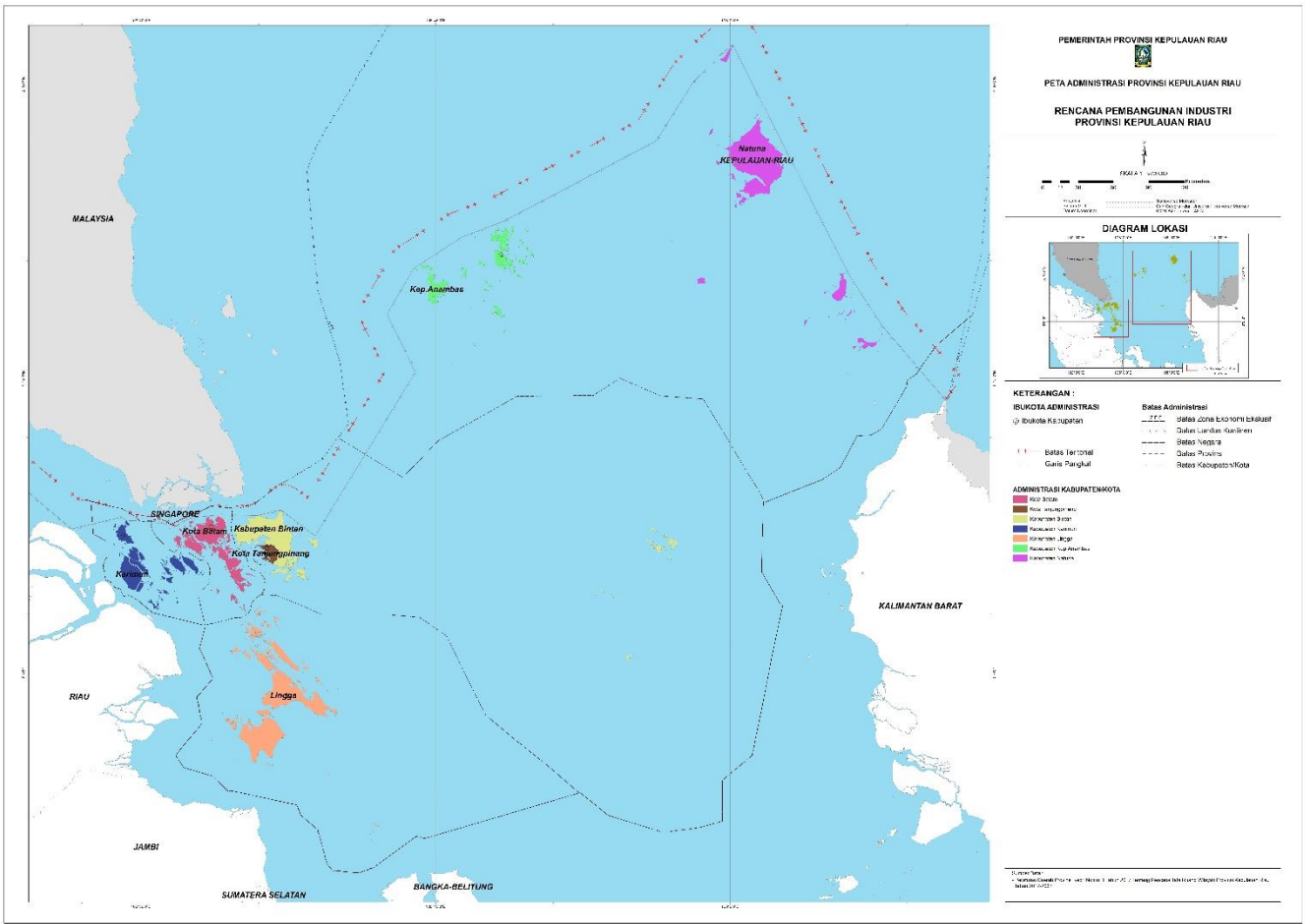
PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

2.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 428.022 km² dengan luas daratan sebesar 9.246 km², sedangkan luas lautannya mencapai 418.774 km². Sebagai provinsi kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km.

Gambar 2.1. Gambar Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2002 sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia. Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Utara : Vietnam dan Kamboja
- Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Timur : Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Rincian luas masing-masing wilayah administratif ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Luas Darat (Km ²)
1	Karimun	912,75
2	Bintan	1318,21
3	Natuna	2009,04
4	Lingga	2266,77
5	Kepulauan Anambas	590,14
6	Batam	960,25
7	Tanjungpinang	144,56
Jumlah		8201,72

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2,118,239 jiwa. Kota Batam memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini berkaitan dengan Kota Batam sebagai Kota dengan perindustrian dan jasa dalam skala yang besar dan luas. Kabupaten lainnya yang memiliki penduduk terkecil adalah Kepulauan Anambas, hal ini dikarenakan Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten termuda di provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021

Wilayah	Jumlah Penduduk (ribu)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi	1,893,02	1,931,33	1,970,45	2,010,39	2,064,56	2,118,239
Karimun	235,46	239,51	243,63	247,82	253,45	259,452
Bintan	152,04	153,73	155,44	157,16	159,52	162,561
Natuna	75,98	77,22	78,47	79,74	81,50	83,364
Lingga	93,24	94,47	95,70	96,96	98,63	100,661
Kep. Anambas	42,93	43,92	44,94	45,99	47,40	48,737
Batam	1,083,60	1,108,74	1,134,46	1,160,78	1,196,40	1,230,097
Tanjungpinang	209,76	213,75	217,81	221,94	227,66	233,367

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010 – 2021**

Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010 – 2020	2020 – 2021
Kepulauan Riau	2,02	1,94
Karimun	1,72	1,77
Bintan	1,11	1,43
Natuna	1,62	1,72
Lingga	1,31	1,54
Kep. Anambas	2,32	2,10
Batam	2,32	2,11
Tanjungpinang	1,90	1,87

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Berdasarkan data IPM di Provinsi Kepulauan Riau, dari tahun 2016 hingga 2021 terus meningkat, yaitu dari 73,99 di tahun 2016 menjadi 75,59 di tahun 2021. Kota Batam memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 81,11 sedangkan Kabupaten Lingga memiliki IPM terendah yaitu sebesar 65,83 persen. IPM yang tinggi di Kota Batam dipengaruhi salah satunya oleh jumlah penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

**Tabel 2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 – 2021
di Provinsi Kepulauan Riau**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Riau	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79
Karimun	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bintan	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57
Natuna	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09
Lingga	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83
Kepulauan Anambas	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23
Batam	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12
Tanjungpinang	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

2.1.3 Infrastruktur Dasar

Pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, pelabuhan, bandara, air, listrik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Infrastruktur Pendukung di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Infrastruktur	Data
1	Panjang jalan	
	Nasional (km)	586,87
	Provinsi (km)	896,45
	Kabupaten/Kota (km)	4.202,98
2	Jumlah pelabuhan	11
3	Jumlah bandara	7
4	Produksi air bersih (m3)	5,3 juta (cakupan layanan 41,47%)
5	Beban puncak listrik (MW) (estimasi 2022)	150 MW

2.1.3.1 Jalan Darat

Panjang jalan (km) di Provinsi Kepulauan Riau pada table berikut ini berdasarkan status jalan yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten di masing – masing Kabupaten Kota.

Tabel 2.6. Panjang Jalan (Km) Berdasarkan Status di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Kab. Karimun	26,25	143,72	885,34
2	Kab. Bintan	137,10	139,10	662,31
3	Kab. Natuna	117,88	143,33	464,08
4	Kab. Kep. Anambas	30,93	51,00	294,13

No	Kabupaten/Kota	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
5	Kab. Lingga	70,45	236,72	871,14
6	Kota Batam	160,20	112,35	646,16
7	Kota Tanjungpinang	44,06	70,23	419,83
Provinsi Kep. Riau		586,87	896,45	4.202,98

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

Jalan Arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah. Adapun Jalan Arteri Primer di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.7. Ruas Jalan Arteri Primer di Provinsi Kepulauan Riau

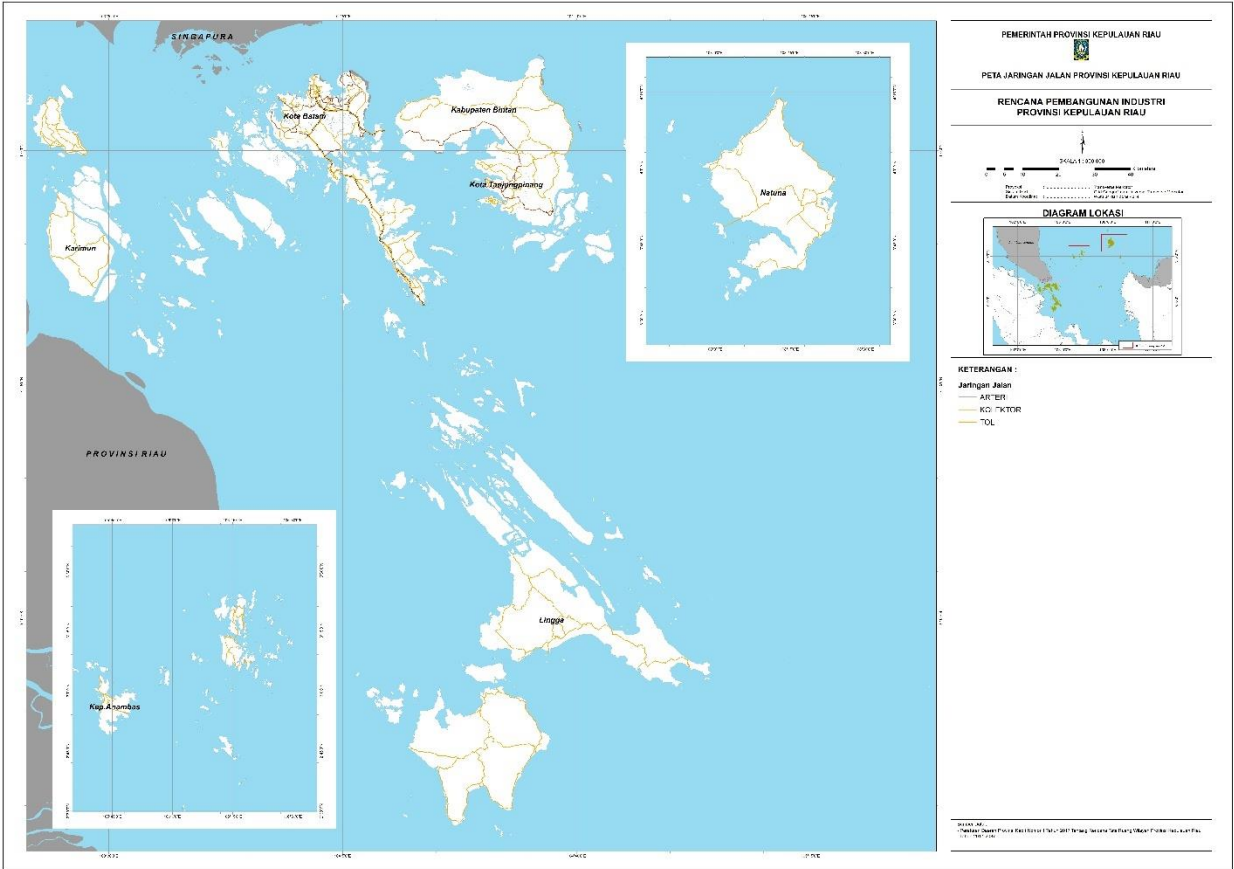
No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
1	003	Sp Wacopek – Kijang (Sei Enam)	7,87	Kabupaten Bintan
2	004 11 K	Jl Berdikari	0,13	Kabupaten Bintan
3	004 12 K	Jl Kebun Nenas	0,48	Kabupaten Bintan
4	004 13 K	Jl Tanah Kuning	0,71	Kabupaten Bintan
5	004 14 K	Jl Barek Betawi	0,37	Kabupaten Bintan
6	004 15 K	Jl Hang Jebat	0,47	Kabupaten Bintan
7	004 16 K	Jl Hang Tuah	0,14	Kabupaten Bintan
8	004 17 K	Jl Sri Bayintan – Pelabuhan	0,60	Kabupaten Bintan
9	005	Sp Gesek (Km 16) – Sp Busung	32,00	Kabupaten Bintan
10	006	Sp Busung – Sp Lobam	12,86	Kabupaten Bintan
11	007 11 K	Sp Lobam – Tanjung Uban	3,84	Kabupaten Bintan
12	008 11 K	Batam Centre – Sp Franky (Jl A Yani)	1,72	Kota Batam
13	008 12 K	Sp Frangky – Sp Kabil (Jl A Yani)	1,93	Kota Batam
14	008 13 K	Sp Kabil – Muka Kuning (Jl A Yani)	3,82	Kota Batam
15	008 14 K	Muka Kuning – Tembesi (Jl Letjen Suprpto)	4,91	Kota Batam
16	008 15 K	Tembesi – Tanjung Berikat	7,76	Kota Batam
17	009 11 K	Sp Kabil – Sp Jam (Jl Jend Sudirman)	3,39	Kota Batam
18	009 12 K	Sp Jam – Sei Harapan (Jl Gajah Mada)	8,67	Kota Batam
19	009 13 K	Sp Harapan – Sekupang (Jl RE Martadinata)	3,92	Kota Batam

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
20	010 11 K	Sp Kabil – Sp Punggur (Jl Jend Sudirman)	6,27	Kota Batam
21	010 12 K	Sp Punggur – Batu Besar (Jl Hang Tuah)	7,04	Kota Batam
22	010 13 K	Batu Besar – Nongsa (Jl Hang Jebat, Jl Hang Lekiu)	15,03	Kota Batam
23	011 11 K	Sp Punggur – Telaga Punggur (Jl Hasanuddin)	11,64	Kota Batam
24	012 11 K	Tembesi – Batu Aji (Jl Letjen Suprpto)	5,65	Kota Batam
25	012 11 K	Batu Aji – Tanjung Uncang (Jl Brigjen Katamso)	9,09	Kota Batam
26	033 11 K	Jl Diponegoro (Sp Sei Harapan – Sp Basecamp Batu Aji)	8,00	Kota Batam
27	034 11 K	Jl Duyung (Pel Batu Ampar – Sp Baloi Centre)	3,90	Kota Batam
28	034 12 K	Baloi Centre – Sp Sei Ladi (UIB)	1,60	Kota Batam
29	001 11 K	Jl. Hang Tuah	0,82	Kota Tanjungpinang
30	001 12 K	Jl. Agus Salim	0,72	Kota Tanjungpinang
31	001 13 K	Jl. Usman Harun	0,93	Kota Tanjungpinang
32	001 14 K	Jl. Yos Soedarso	0,95	Kota Tanjungpinang
33	001 15 K	Jl. Wiratno	1,20	Kota Tanjungpinang
34	001 16 K	Jl. Basuki Rahmat	1,26	Kota Tanjungpinang
35	001 17 K	Jl. Ahmad Yani	1,80	Kota Tanjungpinang
36	001 18 K	Jl. R.H. Fisabilillah	4,54	Kota Tanjungpinang
37	001 19 K	Jl. D.I. Panjaitan	2,05	Kota Tanjungpinang
38	001 1A K	Jl. Sp. Adi Sucipto – Gesek	6,33	Kota Tanjungpinang
39	001 1B K	Jl. Bandara (SP RSUP – Bandara RHF)	2,56	Kota Tanjungpinang
40	002 11 K	Jl. R.H. Fisabilillah (Kp. Haji) – Sp. Dompok Lama	2,37	Kota Tanjungpinang
41	002 12 K	Jl. Sp. Dompok Lama – Sp. Wacopek	7,63	Kota Tanjungpinang
TOTAL PANJANG NASIONAL (RUAS JALAN ARTERI PRIMER)			196,93	PROV KEPRI

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Kota Batam yang merupakan salah satu kota dengan perkembangan Industri dan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Sedangkan Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Bintan masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Sehingga adanya jalan arteri primer di kabupaten dan kota tersebut.

Gambar 2.2. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau



2.1.3.2 Transportasi Laut

Ada 3 transportasi utama yang bisa diakses publik, yaitu Ferry Ro-ro, Ferry (kapal cepat) dan *speed boat*. Ketiga jenis kapal tersebut menjangkau hampir seluruh wilayah. Untuk jarak dekat misalnya seperti Pulau Batam – Pulau Bintan bagian barat bisa menggunakan Ro-ro dengan waktu tempuh 1 jam, atau *speed boat* yang hanya membutuhkan waktu 15 menit. Untuk jarak menengah atau jauh (antar kabupaten atau negara) tersedia Kapal Cepat dengan waktu tempuh bervariasi.

Gambar 2.3. Ferry atau Kapal Cepat untuk Transportasi Laut/Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau



Pelabuhan utama di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelabuhan Bulang Linggi, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Sekupang, dan Pelabuhan Batam Centre. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki tujuan domestik ke kota-kota sesama Kepulauan Riau, kota-kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Tujuan internasional juga dilaksanakan, khususnya tujuan ke Malaysia, Singapura, dan beberapa kapal-kapal pesiar atau wisata dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Tiongkok, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Sri Payung Batu Enam di Tanjungpinang, Pelabuhan Tanjung Balai di Karimun, Pelabuhan Sri Bayintan Kijang di Bintan, Pelabuhan Dabo di Lingga, dan Pelabuhan Tarempa di Anambas.

Lokasi Pelabuhan Laut yang digunakan sebagai angkutan laut.

Berikut ini adalah Hierarki Pelabuhan pada tahun eksisting dan rencana peningkatan Hierarki Pelabuhan sesuai dengan kebutuhan sepuluh tahun mendatang.

Tabel 2.8. Lokasi, Nama Pelabuhan dan Hierarki Pelabuhan di Provinsi Kepri

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Nama Pelabuhan	Hierarki		
			2022	2027	2028
1	Batam	Batu Ampar	PU	PU	PU
2	Batam	Pulau Sambu	PP	PP	PP
3	Bintan	Sei Kolak Kijang	PP	PP	PP
4	Bintan	Tanjung Berakit	PP	PP	PP
5	Bintan	Tanjung Uban/Teluk Sasah	PP	PP	PP
6	Karimun	Malarko	PP	PP	PP
7	Karimun	Parit Rempak	PL	PL	PL
8	Karimun	Tanjung Balai Karimun	PP	PP	PP
9	Karimun	Tanjung Batu Kundur	PP	PP	PP
10	Karimun	Tanjung Tiram	PL	PR	PR
11	Kepulauan Anambas	Tarempa	PP	PP	PP
12	Kepulauan Anambas	Letung	PR	PR	PR
13	Lingga	Dabo Singkep	PR	PP	PP
14	Lingga	Pekajang	PL	PR	PR
15	Lingga	Senayang	PL	PR	PR
16	Natuna	Selat Lampa	PP	PP	PP
17	Natuna	Midai	PL	PL	PL
18	Natuna	Pulau Seluan	PL	PL	PL
19	Natuna	Pulau Laut	PL	PL	PR
20	Natuna	Ranai	PR	PR	PR
21	Natuna	Sedanau	PL	PL	PL
22	Natuna	Serasan	PR	PR	PR
23	Natuna	Subi	PL	PR	PR
24	Tanjungpinang	Tanjungpinang	PP	PP	PP

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Nama Pelabuhan	Hierarki		
			2022	2027	2028
25	Tanjungpinang	Dompak	PR	PR	PR
26	Tanjungpinang	Tanjung Moco	PP	PP	PP

Sumber: RTRW Proivinsi Kepulauan Riau 2013-2033

Adapun Terminal Umum yang dapat dirubah perkembangannya menjadi Pelabuhan di Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun sebagai berikut.

Tabel 2.9. Lokasi Terminal Umum (Bagian Dari Pelabuhan yang dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan)

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	No	Nama Pelabuhan	Wilayah Kerja Pelabuhan
1	Batam	1	Kabil	Pelabuhan Batam
2	Batam	2	Nongsa	Pelabuhan Batam
3	Batam	3	Sekupang	Pelabuhan Batam
4	Batam	4	Telaga Punggur	Pelabuhan Batam
5	Batam	5	Batam Center	Pelabuhan Batam
6	Batam	6	Harbour Bay/Teluk Senimba	Pelabuhan Batam
7	Tanjungpinang	7	Balai Adat Indra Sakti	Pelabuhan Tanjungpinang
8	Tanjungpinang	8	Batu Anam	Pelabuhan Tanjungpinang
9	Batam	9	STS Perairan Nipah-Pulau Sambu	Pelabuhan Pulau Sambu
10	Batam	10	STS Perairan Selat Durian-Pulau Sambu	Pelabuhan Pulau Sambu
11	Karimun	11	STS Tanjung Balai Karimun	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Sumber: RTRW Proivinsi Kepulauan Riau 2013-2033

Pelabuhan lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah Pelabuhan Ikan. Adapun jenis Pelabuhan Ikan di Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Tabel 2.10. Lokasi, Nama Pelabuhan dan Hierarki Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Nama Pelabuhan	Hirarki
1	Natuna	Selat Lampa	Pelabuhan Perikanan Pantai
2	Natuna	Bunguran Utara	Pangkalan Pendaratan Ikan
3	Natuna	Serasan	Pangkalan Pendaratan Ikan
4	Natuna	Midai	Pangkalan Pendaratan Ikan
5	Natuna	Bunguran Barat	Pangkalan Pendaratan Ikan
6	Natuna	Subi	Pangkalan Pendaratan Ikan

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Nama Pelabuhan	Hirarki
7	Anambas	Siantan Selatan	Pangkalan Pendaratan Ikan
8	Anambas	Siantan Timur	Pangkalan Pendaratan Ikan
9	Natuna	Pulau Laut	Pangkalan Pendaratan Ikan
10	Anambas	Antang	Pelabuhan Perikanan Pantai
11	Anambas	Jemaja Timur	Pangkalan Pendaratan Ikan
12	Tanjungpinang	Tanjungbatu Sawah	Pangkalan Pendaratan Ikan
13	Anambas	Siantan Tengah	Pangkalan Pendaratan Ikan
14	Anambas	Jemaja	Pangkalan Pendaratan Ikan
15	Karimun	Moro	Pelabuhan Perikanan Pantai
16	Natuna	Bunguran Timur	Pangkalan Pendaratan Ikan
17	Natuna	Pulau Tiga	Pangkalan Pendaratan Ikan

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2013-2033

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri atas pulau-pulau kecil, dimana sistem transportasi antar wilayahnya sangat mengandalkan transportasi laut, maka dari itu pelabuhan menjadi sarana penting sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Berikut ini adalah beberapa lokasi pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan, terminal umum (bagian dari pelabuhan) dan pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi kepelabuhanan saat ini.

1. Kota Batam

Kota Batam merupakan pusat perekonomian dan perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi Pelabuhan eksisting di Kota Batam berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, di dalam wilayah administratif Kota Batam terdapat 2 pelabuhan ekspor yaitu Batu Ampar dan Pulau Sambu. 2 pelabuhan ini menunjang kegiatan ekspor sesuai dengan jenis barang ekspor.

Dalam perencanaan KPI Kota Batam diperlukan pelabuhan yang menjadi akses menuju pelabuhan-pelabuhan ekspor tersebut, hal tersebut dikarenakan KPI-KPI baru berada di pinggiran Pulau Batam, dan diluar Pulau Batam termasuk pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Bulang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat berhierarki Pengumpan Regional. Rekomendasi perencanaan Pelabuhan penunjang KPI di Kota Batam meliputi pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Pulau Kepala Jeri, Pulau Lumba, Pulau Melintang dan Pulau Rempang.

Rencana pengembangan Pelabuhan Kota Batam meliputi rencana pengembangan pelabuhan dengan Hierarki Pelabuhan Utama (PU) dan Pelabuhan Pengumpan Regional (PR). Perencanaan Pelabuhan Kota Batam terdiri dari, 2 (dua) Pelabuhan eksisting yang terdiri dari Pelabuhan Utama Batam / Batu Ampar dan Pelabuhan Pengumpul Pulau Sambu, serta pengembangan Pelabuhan Regional Cargo Tanjung Riau dan Pelabuhan Sagulung. Berikut adalah tabel Lokasi dan hirarki pelabuhan di Kota Batam.

Tabel 2.11. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut (Barang) di Kota Batam

No	Nama Pelabuhan	Hirarki	Status
1	Batam / Batu Ampar	Pelabuhan Utama (PU)	Eksisting
2	Sekupang	Pelabuhan Utama (PU)	Rencana
3	Kabil	Pelabuhan Utama (PU)	Rencana
4	Pulau Sambu	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
5	Sijantung	Pengumpan Regional (PR)	Rencana
6	Tanjung Riau	Pengumpan Regional (PR)	Rencana
7	Batu Besar	Pengumpan Regional (PR)	Rencana
8	Pelabuhan Sagulung	Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Analisis Data.

Gudang, adalah fasilitas yang berada di belakang dermaga yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang harus menunggu pengepakan dan pendistribusian. Antara Gudang dengan dermaga terdapat apron yang berfungsi sebagai tempat pengalihan dari kegiatan transportasi laut ke kegiatan transportasi darat. Fasilitas Gudang di pelabuhan yang telah dibangun untuk mendukung aktivitas bongkat muat barang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting di Kota Batam

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Batam / Batu Ampar	Peti Kemas, General Cargo, Transshipment, Penumpang Internasional (Khusus)	35.000 DWT	214.000 m2	19.500 m2

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
2	Sekupang	Tank Cleaning, General Cargo, Penumpang Domestik & Regional, Penumpang Internasional Waterfront di Teluk Senimba, Ship Repair, Building dan Ship Yard di Tanjung Uncang	10.000 DWT	116.100 m2	42.240 m2
3	CPO Kabil	Peti Kemas, Curah Cair (Oil, Gas dan CPO), Bulk (Cement dan Coal), Penumpang Domestik (Telaga Punggur), Ro – Ro Domestik (ASDP)	35.000 DWT	100.000 m2	1.890 m2
4	Pulau Sambu	Pelabuhan Khusus Pertamina	-	-	-

Sumber : Badan Pengusahaan Batam, 2022

Kota Batam memiliki beberapa Pelabuhan yang dimiliki oleh Perusahaan, Perorangan, dan Pelabuhan Swasta. Adapun Pelabuhan dan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13. Nama Perusahaan, Perorangan, Pelabuhan Swasta di Kota Batam

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN	DERMAGA		FASILITAS PELABUHAN	KEDALAMAN KOLAM	KAPASITAS SANDAR KAPAL	JENIS KEGIATAN
		UKURAN	KONSTRUKSI				
1	PT. Heng Guan Batam Industrie	<u>Dermaga</u> p : 100 m l : m	Beton	- Kantor - Gudang - Crane	Surut : 3 m Pasang : 5 m	30 GT	B/M Hasil Olahan Buah Kelapa
2	Koperasi "KPSB" Tanjung Uma	<u>Dermaga</u> panjang : 3 m lebar : 3 m	Kayu	-	Surut : 0 m Pasang : 3 m	7 GT	B/M Sembako
3	UD. Toko "SAHABAT"	<u>Dermaga</u> panjang : 12 m lebar : 3 m	Beton	-	Surut : 4 m Pasang : 8 m	7 GT	B/M Sembako,
4	Toko "CAHAYA BARU"	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 6 m	Beton	-	Surut : 4 m Pasang : 8 m	7 GT	B/M Sembako
5	CV. Sarana Niaga Punggur	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 8 m	Kayu	-	Surut : 4 m Pasang : 8 m	7 GT	B/M Sembako
6	PT. Alam Mutiara Bayu	<u>Dermaga</u> panjang : 6 m	Kayu	-	Surut : 2 m Pasang : 5 m	30 GT	B/M Sembako

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN	DERMAGA		FASILITAS PELABUHAN	KEDALAMAN KOLAM	KAPASITAS SANDAR KAPAL	JENIS KEGIATAN
		UKURAN	KONST RUKSI				
		lebar : 3 m					
7	CV. Berjaya Abadi Bareleng	<u>Dermaga</u> panjang : 5 m lebar : 3 m	Kayu	- Kantor - Gudang	Surut : 2 m Pasang : 5 m	7 GT	B/M produksi kayu kelapa
9	PT. Hasil Laut Sejati	<u>Dermaga</u> panjang : 100 m lebar : m	Beton	Kantor, gudang es dll	Surut : 3 m Pasang : 5 m	30 GT	Bongkar Ikan
10	PT. Yakin Sejahtera	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 5 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 5 m	30 GT	Bongkar Arang
11	PT. Sumber Daya Cipta Alam	<u>Dermaga</u> panjang : 4 m lebar : 2 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 4 m	7 GT	Penyewaan Kapal
12	PT.Pantai Jaya Makmur	<u>Dermaga</u> panjang : 5 m lebar : 5 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 5 m	30 GT	B/M Sembako
13	PT. Kencana Bumi Sukses	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 3 m	Beton	-	Surut : 4 m Pasang : 5 m	7 GT	Bongkar Hasil Pertanian
14	PT. Anugrah Makmur Persada	-	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 7 m	s/d 30 GT	Bongkar Arang
15	PT. Madra Guna Gema Sejati	<u>Dermaga</u> panjang : 75 m lebar : 10 m	Beton	-	Surut : 5 m Pasang : 8 m	s/d 60 GT	Bongkar Buah Kelapa
16	Perorangan (SAHRUAN)	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 3 m	Beton	-	Surut : 5 m Pasang : 8 m	s/d 60 GT	Bongkar Arang
17	Perorangan (INDERA)	<u>Dermaga</u> panjang : 10 m lebar : 3 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 8 m	s/d 60 GT	Bongkar Sembako
18	Kedai PELITA BARU	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 5 m	Beton	-	Surut : 5 m Pasang : 8 m	s/d 60 GT	Bongkar Buah Kelapa
19	Toko SELAMAT DATANG	<u>Dermaga</u> panjang : 15 m lebar : 5 m	Beton	- -	Surut : 5 m Pasang : 8 m	s/d 60 GT -	Bongkar Buah Kelapa
20	PT. Arthamas Feras Gemilang	<u>Dermaga</u> panjang : 5 m lebar : 5 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 5 m	7	Tambatan Kapal
21	Perorangan (KARSONO)	<u>Dermaga</u> panjang : 50 m lebar : 5 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 5 m	7	Tambatan Kapal

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN	DERMAGA		FASILITAS PELABUHAN	KEDALAMAN KOLAM	KAPASITAS SANDAR KAPAL	JENIS KEGIATAN
		UKURAN	KONSTRUKSI				
22	PT. Dolphin	<u>Dermaga</u> panjang : 10 m lebar : 3 m	Kayu	-	Surut : 3 m Pasang : 5 m	7	Tambatan Kapal

Sumber : Bapelitbang Kota Batam

2. Kabupaten Bintan

Bintan merupakan salah kabupaten yang memiliki Kawasan Industri di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kondisi Pelabuhan eksisting di Kabupaten Bintan berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, terdapat 2 (dua) pelabuhan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Pengumpul yaitu Sei Kolak Kijang dan Tanjung Berakit, sementara Pelabuhan Teluk Sasah berstatus Pelabuhan Pengumpan Regional.

Berdasarkan kondisi eksisting pelabuhan saat ini, didalam wilayah administratif Kabupaten Bintan terdapat 3 (tiga) pelabuhan yang melayani kegiatan bongkar muat yaitu Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Pelabuhan Seri Udana Lobam, dan Pelabuhan Kota Segara Desa Mentigi.

Pelabuhan Kota Segara Desa Mentigi, berstatus pelabuhan pengumpan regional dan fasilitas pergudangan di pelabuhan tersebut masih dalam proses pembangunan, sehingga tidak diperlukan rekomendasi penambahan pelabuhan baru sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) di Kabupaten Bintan. Sementara pelabuhan Sei Kolak Kijang saat ini melayani barang-barang untuk tujuan domestik atau kebutuhan dalam negeri, untuk kebutuhan perkembangan industri ke depan perlu ditingkatkan menjadi Pelabuhan Pengumpul yang berstandar ekspor bersama pelabuhan Seri Udana Lobam, sehingga dapat melayani kegiatan bongkar/muat barang antar pulau dan luar negeri di wilayah Kabupaten Bintan, karena kedua pelabuhan ini memiliki akses kedekatan dengan KPI yang direncanakan.

**Tabel 2.14. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut
(Barang) di Kab. Bintan**

No	Nama Pelabuhan	Hirarki	Status
1	Sei Kolak Kijang	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
2	Seri Udana Lobam	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
3	Kota Segara Desa Mentigi	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Eksisting

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data.

**Tabel 2.15. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting
di Kabupaten Bintan**

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Sei Kolak Kijang	Pelabuhan Bongkar Muat	10.000 DWT	Total Lapangan 1, 2 dan 3 = 7.263	-
2	Seri Udana Lobam	Pelabuhan Bongkar Muat	Maks 35.000 DWT	Lapangan Penumbuhan Peti Kemas ; Panjang = Bidang I ± 52.80 m. Bidang II ± 82 m Lebar = Bidang I ± 34.20 m Bidang II ± 42.80 m Luas = Bidang I ± 1805.76 m Bidang II ± 3509.60 m Total = 5315.36 m	Type Terrace = 504 M2 Type SD = 1100 M2 Type D = 2200 M2
3	Kota Segara Desa Mentigi	Pelabuhan Bongkar Muat	>1.500 GT	Dalam Tahap pembangunan	

Sumber : Pengelola Pelabuhan Seri Udana Lobam, Sei Kolak Kijang. Dan Dishub Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun memiliki Kawasan Industri di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Secara umum Kawasan Industri eksisting di Kabupaten Karimun berorientansi ekspor dengan basis industri galangan kapal dan Oil Tanking. Kondisi Pelabuhan eksisting di Kabupaten Karimun berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. berdasarkan Kepmen KP 432 Tahun 2017, terdapat 4 (empat) pelabuhan yang menunjang kegiatan bongkar muat barang yaitu pelabuhan Parit Rempak, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Malarko, dan Pelabuhan Tanjung Tiram. Pelabuhan dalam hirarki Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan Malarko dan Pelabuhan Tanjung Tiram sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional.

Saat ini, kegiatan pelabuhan eksisting penunjang kegiatan bongkar muat yaitu pelabuhan Parit Rempak dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, secara analisa pelabuhan ini belum selesai sehingga belum dapat melayani kegiatan ekspor dan kegiatan bongkar muat barang skala regional di Kabupaten Karimun. Dilihat dari persebaran KPI yang direncanakan harus memiliki perencanaan pelabuhan meliputi penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Parit Rempak dan Pelabuhan Gelugur sebagai Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Cargo Paya Togok Tg Batu Kundur, Pelabuhan Tanjung Tiram, Pelabuhan Tanjung Berlian, dan Pulau Buru sebagai Pelabuhan Regional. Pelabuhan Malarko akan dilakukan pengembangan Logistik Domestik – Internasional Malarko.

Tabel 2.16. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut (Barang) di Kab. Karimun

No	Nama Pelabuhan	Hirarki	Status
1	Malarko	Pelabuhan Pengumpul (PU)	Rencana
2	Tanjung Balai Karimun	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
3	Pelabuhan Cargo Paya Togok Tg Batu Kundur	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
4	Tanjung Tiram	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
5	Pelabuhan Parit Rempak	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Rencana
6	Hang Lukut/Gelugur	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Rencana
7	Tanjung Berlian	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
8	Pelabuhan Buru	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data.

**Tabel 2.17. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting
di Kabupaten Karimun**

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Malarko	General Cargo	3000 DWT	-	-
2	Tanjung Balai Karimun	Barang & Penumpang	216 GT	-	-
3	Pelabuhan Parit Rempak	Cargo/Barang	2.500 GT	Terbuka : 1000 M ²	Tertutup: 1000 M ²
4	Hang Lukut/Gelugur	Cargo/Barang	-	-	-
5	Tanjung Selemah	Barang & Penumpang	-	-	4000 M ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri 2019, Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Nomor 17 Tahun 2013.

4. Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi Pelabuhan eksisting di Kabupaten Anambas berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, berdasarkan analisa Kepmen KP 432 Tahun 2017, pelabuhan eksisting penunjang kegiatan aktivitas utama di Kabupaten Anambas meliputi Pelabuhan Letung dan Pelabuhan Tarempa.

Keberadaan KPI di Kabupaten Anambas memerlukan pelabuhan-pelabuhan yang terkoneksi dengan KPI. Rekomendasi perencanaan Pelabuhan Penunjang KPI di Kabupaten Anambas meliputi: peningkatan hirarki Pelabuhan Roro di Pulau Matak menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional dengan fungsi utama sebagai Pelabuhan Barang, pembangunan Pelabuhan Teluk Suek sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP), pembangunan Pelabuhan Regional di KPI Jemaja, mengintegrasikan KPI Jemaja Timur dengan Pelabuhan Kuala Maras melalui pembangunan jalan arteri.

**Tabel 2.18. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut
(Barang) di Kab. Anambas**

No	Nama Pelabuhan	Hirarki	Status
1	Tarempa	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
2	Pelabuhan Teluk Suek	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
3	Kuala Maras	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Eksisting
4	Pelabuhan Roro	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
5	Pelabuhan KPI Jemaja	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data.

**Tabel 2.19. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting
di Kabupaten Anambas**

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Tarempa	Pelabuhan Penumpang dan Barang	-	-	35 M ² (Rencana)

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepri 2019

5. Kabupaten Lingga.

Kondisi Pelabuhan eksisting di Kabupaten Lingga berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, berdasarkan analisa Kepmen KP 432 Tahun 2017, pelabuhan eksisting penunjang kegiatan bongkar muat di Kabupaten Lingga masih berskala kecil. Pemerintah Kabupaten Lingga, kedepan akan mengembangkan kepelabuhanan berdasarkan arah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Jago dan Tanjung Ayam, dimana KPI Jago dan KPI Tanjung Ayam akan dikembangkan sebagai pusat kepelabuhanan dan wilayah kepabeanan baru, sehingga rekomendasi perencanaan pelabuhan penunjang KPI di Kabupaten Lingga meliputi pembangunan Pelabuhan Pengumpul (PP) di KPI Jagoh, pembangunan

Pelabuhan Pengumpan Regional di KPI Tanjung Ayam dan pembanguna akses jalan arteri ke KPI Tanjung Nyang, pengembangan Pelabuhan Senayang sebagai Pelabuhan Multipurpose dengan 2 terminal yaitu terminal bongkar muat (barang) dan terminal penumpang dengan tujuan sebagai pelabuhan penunjang kegiatan KPI Sebangka dengan skema pengintegrasian kegiatan KPI dengan Pelabuhan Senayang melalui perbaikan akses jalan melalui pembangunan Jalan Arteri dari KPI Sebangka menuju Pelabuhan Senayang dan peningkatan Pelabuhan Sebayur dan Pelabuhan Senayang untuk melayani kegiatan bongkar muat dan penunjang kegiatan KPI Tanjung Sebayur.

Tabel 2.20. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut (Barang) di Kab. Lingga

No	Nama Pelabuhan	Hierarki	Status
1	Dabo Singkep	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
2	Pekajang	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
3	Senayang	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Eksisting
4	Jagoh	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Rencana
5	Tg Ayam	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
5	Sebayur	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data.

6. Kabupaten Natuna.

Kondisi Pelabuhan eksisting di Kabupaten Natuna berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, berdasarkan analisa Kepmen KP 432 Tahun 2017, Kabupaten Natuna telah memiliki pelabuhan eksisting yang bisa menjadi penunjang KPI. Rekomendasi perencanaan Pelabuhan di KPI Natuna melalui peningkatan Hierarki yaitu: Pelabuhan Teluk Buton menjadi Pelabuhan Utama (direncanakan menaikkan hierarki menjadi PU setelah menjadi PP dalam 5 tahun kedepan), Pelabuhan Subi menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional.

**Tabel 2.21. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut
(Barang) di Kab. Natuna**

No	Nama Pelabuhan	Hierarki	Status
1	Teluk Buton	Pelabuhan Pengumpan Regional (PU)	Rencana
2	Selat Lampa	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
3	Midai	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
4	Pulau Seluan	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
5	Serasan	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
6	Subi	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
7	Kelarik	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
8	Pulau Tiga	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
9	Penagi	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data

**Tabel 2.22. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting
di Kabupaten Natuna**

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Midai	Barang & Penumpang	5000 GT	-	41 M ² (Rencana)
2	Selat Lampa	Barang	3000 DWT	-	-
3	Serasan	Barang & Penumpang	50000 DWT	-	-
4	Subi	Barang & Penumpang	1000 DWT	-	-
5	Pulau Laut	Barang & Penumpang	-	-	112 M ²

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepri 2019

7. Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang merupakan pusat pemerintah provinsi Kepulauan Riau. kondisi Pelabuhan eksisting di Kota Tanjungpinang berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017

Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sesuai peraturan tersebut, di dalam wilayah administratif Kota Tanjungpinang terdapat 28 buah Pelabuhan. Seluruh pelabuhan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).

Dari 28 Pelabuhan tersebut, terdapat dua Pelabuhan yang dapat menunjang kegiatan industri di Kota Tanjungpinang. Dua Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Sri Payung Batu 6 dan Pelabuhan Tanjung Moco. Dari kedua Pelabuhan ini hanya Tanjung Moco yang dapat dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor penunjang industri kedepannya. Sementara Pelabuhan Sri Payung Batu 6 terkendala tata ruang darat yang sempit dan tata ruang laut yang mengalami pendangkalan. Pelabuhan Tanjung Moco berada di Pulau Dompak, suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Tanjungpinang yang memiliki akses Jembatan dan jalan berstandar nasional. Pelabuhan ini memiliki jarak yang dekat dengan seluruh KPI di Kota Tanjungpinang. Rekomendasi perencanaan dari Pelabuhan ini yaitu menjadikan Pelabuhan Tanjung Moco sebagai Pelabuhan ekspor yang melayani rute nasional dan internasional.

Tabel 2.23. Eksisting dan Rencana Hierarki Pelabuhan Angkutan Laut (Barang) di Kota Tanjungpinang

No	Nama Pelabuhan	Hierarki	Status
1	Tanjung Moco	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Rencana
2	Sri Payung Batu 6	Pelabuhan Pengumpul (PP)	Eksisting
3	Dompak	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
4	Sei jang	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
5	Tanjung Geliga	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana
6	Tanjung Unggat	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	Rencana

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Analisis Data.

**Tabel 2.24. Fasilitas Gudang dari Pelabuhan Eksisting
di Kota Tanjungpinang**

No	Nama Pelabuhan	Fasilitas Pelabuhan Status			
		Jenis Pelabuhan	Kapasitas Sandar Kapal (Capacity)	Gudang Terbuka (Open Storage)	Gudang Tertutup (Warehouse)
1	Sri Payung Batu Anam	Pelabuhan Bongkar Muat	1.000 DWT	2.132 M2	Gudang 202 = 1.200 M2 Gudang 203 = 800 M2
2	Dompak	Barang & Penumpang	60 GT	31.307 M²	-
3	Moco	Barang & Penumpang	3.000 DWT	-	80 M2

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepri 2019, Rencana Induk Pelabuhan Tanjungpinang

- **Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.**

Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan penumpang / orang. Rincian data pelabuhan Angkutan Penyebrangan di Provinsi Kepri ditunjukkan pada table dibawah ini.

**Tabel 2.25. Lokasi, Nama Pelabuhan, Status dan Hierarki Pelabuhan
Angkutan Penyeberangan**

No	Lokasi	Nama Pelabuhan	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
1	Kabupaten Karimun	Tanjung Balai Karimun	Operasi	Kelas 1
2	Kota Batam	Telaga Punggur	Operasi	Kelas 1
3	Kabupaten Bintan	Tanjung Uban	Operasi	Kelas 1
4	Kabupaten Lingga	Dabo/Jagoh	Operasi	Kelas II
5	Kabupaten Bintan	Dompak/Tanjungpinang	Operasi	Kelas II
6	Kabupaten Karimun	Selat Belia	Operasi	Kelas II
7	Kabupaten Lingga	Pulau Lingga/ Penarik	Operasi	Kelas II
8	Kabupaten Anambas	Matak	Rencana	Kelas I
9	Kabupaten Natuna	Selat Lampa	Penagih	Kelas I
10	Kabupaten Natuna	Tambelan	Rencana	Kelas I
11	Kabupaten Natuna	Serasan	Rencana	Kelas III
12	Kabupaten Natuna	Tarempa	Rencana	Kelas I

No	Lokasi	Nama Pelabuhan	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
13	Kabupaten Lingga	Sebangka	Rencana	Kelas III
14	Kabupaten Natuna	Pulau Letung	Rencana	Kelas I
15	Kabupaten Natuna	Sedanau	Rencana	Kelas II

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

2.1.3.3 Pelabuhan Udara

Kondisi Transportasi udara di Provinsi Kepulauan Riau cukup baik, terutama ke Pulau Batam dan Pulau Bintan. Sistem jaringan transportasi udara Kepulauan Riau dilayani oleh:

- Bandar Udara Hang Nadim di Kota Batam sebagai Bandar Udara Pengumpul (hub) dengan skala pelayanan primer dan status sebagai bandar udara internasional/embarkasi klasifikasi kelas utama;
- Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Kota Tanjungpinang sebagai Bandar Udara Pengumpul (hub) dengan skala pelayanan tersier dan status sebagai bandar udara internasional;
- Bandar Udara Ranai di Kabupaten Natuna sebagai Bandar Udara Pengumpul (Hub) dengan skala pelayanan tersier;
- Bandar Udara Sei Bati di Kabupaten Tanjung Balai Karimun sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke) dengan skala penunjang pelayanan Kegiatan Lokal;
- Bandar Udara Dabo di Kabupaten Lingga sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke) dengan skala penunjang pelayanan Kegiatan Lokal;
- Bandar Udara Khusus Matak di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke) dengan skala Penunjang pelayanan Kegiatan Lokal.
- Bandar Udara Letung, Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Bandar Udara Pengumpan (spoke) dengan skala Penunjang pelayanan Kegiatan Lokal.

Terdapat rencana pembangunan pelabuhan udara di Kabupaten Bintan sebagai berikut:

- Pelabuhan Udara Perintis di Kecamatan Tambelan;
- Pelabuhan Udara Khusus di Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

**Gambar 2.4. Sistem Jaringan Transportasi Udara
di Provinsi Kepulauan Riau**



2.1.3.4 Listrik, Air Bersih, dan Energi

a. Listrik

Kebijaksanaan pemerintah di bidang kelistrikan ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan mutu pelayanan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pembangunan Kawasan Industri, kebutuhan kapasitas Kawasan Industri adalah 0,15 - 0,2 MVA/ha yang bersumber dari listrik PLN maupun swasta dan dilengkapi dengan PJU.

Kepulauan Riau memerlukan dukungan pasokan tenaga listrik yang cukup dan handal terutama di Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Pasokan listrik untuk kota Tanjungpinang sebelumnya dipasok melalui sistem Tanjung Pinang yang melayani 3 daerah administrasi, yaitu

Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang dan serta Kabupaten Bintan, sistem Tanjung Pinang dipasok dari PLTD Air Raja dan PLTD Sukaberenang serta PLTU Galang Batang dengan kapasitas terpasang 122,15 MW dengan daya mampu sebesar 55,5 MW sedangkan beban puncak saat ini yang telah mencapai 57,3 MW melalui jaringan 20 kV. Sementara kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Bintan terletak di 2 rayon, yaitu rayon Tanjung Uban dan Kijang.

Saat ini untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, maka telah dilakukan interkoneksi Batam-Bintan dalam mencukupi pasokan daya I sub sistem Tanjungpinang melalui kabel laut, dengan beroperasinya sistem interkoneksi Batam-Bintan akan memperbaiki pasokan daya sub sistem Kota Tanjung Pinang. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah membangun kabel laut interkoneksi 150 kV dengan daya 60 – 70 MW atau 60.000 s.d 70.000 KPA dari Batam – Bintan dan SUTT 150 kV di wilayah pulau Bintan yang bertujuan untuk mengevakuasi daya Listrik dari Pulau Batam ke Pulau Sauh, Pulau Ngenang dan Pulau Bintan, Kota Batam yang ditargetkan sebagai lumbung energi listrik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan terwujudnya interkoneksi Batam-Bintan maka sistem Tanjung Pinang tidak lagi dipasok dari PLTD Sukaberenang dan PLTD Air Raja, serta untuk pasokan listrik di Kabupaten Bintan yang awalnya disuplai dari PLTD Tanjung Uban dan PLTD Kijang juga sudah berhenti dan tidak beroperasi lagi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik kedepan seiring dengan pertumbuhan industri di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan atau kebutuhan listrik di Pulau Bintan secara keseluruhan dari interkoneksi Batam-Bintan tersebut, maka diperlukan penambahan dari sistem interkoneksi Bintan-Batam menjadi 180 MW.

Di Kota Batam jumlah daya yang terpasang sebanyak 498 MW yang diperoleh dari 16 jenis pembangkit listrik, yaitu:

**Tabel 2.26. Ketersediaan (Suplai) Listrik untuk Merencanakan
Pertumbuhan Industri di Batam - Bintan**

No	Jenis Pembangkit Listrik	Jenis Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
1	PLTD Baloi	MFO	(2x10) MW

No	Jenis Pembangkit Listrik	Jenis Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
2	PLTD Batu Ampar I	HSD	(3x8) MW
3	PLTD Batu Ampar II	MFO	(3x8) MW
4	PLTD Sekupang II	HSD	(3x3,8) MW
5	PLTMG Panaran PLN	Gas	(3x8) MW
6	PLTG Panaran I	Gas	(2x30,7) MW
7	CC PLTGU Panaran I	CC	(1x20,6) MW
8	PLTG Panaran II	Gas	(2x30,7) MW
9	CC PLTGU Panaran II	CC	(1x20,6) MW
10	PLTG Tj. Uncang (ELB)	Gas	(2x35) MW
11	PLTG TM 2500	Gas	(1X17,00)
12	PLTMG Kabil I	Gas	(3x5,8) MW
13	PLTMG Kabil II	Gas	(6X5,8) MW
14	PLTU Tj. Kasam	Batu Bara	(2x55) MW
15	PLTG Tj. Uncang PLNB	Gas	(2x42,5) MW
16	CC Tj. Uncang PLNB	CC	(1x40) MW
TOTAL			498 MW

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Disamping 16 jenis pembangkit listrik yang mensuplai kebutuhan listrik ke PT. PLN Batam, Juga terdapat beberapa kawasan industri yang mensuplai sendiri kebutuhan listrik dari jenis pembangkit listrik yang beroperasi di dalam kawasan industri baik, yang berlokasi di Kota Batam maupun di Kabupaten Bintan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.27. Ketersediaan (Suplai) Listrik untuk Merencanakan
Pertumbuhan Industri di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kawasan Industri	Jumlah Jenis Pembangkit Listrik	Jenis Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
1	PT. Batamindo Investment Cakrawala	20	Gas/HSD (solar)	166.818 kVA

No	Kawasan Industri	Jumlah Jenis Pembangkit Listrik	Jenis Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
2	PT. Panbil Utilitas Sentosa	7 Unit Pembangkit Listrik Gas dan 2 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Gas/HSD (solar)	32 MW
3	PT. Tunas Energi	5 Unit Pembangkit Listrik berbahan bakar Gas dan Diesel	Gas/HSD (solar)	15.863,15 kVA
4	PT. Bintang Inti Industrial Estate	3 Unit Pembangkit Listrik berbahan bakar MFO	Gas/HSD (solar)	12.887 kVA
5	PT. Bintang Resort Cakrawala	4 Unit Pembangkit Listrik berbahan bakar MFO	Gas/HSD (solar)	30.560 kVA

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinnsi Kepulauan Riau, 2022

Daerah administratif yang juga berkembang pesat yaitu Kabupaten Karimun yang disediakan dari Sistem Tanjung Balai Karimun. Sistem tersebut di pasok dari PLTD Bukit Carok dan PLTU TBK FTP 1.

Tabel 2.28. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten / Kota	Pembangkit	Lokasi	Daya Mampu	Beban Puncak
Batam	PT PLN Batam	Batam, Rempang, Galang	552,1 MW	455,4 MW
	PT. Tunas Energi	Kawasan Industri Tunas	12 MW	9 MW
	PT. Panbil Utilitas Sentosa	Kawasan industri Panbil	40 MW	20 MW

Kabupaten / Kota	Pembangkit	Lokasi	Daya Mampu	Beban Puncak
	PT Batamindo Investment Cakrawala	Kawasan Industri Batamindo	89 MW	65 MW
Bintan	PT. Bintan Resort Cakrawala	Kawasan Pariwisata Lagoi	24.4 MW	4.8 MW
	PT. Bintan Inti Industrial Estate	Kawasan Industri Lobam	10,3 MW	8 MW
	PT. PLN (Persero)	Sistem Pulau Bintan	9 MW	83.3 MW
	PT. GBKEK	KEK GALANG BATANG	150 MW	2850 MW
Karimun	PLTU	PT. SOMA DAYA UTAMA	-	-
	PLTU	PT. KARIMUN POWER PLANT	-	-
	PT.PLN (Persero)	Sistem Tanjung Balai Karimun	43,89 MW	32,20 MW
Non - Batam Bintan	PT. PLN (Persero)	ULP BELAKANG PADANG	2,02 MW	1,30 MW
		ULP ANAMBAS	8,98 MW	5,61
		ULP NATUNA	22,94 MW	10,35 MW
		ULP DABO SINGKEP	12,45 MW	8,13 MW
		ULP TANJUNG BATU	12,33 MW	7,19 MW
		ULP TANJUNG BALAI KARIMUN	43,89 MW	32,20 MW

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinnsi Kepulauan Riau, 2022

Untuk infrastruktur listrik diketahui bahwa jumlah daya yang terpakai pada tahun 2018 mencapai 155.401.201 KWH. Pemakaian listrik terbesar dilakukan oleh rumah tangga dengan pemakaian mencapai 91.566.284 KWH. Sedangkan industri pemakaiannya mencapai 43.090.535 KWH.

Adapun hasil analisa kebutuhan listrik per KPI di masing – masing Kabupaten dan Kota berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Bintan

Berdasarkan tabel perhitungan kebutuhan listrik KPI di Bintan pada lima tahun pertama 2022 – 2026 yaitu sebesar 1,021.85 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang terus mengalami kebutuhan peningkatan

kebutuhan listrik, yaitu pada tahun 2041 – 2045 membutuhkan 1.277.23 MVA/Ha. Setiap Kawasan Peruntukan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda – beda sesuai dengan luas masing – masing KPI.

Tabel 2.29. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bintan

NO	KPI BINTAN	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Anak Lobam	589.69	66.05	70.17	74.30	78.43	82.56
2	KPI Antam - Kijang	41.27	4.62	4.91	5.20	5.49	5.78
3	KPI Galang Batang	2490.73	278.96	296.40	313.83	331.27	348.70
4	KPI Gunung Kijang	256.78	28.76	30.56	32.35	34.15	35.95
5	KPI Lobam	3517.95	394.01	418.64	443.26	467.89	492.51
6	KPI Maritim Bintan Timur	264.43	29.62	31.47	33.32	35.17	37.02
7	KPI P. Ngalih	78.05	8.74	9.29	9.83	10.38	10.93
8	KPI P. Siolong	71.52	8.01	8.51	9.01	9.51	10.01
9	KPI Pulau Buton	54.91	6.15	6.53	6.92	7.30	7.69
10	KPI Sungai Enam	1148.37	128.62	136.66	144.69	152.73	160.77
11	KPI Sungai Lekop	176.92	19.82	21.05	22.29	23.53	24.77
12	KPI Tanjung Uban	257.79	28.87	30.68	32.48	34.29	36.09
13	KPI Tembeling	17.25	1.93	2.05	2.17	2.29	2.42
TOTAL		8965.75	1004.15	1066.91	1129.67	1192.43	1255.19
KPI BINTAN (DALAM HOLDING ZONE)							
1	HL/KPI Lobam	6.18	0.69	0.74	0.78	0.82	0.86
2	HL/KPI Galang Batang	0.95	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13
3	HL/KPI Sungai Lekop	1.06	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15
4	HL/KPI Maritim Bintan Timur	34.21	3.83	4.07	4.31	4.55	4.79
5	KSA/KPI Maritim Bintan Timur	115.64	12.95	13.76	14.57	15.38	16.19
TOTAL		158.04	17.70	18.81	19.91	21.02	22.13
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		9123.79	1021.85	1085.72	1149.58	1213.45	1277.32

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Peningkatan kapasitas (MW) di Kabupaten Bintan akan dilayani oleh beberapa jenis Pembangkit diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD), Pembangkit PLTU Batu Bara dan Interkoneksi 150 KV Batam – Bintan. Peningkatan Kapasitas (MW) di Kabupaten Bintan ini akan melayani kebutuhan listrik di 20 tahun mendatang pada KPI yang berada di Kabupaten Bintan. Pengembangan Gardu Induk (GI) yang terdiri dari GI Tanjung Uban, GI Kijang, GI Sri Bintan dan GI KEK Galang Batang. Pengembangan GI akan memberikan

supplay kebutuhan pada beberapa KPI yang ada di Kabupaten Bintan. Kebutuhan Peningkatan Kpasitas Gardu Induk dari masing – masing GI adalah 1x60 MVA. Sehingga peningkatan kapasitas listrik dalam pemenuhan KPI di Kabupaten terlayani pada sepuluh tahun perencanaan.

2. Kabupaten Karimun

Kebutuhan listrik KPI di Kabupaten Karimun pada lima tahun pertama 2022 s.d 2026 yaitu sebesar 1,048.08 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang yaitu 2041 – 2045 kebutuhan listrik KPI mengalami kenaikan, yaitu 107,185.37 MVA/Ha. Setiap Kawasan Peruntukan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda – beda sesuai dengan luas masing – masing KPI.

**Tabel 2.30. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Karimun**

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Karimunanak	497.25	55.69	59.17	62.65	66.13	6961.56
2	KPI Kundur	124.13	13.90	14.77	15.64	16.51	1737.86
3	KPI Kundur Barat I	1463.76	163.94	174.19	184.43	194.68	20492.67
4	KPI Kundur Barat II	502.61	56.29	59.81	63.33	66.85	7036.59
5	KPI Kundur Barat III	117.84	13.20	14.02	14.85	15.67	1649.69
6	KPI Kundur Barat IV	92.79	10.39	11.04	11.69	12.34	1299.11
7	KPI Merak	38.22	4.28	4.55	4.82	5.08	535.08
8	KPI Meral	793.96	88.92	94.48	100.04	105.60	11115.48
9	KPI Meral Barat I	863.09	96.67	102.71	108.75	114.79	12083.31
10	KPI Meral Barat II	143.49	16.07	17.08	18.08	19.08	2008.90
11	KPI Meral Barat III	288.59	32.32	34.34	36.36	38.38	4040.27
12	KPI Meral Barat IV	338.90	37.96	40.33	42.70	45.07	4744.64
13	KPI P. Anak Babi	10.51	1.18	1.25	1.32	1.40	147.13
14	KPI P. Babi	16.99	1.90	2.02	2.14	2.26	237.82
15	KPI P. Buru	139.08	15.58	16.55	17.52	18.50	1947.13
16	KPI P. Durian Besar	17.17	1.92	2.04	2.16	2.28	240.39
17	KPI P. Durian Kecil	214.95	24.07	25.58	27.08	28.59	3009.31
18	KPI P. Gunungpapan	493.42	55.26	58.72	62.17	65.62	6907.89
19	KPI P. Lumut	83.57	9.36	9.94	10.53	11.11	1169.94
20	KPI P. Parit	688.26	77.08	81.90	86.72	91.54	9635.60
21	KPI P. Tulang	232.49	26.04	27.67	29.29	30.92	3254.81
22	KPI P. Ungar	22.02	2.47	2.62	2.78	2.93	308.34
23	KPI Tebing I	225.15	25.22	26.79	28.37	29.94	3152.10
24	KPI Tebing II	230.65	25.83	27.45	29.06	30.68	3229.10
TOTAL		7638.89	855.56	909.03	962.50	1015.97	106944.73
KPI KARIMUN (DALAM HOLDING ZONE)							

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	HL/KPI Karimun Anak	326.26	36.54	38.82	41.11	43.39	45.68
2	HL/KPI Meral Barat III	3.68	0.41	0.44	0.46	0.49	0.52
3	HL/KPI Tebing I	9.32	1.04	1.11	1.17	1.24	1.31
4	HL/KPI Tebing II	154.14	17.26	18.34	19.42	20.50	21.58
5	HP/KPI P. Asam	119.79	13.42	14.26	15.09	15.93	16.77
6	HPT/KPI P. Asam	200.42	22.45	23.85	25.25	26.66	28.06
TOTAL		813.61	91.12	96.82	102.51	108.21	113.91
KPI KARIMUN (DALAM BADAN AIR)							
1	BA/KPI Meral	304.36	34.09	36.22	38.35	40.48	42.61
2	BA/KPI Meral Barat II	280.29	31.39	33.35	35.32	37.28	39.24
3	BA/KPI Meral Barat IV	10.72	1.20	1.28	1.35	1.43	1.50
4	BA/KPI P. Asam	209.18	23.43	24.89	26.36	27.82	29.28
TOTAL		804.54	90.11	95.74	101.37	107.00	112.64
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KP Sentra IKM Moro	0.76	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11
2	KPI Pulau Combol	100.00	11.20	11.90	12.60	13.30	14.00
TOTAL		100.76	11.29	11.99	12.70	13.40	14.11
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		9357.82	1048.08	1113.58	1179.09	1244.59	107185.37

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Peningkatan Kapasitas (MW) di Kabupaten Karimun melalui Badan usaha PT.PLN (PERSERO) ULP Tanjung Balai Karimun pada 10 tahun adalah 50 MW dan 20 tahun sebesar 100 MW. Pelayanan kebutuhan listrik di Karimun juga di dukung dengan adanya *Power Plant* yang berada di Kelurahan Sungai Raya. Peningkatan MW melalui pembangunan *Power Plant* ini akan dapat melayani kebutuhan listrik di KPI Karimun.

3. Kabupaten Kepulauan Anambas

Kebutuhan listrik KPI di Kabupaten Anambas pada lima tahun pertama 2022 – 2026 yaitu sebesar 222.23 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang yaitu 2041 – 2045 kebutuhan listrik KPI mengalami kenaikan, yaitu 277.79 MVA/Ha. Setiap Kawasan Peruntukan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda – beda sesuai dengan luas masing – masing KPI. Didalam analisis kebutuhan listrik di Kabupaten Anambas, tidak memperhitungkan kebutuhan listrik di KPI Jemaja Utara seluas 143,95 Ha, karena KPI Jemaja Utara direncanakan akan dialihkan ke KPI Jemaja Timur seluas 50,89 ha.

**Tabel 2.31. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	KPI ANAMBAS	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Matak I	80.88	9.06	9.62	10.19	10.76	11.32
2	KPI Matak II	392.74	43.99	46.74	49.49	52.23	54.98
3	KPI Mubur	2.57	0.29	0.31	0.32	0.34	0.36
4	KPI Siantan	1129.07	126.46	134.36	142.26	150.17	158.07
5	KPI Jemaja - Sebrong	316.53	35.45	37.67	39.88	42.10	44.31
6	KPI Jemaja Utara	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1921.79	215.24	228.69	242.15	255.60	269.05
RENCANA PERUBAHAN KPI							
1	KPI Jemaja Utara ke Jemaja Timur	50.89	5.69968	6.05591	6.41214	6.76837	7.1246
TOTAL		50.89	5.69968	6.05591	6.41214	6.76837	7.1246
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI SIKIM P. MATAK	11.50	1.288	1.3685	1.449	1.5295	1.61
TOTAL		62.39	6.99	7.42	7.86	8.30	8.73
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		1984.18	222.23	236.12	250.01	263.90	277.79

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kapasitas ULP Anambas saat ini adalah 8,98 MW, yang tersedia di PLN Mubur, PLN Siantan dan PLN Letung. Perencanaan peningkatan kapasitas kebutuhan listrik di Kabupaten Anambas direncanakan berada di PLN Palmatak dengan kapasitas 53 MW. Berdasarkan analisa Kebutuhan listrik di KPI Anambas yaitu, pada tahun rencana 2022 – 2026 kapasitas yang dibutuhkan adalah 222.23 MVA/Ha tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas untuk melayani kebutuhan KPI di sepuluh tahun mendatang.

4. Kabupaten Lingga

Kebutuhan listrik KPI di Kabupaten Lingga pada lima tahun pertama 2022 – 2026 yaitu sebesar 721.68 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang yaitu 2041 – 2045 kebutuhan listrik KPI mengalami kenaikan, yaitu 902.10 MVA/Ha. Setiap Kawasan Peruntukan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda – beda sesuai dengan luas masing – masing KPI.

Tabel 2.32. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga

NO	KPI LINGGA	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Marok Tua	219.43	24.58	26.11	27.65	29.18	30.72
2	KPI Sungai Tenam	163.84	18.35	19.50	20.64	21.79	22.94
TOTAL		383.27	42.93	45.61	48.29	50.97	53.66
RENCANA PERUBAHAN LUAS KPI							
1	KPI Sungai Tenam	142.91	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI Tanjung Keruing	1037.22	116.17	123.43	130.69	137.95	145.21
2	KPI Tanjung Sebayur	3027.59	339.09	360.28	381.48	402.67	423.86
3	KPI Tanjung Ayam	382.04	42.79	45.46	48.14	50.81	53.49
4	KPI Temiang Pesisir	456.89	51.17	54.37	57.57	60.77	63.96
5	KPI Jagoh	829.36	92.89	98.69	104.50	110.30	116.11
6	KPI Tanjung Nyang	124.14	13.90	14.77	15.64	16.51	17.38
7	KPI Sebangka	52.24	5.85	6.22	6.58	6.95	7.31
8	SIKIM Sagu	4.22	0.47	0.50	0.53	0.56	0.59
9	SIKIM Kelapa	3.70	0.41	0.44	0.47	0.49	0.52
TOTAL		5917.40	662.75	704.17	745.59	787.01	828.44
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		6443.58	721.68	766.79	811.89	857.00	902.10

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kapasitas (MW) PT.PLN ULP Dabo Singkep di Kabupaten Lingga pada tahun 2022 adalah 10 MW. Kapasitas saat ini perlu ditingkatkan dalam melayani kebutuhan KPI pada 10 tahun mendatang melalui Pemerintah, PT. PLN dan swasta. Sehingga kebutuhan listrik dapat melayani hingga pada tahun 2022 – 2026 nya yaitu 721.68 MVA/Ha.

5. Kota Tanjungpinang

Kebutuhan listrik KPI di Kota Tanjungpinang pada lima tahun pertama 2022 – 2026 yaitu sebesar 177,81 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang yaitu 2041 – 2045 kebutuhan listrik KPI mengalami kenaikan, yaitu 222,26 MVA/Ha. Setiap Kawasan Peruntukan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda – beda sesuai dengan luas masing – masing KPI.

Tabel 2.33. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri Kota Tanjungpinang

NO	KPI TANJUNGPINANG	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Air Raja	301,13	33,73	35,83	37,94	40,05	42,158
2	KPI Dompok Darat	420,48	47,09	50,04	52,98	55,92	58,867
3	KPI Kampung Bugis I	11,94	1,34	1,42	1,50	1,59	1,672
4	KPI Kampung Bugis II	1,28	0,14	0,15	0,16	0,17	0,179
5	KPI Kampung Bugis III	1,00	0,11	0,12	0,13	0,13	0,140
6	KPI Kampung Bulang I	2,27	0,25	0,27	0,29	0,30	0,318
7	KPI Daeng Marewa	1,99	0,22	0,24	0,25	0,26	0,279
8	KPI Sungai Jang	4,42	0,50	0,53	0,56	0,59	0,619
9	KPI Prenjak	3,86	0,43	0,46	0,49	0,51	0,540
10	KPI Tanjung Lanjut	2,39	0,27	0,28	0,30	0,32	0,335
TOTAL		721,61	80,82	85,87	90,92	95,97	101,03
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI Wonosari	2,01	0,23	0,24	0,25	0,27	0,281
2	KPI Kampung Bulang II	4,19	0,47	0,50	0,53	0,56	0,587
3	KPI Kota Piring	0,57	0,06	0,07	0,07	0,08	0,080
TOTAL		6,77	0,76	0,81	0,85	0,90	0,95
RENCANA PERUBAHAN KPI							
1	KPI Dompok Darat	859,17	96,23	102,24	108,26	114,27	120,28
TOTAL		859,17	96,23	102,24	108,26	114,27	120,28
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		1587,55	177,81	188,92	200,03	211,14	222,26

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dalam melayani kebutuhan listrik di Kota Tanjungpinang terdapat peningkatan kapasitas (MW) kebutuhan listrik oleh Swasta di Kawasan FTZ Senggarang, dengan kapasitas 2,000 MW dari 30% pemenuhan listrik dalam negeri. Peningkatan kapasitas tersebut dapat melayani kebutuhan KPI yang berada di Kota Tanjungpinnag dengan kebutuhan 235.01 MVA/Ha pada tahun 2022 – 2026.

6. Kota Batam

Di Kota Batam jumlah daya yang terpasang sebanyak 498 MW yang diperoleh dari 16 jenis pembangkit listrik dengan total daya terpasang listrik di Kota Batam sebesar 498 MW, di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Batam Tahun 2017 s.d 2026 disebutkan, bahwa sampai dengan tahun 2026 diperlukan pembangunan 5 (lima) segmen transmisi baru, yaitu Batu Besar–

Nongsa, Kabil-Batu Besar/Tanjung Kasam, Harapan-Nagoya-Tanjung Sengkuang, Panaran-Rempang, dan Rempang-Galang.

Tabel 2.34. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Batam Kota	296.96	33.26	35.34	37.42	39.50	41.58
2	KPI Batu Ampar I	427.45	47.87	50.87	53.86	56.85	59.84
3	KPI Batu Ampar II	54.71	6.13	6.51	6.89	7.28	7.66
4	KPI Batu Besar I	41.21	4.62	4.90	5.19	5.48	5.77
5	KPI Batu Besar II	1.60	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
6	KPI Belakang Sidi	66.72	7.47	7.94	8.41	8.87	9.34
7	KPI Bengkong	34.21	3.83	4.07	4.31	4.55	4.79
8	KPI Colek	2.79	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39
9	KPI Dangsi	54.58	6.11	6.49	6.88	7.26	7.64
10	KPI Galang	337.86	37.84	40.21	42.57	44.94	47.30
11	KPI Janda Berhias	224.66	25.16	26.73	28.31	29.88	31.45
12	KPI Kabil I	46.82	5.24	5.57	5.90	6.23	6.55
13	KPI Kabil II	41.50	4.65	4.94	5.23	5.52	5.81
14	KPI Kepala Jeri	2024.89	226.79	240.96	255.14	269.31	283.48
15	KPI Ladi	33.33	3.73	3.97	4.20	4.43	4.67
16	KPI Lumba I	829.00	92.85	98.65	104.45	110.26	116.06
17	KPI Lumba II	78.77	8.82	9.37	9.93	10.48	11.03
18	KPI Melintang	103.90	11.64	12.36	13.09	13.82	14.55
19	KPI Muka Kuning	555.34	62.20	66.09	69.97	73.86	77.75
20	KPI Ngenang	474.44	53.14	56.46	59.78	63.10	66.42
v21	KPI Nipah	8.00	0.90	0.95	1.01	1.06	1.12
22	KPI Nongsa	1476.02	165.31	175.65	185.98	196.31	206.64
23	KPI Pelita I	15.49	1.73	1.84	1.95	2.06	2.17
24	KPI Pelita II	8.57	0.96	1.02	1.08	1.14	1.20
25	KPI Pelita III	8.04	0.90	0.96	1.01	1.07	1.13
26	KPI Sagulung I	711.94	79.74	84.72	89.70	94.69	99.67
27	KPI Sagulung II	8.60	0.96	1.02	1.08	1.14	1.20
28	KPI Sei Langkai I	3.77	0.42	0.45	0.47	0.50	0.53
29	KPI Sei Langkai II	3.61	0.40	0.43	0.46	0.48	0.51
30	KPI Sei Pelunggut I	45.63	5.11	5.43	5.75	6.07	6.39
31	KPI Sei Pelunggut II	50.01	5.60	5.95	6.30	6.65	7.00
32	KPI Sekupang I	242.50	27.16	28.86	30.55	32.25	33.95
33	KPI Sekupang II	7.25	0.81	0.86	0.91	0.96	1.02
34	KPI Selatnenek	20.14	2.26	2.40	2.54	2.68	2.82
35	KPI Seraya I	7.69	0.86	0.92	0.97	1.02	1.08
36	KPI Seraya II	2.45	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34
37	KPI Setokok	687.45	76.99	81.81	86.62	91.43	96.24
38	KPI Tanjung Piayu	74.19	8.31	8.83	9.35	9.87	10.39
39	KPI Tanjung Sauh	731.57	81.94	87.06	92.18	97.30	102.42
40	KPI Tanjung Uncang	1315.84	147.37	156.59	165.80	175.01	184.22

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
41	KPI Tembesi I	309.86	34.70	36.87	39.04	41.21	43.38
42	KPI Tembesi II	87.75	9.83	10.44	11.06	11.67	12.28
43	KPI Tembesi III	38.26	4.29	4.55	4.82	5.09	5.36
TOTAL		11595.37	1298.68	1379.85	1461.02	1542.18	1623.35
KPI BATAM (DALAM HOLDING ZONE)							
1	HL/KPI Tanjung Uncang	71.99	8.06	8.57	9.07	9.57	10.08
2	HL/KPI Sagulung	186.04	20.84	22.14	23.44	24.74	26.05
3	HL/KPI Setokok	5.38	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75
4	HL/KPI Tanjung Piayu	0.83	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12
5	HL/KPI Galang	87.39	9.79	10.40	11.01	11.62	12.23
6	HP/KPI Sembulang	1151.54	128.97	137.03	145.09	153.15	161.22
TOTAL		1503.16	168.35	178.88	189.40	199.92	210.44
KPI BATAM (DALAM BADAN AIR)							
1	BA/KPI Janda Berhias	290.93	32.58	34.62	36.66	38.69	40.73
2	BA/KPI Sekupang I	30.53	3.42	3.63	3.85	4.06	4.27
3	BA/KPI Sekupang II	7.64	0.86	0.91	0.96	1.02	1.07
4	BA/KPI Melintang	45.91	5.14	5.46	5.78	6.11	6.43
5	BA/KPI Tanjung Uncang	241.40	27.04	28.73	30.42	32.11	33.80
6	BA/KPI Sagulung I	38.01	4.26	4.52	4.79	5.06	5.32
7	BA/KPI Sei Pelunggut	11.89	1.33	1.41	1.50	1.58	1.66
8	BA/KPI Ladi	6.64	0.74	0.79	0.84	0.88	0.93
9	BA/KPI Dangsi	15.01	1.68	1.79	1.89	2.00	2.10
10	BA/KPI Tembesi I	135.12	15.13	16.08	17.03	17.97	18.92
11	BA/KPI Batu Ampar I	33.17	3.71	3.95	4.18	4.41	4.64
12	BA/KPI Batu Ampar II	46.47	5.20	5.53	5.86	6.18	6.51
13	BA/KPI Bengkong	109.24	12.23	13.00	13.76	14.53	15.29
14	BA/KPI Belakang Sidi	49.31	5.52	5.87	6.21	6.56	6.90
15	BA/KPI Ngenang	208.66	23.37	24.83	26.29	27.75	29.21
16	BA/KPI Tanjung Sauh	471.64	52.82	56.12	59.43	62.73	66.03
17	BA/KPI Nongsa	502.81	56.31	59.83	63.35	66.87	70.39
18	BA/KPI Batu Besar I	102.71	11.50	12.22	12.94	13.66	14.38
19	BA/KPI Kepala Jeri	1123.84	125.87	133.74	141.60	149.47	157.34
TOTAL		3470.92	388.74	413.04	437.34	461.63	485.93
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		16569.44	1855.78	1971.76	2087.75	2203.74	2319.72

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan energi listrik di Kota Batam berkisar antara 183,9 – 245,2 MVA, sehingga untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kota Batam kedepan harus menambah maksimal 245,2 MVA atau sekitar 196,16 MW. Berdasarkan

Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik di Kota Batam untuk meningkatkan infrastruktur energi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Batam, sampai dengan 2023 PLN Batam akan membangun total pembangkit listrik sekitar 871 MW.

7. Kabupaten Natuna

Kebutuhan listrik KPI di Kabupaten Natuna pada lima tahun pertama 2022 – 2026 yaitu sebesar 263.34 MVA/Ha. Pada lima tahun kedua hingga 20 tahun mendatang yaitu 2041 – 2045 kebutuhan listrik KPI mengalami kenaikan, yaitu 329.17 MVA/Ha. Dalam peningkatan kapasitasnya untuk melayani KPI Natuna diperlukan pengembangan pembangkit tenaga listrik untuk melayani kebutuhan selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2.35. Analisa Kebutuhan Listrik di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Natuna

NO	KPI NATUNA	LUAS (HA)	Kebutuhan Listrik (MVA/Ha)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Bunguran Utara I	1781.90	199.57	212.05	224.52	236.99	249.47
2	KPI Bunguran Selatan	557.34	62.42	66.32	70.22	74.13	78.03
3	KPI Serasan	0.94	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13
4	KPI Midai	1.63	0.18	0.19	0.21	0.22	0.23
5	KPI Subi	0.31	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
6	KPI Pulau Tiga	0.75	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11
7	KPI Bunguran Batubi	0.44	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
8	KPI Bunguran Utara II	1.67	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23
9	KPI Bunguran Timur Laut I	0.65	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
10	KPI Bunguran Timur Laut II	3.08	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43
TOTAL		2348.71	263.06	279.50	295.94	312.38	328.82
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
11	SIKIM Keripik dan Kerupuk	0.50	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
12	SIKIM Kelapa	1.00	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14
13	SIKIM Pengolahan Rumpul Laut (Bunguran Timur)	1.00	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14
TOTAL		2.50	0.28	0.30	0.32	0.33	0.35
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK		2351.21	263.34	279.79	296.25	312.71	329.17

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kapasitas ketersediaan listrik ULP Natuna saat ini adalah 22,94 MW. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan listrik di KPI Natuna yaitu pada tahun

2022 – 2026 kebutuhan listriknya adalah 263.34 MAV/Ha. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas untuk melayani kebutuhan listrik di KPI nya.

2.1.3.5 Rencana Pengembangan Kebutuhan Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam merencanakan pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik Batam Bintan di focuskan untuk memenuhi pertumbuhan beban dan menjaga kehandalan pasokan sistem sesuai dengan kriteria kehandalan yang telah ditetapkan. Pengembangan pembangkit diupayakan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi kecukupan daya dan tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik.

Tabel 2.36. Tambahan Kapasitas Pembangkit

No	Jenis Pembangkit	MW	Rencana	Keterangan
1	PLTMG Baloi	30	2022	Terkontrak
2	Pembangkit EBT #1	1	2022	Terkontrak
3	Penambahan Pembangkit Sewa PLTG	50	2022	Terkontrak
4	Penambahan Pasokan dari Panbil Utilitas	50	2025	Terkontrak
5	Pembangkit EBT #2	30	2022	Rencana
6	Pembangkit EBT #3	50	2023	Rencana
7	GTG PLTGU New kapasitas	80	2023	Rencana
8	STG PLTGU New	40	2024	Rencana
9	Combine Cycle Tanjung Uncang ELB	39	2024	Rencana
10	PLTU Tj Sauh #1 (Biomass)	75	2025	Rencana
11	PLTU Tj Sauh #2 (Biomass)	75	2026	Rencana
12	PLTG Batam #1	50	2027	Rencana
13	PLTG Batam #2	50	2028	Rencana
14	PLTG Batam #3	30	2030	Rencana
15	Pembangkit EBT #5	100	2029	Rencana

Sumber : RUPTL 2022 – 2031

b. Air Bersih

Kondisi sumberdaya air di Provinsi Kepulauan Riau terutama sumber daya air baku (sungai, waduk/dam, kolong, estuari, air tanah dan mata air) sering dihadapkan pada krisis air khususnya di daerah perkotaan.

Tabel 2.37. Sumber Daya Air Di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Sungai/Waduk/Mata Air
Bintan	Sei Pulai, Gesek, Busung, Ekan Angculai, Jago, Sungai Bintan, Kangboi, Sei Lapan, Sekuning, Lagoi, Kawal, Galang Batang
Tanjungpinang	Terusan, Ladi, Jang, Dompok
Lingga	Gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggal, Bukit Selayar, Sungai Bakung, Sungai Cikasim, Daik, Jelutung, Kelumu, Keton, Langkap, Limas, Marok Tua, Mengkuding, Mentuda, Nerekeh, Pancur, Panggak Darat, Petengah, Resun, Selayar, Senayang, Serak, Sergang, Sungai Besar, Sungai Pinang, Tanda dan Temiang.
Anambas	Waduk david, waduk matan, waduk jelis, mata air P. Siantan, mata air Pulau Matak, mata air Pulau Jemaja, mata air Pulau Mubur, mata air Pulau Bajau.
Natuna	Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak (sumber air baku Bukit Berangin). Sungai Segeram, Sungai Tapau, Sungai Binjai, Air Terjun Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin, Bendung Pering, mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut. sungai Sabang Mudu, sungai Air Salor, sungai cabang Sungai Abit, sungai Air Pancur, Bendung Kelarik dan Tapau
Karimun	Air Terjun Desa Pongkar, Atarin, Waduk Pongkar 1, Waduk Pongkar II, Sei Bati, Baran, Sentani, Sememal, Lubuk, Waduk Sidodadi dan Waduk Sidomoro di Kecamatan Moro, Waduk Tempan dan Sawang di

Kabupaten/Kota	Sungai/Waduk/Mata Air
	Kecamatan Kundur, Waduk Pulau Parit dan Pulau Papan, Air Terjun Pasir Panjang, Waduk RSUD Kelurahan Baran.
Batam	Sungai Harapan, Sungai Ladi, SungaiMuka Kuning, Sungai Duriangkang,Sungai Beduk, Sungai Tongkong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Sungai Nongsa, Sungai Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Monggak, Sungai Galang, Waduk Sungai Harapan, Waduk Sungai Ladi, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Cia, Waduk Pulau Abang, Pulau Air Raja,Waduk Sungai Galang, Waduk Pulau Sembulang, Waduk Sungai Gong, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan, Waduk Pulau Bulang Lintang, Waduk Pulau Bulan.

Sumber: RTRW Proivinsi Kepulauan Riau 2013-2033, Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Adapun arahan pengembangan jaringan sumberdaya air di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan melalui :

- a) Upaya konservasi sumberdaya air;
Pengelolaan dengan menjaga kelestarian lingkungan daerah sekitar sumberdaya air;
- b) Menjaga kelestarian hutan;
- c) Pemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- d) Pengembangan sistem jaringan irigasi.

Jaringan air bersih Kepulauan Riau dilayani oleh PDAM Tirta Kepri dengan jumlah sambungan langganan sebesar 15.204 dan produksi air 4.114.285 m³ pada tahun 2017, dengan penerimaan sebesar Rp. 25.506.427.150,- dengan kapasitas produksi air 265 L/detik. Cakupan layanan yang dipenuhi adalah 41,47% yaitu meliputi Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas. Khusus untuk Pulau Batam (*Mainland*) jaringan air bersih dilayani oleh PT. Aditya Tirta Batam (ATB), sementara wilayah Hinterland dilayani oleh

UPTD Air Bersih dibawah Bina Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Batam.

Untuk penggunaan air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kepri - Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan adanya penurunan penggunaan dari 2.958.044 m3 di tahun 2012 menjadi 2.934.556 m3 di tahun 2013. Disisi lain jumlah pelanggan air minum justru meningkat, dari 14.769 menjadi 15.095 pelanggan. Kapasitas produksi air juga meningkat dari 262 Liter/detik menjadi hanya 265 Liter/detik.

Sumber air bersih di Kota Batam berupa instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sungai Harapan, Sungai Muka Kuning, Sungai Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tokong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Sungai Nongsa, Sungai Ladi, Sungai Baloi, Sungai Tembesi, Sungai Cia, Sungai Gong, Sungai Langkai, Sungai Bengkong, Sungai Rempang, Sungai Monggak, Sungai Galang, Embung Sekanak I dan Embung Sekanak II, Pulau Pemping, Embung Bulang, Pulau Bulan dan Embung Bulang Lintang dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*) dan mata air.

Tabel 2.38. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Batam Kota	296.97	118.79	148.49	178.18	207.88	237.58
2	KPI Batu Ampar I	427.45	170.98	213.72	256.47	299.21	341.96
3	KPI Batu Ampar II	54.71	21.88	27.36	32.83	38.30	43.77
4	KPI Batu Besar I	41.21	16.48	20.60	24.72	28.84	32.97
5	KPI Batu Besar II	1.60	0.64	0.80	0.96	1.12	1.28
6	KPI Belakang Sidi	66.72	26.69	33.36	40.03	46.70	53.37
7	KPI Bengkong	34.21	13.68	17.10	20.52	23.95	27.37
8	KPI Colek	2.79	1.12	1.39	1.67	1.95	2.23
9	KPI Dangsi	54.58	21.83	27.29	32.75	38.20	43.66
10	KPI Galang	337.86	135.14	168.93	202.72	236.50	270.29
11	KPI Janda Berhias	224.66	89.87	112.33	134.80	157.26	179.73
12	KPI Kabil I	46.82	18.73	23.41	28.09	32.77	37.45
13	KPI Kabil II	41.50	16.60	20.75	24.90	29.05	33.20
14	KPI Kepala Jeri	2024.89	809.96	1012.44	1214.93	1417.42	1619.91
15	KPI Ladi	33.33	13.33	16.67	20.00	23.33	26.67
16	KPI Lumba I	829.00	331.60	414.50	497.40	580.30	663.20
17	KPI Lumba II	78.77	31.51	39.39	47.26	55.14	63.02
18	KPI Melintang	103.90	41.56	51.95	62.34	72.73	83.12

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
19	KPI Muka Kuning	555.34	222.13	277.67	333.20	388.74	444.27
20	KPI Ngenang	474.44	189.78	237.22	284.66	332.11	379.55
21	KPI Nipah	8.00	3.20	4.00	4.80	5.60	6.40
22	KPI Nongsa	1476.02	590.41	738.01	885.61	1033.21	1180.82
23	KPI Pelita I	15.49	6.20	7.75	9.29	10.84	12.39
24	KPI Pelita II	8.57	3.43	4.29	5.14	6.00	6.86
25	KPI Pelita III	8.04	3.22	4.02	4.83	5.63	6.44
26	KPI Sagulung I	711.94	284.77	355.97	427.16	498.36	569.55
27	KPI Sagulung II	8.60	3.44	4.30	5.16	6.02	6.88
28	KPI Sei Langkai I	3.77	1.51	1.88	2.26	2.64	3.01
29	KPI Sei Langkai II	3.61	1.45	1.81	2.17	2.53	2.89
30	KPI Sei Pelunggut I	45.63	18.25	22.82	27.38	31.94	36.51
31	KPI Sei Pelunggut II	50.01	20.00	25.00	30.00	35.01	40.01
32	KPI Sekupang I	242.50	97.00	121.25	145.50	169.75	194.00
33	KPI Sekupang II	7.25	2.90	3.63	4.35	5.08	5.80
34	KPI Selatnenek	20.14	8.06	10.07	12.09	14.10	16.11
35	KPI Seraya I	7.69	3.08	3.85	4.62	5.38	6.15
36	KPI Seraya II	2.45	0.98	1.22	1.47	1.71	1.96
37	KPI Setokok	687.45	274.98	343.72	412.47	481.21	549.96
38	KPI Tanjung Piayu	74.19	29.67	37.09	44.51	51.93	59.35
39	KPI Tanjung Sauh	731.57	292.63	365.78	438.94	512.10	585.25
40	KPI Tanjung Uncang	1315.84	526.34	657.92	789.50	921.09	1052.67
41	KPI Tembesi I	309.86	123.95	154.93	185.92	216.90	247.89
42	KPI Tembesi II	87.75	35.10	43.87	52.65	61.42	70.20
43	KPI Tembesi III	38.26	15.30	19.13	22.96	26.78	30.61
TOTAL		11595.37	4638.15	5797.69	6957.22	8116.76	9276.30
KPI BATAM (DALAM HOLDING ZONE)							
1	HL/KPI Tanjung Uncang	71.99	28.80	35.99	43.19	50.39	57.59
2	HL/KPI Sagulung	186.04	74.42	93.02	111.62	130.23	148.83
3	HL/KPI Setokok	5.38	2.15	2.69	3.23	3.77	4.30
4	HL/KPI Tanjung Piayu	0.83	0.33	0.42	0.50	0.58	0.66
5	HL/KPI Galang	87.39	34.95	43.69	52.43	61.17	69.91
6	HP/KPI Sembulang	1151.54	460.62	575.77	690.92	806.08	921.23
TOTAL		1503.16	601.27	751.58	901.90	1052.21	1202.53
KPI BATAM (DALAM BADAN AIR)							
1	BA/KPI Janda Berhias	290.93	116.37	145.46	174.56	203.65	232.74
2	BA/KPI Sekupang I	30.53	12.21	15.26	18.32	21.37	24.42
3	BA/KPI Sekupang II	7.64	3.06	3.82	4.58	5.35	6.11
4	BA/KPI Melintang	45.91	18.36	22.96	27.55	32.14	36.73
5	BA/KPI Tanjung Uncang	241.40	96.56	120.70	144.84	168.98	193.12
6	BA/KPI Sagulung I	38.01	15.21	19.01	22.81	26.61	30.41
7	BA/KPI Sei Pelunggut	11.89	4.75	5.94	7.13	8.32	9.51
8	BA/KPI Ladi	6.64	2.65	3.32	3.98	4.65	5.31

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
9	BA/KPI Dangsi	15.01	6.00	7.50	9.00	10.51	12.01
10	BA/KPI Tembesi I	135.12	54.05	67.56	81.07	94.58	108.10
11	BA/KPI Batu Ampar I	33.17	13.27	16.58	19.90	23.22	26.54
12	BA/KPI Batu Ampar II	46.47	18.59	23.24	27.88	32.53	37.18
13	BA/KPI Bengkong	109.24	43.69	54.62	65.54	76.47	87.39
14	BA/KPI Belakang Sidi	49.31	19.73	24.66	29.59	34.52	39.45
15	BA/KPI Ngenang	208.66	83.46	104.33	125.20	146.06	166.93
16	BA/KPI Tanjung Sauh	471.64	188.65	235.82	282.98	330.15	377.31
17	BA/KPI Nongsa	502.81	201.12	251.40	301.68	351.96	402.24
18	BA/KPI Batu Besar I	102.71	41.08	51.35	61.63	71.90	82.17
19	BA/KPI Kepala Jeri	1123.84	449.53	561.92	674.30	786.69	899.07
	TOTAL	3470.92	1388.37	1735.46	2082.55	2429.65	2776.74
	TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH	16569.44	6627.78	8284.72	9941.67	11598.61	13255.55

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kabupaten Bintan berupa instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lapan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Estuari dan Dam Busung, Waduk Gunung Bini, Kolong Enam Kijang, Sungai Gesek, Sungai Busung, Sungai Ekan-Angculai, Sungai Kawal, Sungai Bintan, Sungai Kangboi. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang.

Tabel 2.39. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bintan

NO	KPI BINTAN	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Anak Lobam	589.69	165.11	206.39	247.67	288.95	330.23
2	KPI Antam - Kijang	41.27	11.56	14.45	17.33	20.22	23.11
3	KPI Galang Batang	2490.73	697.40	871.76	1046.11	1220.46	1394.81
4	KPI Gunung Kijang	256.78	71.90	89.87	107.85	125.82	143.80
5	KPI Lobam	3517.95	985.03	1231.28	1477.54	1723.80	1970.05
6	KPI Maritim Bintan Timur	264.43	74.04	92.55	111.06	129.57	148.08
7	KPI P. Ngalih	78.05	21.86	27.32	32.78	38.25	43.71
8	KPI P. Siolong	71.52	20.03	25.03	30.04	35.04	40.05
9	KPI Pulau Buton	54.91	15.38	19.22	23.06	26.91	30.75
10	KPI Sungai Enam	1148.37	321.54	401.93	482.31	562.70	643.08
11	KPI Sungai Lekop	176.92	49.54	61.92	74.31	86.69	99.08
12	KPI Tanjung Uban	257.79	72.18	90.23	108.27	126.32	144.36
13	KPI Tembeling	17.25	4.83	6.04	7.25	8.45	9.66
	TOTAL	8965.75	2510.39	3137.98	3765.58	4393.18	5020.77

NO	KPI BINTAN	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
KPI BINTAN (DALAM HOLDING ZONE)							
1	HL/KPI Lobam	6.18	1.73	2.16	2.59	3.03	3.46
2	HL/KPI Galang Batang	0.95	0.27	0.33	0.40	0.47	0.53
3	HL/KPI Sungai Lekop	1.06	0.30	0.37	0.45	0.52	0.60
4	HL/KPI Maritim Bintang Timur	34.21	9.58	11.97	14.37	16.76	19.16
5	KSA/KPI Maritim Bintang Timur	115.64	32.38	40.47	48.57	56.66	64.76
TOTAL		158.04	44.25	55.31	66.38	77.44	88.50
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH		9123.79	2554.64	3193.29	3831.96	4470.62	5109.27

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kabupaten Karimun berupa instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol, Pulau Durai, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani, Kolong Paya Manggis dan Kolong Depan RSUD serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (sistem *reverse osmosis*), estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang.

Tabel 2.40. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Karimun

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Karimunanak	497.25	139.23	174.04	208.85	243.65	2784.62
2	KPI Kundur	124.13	34.76	43.45	52.14	60.83	695.14
3	KPI Kundur Barat I	1463.76	409.85	512.32	614.78	717.24	8197.07
4	KPI Kundur Barat II	502.61	140.73	175.91	211.10	246.28	2814.64
5	KPI Kundur Barat III	117.84	32.99	41.24	49.49	57.74	659.88
6	KPI Kundur Barat IV	92.79	25.98	32.48	38.97	45.47	519.64
7	KPI Merak	38.22	10.70	13.38	16.05	18.73	214.03
8	KPI Meral	793.96	222.31	277.89	333.46	389.04	4446.19
9	KPI Meral Barat I	863.09	241.67	302.08	362.50	422.92	4833.33
10	KPI Meral Barat II	143.49	40.18	50.22	60.27	70.31	803.56
11	KPI Meral Barat III	288.59	80.81	101.01	121.21	141.41	1616.11
12	KPI Meral Barat IV	338.90	94.89	118.62	142.34	166.06	1897.86
13	KPI P. Anak Babi	10.51	2.94	3.68	4.41	5.15	58.85
14	KPI P. Babi	16.99	4.76	5.95	7.13	8.32	95.13
15	KPI P. Buru	139.08	38.94	48.68	58.41	68.15	778.85
16	KPI P. Durian Besar	17.17	4.81	6.01	7.21	8.41	96.15
17	KPI P. Durian Kecil	214.95	60.19	75.23	90.28	105.33	1203.72
18	KPI P. Gunungpapan	493.42	138.16	172.70	207.24	241.78	2763.15

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
19	KPI P. Lumut	83.57	23.40	29.25	35.10	40.95	467.98
20	KPI P. Parit	688.26	192.71	240.89	289.07	337.25	3854.24
21	KPI P. Tulang	232.49	65.10	81.37	97.64	113.92	1301.92
22	KPI P. Ungar	22.02	6.17	7.71	9.25	10.79	123.34
23	KPI Tebing I	225.15	63.04	78.80	94.56	110.32	1260.84
24	KPI Tebing II	230.65	64.58	80.73	96.87	113.02	1291.64
TOTAL		7638.89	2074.24	2138.89	2673.62	3208.34	3743.07
KPI KARIMUN (DALAM HOLDING ZONE)							
1	HL/KPI Karimunanak	326.26	91.35	114.19	137.03	159.87	182.70
2	HL/KPI Meral Barat III	3.68	1.03	1.29	1.55	1.80	2.06
3	HL/KPI Tebing I	9.32	2.61	3.26	3.92	4.57	5.22
4	HL/KPI Tebing IV	154.14	43.16	53.95	64.74	75.53	86.32
5	HP/KPI P. Asam	119.79	33.54	41.93	50.31	58.70	67.08
6	HPT/KPI P. Asam	200.42	56.12	70.15	84.18	98.20	112.23
TOTAL		813.61	227.81	284.76	341.72	398.67	455.62
KPI KARIMUN (DALAM BADAN AIR)							
1	BA/KPI Meral	304.36	85.22	106.53	127.83	149.14	170.44
2	BA/KPI Meral Barat II	280.29	78.48	98.10	117.72	137.34	156.96
3	BA/KPI Meral Barat IV	10.72	3.00	3.75	4.50	5.25	6.00
4	BA/KPI P. Asam	209.18	58.57	73.21	87.85	102.50	117.14
TOTAL		804.54	225.27	281.59	337.91	394.23	450.54
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KP Sentra IKM Moro	0.76	0.21	0.27	0.32	0.16	0.09
2	KPI Pulau Combol	100.00	28.00	35.00	42.00	20.58	16.46
TOTAL		100.76	28.21	35.27	42.32	20.74	16.55
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH		9357.82	2555.53	3194.42	3833.30	4443.55	42407.46

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kota Tanjungpinang berupa instalasi pengolahan air (IPA) waduk Sei Pulau dengan memperkuat *intake* Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang Batang, Estuari DAM Muara Sungai Dompok dan embung pulau dompok, Kolong Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Toucang. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (*Reverse Osmosis*), kolong pasca tambang, mata air dan tampungan lainnya sebagai sumber air baku.

Tabel 2.41. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kota Tanjungpinang

No	KPI TANJUNGPINANG	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Air Raja	301,13	84,32	105,40	126,47	147,55	168,63
2	KPI Dompok Darat	420,48	117,73	147,17	176,60	206,04	235,47
3	KPI Kampung Bugis I	11,94	3,34	4,18	5,01	5,85	6,69
4	KPI Kampung Bugis II	1,28	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72
5	KPI Kampung Bugis III	1,00	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56
6	KPI Kampung Bulang I	2,27	0,64	0,79	0,95	1,11	1,27
7	KPI Daeng Marewa	1,99	0,56	0,70	0,84	0,98	1,11
8	KPI Sungai Jang	4,42	1,24	1,55	1,86	2,17	2,48
9	KPI Prenjak	3,86	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16
10	KPI Tanjung Lanjut	2,39	0,67	0,84	1,00	1,17	1,34
TOTAL		721,61	202,05	252,56	303,08	353,59	404,10
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI Wonosari	2,01	0,56	0,70	0,84	0,98	1,126
2	KPI Kampung Bulang II	4,19	1,17	1,47	1,76	2,05	2,346
3	KPI Kota Piring	0,57	0,16	0,20	0,24	0,28	0,319
TOTAL		6,77	1,90	2,37	2,84	3,32	3,79
RENCANA PERUBAHAN KPI							
1	KPI Dompok Darat	859,17	240,57	300,71	360,85	420,99	2,47
TOTAL		859,17	240,57	300,71	360,85	420,99	2,47
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH		1587,55	444,51	555,64	666,77	777,90	410,36

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kabupaten Natuna berupa instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai, Sungai Air Hijau, Sungai Ulu, Sungai Semala, Air Terjun Air Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak, Sungai Tapau, Sungai Bijai, air terjun Gunung Ranai, Air Terjun Bukit Berangin, Bendung Pering); di Pulau Midai (yang bersumber dari mata air Gunung Jambat, Gunung Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga, sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai Air Salor, sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air Pancur); Bendung Lampa serta sumber air baku yang berasal dari embung penampungan air di pulau-pulau kecil dan mata air.

Tabel 2.42. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Natuna

NO	KPI NATUNA	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Bunguran Utara I	1781.90	498.93	623.67	748.40	873.13	997.86
2	KPI Bunguran Selatan	557.34	156.06	195.07	234.08	273.10	312.11
3	KPI Serasan	0.94	0.26	0.33	0.39	0.46	0.53
4	KPI Midai	1.63	0.46	0.57	0.68	0.80	0.91
5	KPI Subi	0.31	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17
6	KPI Pulau Tiga	0.75	0.21	0.26	0.32	0.37	0.42
7	KPI Bunguran Batubi	0.44	0.12	0.15	0.18	0.22	0.25
8	KPI Bunguran Utara II	1.67	0.47	0.58	0.70	0.82	0.94
9	KPI Bunguran Timur Laut I	0.65	0.18	0.23	0.27	0.32	0.36
10	KPI Bunguran Timur Laut II	3.08	0.86	1.08	1.29	1.51	1.72
TOTAL		2348.71	657.64	822.05	986.46	1150.87	1315.28
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
11	SIKIM Keripik dan Kerupuk	0.50	0.14	0.18	0.21	0.25	0.28
12	SIKIM Kelapa	1.00	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56
13	SIKIM Pengolahan Rumpul Laut (Bunguran Timur)	1.00	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56
TOTAL		2.50	0.70	0.88	1.05	1.23	1.40
TOTAL KEBUTUHANAIR BERSIH		2351.21	658.34	822.92	987.51	1152.09	1316.68

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa instalasi pengolahan air (IPA) DAS Siantan, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Jemaja, DAS Bajau, DAS Air Abu, DAS Telaga, DAS Temburun, DAS Neraja dan DAS Air Bini. Dan pengembangan IPA lainnya berasal dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis), mata air dan air baku buatan.

Tabel 2.43. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	KPI ANAMBAS	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Matak I	80.88	22.65	28.31	33.97	39.63	45.29
2	KPI Matak II	392.74	109.97	137.46	164.95	192.44	219.93
3	KPI Mubur	2.57	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44
4	KPI Siantan	1129.07	316.14	395.17	474.21	553.24	632.28
5	KPI Jemaja - Sebrong	316.53	88.63	110.79	132.94	155.10	177.26
6	KPI Jemaja Utara	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1921.79	538.10	672.63	807.15	941.68	1076.20
RENCANA PERUBAHAN KPI							

1	KPI Jemaja Utara ke KPI Jemaja Timur	50.89	14.25	17.81	21.37	24.94	28.50
TOTAL		50.89	14.25	17.81	21.37	24.94	28.50
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI SIKIM P. MATAK	11.50	3.22	4.03	4.83	5.64	6.44
TOTAL		62.39	17.47	21.84	26.20	30.57	34.94
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH		1984.18	569,82	712,28	854,72	997,19	1.1139,64

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sumber air bersih di Kabupaten Lingga berupa instalasi pengolahan air (IPA) yang bersumber dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik, Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin, Kudung, Sungai Pinang, Sungai Cik Latif, Sungai Kuala Raya, Tebing Gunung Lanjut, Gunung Tunggal, Bukit Selayar, Kolong Berindat, Kolong Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai Kerekel, Kolong Marok Tua, Kolong Tanah Sejuk, Kolong Raya serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber air baku berasal dari pengolahan air laut (sistem *reverse osmosis*), mata air dan kolong pasca tambang.

Tabel 2.44. Analisa Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga

NO	KPI LINGGA	LUAS (HA)	Kebutuhan Air Bersih (liter/detik/hektar)				
			2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1	KPI Marok Tua	219.43	61.44	76.80	92.16	107.52	122.88
2	KPI Sungai Tenam	163.84	45.88	57.34	68.81	80.28	91.75
TOTAL		383.27	107.32	134.14	160.97	187.80	214.63
RENCANA PERUBAHAN LUAS KPI							
1	KPI Sungai Tenam	142.91	40.01	50.02	60.02	70.03	80.03
RENCANA PENAMBAHAN KPI							
1	KPI Tanjung Keruing	1037.22	290.42	363.03	435.63	508.24	580.84
2	KPI Tanjung Sebayur	3027.59	847.73	1059.66	1271.59	1483.52	1695.45
3	KPI Tanjung Ayam	382.04	106.97	133.71	160.46	187.20	213.94
4	KPI Temiang Pesisir	456.89	127.93	159.91	191.89	223.88	255.86
5	KPI Jagoh	829.36	232.22	290.28	348.33	406.39	464.44
6	KPI Tanjung Nyang	124.14	34.76	43.45	52.14	60.83	69.52
7	KPI Sebangka	52.24	14.63	18.28	21.94	25.60	29.25
8	SIKIM Sagu	4.22	1.18	1.48	1.77	2.07	2.36
9	SIKIM Kelapa	3.70	1.04	1.30	1.55	1.81	2.07
TOTAL		5917.40	1656.87	2071.09	2485.31	2899.53	3313.74
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH		6443.58	1804.20	2255.25	2706.30	3157.35	3608.40

Sumber : Hasil Analisis, 2022

c. Fasilitas Jaringan Energi

Jaringan Transmisi dan Distribusi Energi berupa gas bumi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau dilewati oleh 2 (dua) jalur yaitu : Jalur Pipa Gas dari West Natuna Transportation System dan Jalur Pipa Gas dari Grissik :

- Jalur pipa gas bumi jalur pipanisasi gas Grissik (Sumsel)–Batam–Singapura, sebagai operator adalah PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) dengan total panjang pipa 477 KM, diameter pipa 28 inci dan kapasitas gas 350 mmscf/hari (*existing line*).
- Jalur pipa gas WNTS (West Natuna Transportation System) Laut Natuna – Singapura dengan total panjang 640 KM, diameter pipa 28 inci dan kapasitas gas 700 mmscf/hari (*existing line*).
- Rencana pembangunan pipa gas dari SSTI-B WNTS menuju pemping dengan jarak 4,25 km dengan pipa 16”.
- Pembangunan Infrastruktur Gas Eksisting (Proyek Pipa WNTS) menuju Pemping (Pipa gas Pemping) - Tj. Uncang dibangun pada tahun 2015 sepanjang 13,5 km dengan pipa 16”.
- Penambahan kapasitas Titik Serah (TS) Kabil sebesar 25 MW dan TS Dalle Energi Batam sebesar 25 MW.
- Penambahan Titik Serah (TS) Sekupang dan Sengkuang dilakukan secara bertahap dan akan selesai dibangun pada 2025.
- Sehubungan dengan adanya rencana pengembangan industri hilirisasi gas/migas di Batam, Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang membangun jaringan pipa gas sepanjang 141,3 KM yang melingkar di dalam kota Batam dan telah membangun pipa distribusi gas di Nagoya sepanjang 18,3 KM, diklaim sudah mampu menjangkau perumahan dan industri pembangkit di kota ini. Hingga kuartal pertama 2019, PGN telah memasok gas bumi ke 4.842 pelanggan di wilayah Batam, yang terdiri atas 93 industri dan komersial, 29 pelanggan kecil, 4.720 pelanggan rumah tangga. Diameter pipa 28 inci dan kapasitas gas 300 mmscf/hari (*diolah dari Tribun Batam, Mei 2019*).
- Untuk rencana pengembangan industri hilirisasi gas/migas di beberapa daerah lain selain Batam (Bintan, Anambas, dan Natuna), perlu dibangun instalasi gas berkapasitas 75 mmscf/hari (*diolah dari Data BPS, 2017*).

- Potensi Kebutuhan gas untuk pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, yang akan dibangun secara 4 tahap, yaitu :
 - Tahap 1 : (6 x 25 MW) Penyediaan Steam dan Tenaga Listrik untuk alumina refinery (selesai Juni 2022);
 - Tahap 2 : (6 x 150 MW) untuk supply tenaga listrik ke aluminium smelter tahap I dengan kapasitas 250 kt (selesai 2025);
 - Tahap 3 : (4 x 150 MW) untuk supply tenaga listrik ke Aluminum Smelter Tahap II dengan kapasitas 250 kt (Selesai 2026);
 - Tahap 4 : (8 x 150 MW) untuk supply tenaga listrik ke aluminum smelter tahap III dengan kapasitas 500 kt (selesai 2027). *(diolah dari Dinas ESDM Provinsi Kepri).*

2.1.3.6 Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sektor telekomunikasi dan informatika diarahkan pada:

- a. Terhubungnya seluruh Kota/Kabupaten/Desa/Pulau dengan serat optik;
- b. Tersedianya sarana komunikasi di seluruh Desa/Pulau di Provinsi Kepulauan Riau (mengurangi kesenjangan informasi sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bisa mengakses informasi);
- c. Mewujudkan aksesibilitas telekomunikasi bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan dan jasa telekomunikasi;

Pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang baik tersebut dengan menambah kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) pada STO-STO yang sudah ada. Untuk STO-STO di perkotaan yang mempunyai tingkat layanan rendah, penambahan SST dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya.

2.1.3.7 Fasilitas Sanitasi/Sistem Pembuangan Limbah

a) Sistem Pengelolaan Sampah dan Instalasi Lumpur Tinja

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Riau ke depannya akan dilakukan dengan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurangan dan/atau pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
2. Penanganan sampah, dimana penanganan sampah ini meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

b) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terpadu

Lokasi pengolahan limbah B3 di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan dibangun di Kawasan Industri Ladi Kota Batam, sementara itu lokasi penimbunan limbah B3 direncanakan di Kabupaten Bintan. Sedangkan lokasi transfer depo limbah B3 sebelum dibawa ke tempat pusat pengolahan limbah B3 ditempatkan di masing-masing kabupaten/kota penghasil limbah B3.

2.1.4 Penataan Wilayah

a) Arahkan Pusat-Pusat Kegiatan

**Tabel 2.45. Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau**

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
1.	Batam	PKN / PKSN	a. Pusat pemerintahan Kota Batam. b. Kawasan investasi internasional.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			c. “Pusat keunggulan” (center of excellent) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. d. Pusat kawasan industri, perdagangan dan jasa Provinsi Kepulauan Riau. e. Simpul utama (main outlet) transportasi laut dan udara skala nasional dan internasional. f. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah perbatasan. g. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. h. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. i. Kawasan alih muat kapal (transshipment point). j. Kawasan pariwisata.
2.	Ranai	PKSN	Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global. Simpul transportasi laut nasional dan internasional. Simpul transportasi udara nasional. Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
3.	Tarempa	PKSN/PKW	Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. Simpul transportasi laut skala nasional. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional. Sentra produksi perikanan dan kelautan. Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan. Kawasan pariwisata. Kota transit lalu lintas pelayaran.
4.	Tanjungpinang	PKW	Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang. Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi. Pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. Simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional. Pusat perdagangan dan jasa skala provinsi. Pendukung kegiatan pariwisata. Kawasan pendidikan.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
5.	Daik Lingga	PKW	Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. Pusat perdagangan dan jasa skala regional. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, dan kehutanan Kawasan pariwisata. Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal.
6.	Dabo – Pulau Singkep	PKW	Pusat pelayanan untuk Pulau Singkep dan sekitarnya. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Pusat pelayanan transportasi udara skala regional. Simpul transportasi laut skala nasional.
7.	Tanjungbalai Karimun	PKW	Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Pembangunan dan peningkatan pelabuhan Malarko dan pelabuhan bongkar muat Parit Rampak sebagai pelabuhan bebas FTZ Karimun. Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata. Pusat koleksi dan distribusi tingkat regional. Simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.
8.	Bandar Seri Bintan	PKL	Pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan kabupaten. Kawasan pariwisata. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Simpul transportasi laut.
9.	Tanjung Uban	PKL	Kawasan industri pendukung Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Pusat koleksi dan distribusi. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. Simpul penghubung PKN Batam dengan wilayah Kabupaten Bintan. Kawasan pendukung pariwisata. Kawasan industri dan jasa.
10.	Kijang	PKL	Kawasan perdagangan dan jasa lokal. Kawasan industri maritim. Kawasan perikanan. Pusat koleksi dan distribusi lokal. Simpul pelayanan transportasi skala nasional. Kawasan pertambangan. Pengembangan kawasan pariwisata.
11.	Letung	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. Kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal. Kawasan pertanian. Kawasan industri perikanan dan kelautan. Kawasan pariwisata. Simpul pelayanan transportasi laut regional.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
12.	Tebangladan	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan. Kawasan perdagangan lokal. Kawasan pariwisata. Pusat pengolahan minyak dan gas. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. Simpul transportasi udara skala regional.
13.	Pancur	PKL	Pengembangan kegiatan pertanian. Kawasan perikanan dan kelautan. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian. Simpul pelayanan transportasi laut lokal.
14.	Senayang	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan. Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. Kawasan pengembangan wisata bahari.
15.	Meral	PKL	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Kawasan industri maritim. Kawasan perdagangan dan jasa lokal. Kawasan pertambangan.
16.	Tanjung Batu	PKL	Simpul transit skala regional dan antar pulau. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan. Pusat koleksi dan distribusi lokal. Kawasan pendukung pengembangan industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
17.	Moro	PKL	Pusat koleksi dan distribusi lokal.

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			Pusat kegiatan perikanan. Pengembangan kawasan pertambangan. Simpul transportasi laut nasional.
18.	Sedanau	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pusat perdagangan skala lokal. Simpul pelayanan transportasi skala regional.
19.	Serasan	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan kelautan. Simpul pelayanan transportasi laut skala regional.
20	Midai	PKL	Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh) Simpul pelayanan transportasi laut regional Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari
21	Pulau Tiga	PKL	Pusat pengembangan sentra perikanan Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari Simpul pelayanan transportasi laut regional
22	Tambelan	PKL	Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian Simpul pelayanan transportasi laut dan udara regional Pusat konservasi penyu (habitat penyu bertelur)

Sumber: RTRW Kepulauan Riau 2017-2037

b) Pola Ruang Wilayah

Pembahasan dibatasi pada lingkup kawasan budidaya, kawasan peruntukan lahan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan peruntukan industri.

- **Kawasan Budidaya**, meliputi :

1. **Kawasan Hutan Produksi.** Luas kawasan hutan produksi di Provinsi Kepulauan Riau adalah 78.878 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 120.432 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Konversi seluas 74.378 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
2. **Kawasan Peruntukan Pertanian** di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang direncanakan seluas sekitar 39.984 Ha, dengan luas lahan terluas dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Khusus peternakan babi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) akan ditempatkan di Pulau Bulan dengan tujuan ekspor melalui pemindahan ternak babi 15.000 ekor dan 490 keluarga peternak.
3. **Kawasan Peruntukan Perikanan;** Di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:
 - a) Kawasan Perikanan Tangkap, tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
 - b) Kawasan Perikanan Budidaya, terdiri dari perikanan budidaya air laut, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 174,35 ha, budidaya tawar seluas 5.282,07 ha dan, budidaya payau seluas lebih kurang 95 ha. (sumber data Kepri dalam Angka tahun 2018).
 - c) Kawasan minapolitan, kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
 - d) Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan terdiri dari:
 1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang dikembangkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas (Antang) dan Kabupaten Natuna.
 4. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang dikembangkan di Kota Tanjungpinang (Tanjung Batu Sawah), Kabupaten Bintan (Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal, Barek Motor), Kota Batam (Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang), Kabupaten Karimun (Moro), Kabupaten Lingga (Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara, dan Singkep Barat), Kabupaten Natuna (Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai, Bunguran Timur), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan).
4. **Kawasan Peruntukan Pertambangan;** di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral. Kawasan peruntukan pertambangan mineral termuat dalam wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Wilayah pertambangan meliputi wilayah kegiatan usaha pertambangan baik yang sedang/sudah/belum dikerjakan, yang terdiri atas satu atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, mineral non logam dan batuan. Potensi mineral logam yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari Timah, Bauksit, Biji Besi dan bahan galian tambang lainnya yang bernilai ekonomis dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Potensi mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dan telah diusahakan terdiri dari granit, pasir darat, pasir laut dan bahan galian lainnya. Potensi pertambangan yang ada berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya. Adapun rencana kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.899 Ha.

5. **Kawasan Peruntukan Industri;** ditujukan sebagai pusat pemusatan kegiatan industri yang berbasiskan potensi daerah dan berwawasan lingkungan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang serta untuk pengembangan, pembentukan dan pembangunan Techno Park di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s.d 2037, Luas kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau lebih kurang 18.456 Ha, luas Kawasan Peruntukan Industri sebesar 34.817 ha. yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan peruntukan industri meliputi:
- a) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Tanjung Uban, Lobam, Anak Lobam, Galang Batang, Antam-Kijang, Maritim Bintan Timur, Sungai Lekop, Sengai Enam, Gunung Kijang, Pulau Buton, Pulau Siolong, Pulau Ngalih, dan Tembiling).
 - b) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam Kecamatan Lingga dan Kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat.
 - c) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Meral Barat, Meral Pesisir, Tebing, Pulau Karimun Anak, Pulau Parit, Pulau Lumut, Pulau Tulang, Pulau Gunungpapan, Pulau Buru, Pulau Kundur, Pulau Durian Kecil, Pulau Asam).
 - d) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, kawasan industri Dompok Darat, Kampung Bugis, Kampung Bulang, Kawasan industri Sungai Jang, Prendjak, Kawasan industri sungai carang, dan Kawasa Industri Tanjung Laut).
 - e) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, Gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang, Belian, Baloi Permai, Seraya, Bengkon, Tembesi , Sei Langkai , Sei Pelunggut, Segulung, Melintang, Colek, dan Selatnenek.

- f) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Mubur, Siantan, dan Sebrong).
- g) Kabupaten Natuna (kawasan industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, kawasan industri Cemaga Selatan).

2.1.4 Ekonomi Makro Regional

Performa ekonomi Provinsi Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang dihasilkan oleh Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai Rp. 174.976 milyar, turun dari Rp. 181.895 milyar pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2021 mencapai 180.952 milyar.

Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar -3,80%, sedangkan tahun 2019 mencapai 4,84%. Kategori Pertambangan dan Penggalian yang memiliki kontribusi terbesar kedua mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -4,17%. Kategori Industri Mesin dan Perlengkapan merupakan kategori yang paling minum penurunannya yaitu 19,04%.

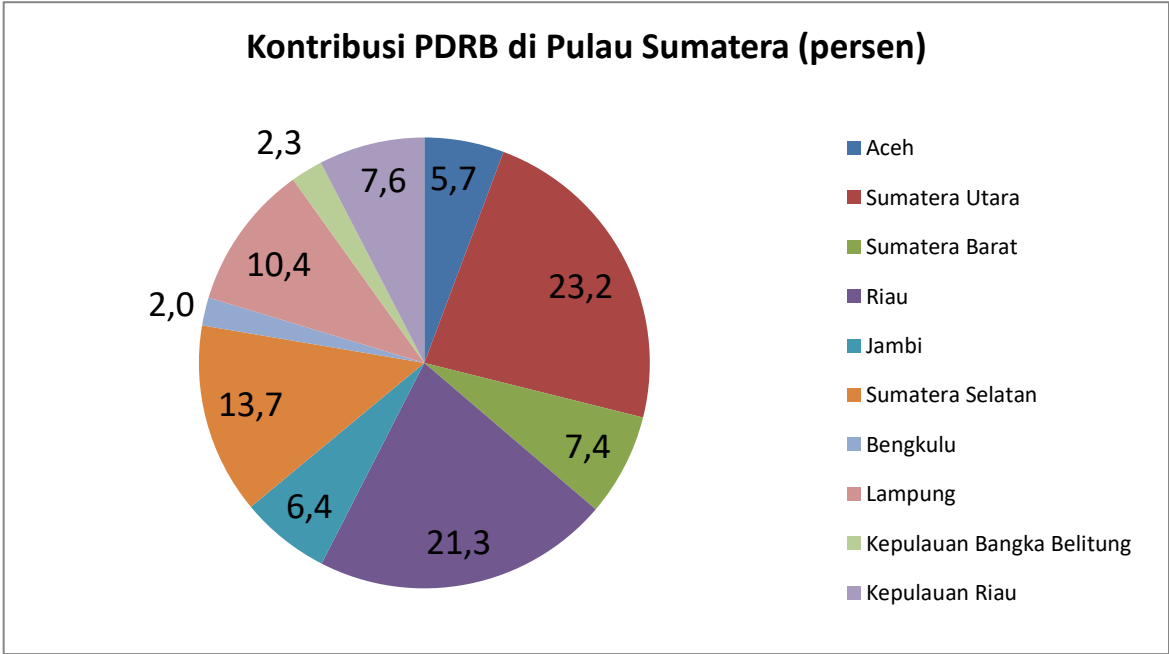
Tabel 2.46. PDRB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2021 dalam Milyar Rupiah

Kategori	Lapangan Usaha	Nilai				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	5.945,51	5.757,78	5.717,73	5.466,78	5.322,05
B	Pertambangan dan Penggalian	25.648,83	25.995,36	26.037,64	24.951,04	24.748,82
C	Industri Pengolahan	62.436,28	65.018,04	69.079,81	71.325,79	75.925,35
D	Pengadaan Listrik, Gas	167,70	1.600,28	1.653,05	1.580,66	1.648,93
E	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	222,66	225,03	224,90	218,65	218,68
F	Konstruksi	29.042,76	31.345,83	33.924,66	31.752,17	33.256,03

G	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	13.665,03	14.523,51	15.408,88	13.449,61	13.592,98
H	Transportasi dan Pergudangan	4.654,49	4.696,77	4.280,15	2.558,45	2.514,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.536,02	3.895,60	4.283,34	2.526,91	2.357,95
J	Informasi dan Komunikasi	3.736,38	4.136,74	4.626,51	5.392,39	5.909,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.466,53	4.724,11	4.951,67	4.798,29	4.833,25
L	Real Estate	2.549,27	2.539,78	2.542,82	2.330,97	2.247,92
M,N	Jasa Perusahaan	8,88	9,49	8,65	5,03	5,74
O	Adminiastasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.750,53	4.013,02	4.073,85	4.398,45	4.028,29
P	Jasa Pendidikan	2.418,96	2.450,78	2.461,46	2.259,58	2.183,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1.618,90	1.714,54	1.679,46	1.886,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	758,86	898,50	906,21	282,47	272,86
Total		164.627,59	173.498,76	181.895,87	174.976,70	180.952,44

Sumber : *PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021*

Gambar 2.5. Kontribusi PDRB Provinsi di Sumatera, 2021 (persen)



PDRB Kepulauan Riau mempunyai peranan 7,6 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. Besaran ini merupakan yang lumayan kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya di Pulau Sumatera, namun peranan PDRB Provinsi Kepulauan Riau sama dengan besaran peranan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, sumber daya ekonomi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Perekonomian Kepulauan Riau didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori Industri Pengolahan; kategori Pertambangan dan Penggalian; serta kategori Konstruksi. Ketiga kategori ini berkontribusi sebesar 73,17% dalam pembentukan PDRB Kepulauan Riau tahun 2021. Dari ketiga kategori tersebut, kontribusi kategori Industri Pengolahan masih yang terbesar, yaitu diatas 30%. Besarnya sumbangan kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kepulauan Riau menunjukkan ekonomi Kepulauan Riau fokus pada industrialisasi.

**Tabel 2.47. Peranan PDRB Kepulauan Riau Menurut Kategori
Tahun 2016-2021 (Persen)**

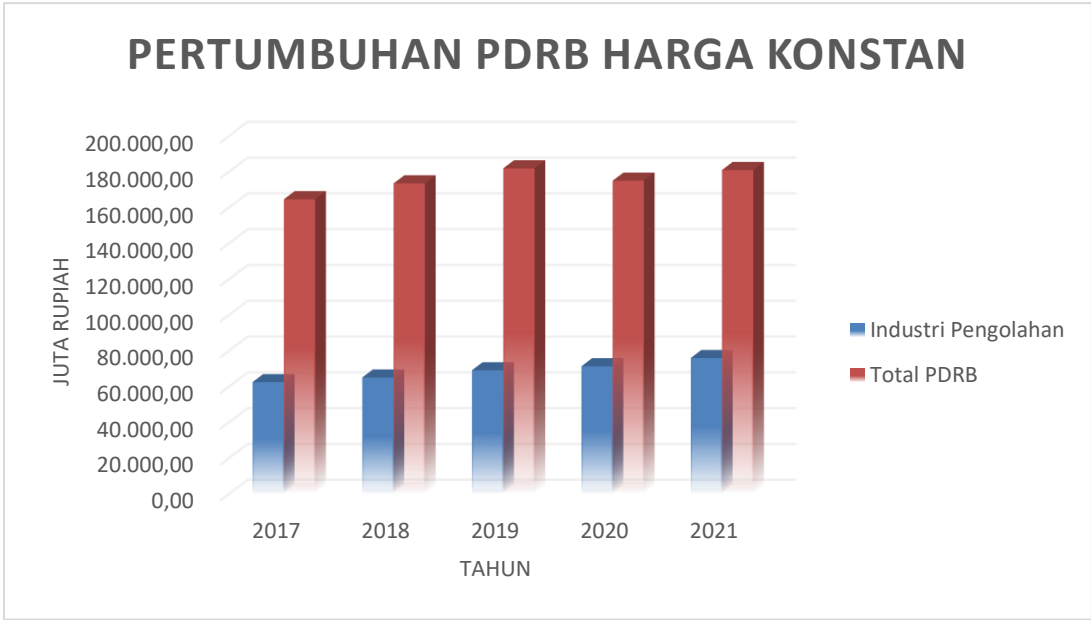
Kategori	Lapangan Usaha	Nilai					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	3,58	3,51	3,26	3,07	3,17	3,07
B	Pertambangan dan Penggalian	15,29	14,08	14,13	13,06	11,17	12,59
C	Industri Pengolahan	37,43	37,07	36,89	37,62	41,65	42,03
D	Pengad aan Listrik, Gas	1,14	1,18	1,06	1,03	1,02	0,99
E	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	17,98	18,19	18,74	19,52	19,40	19,29
G	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	8,2	8,63	8,87	9,08	8,48	8,15
H	Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,28	2,07	2,70	1,62	1,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,01	2,22	2,24	2,32	1,33	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,84	1,97	2,02	2,09	2,55	2,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	2,75	2,73	2,72	2,75	2,61
L	Real Estate	1,45	1,5	1,39	1,33	1,26	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0,01	0	0	0
O	Adminiastrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,60	2,57	2,54	2,89	2,43

Kategori	Lapangan Usaha	Nilai					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	1,36	1,50	1,49	1,44	1,53	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,93	0,90	0,86	0,90	0,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,45	0,47	0,53	0,50	0,17	0,16
Total		100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

2.1.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

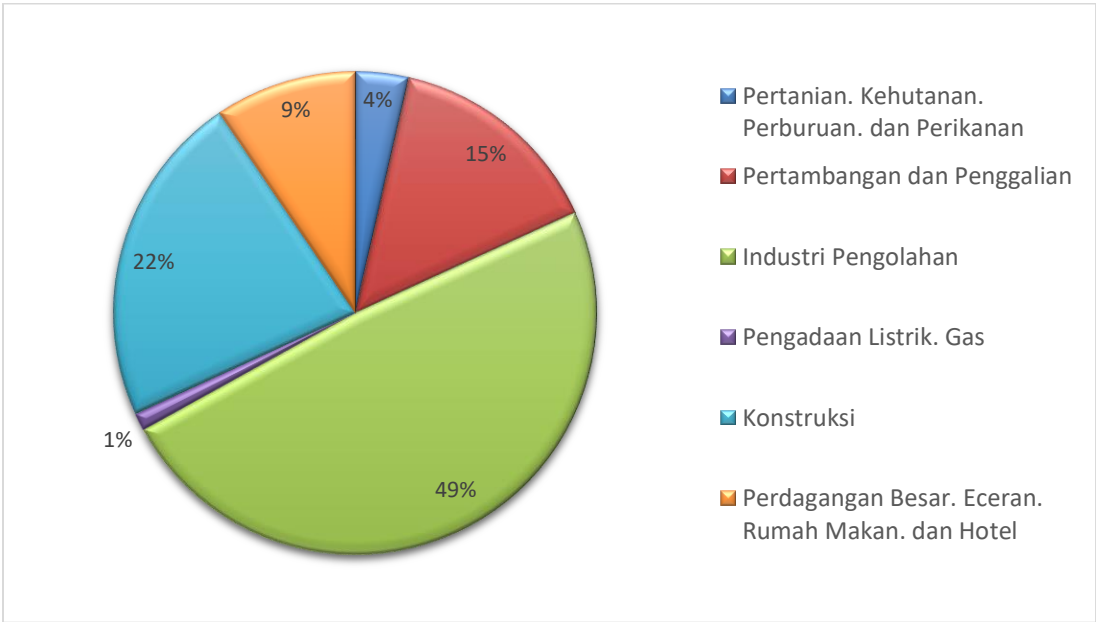
2.1.5.1 Kontribusi Sektor Industri



Gambar 2.6. Perkembangan Pertumbuhan PDRB dan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2017-2021

Rata-rata dalam periode 2017-2021 sektor industri pengolahan tanpa migas menunjukkan pertumbuhan positif sekitar 4,3% per tahun. Nilai ini lebih tinggi dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Kepulauan Riau, yakni sekitar 2,3% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh pesat di Kepulauan Riau.

**Gambar 2.7. Grafik Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB
Tahun 2021**



Jika dilihat kontribusinya di tahun 2021, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor utama penggerak perekonomian daerah dengan kontribusi PDRB paling besar, yaitu sekitar 49%. Sektor lain yang juga turut berperan besar terhadap perekonomian daerah oleh sektor konstruksi dan pertambangan dengan kontribusi masing-masing sebesar 22% dan 15%.

2.1.5.2 Unit Usaha Industri (Besar, Sedang)

Industri pengolahan/manufaktur merupakan salah satu sektor dominan dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Kepulauan Riau. Peranan pada PDRB dengan migas menurut harga berlaku mencapai 47,70 persen, turun sedikit dibanding tahun lalu yaitu sebesar 47,88 persen. Data perusahaan industri pembentuk PDRB di sektor industri pengolahan/manufaktur dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.48. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten							
1	Karimun	16	16	16	6,626	6,579	3,521

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
2	Bintan	20	17	19	6,562	6,154	6,547
3	Natuna	2	2	3	42	45	121
4	Lingga	7	7	6	283	280	242
5	Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-
Kota							
6	Batam	407	367	492	125,882	122,331	135,448
7	Tanjungpinang	17	17	18	1,049	1,059	1,220
	Kepulauan Riau	469	425	554	140,444	136,448	147,099

Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang ProvinsiKepulauan Riau 2022

Kekuatan industri Provinsi Kepulauan Riau bertumpu di Kota Batam yaitu sebesar 88 persen dari total Industri Besar Sedang provinsi Kepulauan Riau.

2.1.5.3 Ekspor dan Impor Produk Industri

Ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 lebih banyak didominasi oleh ekspor yang berasal dari komoditi mesin/peralatan listrik.

Tabel 2.49. Jumlah Ekspor Non Migas Tahun 2021

No.	Kelompok Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Persentase
1	Bahan Bakar Mineral	4,674,918,297.77	29.22
2	Mesin/Peralatan Listrik	4,606,512,565.59	28.80
3	Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik	1,291,965,180.75	8.08
4	Minyak dan Lemak Hewan/Nabati	1,176,294,966.19	7.35
5	Berbagai Produk Kimia	683,100,307.12	4.27
6	Benda-Benda dari Besi dan baja	843,494,001.32	5.27
7	Kokoa	281,238,997.48	1.76
8	Kapal Laut	118,645,666.46	0.74
9	Plastik dan Barang-Barang dari Plastik	271,787,937.63	1.70
10	Perangkat Optik	248,898,502.73	1.56
11	Lainnya	1,800,239,657.30	11.25
Jumlah		15,997,096,080.34	100%

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka 2022

**Tabel 2.50. Volume dan Nilai Impor Menurut Jenis Komoditas
Tahun 2020-2021**

Jenis Komoditas	Volume Impor (ton)		Nilai CIF (US \$)	
	2020	2021	2020	2021
Mesin/peralatan listrik	89.815,07	100.357,24	3.659.142.919	3.659.142.919

Jenis Komoditas	Volume Impor (ton)		Nilai CIF (US \$)	
	2020	2021	2020	2021
Bahan bakar mineral	4.543.390,63	4.989.813,65	1.699.117.390	1.699.117.390
Benda-benda dari besi dan baja	151.353,98	129.421,92	1.563.360.487	1.563.360.487
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	499.008,55	301.240,30	918.457.135	918.457.135
Besi dan Baja	601.859,28	405.518,31	474.686.285	468.917,757
Kapal laut	523.630,521	161.202,085	433.164,140	236.938,509
Kokoa	58.942,235	101.399,622	146,268,656	239.432,245
Perangkat Optik	33.632,59	33.632,59	163.311.143	163.311.143
Timah	31.847,06	31.847,06	80.358.019	80.358.019
Berbagai produk kimia	31.847,063	18.225,145	80.358,019	75.712,414
Lainnya	821.462,677	1.253,840,979	1.395.841.577	1.967,143,672
Jumlah	7.675,726,164	7.783,336,148	11.263,689,521	14.427,672,528

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka 2022

Selama periode 2021 nilai impor barang ke Provinsi Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan *cost insurance freight* (CIF) mengalami kenaikan yaitu dari 11,26 miliar dolar AS selama 2020 menjadi 14,43 miliar dolar AS pada 2021. Komoditi impor terbesar adalah bahan bakar mineral dengan nilai sebesar 4.989.813,65 ton pada 2021.

2.2 Sumber Daya Industri

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, universitas, balai latihan kerja serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51. Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2020

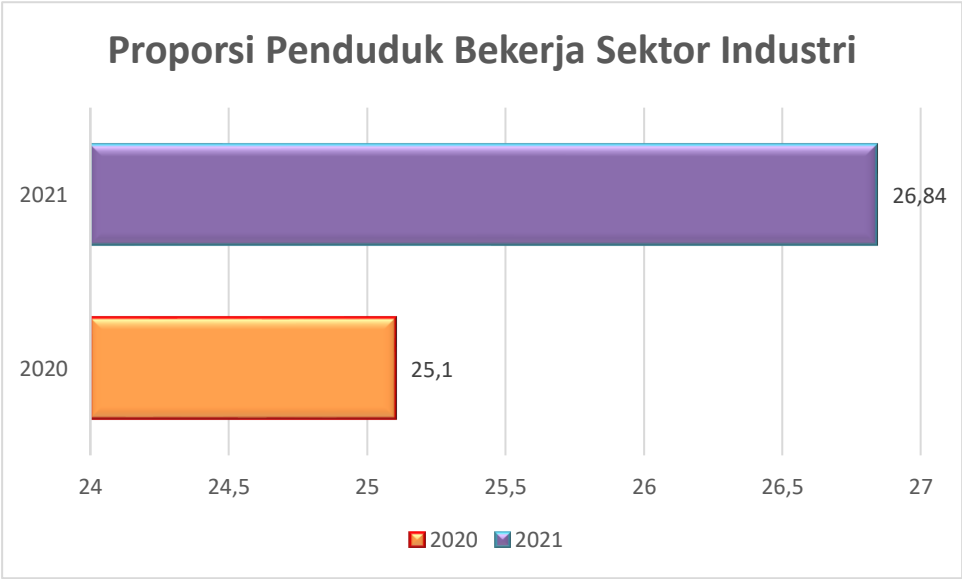
No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2020
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	136.448 orang
2	Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku:	
	a. Perikanan tangkap dan budidaya (ton)	310.051 ton*
	b. Kelapa (ton)	11,78 ton
	Karet (ton)	5,43 ton
3	Pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan sebagai bahan baku:	

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2020
	a. Gas (ton)	7.241 ton
	b. minyak (ton)	1.418 ton
4	Lembaga Pendidikan	
	b. Pendidikan Tinggi	
	Jumlah (unit pendidikan)	35 unit
	Kapasitas (orang)	4.417 orang
	c. Sekolah Menengah Kejuruan	
	Jumlah (unit pendidikan)	99 unit
	Kapasitas (orang)	29.236 siswa
5	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan) /cek dlm angka	1 unit
5	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	-
6	Jumlah investasi industri (Rp. Milyar)	106, 600 Milyar

2.2.1 Sumber Daya Manusia Industri

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber manusia yang cukup meliputi tenaga kerja sektor industri, sampai tahun 2021 tercatat sebanyak 136.448 orang pekerja yang bekerja di sektor industri.

Gambar 2.8. Proporsi Penduduk Sektor Industri Tahun 2020 – 2021



2.2.2 Sumberdaya Alam Bahan Baku Industri

2.2.2.1 Produksi Komoditas dan Cadangan Sumber Daya Alam

Produksi komoditas sumber daya alam di Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.52 sampai dengan Tabel 2.66. Pada tabel ini disajikan data sumber daya

perikanan dan sumber daya agrikultur dari produksi per Kabupaten/kota se-
Provinsi Kepri.

**Tabel 2.52. Data Historis Produksi Komoditas Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau pada 2017 – 2020**

Wilayah	Perikanan Tangkap (Ton)			
	2020	2019	2018	2017
Karimun	52.521,00	59.176,00	16.783,00	59.176,00
Bintan	47.703,00	55.640,00	20.903,00	5.991,00
Natuna	120.589,00	46.818,00	13.082,00	4.653,00
Lingga	34.265,00	44138	13.663,00	8.196,00
Kepulauan Anambas	21.119,00	32.221,00	14.363,00	7.043,00
Batam	38.397,00	4.176,00	17.058,00	2.708,00
Tanjungpinang	17,583.00	10.640,00	5.088,00	24.126,00
Kepulauan Riau	332.176,00	252.80 9,00	100.940,00	111.893,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Wilayah	Perikanan Budidaya (Ton)		
	2019	2018	2017
Karimun	9.232,00	1540	4.223,00
Bintan	5.273,00	2.735,00	4.762,00
Natuna	254	2265	5820
Lingga	367	2005	41
Kepulauan Anambas	2.028,00	3464	3765
Batam	15.999,00	2.055,00	15.648,00
Tanjungpinang	42	761	60945
Kepulauan Riau	33.19 5,00	14.825,00	95.204,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

**Tabel 2.53. Data Historis Produksi Komoditas Rumput laut Kepulauan
Riau dalam 4 Tahun Terakhir**

Wilayah	Rumput laut (Ton)			
	2020	2019	2018	2017
Karimun	1.651	2.213	2.413	1 .981
Bintan	0	0	0	0
Natuna	20	14	478	5.808
Lingga	6	1	0	0
Kepulauan Anambas	12	1	0	2.113
Batam	2.407	2.582	613	2.6 42
Tanjungpinang	0	0	0	0
Kepulauan Riau	4.095	4.8 11	3.504	12.5 44

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.54. Data Historis Produksi Komoditas Hasil Perkebunan Kelapa, Sagu dan Gambir Kepulauan Riau pada 2018-2021

Wilayah	Kelapa Dalam (Ton)			Sagu (Ton)				Gambir (Ton)		
	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Karimun	3.336	3.355	740	1.949,00	2.076,5	2.076,5	683	302	302	236,3
Bintan	3.968	3.991	1.470	-	-	-	-	-	-	-
Natuna	11.406	11.411	6.210	423,50	258	258	9	-	-	-
Lingga	2.971	2.909	1.310	3.258,00	3.276,5	3.293,5	2.586	26	27	88
Kepulauan Anambas	9.763	9.763	1.460	268,00	237	237	86	-	-	-
Batam	1.080	1.092,25	360	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	91,4	105,4	20	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	32.615	22.873	11.570	5.898,50	5.844	5.865	3.364	328	329	324

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.55. Data Historis Produksi Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao Kepulauan Riau pada 2018-2021

Wilayah	Kelapa Sawit (Ribuan Ton)				Karet (Ribuan Ton)				Kakao (Ribuan Ton)			
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Karimun	195,03	0,04	0,05	0,04	19,1	19,1	22,6	4,00	0,025	0,027	0,028	2
Bintan	3.609,04	1,46	1,46	1,46	3.98	3,99	4,20	1,00	0,008	0,002	0,009	-
Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,24	4,26	4,89	-	-	-	-
Lingga	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	10,27	6,34	3,31	-	-	-	-
Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	2,71	2,75	0,57	-	0,003	0,003	0,1
Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4	0,41	0,17	-	-	-	-
Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,00	-	-	-	-
Kepulauan Riau	3.804,07	1,51	1,51	1,50	39,56	40,74	40,6	13,94	33,50	0,032	0,039	2,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.56. Data Historis Produksi Komoditas Hortikultura Pisang, Rambutan dan Durian Kepulauan Riau dalam 4 Tahun Terakhir

Wilayah	Pisang (Ton)				Rambutan (Ton)				Durian (Ton)				Mangga (Ton)			
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Karimun	2.658,60	3.416	3.327	333	NA	429	20.339	NA	13.135,88	3.416	3.327	2.666	1.449,86	2.247	2.186	351
Bintan	18.449,05	67.720	17.747	1.775	NA	1.185	5.073	NA	548,27	67.720	17.747	1.027	2.133,98	25.605	9.197	241
Natuna	1.107,10	760	981	98	NA	90	742	NA	1.639,45	760	981	95	1.174,27	978	4.921	44
Lingga	1.141,04	692	612	61	NA	395	2.696	NA	4.472,00	692	612	694	6.230,70	1.705	1.016	76
Kepulauan Anambas	380,50	846	960	96	NA	11	43	NA	346,50	846	960	49	84,00	147	1.101	16
Batam	3.152,00	5.730	664	664	NA	572	827	NA	1.668,00	5.730	6.644	191	2.239,00	4.781	12.104	479
Tanjungpinang	352,00	125	216	22	NA	138	175	NA	389,00	125	216	8	804,00	2.407	2.163	96
Kepulauan Riau	27.242,29	78.837	30.487	3049	NA	2.820	29.895	NA	27.138,10	78.837	30.487	2.584	14.115,81	37.870	32.688	1302

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.57. Data Historis Produksi Komoditas Hortikultura Nenas dan Pepaya Kepulauan Riau dalam 4 Tahun Terakhir

Wilayah	Nanas (Ton)				Pepaya (Ton)			
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Karimun	NA	5.715	5.146	648	772,20	1.054	935	153.4
Bintan	NA	33.952	16.530	1225.6	5.849,50	12.722	9817	1666.9
Natuna	NA	556	138	14.8	2.400,00	366	207	24
Lingga	NA	22	66	14.3	84,85	51	127	12
Kepulauan Anambas	NA	58	57	6.4	141,35	252	112	5
Batam	NA	140	425	14.8	2.646,00	2.647	5760	203.1
Tanjungpinang	NA	96	61	27.2	1.071,00	2.583	1420	137
Kepulauan Riau	NA	40.540	22.423	1.951.1	12.964,90	19.675	18378	2190

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022, 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.58. Data Historis Produksi Komoditas Pertanian Kepulauan Riau dalam 3 Tahun Terakhir

Wilayah	Ubi Kayu (Ton)		
	2020	2019	2018
Karimun	2.138,09	1.908,403	2.512,83
Bintan	4.356,28	3.456	3.727,97
Natuna	2.627,13	2.363,055	2.871,17
Lingga	1.498,42	589,628	1.000,58
Kepulauan Anambas	520,71	422,81	792,98
Batam	7.632,12	8.580,48	9.065,76
Tanjungpinang	175,52	99,27	419,12
Kepulauan Riau	18.948,27	17.419,65	20.390,42

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2021, 2020, dan 2019

Tabel 2.59. Data Rata-Rata Produksi Komoditas Hortikultura Provinsi Kepri Secara Keseluruhan dalam 3 Tahun Terakhir

Komoditas	Produksi (Ton)
Alpukat	229,9
Belimbing	217,5
Duku/Langsar	445,3
Durian	3.555,8
Jambu Air	592,6
Jambu Biji/Guava	576

Komoditas	Produksi (Ton)
Jeruk Besar	49,9
Jeruk Siam/Keprok	471,2
Mangga	3787
Manggis	139,9
Markisa/Konyal	2,1
Melinjo	376,4
Nangka/Cempedak	5.818
Nanas	4054
Pepaya	1.967,5
Pisang	7.883,7
Rambutan	282
Salak	731,9
Sawo	2.455,2
Sirsak	773,4
Sukun	2.918,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2021, 2020, dan 2019

Komoditas-komoditas yang dihasilkan dari sektor agrikultur dari komoditas hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan, namun ada dari beberapa komoditas-komoditas tersebut yang hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi karena dipengaruhi karakteristik komoditas dan pengaruh musim, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan terhadap komoditas hortikultura yang perlu didorong untuk dikembangkan dalam skala industri.

Tabel 2.60. Pohon industri agrikultur potensial (sampai bahan setengah jadi) komoditas RIPIN di Kepulauan Riau

No.	Hasil Agro	Produk turunan
1	Rumput laut	Gracillaria sp dan Gellidium sp → agar-agar Eucheuma sp → karagenan, biostimulant Sargassum sp dan Turbinaria sp → alginate
2	Ikan	Ikan kaleng, ikan beku, ikan fillet, ikan asap, ikan pindang, ikan asin, ikan kering, tepung ikan, minyak ikan, ekstrak ikan, kecap ikan, pakan ternak, kulit samak, gelatin, kerajinan tulang
3	Karet	Kayu, lateks pekat, crumb rubber, sheet

No.	Hasil Agro	Produk turunan
4	Kakao	Cangkang dan pulp, cocoa mass/liquor, lemak cokelat
5	Tanaman herbal	Bumbu, obat, kosmetik, ekstrak, senyawaan khusus

a) Migas dan Batubara

Tabel 2.61. Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Minyak Bumi (Barrel/tahun)				Gas Alam (MMBTU/Tahun)			
	2017	2016	2015	2020	2017	2016	2015	2020
Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-
Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-
Natuna	4.773.443	5.653.721	4.885	15.721.000	52.291.612	60.954.889	68.235.322	159.484.000
Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Anambas	-	-	3.040	1.992.000			27.443	86.296.080
Batam	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	4.773.443	5.653.721	7.925	17.713.000	52.291.612	60.954.889	68.262.765	245.780.080

Sumber: Sekertariat Daerah Bagian Migas

Produksi migas Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan. Produk-produk industri pengolahan dari sektor migas ditunjukkan pada Tabel 2.62

Tabel 2.62. Pohon industri migas potensial

No.	Hasil Migas	Produk turunan
1	Minyak mentah	BBM, petrokimia (olefin, parafin, aromatik), aspal
2	Gas alam	LNG, metanol, <i>gas-to-liquid</i> , etilen, amonia, asam format, asetilen

b) **Bahan Galian Logam**

Tabel 2.63. Bahan Galian Logam Provinsi Kepulauan Riau 2020

Wilayah	Bauksit	Timah	Bijih Besi
Cadangan Kepulauan Riau	181 juta ton	11 juta m ³	√
Lokasi Cadangan			
Karimun	√	√	
Bintan	√		
Natuna			√
Lingga	√	√	√
Kepulauan Anambas			
Batam			
Tanjungpinang	√		

Bahan Galian Logam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan. Produk-produk industri pengolahan dari sektor pertambangan bahan galian logam ditunjukkan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64. Pohon industri pertambangan logam potensial di Kepulauan Riau

No	Hasil Tambang	Produk turunan
1	Bauksit	Alumina → aluminium
2	Timah	Ingot timah, timah solder, billet, logam mineral ikutan timah, slag
3	Bijih besi	Sponge iron, pig iron, baja, ferronikel

Tabel 2.65. Bahan Galian Non-logam Provinsi Kepulauan Riau 2020

Wilayah	Batu Granit	Pasir Darat	Pasir Laut	Pasir Kuarsa
Kepulauan Riau	873 juta m ³	40 juta ton	7,2 juta ton	190.800.000 ton
Lokasi Cadangan				
Karimun	√	√	√	
Bintan	√	√		
Natuna				306.466,224 ton

Wilayah	Batu Granit	Pasir Darat	Pasir Laut	Pasir Kuarsa
Lingga	√			143.100.000 ton
Kepulauan Anambas				47.700.000 ton
Batam				
Tanjungpinang				

Bahan Galian Bukan Logam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan. Produk-produk industri pengolahan dari sektor pertambangan bahan galian bukan logam ditunjukkan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66. Pohon industri pertambangan non-logam potensial di Kepulauan Riau

No	Hasil Tambang	Produk turunan
1	Batu granit	Bahan konstruksi
2	Pasir Kuarsa	Gelas/kaca, keramik, semen, beton, keramik, komponen photovoltaic, bata, genteng
3	Pasir darat	Bahan konstruksi, bata, genteng
4	Pasir laut	Bahan konstruksi, bata, genteng

2.2.2.2 Potensi Komoditas Sumber Daya Alam yang Belum Termanfaatkan

a. Sektor Pertanian

Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Karimun. Tanaman perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah bruto sektor Pertanian. Peranan tanaman pangan dari sektor pertanian ini naik dari 19,53 persen di tahun 2017 menjadi 23,20 persen di tahun 2020.

Pembangunan industri atau pabrik pengolahan produk pangan untuk memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional dan luar negeri memiliki peluang yang sangat besar terkait dengan trend saat ini sebagai makanan oleh-oleh (kue/cake), keripik yang bisa didistribusikan ke luar daerah kabupaten/ kota setempat. Di sektor pertanian hortikultura Provinsi Kepulauan Riau memiliki lahan area yang belum dimanfaatkan sebesar 83,6%.

Potensi Kawasan Free Trade Zone sebagai Pasar Komoditi Pertanian, Kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dapat menjadi potensi pasar bagi berkembangnya Kabupaten Lingga sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Kebutuhan pasar internasional yang tinggi, yaitu di Singapura yang membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura per hari, Indonesia hanya mengekspor 200 ton per hari, atau dengan kata lain hanya bisa memasok 6% dari total kebutuhan mereka.

b. Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi yang besar terutama tanaman karet, kelapa, dan cengkeh. Nilai produksi karet yang dihasilkan adalah 9.240.000 Kg. Komoditas kelapa berproduksi sebanyak 16.060.000 Kg/th. Komoditas cengkeh berproduksi sebanyak 16.040.500 Kg/th. Pertumbuhan nilai tambah bruto perkebunan mengalami penurunan dari 4,13 persen di tahun 2017 menjadi -6,15 persen di tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,02 persen per tahun.

Selain itu juga pengembangan tanaman Sagu, khususnya di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. dapat diperkirakan hasil per hektar per tahun adalah 7 - 11 ton aci sagu kering.

Berdasarkan potensi sumber daya alam dan ketersediaan infrastruktur pendukung, peluang pengembangan industri adalah dengan mendirikan perusahaan pengolahan hasil tanaman perkebunan seperti pengolahan karet, cengkeh dan lada, kelapa untuk santan dan pabrik pengolahan gambir, sagu dan lada yang lebih modern dengan fasilitas teknologi yang bagus.

Peluang pasar yang ada antara lain, ketersediaan hasil perkebunan yang bagus dengan ciri khas potensi setiap kota/kabupaten bisa dipasarkan pada lingkungan domestik maupun ekspor serta pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, dan

sebagai sumber bahan baku pengolahan industri perkebunan di kota/kabupaten Kepulauan Riau ataupun di wilayah lain.

c. Sektor Peternakan

Sepanjang periode 2017-2021, sektor Peternakan mengalami peningkatan pertumbuhan nilai tambah dari 8,73 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 12,23 persen di tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,80 persen per tahun. Sektor peternakan ini memiliki peluang pasar untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan negara tetangga, Singapura.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*).

- ✓ Kawasan agribisnis diprioritaskan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat.
- ✓ Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*.
- ✓ Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga (Pulau Bakung ditetapkan sebagai pulau karantina Sapi), Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, untuk ternak babi diarahkan ke Pulau Bulan. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Sektor Perikanan

Sumber Daya Perikanan

Secara garis besar ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis (tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri dan sebagainya), kelompok sumber daya ikan demersal (kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dsb), kelompok sumber daya ikan karang (kerapu, baronang, napoleon, dsb), kelompok sumber daya moluska (cumi-cumi, sotong, dsb), dan kelompok sumber daya krustase (kepiting, rajungan), dan kelompok sumber daya udang.

Perikanan Tangkap

Potensi sumber daya ikan laut di Laut Cina Selatan diperkirakan sebesar 1.143.341 ton/tahun. Wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi ikan sebesar 304.038,11 ton/tahun meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53,802.34 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 106.025.30 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 115.982,16 ton/tahun, ikan karang sejumlah 17.562.29 ton/tahun, lainnya (cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/tahun (*data dari BPS tahun 2018*).

Budidaya Laut

Terdapat kurang lebih 455.7799 ha areal laut, berpotensi untuk pengembangan marikultur, terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir dan 401.1079 ha untuk marikultur lepas pantai yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota (*data dari BPS tahun 2018*).

Budidaya Air Payau dan Tawar

Dengan luas daratan 1.059.511 ha, Provinsi kepulauan Riau memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 ha dan 819 ha, dan menyebar hampir di semua Kabupaten/Kota.

Potensi pembangunan industri di sektor perikanan, antara lain:

- ✓ Industri bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut dalam dan wisata bahari dan potensi *mangrove* dan terumbu karang.
- ✓ Industri budi daya air laut: rumput laut, ikan dan biota laut serta komoditi hasil budidaya perikanan (bandeng dan nila laut, kakap putih, kerapu, bawal bintang).

- ✓ Industri budi daya air payau: budidaya udang (vannamei dan windu).
 - ✓ Industri Budi daya air tawar: ikan lele nila, gurami, mujair dan ikan air tawar lainnya.
 - ✓ Pembangunan Industri Kembangan diantaranya budidaya jaring apung, kolam, usaha pengolahan perikanan yang dilakukan secara terpadu, pengolahan kitin kitosan.
- Peluang pasar yang ada, antara lain:
- ✓ Meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong, dan China.
 - ✓ Produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak.
 - ✓ Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan dan tempat kuliner baik local maupun eskpor Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong, dan Cina. Potensi pasar yang tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budi daya laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Diantaranya, ikan Kerapu, Bawal bintang dan Kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri (Vietnam, Thailand, Iepang dan Korea).

e. Sektor Kelautan

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 96% lautan dan 4% daratan dengan panjang garis pantai 2367.6 km. Dari potensi ini dapat dikembangkan industri berbasis potensi kelautan dan perikanan. Peluang pasar yang muncul dari potensi pasar ini adalah produk dan jasa marikultur dan wisata bahari.

Ekosistem terumbu karang, pantai dan pulau kecil, pantai yang tinggi. Beberapa lokasi terumbu karang yang indah, dan jenis-jenis ikan karang dengan bentuk dan warna yang menarik. diantaranya yaitu, Natuna Bagian Selatan (Selat Lampa) tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna Bagian Utara (Teluk Buton) tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek, Natuna Bagian Timur tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna Bagian Timur Laut. Dari potensi ini dapat dikembangkan industri wisata bahari, dengan prioritas kawasan yaitu: Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Industri bahari ini meliputi kawasan wisata dengan kategori

rekreasi pantai, yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

f. Sektor Kehutanan

Berbagai jenis tumbuhan hutan seperti kayu, rotan serta hutan pantai antara lain, berbagai jenis rumput, pohon berkayu; antara lain rumput gerinting, ipomoea pescaprae, berbagai jenis pandan, ketapang, baringtonia, nyamplung, waru laut, cemara udang, dan aneka palem. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, 97.280 ha, tersebar di Kabupaten Bintan (20.330 ha), Kabupaten Karimun (8.580 ha), Kabupaten Lingga (31.970 ha), Kabupaten Anambas (3.650), Kabupaten Natuna (12.260 ha), dan Kota Batam (20.490 ha). Luas kawasan hutan produksi di Provinsi Kepulauan Riau adalah 274.630 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 117.520 Ha, Kawasan Hutan Produksi Tetap sebesar 75.430 Ha dan Kawasan hutan Produksi Konversi seluas 81.680 Ha (*data dari BPS tahun 2020*).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kehutanan, dengan komoditas yang dapat dikembangkan antara lain yaitu kayu, rotan, dan kulit kayu yang dapat diolah menjadi *plywood*, *block-board*, *veneer*, *lumber-core*, kayu gergajian dan poliester. Potensi-potensi ini kemudian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal yang belum terpenuhi.

g. Sektor Pertambangan, Batuan, dan Logam

Pengembangan kawasan industri/pertambangan seluas kurang lebih 1.899 Ha di Galang Batang, Kabupaten Bintan.

Potensi cadangan bahan tambang batuan dan logam Kepulauan Riau meliputi:

1. Bauksit dengan total cadangan 15.880.000 ton terdapat di Pulau Bintan dan Tanjungpinang. Tambang bauksit terdapat di pulau Bintan (Riau). Bauksit merupakan sisa dari deposit bauksit yang tersebar di Kecamatan Bintan Timur. Bahan galian ini telah lama dieksploitasi sejak zaman penjajah Belanda seperti perusahaan NV. Nibem. Saat ini bauksit yang ada (sekitar 10.000.000) dikelola oleh PT Aneka Tambang, Tbk., sekitar 3.835.500 ton merupakan endapan yang belum dieksploitasi, terutama di Kecamatan Bintan Utara, Kab. Kepulauan Riau, Kundur, Kabupaten Karimun.

2. Timah dengan jumlah cadangan mencapai 11.360.500 m³ terdapat di Pulau Karimun. Di perairan Kabupaten Karimun dan perairan Kabupaten Lingga 200.000 ton,
3. Granit dengan total cadangan mencapai 858.384.000 m³ terdapat di Pulau Karimun dan Pulau Bintan.
4. Pasir darat dengan total Cadangan mencapai 39.826.400 ton terdapat di Pulau Karimun dan Pulau Bintan.

h. Sektor Migas

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi minyak dan gas bumi tersebar di Laut Natuna Bagian Barat dan Laut Natuna Bagian Timur Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Potensi cadangan minyak di Provinsi Kepulauan Riau ini sebesar 108,84 MMSTB (juta Standart Tank Barrel) dan gas bumi sebesar 50,27 TSCF (*Trilion Standard Cubic Feet*), cadangan minyak dan gas bumi tersebut terbukti dan potensial.

Luas Wilayah Kerja Migas Provinsi Kepri sebesar 76,40431 km² dari 19 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah diizinkan sampai tahun 2012. Untuk pipa distribusi di Pulau Batam, Perusahaan Gas Negara (PGN) telah membangun pipa distribusi sepanjang 59,364 km melalui Panaran – Kawasan Industri Batamindo - Kawasan Industri Panbill – Batu Ampar - Batam Center dan Kabil. Pelanggan gas di Pulau Batam sampai tahun 2011 sebanyak 98 pelanggan yang terdiri dari yaitu industri sebanyak 23 pelanggan, rumah tangga 56 pelanggan dan komersil 19 pelanggan dengan jumlah pasokan yang tersedia sebesar 67,96 BBTUD. Potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagian sudah dieksploitasi di kawasan lepas pantai Kabupaten Kep. Anambas sedangkan potensi di Kabupaten Natuna (sekitar Pulau Natuna, Laut Cina Selatan) masih tahap eksploitasi.

Kabupaten Natuna khususnya memiliki cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan secara. Ladang gas di Utara dan Selatan Kepulauan Natuna diperkirakan memiliki 222 triliun kaki kubik gas alam, dan baru sekitar 46 triliun yang dapat dieksplorasi. Sejak ditemukannya ladang minyak dan gas di Natuna, selain Pertamina, perusahaan lainnya termasuk Exxon Mobil, Premier Oil dan Conoco. Kabupaten Anambas juga memiliki sumber minyak dan gas yang signifikan, begitu juga dengan sumber daya alam lainnya. Pulau Matak adalah

basis utama eksplorasi dan berfungsi sebagai basis untuk perusahaan Conoco Philips dan Primer Oil. Cadangan minyak di bawah laut mencapai 298,81 *million barrel oil* (MMBO), sementara cadangan gas alam sebanyak 55,3 *trillion square cubic feet* (TSCF) terdapat di Kabupaten Natuna.

Di kepulauan Riau terdapat sarana penimbunan migas berfungsi sebagai sarana penyimpanan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) dan migas ke lembaga penyalur seperti SPBU, APMS, AMT, SPDN dan industri. meliputi:

- Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdapat di Pulau Sambu, Kabil Kota Batam dan Kijang Kabupaten Bintan.
- Terminal Migas di Tanjung Uban, Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Pulau Matak dan Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peluang Pembangunan Industri Skala Besar yang dapat di kembangkan berdasarkan potensi sumber daya alam sektor migas ini antara lain:

- Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai
- Jasa Pengoperasian, Transportasi dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (*operating and maintenance service*)

Kepulauan Riau mempunyai potensi gas alam 7,96 TSCF, minyak bumi 4155,67 MMSTB panas bumi hanya di satu lokasi (25 MWe), serta air 949 MW. Minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu potensi ekonomi dan kekayaan alam yang sangat potensial di Kepulauan Riau. Perairan Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya Natuna, dikelilingi ladang migas dengan blok-blok eksploitasi seperti petak-petak sawah. Perhitungan kasar besarnya cadangan gas bumi di Blok Natuna Timur mencapai 46 triliun kaki kubik atau trillion cubic feet (TCF). Volume tersebut hampir mencapai sepertiga total cadangan gas bumi di Indonesia yang sebesar 157 TCF sekaligus menjadi cadangan terbesar di Asia-Pasifik.

2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya lain sebagai pendukung industri meliputi lembaga pendidikan, diklat dan litbang. Terdapat satu perguruan tinggi negeri di Kepulauan Riau, yaitu Universitas Maritim Raja Haji (UMRAH). Universitas ini merupakan gabungan dari 2 perguruan tinggi swasta, yaitu

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan Politeknik Negeri Batam, berlokasi di Kota Tanjung Pinang.

2.2.4 Lembaga Uji

Guna mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan, BP Batam membangun sebuah laboratorium pengujian pada 2009 yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor LP-746-IDN yang berlokasi di kawasan Politeknik Negeri Batam. Adapun pendirian laboratorium pengujian ini didasarkan pada kebijakan Uni Eropa (EU) terkait larangan Restriction of The Use of Certain Hazardous Substance (RoHS) terhadap penggunaan 6 bahan berbahaya, dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak. Di samping pengujian scrap yang terkontaminasi, dan pengujian RoHS pada komponen elektronika, serta pendukungnya, Laboratorium Uji BP Batam melayani pengujian limbah industri cair dan padat. Pengujian kepada industri dilakukan Laboratorium Uji BP Batam guna memenuhi ketentuan pengaturan, sehingga para pengguna jasa laboratorium yang berada di Batam tidak lagi mengirimkan sampel ke laboratorium di luar Batam. Adapun jenis sampel yang dapat diuji di Laboratorium Uji BP Batam antara lain:

1. Sampel Cair;
2. Sampel Padat seperti: bijih plastik, plastik, komponen elektronika, dan logam.

Laboratorium Uji BP Batam telah dilengkapi dengan instrumen kimia yang terkalibrasi dengan baik, dan memiliki tim analis yang sudah terlatih untuk melakukan analisis dasar maupun dengan instrumentasi kimia. Instrumen-instrumen kimia tersebut, berupa X-Ray EDX 8000, Hydride Vapor Generator (HVG-I), Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS), UV-Vis Spectrophotometer, Forier Transform Infrared (FTIR), Microwave Digestion, ICP OES Optima 8300, Flow Injection Mercury System (FIMS), Grinding untuk Polimer, dan lainnya.

2.2.5 Pergudangan dan Penyimpanan

Rencana pengembangan pergudangan akan dilakukan di Batam yaitu pengembangan pusat logistik Bandara Hang Nadim dan pergudangan tertutup seluas 390m² dan gudang terbuka seluas 390 m² pada kawasan pengelolaan limbah industri (KPLI-B3) . Pergudangan lainya terletak di dalam Kawasan industri Kota Batam terdiri dari 85 Pergudangan dengan beberapa jenis pergudangan yaitu, *cigarate warehouse, food warehouse, plastick warehouse, nimimart warehose, avian paint warehouse, warehouse of bicycle, empty warehouse.*

Selain itu, pergudangan lainya di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari bidang usaha pergudangan dan penyimpanan. Adapaun letak pergudangannya di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67. Pergudangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha
1	PT ALIMA USAHA SAMUDERA	JL. SULTAN SULAIMAN, KAMPUNG BULANG, RT.001, RW.001,, Kampung Bulang, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Pergudangan Dan Penyimpanan
2	PT Bumindo Nusantara Indonesiaku	Komplek Citra Buana Industrial Park I Blok M No.1, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau	Pergudangan Dan Penyimpanan
3	PT Pt. Nusantara Indo Logistik Batam	KOMPLEK BATU AMPAR INDUSTRIAL ESTATE, JALAN TODAK TYPE A BLOK A15, Batu Merah, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau	Pergudangan Dan Penyimpanan

Sumber: SIINAS, 2022

2.2.6 Pembiayaan Industri

Data Statistik penanaman modal yang disetujui pemerintah terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Realisasi investasi penanaman modal tidak termasuk sektor minyak, asuransi, dan perbankan. Data telah memperhatikan perubahan investasi yang beralih status dan juga pengurangan investasi yang dicabut izin usahanya.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepri (2022), Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepri tahun 2020 – 2021 sebesar 1.043.685,50 ribu US\$ dengan jumlah proyek 2.383 proyek. Sedangkan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepri senilai Rp.9.768.685,70 dengan jumlah proyek sejumlah 5.007. nilai Investasi Kepri menunjukan bahwa PMA yang masih mendominasi Investasi di provinsi Kepri.

2.3. Kawasan Industri

Kawasan Industri di Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Kawasan industri berbasis komoditi (umum).
- b. Kawasan industri berbasis non komoditi (strategis).

a) Kawasan Industri Berbasis Komoditi (Pemanfaatan Umum)

Dalam rangka peningkatan nilai sumberdaya, maka perlu dikembangkan kawasan-kawasan industri yang dapat mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap pakai, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor. Kawasan industri yang terkait dengan pengolahan sumberdaya secara umum terletak tidak jauh dari lokasi sumberdaya bahan bakunya. Selain industri yang berorientasi pada sumberdaya, terdapat juga industri-industri yang mengambil manfaat dari kedekatannya dan keterbatasan ruang di Singapura. Industri-industri ini cenderung akan berkembang di daerah pesisir untuk mempermudah akses transportasi laut. Dengan demikian pengembangan kegiatan industri ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulauan Riau.

b) Kawasan Industri Non Komoditi (Kawasan Strategis)

Peruntukan industri di Kepulauan Riau tidak bisa terlepas dari/terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan Strategis Nasional dan penetapan kawasan strategis sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2037.

Arahan Pemanfaatan ruang wilayah untuk pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Rencana struktur ruang, rencana pola pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, rencana pola pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana diatur didalam Perda Nomor 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2037.

1. Kawasan strategis nasional yang berada di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang dimaksud diatas terdiri atas: 1). kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 19 (sembilan belas) pulau terkecil terdepan di Kabupaten Natuna (Pulau Semun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro. Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar). Kabupaten Bintan (Pulau Sentut). Kota Batam (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Pulau Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri). Dan di Kabupaten Karimun (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak). 2). Dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
2. Kawasan strategis nasional 19 pulau kecil terdepan di provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi.
3. Kawasan Industri yang terpusat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) yang merupakan Kawasan Strategis Nasional, tahap pengembangan pertama dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan dengan sudut kepentingan ekonomi.

4. Kawasan strategis provinsi merupakan merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi terdiri dari :
- Kawasan strategis provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Istana Kota Piring Pulau Dompok di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di provinsi sebagai *icon* daerah dengan nuansa budaya Melayu;
 - Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;
 - Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan serta perikanan;
 - Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.
5. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi: 1). Peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri meliputi industri besar dan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah. 2). Peningkatan dan

- pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3). Peningkatan dan pengembangan Techno Park sesuai potensi daerah.
6. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan kawasan industri memenuhi: 1). Kawasan industri yang berwawasan lingkungan, 2). Luasan lahan untuk kawasan industri usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam satu hamparan ditetapkan berlandaskan peraturan perundang-undangan. 3). Kawasan industri harus dilengkapi dengan sarana perkantoran, asrama/mess pekerja, sarana olah raga/hiburan/restoran, pasar, klinik, tempat ibadah, fasilitas pergudangan, pengolahan limbah dan jalan lingkungan kawasan.
 7. Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi:
 - a. Pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari.
 - b. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) / masterplan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan
 - c. Zona pemanfaatan dan zona perlindungan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: 1). Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai dan Pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi. 2). Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kepulauan Anambas. 3). Zona perikanan tangkap terdapat hampir di seluruh perairan Kepulauan Anambas. 4). Zona perikanan budidaya, terdiri atas :
 - a). Kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa

Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.

- b). Kawasan budidaya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak, Letung Kecamatan Jemaja dan Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
- c). Kawasan Perikanan Terpadu di Teluk Rambut, Kecamatan Siantan Selatan. 6). Industri pengolahan hasil perikanan terletak di Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Palmatak dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

- 8. Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Lingga meliputi:
 - a. Pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada kegiatan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan;
 - b. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) / masterplan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga;
 - c. Pengembangan pertanian khusus untuk komoditi budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - d. Zona pertanian Kawasan Strategis provinsi di Kabupaten Lingga meliputi Desa Bukit Belah, Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa Kerandin dan Desa Linau;
 - e. Zona kawasan perikanan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan;
 - f. Zona kawasan perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan.
- 9. Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna meliputi :

- a. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) / masterplan Kawasan Strategis provinsi di Kabupaten Natuna;
- b. Pengembangan Kawasan Strategis provinsi di Kabupaten Natuna diarahkan dalam sarana prasarana dan pengembangan serta pengelolaan kawasan sebagai simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan perindustrian terpadu;
- c. Zona kawasan perikanan tangkap terdapat diseluruh perairan Kabupaten Natuna, dan;
- d. Zona simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, perikanan tangkap dan perindustrian terpadu terdapat di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur.

2.3.1 Kawasan Industri di Kota Batam

Di Pulau Batam terdapat 31 kawasan industri yang berada di daerah yang cukup strategis, dengan letak yang geografis yakni berbatasan dengan Singapura dan Malaysia serta terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran sibuk didunia. Industri berat di Batam yang didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam, dan lainnya. Kawasan industri di Pulau Batam tersebar di beberapa lokasi antara lain:

Tabel 2.68. Kawasan Industri di Kota Batam

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Megacipta Industrial Park	8,49	Batu Ampar - Batam
2	Malindo Cipta Perkasa	3,23	Batu Ampar - Batam
3	Union Industrial Park	31,88	Batu Ampar - Batam
4	Citra Buana Centre Park II	7,39	Batu Ampar - Batam
5	Citra Buana Centre Park I	6,68	Seraya - Batam
6	West Point	102,27	Batam Centre - Batam
7	Sekupang Makmur Abadi	30,93	Sekupang - Batam
8	Indah Industrial Park	15,50	Pelita - Batam
9	Bintang Industrial Park	77,02	Batu Ampar - Batam
10	Latrade Industrial Park	54,67	Tanjung Ugang - Batam

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
11	Kara Industrial Park	20,34	Batam Centre - Batam
12	Cammo Industrial Park	16,36	Batam Centre - Batam
13	Hijrah Industrial Estate	7,59	Batam Centre - Batam
14	Puri Industrial Park 2000	35,73	Batam Centre - Batam
15	Nongsa Digital Park	163,34	Nongsa - Batam
16	Executive Industrial Park	20,82	Batam Centre - Batam
17	Citra Buana Industrial Park III	18,88	Batam Centre - Batam
18	Lytech Industrial Park I	5,92	Batam Centre - Batam
19	Sarana Industrial Point	11,72	Batam Centre - Batam
20	Tunas Industrial Estate	54,20	Batam Centre - Batam
21	Kabil Integrated Industrial Park	456,55	Kabil - Batam
22	Wiraraja Industrial Estate	20,00	Kabil, Nongsa - Batam
23	Taiwan International Park	112,96	Kabil - Batam
24	Panbil Industrial Park	74,93	Muka Kuning - Batam
25	Batamindo Industrial Park	318,29	Muka Kuning - Batam
26	Dragon Industrial Park	10,06	Kabil - Batam
27	Horizon Industrial Park	40,43	Tanjung Ugang - Batam
28	Mega Regency Industrial Park	6,07	Batam Centre - Batam
29	Repindo Industrial Estate	5,28	Batu Ampar - Batam
30	BCI Industrial Park	3,67	Batu Ampar - Batam
31	Walakaka	7,43	Batam Centre - Batam

Sumber : Badan Pengusahaan Batam, HKI, 2022

2.3.2 Kawasan Industri di Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan terdapat 2 (dua) Kawasan Industri yang berlokasi di Lobam dan Galang Batang, antara lain:

1. Kawasan industri PT. Bintan Inti Industrial Estate (PT. BIIE) di Lobam seluas 4.251,06 ha,
2. Kawasan Industri PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI) di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Galang Batang seluas 2.333 ha (Data sesuai PP No. 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang).

2.3.3 Kawasan Industri di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun memiliki 1 (satu) Kawasan Industri Maritim yaitu Kawasan Industri PT. Karimun Indojoya Cakrawala (PT. KIC) seluas 1.109,19 ha.

2.4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing Kabupaten/Kota. KPI merupakan lokasi Kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

A. Kawasan Peruntukan Industri di Kota Batam

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Batam terdiri dari empat puluh tiga KPI, KPI terluas berada di KPI Kepala Jeri dengan luas 2024,89 Ha dan masih ada beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kota Batam yang berada dalam zona tunda (*Holding Zone*), Berikut ini adalah KPI yang berada di Kota Batam.

Tabel 2.69. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Batam

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)
1	KPI Batam Kota	296.96
2	KPI Batu Ampar I	427.45
3	KPI Batu Ampar II	54.71
4	KPI Batu Besar I	41.21
5	KPI Batu Besar II	1.60
6	KPI Belakang Sidi	66.72
7	KPI Bengkong	34.21
8	KPI Colek	2.79
9	KPI Dangsi	54.58
10	KPI Galang	337.86
11	KPI Janda Berhias	224.66
12	KPI Kabil I	46.82
13	KPI Kabil II	41.50
14	KPI Kepala Jeri	2024.89
15	KPI Ladi	33.33
16	KPI Lumba I	829.00
17	KPI Lumba II	78.77
18	KPI Melintang	103.90

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)
19	KPI Muka Kuning	555.34
20	KPI Ngenang	474.44
21	KPI Nipah	8.00
22	KPI Nongsa	1476.02
23	KPI Pelita I	15.49
24	KPI Pelita II	8.57
25	KPI Pelita III	8.04
26	KPI Sagulung I	711.94
27	KPI Sagulung II	8.90
28	KPI Sei Langkai I	3.77
29	KPI Sei Langkai II	3.61
30	KPI Sei Pelunggut I	45.63
31	KPI Sei Pelunggut II	50.01
32	KPI Sekupang I	242.50
33	KPI Sekupang II	7.25
34	KPI Selatnenek	20.14
35	KPI Seraya I	7.69
36	KPI Seraya II	2.45
37	KPI Setokok	687.45
38	KPI Tanjung Piayu	74.19
39	KPI Tanjung Sauh	731.57
40	KPI Tanjung Uncang	1315.84
41	KPI Tembesi I	309.86
42	KPI Tembesi II	87.75
43	KPI Tembesi III	38.26
TOTAL		11595.37

Sumber : RTRW Kota Batam No. 3 Tahun 2021

Adapun KPI yang berada dalam Badan Air yang merupakan bagian dari KPI adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.70. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kota Batam
dalam Badan Air (BA)**

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)
1	BA/KPI Janda Berhias	290.93
2	BA/KPI Sekupang I	30.53
3	BA/KPI Sekupang II	7.64
4	BA/KPI Melintang	45.91
5	BA/KPI Tanjung Uncang	241.40
6	BA/KPI Sagulung I	38.01
7	BA/KPI Sei Pelunggut	11.89
8	BA/KPI Ladi	6.64
9	BA/KPI Dangsi	15.01

NO	KPI BATAM	LUAS (HA)
10	BA/KPI Tembesi I	135.12
11	BA/KPI Batu Ampar I	33.17
12	BA/KPI Batu Ampar II	46.47
13	BA/KPI Bengkong	109.24
14	BA/KPI Belakang Sidi	49.31
15	BA/KPI Ngenang	208.66
16	BA/KPI Tanjung Sauh	471.64
17	BA/KPI Nongsa	502.81
18	BA/KPI Batu Besar I	102.71
19	BA/KPI Kepala Jeri	1123.84
TOTAL		3470.93

Sumber : RTRW Kota Batam No. 3 Tahun 2021

Beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kota Batam yang masih dalam zona tunda (*Holding Zone*) dan merupakan bagian dari KPI, antara lain :

Tabel 2.71. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kota Batam dalam Zona Tunda (Holding Zone)

NO	KPI BATAM (DALAM HOLDING ZONE)	LUAS (HA)
1	HL/KPI Tanjung Uncang	71.99
2	HL/KPI Sagulung	186.04
3	HL/KPI Setokok	5.38
4	HL/KPI Tanjung Piayu	0.83
5	HL/KPI Galang	87.39
6	HP/KPI Sembulang	1151.54
TOTAL		1503.16

Sumber : RTRW Kota Batam No. 3 Tahun 2021

B. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bintan

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Bintan terdiri dari 13 KPI. KPI di Kabupaten Bintan yang memiliki luas terbesar adalah KPI Lobam dengan luas 3517.95 Ha, dan masih ada beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bintan yang berada dalam zona tunda (*Holding Zone*), Berikut ini adalah KPI yang berada di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.72. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bintan

NO	KPI BINTAN	LUAS (HA)
1	KPI Anak Lobam	589.69
2	KPI Antam - Kijang	41.27
3	KPI Galang Batang	2490.73

NO	KPI BINTAN	LUAS (HA)
4	KPI Gunung Kijang	256.96
5	KPI Lobam	3517.95
6	KPI Maritim Bintan Timur	264.34
7	KPI P. Ngalih	78.05
8	KPI P. Siolong	71.52
9	KPI Pulau Buton	54.91
10	KPI Sungai Enam	1148.37
11	KPI Sungai Lekop	176.92
12	KPI Tanjung Uban	257.79
13	KPI Tembeling	17.25
TOTAL		8965.75

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2020

Beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bintan yang masih dalam zona tunda (*Holding Zone*) dan merupakan bagian dari KPI, antara lain :

Tabel 2.73. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Bintan dalam Zona Tunda (*Holding Zone*)

NO	KPI BINTAN (DALAM HOLDING ZONE)	LUAS (HA)
1	HL/KPI Lobam	6.18
2	HL/KPI Galang Batang	0.95
3	HL/KPI Sungai Lekop	1.06
4	HL/KPI Maritim Bintan Timur	34.21
5	KSA/KPI Maritim Bintan Timur	115.64
TOTAL		158.04

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2020

C. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Karimun terdiri dari dua puluh empat KPI, dengan KPI terluas adalah KPI Kundur Barat I seluas 1463.76 Ha dan masih ada beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun yang berada dalam zona tunda (*Holding Zone*), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.74. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)
1	KPI Karimunanak	497.25
2	KPI Kundur	124.13
3	KPI Kundur Barat I	1463.76
4	KPI Kundur Barat II	502.61

NO	KPI KARIMUN	LUAS (HA)
5	KPI Kundur Barat III	117.84
6	KPI Kundur Barat IV	92.79
7	KPI Merak	38.22
8	KPI Meral	793.96
9	KPI Meral Barat I	863.09
10	KPI Meral Barat II	143.49
11	KPI Meral Barat III	288.59
12	KPI Meral Barat IV	338.90
13	KPI P. Anak Babi	10.51
14	KPI P. Babi	16.99
15	KPI P. Buru	139.08
16	KPI P. Durian Besar	17.17
17	KPI P. Durian Kecil	214.95
18	KPI P. Gunungpapan	493.42
19	KPI P. Lumut	83.57
20	KPI P. Parit	688.26
21	KPI P. Tulang	232.49
22	KPI P. Ungar	22.02
23	KPI Tebing I	225.15
24	KPI Tebing II	230.65
TOTAL		7638.89

Sumber : RTRW Kabupaten Karimun No. 3 Tahun 2021

Adapun KPI yang berada dalam Badan Air yang merupakan bagian dari KPI adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Karimun dalam Badan Air (BA)

NO	KPI KARIMUN (DALAM BADAN AIR)	LUAS (HA)
1	BA/KPI Meral	304.36
2	BA/KPI Meral Barat II	280.29
3	BA/KPI Meral Barat IV	10.72
4	BA/KPI P. Asam	209.18
TOTAL		804.54

Sumber : RTRW Kabupaten Karimun No. 3 Tahun 2021

Beberapa Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun yang masih dalam zona tunda (*Holding Zone*) dan merupakan bagian dari KPI, antara lain :

**Tabel 2.76. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Karimun
dalam Zona Tunda (*Holding Zone*)**

NO	KPI KARIMUN (DALAM <i>HOLDING ZONE</i>)	LUAS (HA)
1	HL/KPI Karimun anak	326.26
2	HL/KPI Meral Barat III	3.68
3	HL/KPI Tebing I	9.32
4	HL/KPI Tebing II	154.14
5	HP/KPI P. Asam	119.79
6	HPT/KPI P. Asam	200.42
TOTAL		813.61

Sumber : RTRW Kabupaten Karimun No. 3 Tahun 2021

D. Kawasan Peruntukan Industri di Kota Tanjungpinang

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Tanjungpinang terdiri dari sepuluh KPI yang terletak menyebar di Kota Tanjungpinang. KPI yang terluas di Kota Tanjungpinang adalah KPI Dompok Darat dengan luas 420.48 Ha. Berikut ini adalah Tabel KPI di Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.77. Kawasan Peruntukan Industri di Kota Tanjungpinang

NO	KPI TANJUNGPINANG	LUAS (HA)
1	KPI Air Raja	301.13
2	KPI Dompok Darat	420.48
3	KPI Kampung Bugis I	11.94
4	KPI Kampung Bugis II	1.28
5	KPI Kampung Bugis III	1.00
6	KPI Kampung Bulang I	2.27
7	KPI Prendjak	3.86
8	KPI Daeng Marewa	1.99
9	KPI Sungai Jang	4.42
10	KPI Tanjung Lanjut	2.39
TOTAL		750.76

Sumber : RDTR Kota Tanjung No. 3 Tahun 2018

E. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Natuna

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Natuna tersebar di beberapa daerah. Adapun jumlah KPI terdiri dari sepuluh KPI dengan KPI terluas adalah KPI Bunguran Utara I seluas 1.781,90 Ha. Berikut ini KPI di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.78. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Natuna

NO	KPI NATUNA	LUAS (HA)
1	KPI Bunguran Utara I	1781.90
2	KPI Bunguran Selatan	557.34
3	KPI Serasan	0.94
4	KPI Midai	1.63
5	KPI Subi	0.31
6	KPI SIKM Pulau Tiga	0.75
7	KPI Bunguran Batubi	0.44
8	KPI Bunguran Utara II	1.67
9	KPI Bunguran Timur Laut I	0.65
10	KPI Bunguran Timur Laut II	3.08
TOTAL		2339.24

Sumber : RTRW Kabupaten Natuna No. 18 Tahun 2021.

F. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Anambas terdiri dari Enam KPI yang tersebar di beberapa lokasi. KPI yang terluas adalah Siantan dengan luas 1129.07 Ha dan KPI Jemaja-Sebrong seluas 316,53 Ha. Berikut ini adalah tabel KPI di Kabupaten Anambas.

Tabel 2.79. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Anambas

NO	KPI ANAMBAS	LUAS (HA)
1	KPI Matak I	80.88
2	KPI Matak II	392.74
3	KPI Mubur	2.57
4	KPI Siantan	1129.07
5	KPI Jemaja-Sebrong	316.53
6	KPI Jemaja Utara	143,95
TOTAL		2065.74

Sumber : Kompilasi dari RTRW Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2017 dan RTRW Kabupaten Anambas No. 3 Tahun 2013

G. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lingga

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Lingga terletak pada dua Pulau yang terpisah. Adapun KPI dan luasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.80. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lingga

NO	KPI LINGGA	LUAS (HA)
1	KPI Marok Tua	219.43
2	KPI Sungai Tenam	163.84
TOTAL		383.27

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2017

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Sektor Industri di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sebagaimana telah diuraikan, sektor ini adalah penyumbang terbesar pada PDRB Kepulauan Riau, yaitu lebih dari 39 persen. Selain kontribusinya pada PDRB sektor ini juga memegang peranan strategis untuk liberalisasi ekonomi regional, baik dalam payung ASEAN yang telah memberlakukan *Asean Economic Community* (MEA/AEC) dan isu-isu liberalisasi lainnya, termasuk Batam-Bintan-Karimun sebagai FTZ (Free Trade Zone).

Penguatan sektor industri ini dengan melalui penguatan perencanaannya menjadi sangat strategis dan penting agar Kepulauan Riau mampu memanfaatkan secara optimal potensi sumberdayanya untuk kepentingan ekonomi daerah dan masyarakat. Untuk itu Kepulauan Riau harus memiliki Visi dan Misi yang kuat dalam pembangunan industri ini, dan harus sejalan dan sinergi dengan pembangunan daerah dan pembangunan industri nasional.

3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai arahan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2021 – 2026 Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Pencapaian visi tersebut dijabarkan dilakukan dengan menjalankan 5 Misi meliputi :

- Misi 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim. Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
- Misi 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Beorientasi Pelayanan.

- Misi 3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
- Misi 4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- Misi 5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Besarnya perhatian Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan industri ditandai dengan banyaknya Misi yang terkait. Diantara Misi tersebut, yang terkait dengan pengembangan sektor Industri adalah Misi ke-3 yaitu mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa, Misi ke-4 yaitu Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Misi ke-5 yaitu Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Penentuan tujuan pembangunan industri Provinsi Kepulauan Riau yang diarahkan pada :

1. Persebaran Industri ke sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
3. Menguatnya struktur Industri Daerah sehingga menjadi bagian dari kekuatan ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatnya pengawasan mutu dan peningkatan jumlah produksi.
5. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas, lancar dan mantap.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkan-kembangkan industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran dapat merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakikatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan pembangunan industri Provinsi

Kepulauan Riau, secara kuantitatif, sasaran pembangunan industri Kepulauan Riau 2022-2042 per lima tahun ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2043

No.	Sasaran	Tahun				
		2023	2028	2033	2038	2043
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas (%)	6	8,2	9,3	10,4	11,9
2	Kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDRB (%)	39	41	41,45	42	42,45
3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas (Milyar USD)	0,60	1,20	1,25	1,30	1,40
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas (orang)	187.000	280.000	290.000	300.000	310.000
5	Nilai Investasi sektor industri pengolahan non migas					
	a. Penanaman Modal Asing (Milyar US \$)	0,160	0,210	0,260	0,300	0,340
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Triliun)	0,191	0,233	0,276	0,337	0,384

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Untuk mencapai Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau (sebagaimana ditetapkan pada Sub-Bab 3.3 dilakukan dengan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan provinsi dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri. Penyusunan dan penetapan strategi dan program pembangunan industri Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang ditempuh untuk mencapai pembangunan industri adalah sebagai berikut.

1. Mengokohkan Industri Pengolahan di Kepulauan Riau sebagai faktor penggerak (*driving factor*) perekonomian daerah dan nasional;
2. Menghasilkan produk industri yang sesuai dengan keunggulan daerah dan potensi pasar ekspor, terutama untuk memenuhi kebutuhan Singapura, Malaysia, Thailand, dan regional lainnya;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja yang terampil dan kompeten utamanya bagi masyarakat daerah;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
5. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
6. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. Melakukan pembangunan industri hijau;

8. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan kerjasama industri.

4.2 Kriteria Pemilihan Industri Unggulan

Industri pengolahan yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan provinsi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Industri berdasarkan *Past Performance*

Industri berdasarkan *Past Performance*: Industri pengolahan non migas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah:

- a. Nilai output
- b. Pertumbuhan output
- c. Penyerapan tenaga kerja
- d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah

4.2.1.1 Nilai Output

Produksi industri pengolahan dari Kepulauan Riau tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Produksi industri pengolahan di Kep. Riau Tahun 2015-2017
(Miliar Rupiah)

No.	Jenis Industri	2015	2016	2017
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1.792	1.792	1.762
2	Industri Makanan dan Minuman	1.334	1.549	1.706
3	Industri Pengolahan Tembakau	408	422	489
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.747	1.939	1.949
5	Industri Kayu dan Turunannya	971	965	975
6	Industri Kertas dan Turunannya	522	504	587
7	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	488	539	569
8	Industri Karet dan Plastik	3.060	3.033	3.489
9	Industri Barang Galian Bukan Logam	258	269	287
10	Industri Logam Dasar	9.255	9.245	9.460
11	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	39.189	42.235	45.029
12	Industri Mesin dan Perlengkapannya	4.856	5.203	5.549
13	Industri Alat Transportasi	5.467	5.983	5.745
14	Industri Furnitur	1.862	2.028	2.228
15	Industri Pengolahan Lainnya	3.638	4.018	4.489

Sumber: Diolah dari Data BPS Tahun 2018

Dari data produksi tersebut dapat terlihat bahwa industri yang memiliki *past performance* yang baik, yaitu terus mengalami pertumbuhan serta menghasilkan

nilai produksi tinggi adalah Industri Elektronika dan Telematika, Industri Pembangkit Energi, dan Industri Alat Transportasi.

4.2.1.2 **Pertumbuhan Output**

Perdagangan dari berbagai produk hasil industri pengolahan disajikan dalam data perdagangan ekspor dan impor dari Kepulauan Riau. Data perdagangan produk industri pengolahan pada berbagai kelompok industri disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Perdagangan Ekspor Kepulauan Riau (dalam US\$)

No	Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)
1	Industri Alat Angkutan Lainnya	296.024.059	244.861.121	401.648.528	345.326.784	0,109
2	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1.483.282.671	1.589.617.797	1.556.968.816	1.493.351.147	0,003
3	Industri Barang Galian Bukan Logam	25.583.204	9.393.250	18.973.058	8.828.817	-0,049
4	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	176.435.718	157.907.661	238.051.488	348.773.787	0,289
5	Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	121.153	178.685	195.459	80.628	-0,006
6	Industri Furnitur	19.464.825	17.146.717	22.111.013	40.142.608	0,329
7	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	165.469.253	189.314.725	189.630.927	214.662.770	0,093
8	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	898.206	84.688	194.470	83.257	-0,060
9	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	35.481.418	20.123.892	15.939.908	26.091.426	-0,001
10	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	8.365.220	11.093.076	8.267.692	13.181.383	0,222
11	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	1.776.791.551	2.050.336.465	1.993.693.668	2.496.190.816	0,126
12	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	41.972.973	40.830.860	36.022.619	21.507.292	-0,183
13	Industri Logam Dasar	547.125.771	770.874.689	597.997.574	446.559.180	-0,023
14	Industri Makanan	1.373.230.179	1.257.617.550	1.185.575.450	1.258.546.158	-0,027
15	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	664.844.304	573.594.033	519.881.371	578.702.009	-0,039
16	Industri Minuman	820.869	440.408	280.843	406.080	-0,127
17	Industri Pakaian Jadi	101.208.020	138.451.716	136.432.498	134.142.813	0,112
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	749.687	513.763	819.571	398.321	-0,078
19	Industri Pengolahan Lainnya	214.670.667	235.849.334	268.455.876	223.999.790	0,024
20	Industri Pengolahan Tembakau	59.836.270	50.756.264	38.790.248	44.236.467	-0,082
21	Industri Peralatan Listrik	1.582.814.106	1.544.594.810	1.746.645.046	1.886.592.249	0,062
22	Industri Produk dari Batu Bara dan	1.467	-	320	51	-0,920

No	Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)
	Pengilangan Minyak Bumi					
23	Industri Tekstil	2.160.600	2.327.896	2.113.948	10.999.677	1,396

Sumber: Diolah dari Data BPS Tahun 2020

Tabel 4.3 Perdagangan Impor Kepulauan Riau (dalam US\$)

No	Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)
1	Industri Alat Angkutan Lainnya	361.575.758	567.266.012	421.029.778	470.888.022	0,143
2	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	908.022.118	1.336.294.858	1.073.282.335	929.981.453	0,047
3	Industri Barang Galian Bukan Logam	44.296.975	61.320.402	54.971.588	42.026.869	0,015
4	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	443.108.777	483.214.823	673.439.260	492.459.631	0,072
5	Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	393.188	414.739	200.602	441.551	0,247
6	Industri Furnitur	12.410.182	14.235.097	22.342.839	53.459.459	0,703
7	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	408.027.616	392.295.991	480.594.041	515.921.518	0,087
8	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	9.361.872	7.906.605	6.483.753	6.585.959	-0,107
9	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	32.309.098	27.560.740	31.359.009	34.616.995	0,032
10	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	69.422.236	75.776.185	64.192.241	86.658.741	0,096
11	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	1.762.345.351	2.593.305.085	2.154.887.967	2.639.635.879	0,176
12	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	66.985.685	52.596.223	46.591.837	20.642.819	-0,295
13	Industri Logam Dasar	823.715.365	1.107.442.209	1.485.157.209	1.354.234.177	0,199
14	Industri Makanan	68.733.646	81.158.270	99.240.360	84.031.387	0,083
15	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	740.604.915	779.606.129	995.610.999	1.435.289.584	0,257
16	Industri Minuman	8.319.371	9.830.065	7.443.635	4.033.401	-0,173
17	Industri Pakaian Jadi	22.826.554	32.008.408	33.257.131	14.217.579	-0,044
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.091.080	1.966.737	2.269.389	2.931.536	0,129
19	Industri Pengolahan Lainnya	71.277.286	44.628.652	39.754.779	25.455.374	-0,281
20	Industri Pengolahan Tembakau	34.023.890	59.963.710	20.086.307	47.710.221	0,491
21	Industri Peralatan Listrik	887.609.321	1.202.113.910	1.078.608.761	1.261.079.241	0,140
22	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	522.961	269.599	124.020	59.778	-0,514
23	Industri Tekstil	94.918.121	85.693.864	145.025.258	97.743.985	0,090

Sumber: Diolah dari Data BPS Tahun 2020

Pemilihan sektor/sub sektor industri unggulan provinsi Kepulauan Riau juga dapat menggunakan analisis Location Quotient meliputi *Static Location Quotient* (SLQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan analisis *Shift Share* disamping nilai perdagangan Ekspor dan impor serta berdasarkan arahan RIPIN 2015-2035.

a. Static Location Quotient (SLQ)

Metode *Static Location Quotient* (SLQ) dalam kajian ini digunakan untuk mengidentifikasi peranan sektor provinsi terhadap nasional. Dengan menggunakan SLQ dapat diketahui apakah sebuah sektor di suatu provinsi pada suatu tahun tertentu merupakan sektor basis atau bukan. Adapun rumus menghitung SLQ_i (SLQ sektor i) adalah sebagai berikut:

$$SLQ_i = \frac{\frac{v_i}{v}}{\frac{V_i}{V}}$$

Dalam hal ini:

- v_i = PDRB sektor i provinsi
- v = PDRB total provinsi
- V_i = PDB sektor i nasional
- V = PDB total nasional

Kriteria pengambilan keputusan dari hasil perhitungan SLQ tersebut adalah:

1. Jika nilai $SLQ_i > 1$ menunjukkan bahwa sektor i provinsi tergolong sektor basis, atau sektor i provinsi lebih spesialis dibandingkan nasional.
2. Jika nilai $SLQ_i < 1$ menunjukkan bahwa sektor i provinsi tergolong sektor non basis, atau sektor i provinsi kurang spesialis dibandingkan nasional.
3. Jika nilai $SLQ_i = 1$ menunjukkan sektor i provinsi memiliki spesialis yang sama dengan nasional.

Kelebihan analisis SLQ ini antara lain adalah merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu provinsi dibandingkan nasional. Sedangkan kelemahannya adalah analisis SLQ bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu, yang berarti bahwa sektor unggulan tahun ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan di waktu yang akan datang. Demikian sebaliknya, sektor yang belum unggul pada tahun ini mungkin akan menjadi sektor unggulan (menjadi sektor basis) di masa yang akan datang.

b. Dynamic Location Quotient (DLQ)

Kelemahan analisis SLQ dapat diatasi apabila laju pertumbuhan suatu sektor provinsi kajian dapat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut di tingkat nasional. Untuk itu dalam kajian ini ditambahkan metode *Dynamic*

Location Quotient (DLQ). Dalam metode DLQ laju pertumbuhan suatu sektor provinsi relatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut di tingkat nasional relatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dynamic Location Quotient sektor i (DLQ_i) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DLQ_i = \frac{\frac{(1 + g_i)}{(1 + g)}}{\frac{(1 + G_i)}{(1 + G)}}$$

dalam hal ini:

g_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor i provinsi

G_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor i nasional

g = rata-rata laju pertumbuhan PDRB provinsi

G = rata-rata laju pertumbuhan PDB nasional

Kriteria pengambilan keputusan hasil perhitungan DLQ dalam perekonomian diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika $DLQ_i > 1$, berarti potensi perkembangan sektor i provinsi lebih cepat dibandingkan dengan nasional.
2. Jika $DLQ_i = 1$, berarti potensi perkembangan sektor i provinsi sama dengan nasional.
3. Jika $DLQ_i < 1$, berarti potensi perkembangan sektor i provinsi lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

c. Klasifikasi Sektoral atas dasar analisis komparatif SLQ dan DLQ.

Perolehan nilai SLQ dan DLQ dapat dipadukan untuk mengetahui tingkat keunggulan saat ini dan potensi keunggulan masa depan suatu sektor provinsi, dengan empat kemungkinan hasil sebagai berikut:

- A: $SLQ_i < 1$ dan $DLQ_i < 1$
Sektor i bukan merupakan sektor unggulan saat ini dan tidak berpotensi unggulan di masa depan.
- B: $SLQ_i < 1$ dan $DLQ_i > 1$
Sektor i bukan merupakan sektor unggulan saat ini namun berpotensi unggulan di masa depan.
- C: $SLQ_i > 1$ dan $DLQ_i < 1$
Sektor i merupakan sektor unggulan saat ini tetapi tidak berpotensi unggulan di masa depan.
- D: $SLQ_i > 1$ dan $DLQ_i > 1$
Sektor i merupakan sektor unggulan saat ini sekaligus berpotensi unggulan di masa depan.

Analisis SLQ dan DLQ untuk level Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan perekonomian nasional sebagai wilayah referensinya.

Tabel 4.4 Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

KRITERIA	SLQ	
	SLQ≥1	SLQ<1
DLQ≥ 1	SEKTOR UNGGULAN BERPOTENSI UNGGUL DIMASA DEPAN	BUKAN UNGGULAN DAN BERPOTENSI UNGGUL DI MASA DEPAN
	Konstruksi	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
	Industri Pengolahan	– Tanaman Hortikultura
	– Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	– Peternakan
		Industri Pengolahan
		– Industri Makanan dan Minuman
		– Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
		– Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
		– Industri Furnitur
		– Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
		Pengadaan Listrik, Gas
		– Ketenagalistrikan
		– Gas
		Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		– Perdagangan Besar dan Eceran
		– Angkutan Rel
		– Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
		Angkutan Udara
		Informasi dan Komunikasi
		– Jasa Penunjang Keuangan
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
DLQ<1	SEKTOR UNGGULAN TIDAK BERPOTENSI UNGGUL DIMASA DEPAN	BUKAN UNGGULAN DAN TIDAK BERPOTENSI UNGGUL DI MASA DEPAN
	-	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		– Perkebunan
		Pertambangan dan Penggalian
		– Pertambangan Batubara dan Lignit
		– Pertambangan Bijih Logam
		– Pertambangan dan Penggalian Lainnya
		– Industri Batubara dan Pengilangan Migas
		– Pengolahan Tembakau
		– Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
		– Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
		– Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
		– Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
		– Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
		– Industri Barang Galian bukan Logam
		– Industri Logam Dasar
		– Industri Alat Angkutan
		Pengadaan Air

KRITERIA	SLQ	
	SLQ $\geq$ 1	SLQ<1
		– Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
		Transportasi dan Pergudangan
		– Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
		Transportasi dan Pergudangan
		– Angkutan Darat
		Angkutan Laut
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		– Penyediaan Akomodasi
		– Penyediaan Makan Minum
		Jasa Keuangan
		– Bank
		– Asuransi dan Dana Pensiun
		– Jasa Keuangan Lainnya
		Real Estate
		Jasa Perusahaan
		Jasa Pendidikan
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		Jasa lainnya

Sumber : BPS Tahun 2021, Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil Analisis SLQ dan DLQ Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2017 – 2020, sektor unggulan dan berpotensi unggul dimasa depan adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, yang merupakan sektor bukan unggulan dan berpotensi unggul di masa depan dengan nilai SLQ < 1 dan DLQ > 1 adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dan sub sektor tanaman hortilkultura dan peternakan. Sektor lainnya adalah industri pengolahan dengan sub sektor industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri furniture, industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, sektor pengadaan listrik, gas dan sub sektor ketanagalistrikan dan gas, sektor perdagangan besar eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sub sektor perdagangan besar dan eceran, angkutan rel, angkutan sungai danau dan penyebrangan, angkutan udara, sektor informasi dan komunikasi serta sektor administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Karena analisis SLQ bersifat statis maka sektor unggulan tahun ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan di waktu yang akan datang. Demikian sebaliknya, sektor yang belum unggul pada tahun ini mungkin akan menjadi sektor unggulan (menjadi sektor basis) di masa yang akan datang.

d. Shift Share

Shift Share adalah salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi sumber ekonomi dari sisi tenaga kerja atau pendapatan suatu wilayah tertentu. Analisis *Shift Share*

ini menggunakan dua titik periode data untuk menganalisis dari segi pendapatan daerah, yaitu PDRB pada tahun 2016 dan 2020 . *Shift Share* ini berguna untuk melihat perkembangan wilayah terhadap wilayah yang lebih luas misal perkembangan kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengan *Shift Share* dapat diketahui juga perkembangan sektor - sektor dibanding sektor lainnya serta dapat membandingkan laju perekonomian suatu wilayah. Terdapat enam langkah analisis *Shift Share*:

1. Menentukan wilayah yang akan dianalisis.
2. Menentukan indikator kegiatan ekonomi yang akan dianalisis (Pendapatan atau Tenaga Kerja) serta periodenya.
3. Menentukan sektor yang akan dianalisis.
4. Menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi.
5. Menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi.
6. Menghitung komponen pertumbuhan wilayah.

Komponen pertumbuhan wilayah terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Komponen pertumbuhan nasional (PN)

$$PN_{ij} = (Ra) Y_{ij}$$

$$\% PN_{ij} = (PN_{ij}) / Y_{ij}$$

2. Komponen pertumbuhan proporsional (PP)

$$PP_{ij} = (Ri - Ra) Y_{ij}$$

$$\%PP_{ij} =(PP_{ij}) / Y_{ij}$$

3. Komponen Pangsa Wilayah (PPW)

$$PPW_{ij} = (ri-Ri) Y_{ij}$$

$$\%PPW_{ij} = (PPW_{ij}) / Y_{ij}$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat diintrepertasikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Interpretasi Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) Berdasarkan Lapangan Usaha dari PDRB Provinsi Kepri Tahun 2017 – 2020

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Diferential Shift	KETERANGAN
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
		a. Tanaman Pangan	-0,06	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	KETERANGAN
			Diferential Shift	
		b. Tanaman Hortikultura	0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
		c. Tanaman Perkebunan	0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
		d. Peternakan	0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	3	Perikanan	0,10	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
B	Pertambangan dan Penggalian		-0,17	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-0,29	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-0,26	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	3	Pertambangan Bijih Logam	0,25	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
C	Industri Pengolahan		-0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-0,14	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	2	Industri Pengolahan Non Migas	0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	3	Industri Makanan dan Minuman	-0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	4	Industri Pengolahan Tembakau	0,10	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	5	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0,17	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	7	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,01	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,12	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	9	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-0,17	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	10	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,18	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	11	Industri Barang Galian bukan Logam	0,09	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	12	Industri Logam Dasar	-0,14	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	13	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	14	Industri Mesin dan Perlengkapan	-0,29	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	KETERANGAN
			Diferential Shift	
	15	Industri Alat Angkutan	0,01	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	16	Industri Furnitur	-0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	17	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
D	Pengadaan Listrik, Gas		0,00	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Ketenagalistrikan	-0,14	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	2	Pengadaan Gas	0,06	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,04	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
F	Konstruksi		-0,01	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-0,20	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
H	Transportasi dan Pergudangan		-0,29	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Angkutan Rel	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	2	Angkutan Darat	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	3	Angkutan Laut	-0,09	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-0,66	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	5	Angkutan Udara	-0,04	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-0,12	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-0,32	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	1	Penyediaan Akomodasi	-0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
	2	Penyediaan Makan Minum	0,22	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
J	Informasi dan Komunikasi		0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	1	Jasa Perantara Keuangan	0,15	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	0,14	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	KETERANGAN
			Diferential Shift	
	4	Jasa Penunjang Keuangan	0,05	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
L	Real Estate		0,10	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
M,N	Jasa Perusahaan		0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		0,09	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
P	Jasa Pendidikan		0,25	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat
R,S, T,U	Jasa lainnya		0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh Cepat

Sumber : BPS Tahun 2021, Hasil Analisis Data

Jika Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) bernilai positif ($KPP > 0$) maka wilayah/daerah berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat. Jika KPP bernilai negatif ($KPP < 0$) maka wilayah/daerah berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat atau sektor/subsektor tersebut mengalami penurunan kinerja/merosot. *Proporsional shift* atau Komponen Pertumbuhan Proporsional (KKP) yang bernilai positif adalah :

- Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
- Subsektor Holtikultura.
- Subsektor Perkebunan.
- Subsektor Peternakan.
- Subsektor Perikanan.
- Sektor Pertambangan dan penggalian Lainnya.
- Subsektor Pertambangan Biji Logam.
- Sektor Industri Pengolahan.
- Subsektor Industri Pengolahan Non Migas.
- Subsektor Industri Pengolahan Tembakau.
- Subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
- Subsektor Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan reproduksi Media Rekaman.
- Subsektor Barang Galian bukan Logam.
- Subsektor Industri Alat Angkutan.
- Sektor Pengadaan Listrik, Gas.
- Subsektor Pengadaan Gas.

- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.
- Sektor Transportasi dan Pergudangan.
- Subsektor Angkutan Rel.
- Subsektor Angkutan Darat.
- Subsektor Penyediaan Makan dan Minum
- Sektor Informasi dan Komunikasi.
- Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.
- Sektor Real Estate.
- Sektor Jasa Perusahaan.
- Sektor Adminitrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- Sektor Jasa Pendidikan.
- Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- Sektor Jasa Lainnya.

Tabel 4.6 Interpretasi Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) Berdasarkan Lapangan Usaha dari PDRB Provinsi Kepri Tahun 2017 – 2020

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Diferential Shift	KETERANGAN
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		(0,17)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,03	Mempunyai Daya Saing
		a. Tanaman Pangan	(0,40)	Tidak Mempunyai Daya Saing
		b. Tanaman Hortikultura	0,08	Mempunyai Daya Saing
		c. Tanaman Perkebunan	(0,05)	Tidak Mempunyai Daya Saing
		d. Peternakan	0,08	Mempunyai Daya Saing
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	(0,22)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	(0,39)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	3	Perikanan	(0,33)	Tidak Mempunyai Daya Saing
B	Pertambangan dan Penggalian		(0,08)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,03	Mempunyai Daya Saing
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	(0,88)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	3	Pertambangan Bijih Logam	(0,49)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	(0,13)	Tidak Mempunyai Daya Saing
C	Industri Pengolahan		0,13	Mempunyai Daya Saing
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	(0,99)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Industri Pengolahan Non Migas	(0,04)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	3	Industri Makanan dan Minuman	(0,14)	Tidak Mempunyai Daya Saing

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	KETERANGAN
			Diferential Shift	
	4	Industri Pengolahan Tembakau	0,17	Mempunyai Daya Saing
	5	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	(0,10)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	(0,06)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	7	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	(0,21)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	(0,36)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	9	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	(0,08)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	10	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	(0,06)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	11	Industri Barang Galian bukan Logam	(0,47)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	12	Industri Logam Dasar	0,44	Mempunyai Daya Saing
	13	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,30	Mempunyai Daya Saing
	14	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,51	Mempunyai Daya Saing
	15	Industri Alat Angkutan	0,01	Mempunyai Daya Saing
	16	Industri Furnitur	0,15	Mempunyai Daya Saing
	17	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	(0,14)	Tidak Mempunyai Daya Saing
D	Pengadaan Listrik, Gas		(0,12)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Ketenagalistrikan	(0,03)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	(0,20)	Tidak Mempunyai Daya Saing
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,02	Mempunyai Daya Saing
F	Konstruksi		(0,03)	Tidak Mempunyai Daya Saing
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		(0,17)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,08	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	(0,39)	Tidak Mempunyai Daya Saing
H	Transportasi dan Pergudangan		(0,85)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Angkutan Rel	(0,62)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Angkutan Darat	(0,51)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	3	Angkutan Laut	0,07	Mempunyai Daya Saing
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	(0,02)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	5	Angkutan Udara	(0,20)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	(0,35)	Tidak Mempunyai Daya Saing
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		(0,17)	Tidak Mempunyai Daya Saing

LAPANGAN USAHA			Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	KETERANGAN
			Diferential Shift	
	1	Penyediaan Akomodasi	(0,38)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Penyediaan Makan Minum	0,09	Mempunyai Daya Saing
J	Informasi dan Komunikasi		(0,10)	Tidak Mempunyai Daya Saing
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		(0,05)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	1	Jasa Perantara Keuangan	(0,18)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	(0,17)	Tidak Mempunyai Daya Saing
	3	Jasa Keuangan Lainnya	0,04	Mempunyai Daya Saing
	4	Jasa Penunjang Keuangan	(0,25)	Tidak Mempunyai Daya Saing
L	Real Estate		(0,72)	Tidak Mempunyai Daya Saing
M,N	Jasa Perusahaan		0,08	Mempunyai Daya Saing
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		(0,09)	Tidak Mempunyai Daya Saing
P	Jasa Pendidikan		(0,31)	Tidak Mempunyai Daya Saing
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		(0,86)	Tidak Mempunyai Daya Saing
R,S, T,U	Jasa lainnya		(0,86)	Tidak Mempunyai Daya Saing

Sumber : BPS Tahun 2021, Hasil Analisis Data

PPW bernilai positif (PPW > 0) pada sektor/subsektor yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) atau berdaya saing, PPW bernilai negatif (PPW < 0) pada sektor/subsektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif / tidak berdaya bersaing. Sektor/subsektor yang berdaya saing adalah sektor/subsektor yang memiliki keunggulan akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regional. Sektor/subsektor yang memiliki keunggulan komparatif di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- Subsektor Pertanian, Penternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.
- Subsektor hortikultura.
- Subsektor Penternakan.
- Subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi.
- Sektor Industri Pengolahan
- Subsektor Industri Pengolahan Tembakau
- Subsektor Industri Logam Dasar.
- Subsektor Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik.
- Subsektor Mesin dan Perlengkapan.
- Subsektor Alat Angkutan.
- Subsektor Furnitur.
- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
- Subsektor Angkutan Laut.
- Subsektor Penyediaan Makan Minum.
- Subsektor Jasa Keuangan Lainnya.

- Sektor Jasa Perusahaan.

4.2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 paling besar terjadi di sektor industri mesin dan perlengkapan ytdl dengan jumlah tenaga kerja sebesar 42.382 jiwa. Secara rinci penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau ditunjukkan pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020**

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Makanan	2.674
2	Minuman	725
3	Pengolahan Tembakau	815
4	Tekstil	77
5	Pakaian Jadi	9.161
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.321
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan sejenisnya	274
8	Kertas dan Barang dari Kertas	1.603
9	Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi	532
10	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	4.677
11	Karet, Barang dari Karet dan plastik	10.683
12	Barang Galian Bukan Logam	7218
13	Logam Dasar	5.630
14	Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	7.207
15	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	42.382
16	Peralatan Listrik	10.290
17	Mesin dan Perlengkapan	4.839
18	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	320
19	Alat angkutan lainnya	18.616

Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

4.2.1.4 Kontribusi Terhadap Ekonomi Daerah

Sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 didominasi oleh industri barang logam, komputer, dan elektronika yang mencapai 27,53% kontribusi pada nilai tambah di industri pengolahan. Industri logam dasar dan alat angkutan adalah jenis industri lain yang juga berkontribusi besar dengan masing-masing 2,69% dan 2,66%. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya, industri barang logam, komputer, dan elektronika serta industri mesin dan perlengkapan

adalah kelompok industri yang pertumbuhan per tahunnya paling cepat, yaitu 8,01% dan 10,67%.

**Tabel 4.8 Profil Masing-Masing Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB
Sektor Industri Pengolahan Tahun 2021**

No.	Kelompok Industri	Nilai Tambah (Rp. Miliar)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan per tahun (%)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,01	NA
2	Industri Makanan dan Minuman	1,539.71	2.03	5.49
3	Industri Pengolahan Tembakau	281.68	0.37	11.84
4	Indusri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,685.08	2.22	-9.87
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	78.84	0.10	-5.27
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	507.85	0.67	-13.19
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	280.54	0.37	-15.19
8	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	359.01	0.47	10.41
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,687.01	2.22	-18.51
10	Inndustri Barang Galian Bukan Logam	138.46	0.18	-12.97
11	Industri Logam Dasar	5,806.11	7.65	-5.13
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	48,329.95	63.65	14.03
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	4,538.41	5.98	1.18
14	Industri Alat Angkutan	5,340.92	7.03	-7.01
15	Industri Furnitur	1,904.36	2.51	7.56
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3,447.50	4.54	-6.51
Total Industri Pengolahan		75925.43	100,00%	6.45

Sumber: BPS, Kepulauan Riau dalam Angka 2021, Data Olahan

Industri unggulan yang ditentukan berdasarkan performa industri yang sudah berjalan selama ini (*past performance*). Berdasarkan data kondisi produksi industri

pengolahan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau saat ini, serta data profil perdagangan produk hasil industri pengolahan, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Industri Unggulan berdasarkan *Past Performance*

No.	Jenis Industri	Nilai Produksi (Miliar Rp.)	Pertumbuhan Produksi Rata- Rata per Tahun	Nilai Ekspor (Miliar Rp.)	Potensi Pengurangan Nilai Impor (Miliar Rp.)
1	Industri Elektronik dan Telematika	33.971	61%	30.050	23.811
2	Industri Pembangkit Energi	20.585	366%	5.971	4.997
3	Industri Alat Transportasi	7.322	28%	10.981	4.554

Sumber: BPS, Kepulauan Riau dalam Angka 2021, Data Olahan

4.2.1.5 Industri Prioritas Nasional.

Industri Prioritas yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dengan kriteria:

1. Potensi bahan baku daerah untuk Industri Prioritas
2. Pertumbuhan produksi bahan baku Industri Prioritas
3. Pangsa pasar produk Industri Prioritas
4. Nilai tambah Industri Prioritas

**Tabel 4.10 Industri Agrikultur Unggulan
(Komoditas RIPIN) di Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Hasil Agro	Produk turunan
1	Rumput laut	Gracillaria sp dan Gellidium sp → agar-agar Eucheuma sp → karagenan Sargassum sp dan Turbinaria sp → alginat
2	Ikan	Ikan kaleng, ikan beku, ikan fillet, ikan asap, ikan pindang, ikan asin, ikan kering, tepung ikan, minyak ikan, ekstrak ikan, kecap ikan, pakan ternak, kulit samak, gelatin, kerajinan tulang.
3	Karet	Kayu, lateks pekat, crumb rubber, sheet, Karet untuk keperluan umum (sarung tangan, alas kaki, pakaian selam, perahu karet, belt conveyor, dll). Biji karet menjadi resin, varnish minyak cat, dan briket. Karet untuk keperluan kesehatan, otomotif dan elektronik (slang stetoskop, sarung tangan medis, Ban dll).

No.	Hasil Agro	Produk turunan
4	Tanaman herbal	Bumbu, obat, kosmetik, ekstrak, senyawaan khusus

Sumber : RIPIN 2015

**Tabel 4.11 Industri Minyak Bumi dan Gas Alam Unggulan
(Komoditas RIPIN) di Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Hasil Migas	Produk turunan
1	Minyak mentah	BBM, petrokimia (olefin, parafin, aromatik), aspal
2	Gas alam	LNG, metanol, <i>gas-to-liquid</i> , etilen, amonia, asam format, asetilen

Sumber : RIPIN 2015 dan Analisis Data

**Tabel 4.12 Industri Pertambangan Logam Unggulan
(Komoditas RIPIN) di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Hasil Tambang	Produk turunan
1	Bauksit	Alumina → aluminium

Sumber : RIPIN 2015 dan Analisis Data

**Tabel 4.13 Industri pertambangan non-logam Unggulan
(Komoditas RIPIN) di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Hasil Tambang	Produk turunan
1	Batu granit	Bahan konstruksi
2	Pasir Kuarsa	Gelas/kaca, keramik, semen, beton, keramik, komponen photovoltaic, bata, genteng

Sumber : RIPIN 2015 dan Analisis Data

4.2.1.6 Industri Unggulan dari Bangkitan Daerah.

Industri Unggulan Provinsi adalah industri di luar kelompok Industri Prioritas dan mengolah sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah :

1. Potensi bahan baku unggulan provinsi.
2. Pertumbuhan produksi bahan baku unggulan provinsi.

3. Pangsa pasar produk olahan.
4. Nilai tambah industri dan potensi nilai tambah industri.
5. Kriteria VRIO, meliputi :
 - Nilai (*value*): apakah hal ini menentukan keunggulan bersaing daerah?
 - Kelangkaan (*rareness*): apakah kompetitor lain memiliki ini sumberdaya ini?
 - Kemampuan dapat ditiru (*imitability*): apakah mahal atau sulit untuk ditiru daerah lain?
 - Organisasi: apakah daerah ini telah atau akan diorganisir untuk mengeksploitasi sumberdayanya?
6. Usulan berupa masukan dan saran di Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri

**Tabel 4.14 Industri produk industri unggulan dari bangkitan daerah
Di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Hasil Agro	Produk turunan
1	Pepaya	Olahan papaya mentah (enzim papain), enzim papain kasar (crude papain), papain bersih cair (refined liquid papain), papain bersih (refined papain) dalam bentuk tepung, manisan basah, manisan kering, sukade, sirup papaya sebagai obat gagal ginjal, cocktail, selai/jam, pengolahan biji papaya menjadi obat, pengolahan daun papaya menjadi serbuk (obat pelancar ASI/antioksidan), pengolahan akar dan getah papaya menjadi obat.
2	Cengkeh	Minyak cengkeh dari daun untuk farmasi dan kosmetik, ampas cengkeh untuk pupuk, tepung cengkeh dari bunga, minyak cengkeh dari bunga, euganol dari minyak cengkeh, iso euganol dari euganol.
3	Lada	Minyak lada, Oleoresin, Mikrokapsulasi Oleoresin, lada butiran/Bumbu, obat, kosmetik, bahan obat (farmasi).
4	Sagu	Tepung Sagu, Serampin (ampas sagu) menjadi kompos, kulit batang menjadi kertas, partikel board, pellet/bricket arang. Pati tepung sagu menjadi bioetanol, siklodestrin, sirup glukosa, bioplastik, lem untuk plywood, staplek, asam sitrat, asam laktat, Mi instan/Bihun dari Sagu.
5	Nanas	Nanas kaleng, sirup nanas, jus nanas, keripik buah nanas, selai nanas, puree nanas, dodol nanas, kain dari serat nanas,

No	Hasil Agro	Produk turunan
		nata de pina, manisan buah, kulit nanas menjadi pakan ternak/kompos, enzim bromelin dari batang nanas.
6	Ubi Kayu	Tepung tapioca, mutiara/pearl tapioca, serpihan/flakes tapioca, Tepung Gaplek (manioc flour), pati tepung tapioca menjadi asam sitrat (citric acid), dextrin, glukosa, sorbitol, fruktosa, etanol, asam asetat.
7	Gambir	Gambir murni, katekin dan tanin, produk biofarmaka (tablet diare, obat kumur, gel dan krim, pasta gigi, sabun, gel luka dan luka bakar). Kosmetika. Biopepsida. Penyamak Kulit. Pewarna Alami. Peluruh dan Anti Karat Logam. Antioksidan dan Anti Mikroorganisme. Kompos dari sisa olahan gambir dan pakan ternak.
8	Kelapa	Selai Kelapa, High/Low fat Dessicated Coconut, Kopra Putih, VCO, CCO (minyak mentah), santan kemasan, sabun (NaOH), Biodiesel, HCO (Healthy Coconuts Oil), Nata de Coco, Nata de Coco, Cuka Kelapa, Alkohol, Kecap Kelapa, Sirup Kelapa, Hydro Coco, Cocopeat, Cocofiber, Bricket Kelapa, karbon aktif. Bungkil Kelapa menjadi Pakan Ternak dan Pakan Ikan.

4.2.1.7 Industri Unggulan Menunjang Visi Misi Pembangunan Daerah.

Industri yang menunjang visi misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

4.3 Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan provinsi, berikut adalah industri unggulan provinsi yang terpilih :

4.3.1 Industri Unggulan Provinsi dan Pentahapan Pembangunan Industri

Pembangunan industri unggulan provinsi dilakukan secara bertahap. Pentahapan ini dilakukan dalam periode 2023-2028, 2029-2033 dan 2034-2043. Tahapan pembangunan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.15 Industri Unggulan Provinsi dan Pentahapan
Pembangunan Industri**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika		
		Kabel Serat Optik, Semi Konduktor, Komponen Elektronik, <i>Smart Home Devices and Appliance</i>	Semi Konduktor, <i>Smart Home Devices and Appliance</i>	Semi Konduktor Kendaraan Listrik, <i>Smart Home Devices and Appliance</i>
		Industri Komputer		
		<i>Computer Appliance</i>	<i>Computer</i>	<i>Computer</i>
		Industri Peralatan Komunikasi		
		<i>Smart Phone Devices and Appliance</i>	<i>Smart Phone Devices and Appliance</i>	<i>Smart Phone Devices and Appliance</i>
2	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan		
		Kabel Listrik, Akumulator Listrik, Motor/generator listrik, Baterai, Industri Pengubah Tegangan, Arus dan Pengontrol Tegangan, Solar Cell	Kabel Listrik, Akumulator Listrik, Motor/generator listrik, Baterai, Industri Pengubah Tegangan, Arus dan Pengontrol Tegangan, Solar Cell	Kabel Listrik, Akumulator Listrik, Motor/generator listrik, Baterai, Industri Pengubah Tegangan, Arus dan Pengontrol Tegangan, Solar Cell
3	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan		
		Industri Kapal Laut dan Galangan Kapal (Perawatan dan Perbaikan Kapal), Industri Komponen Kapal (Mekanikal dan Elektronik)	Industri Kapal Laut dan Galangan Kapal (Perawatan dan Perbaikan Kapal), Industri Komponen Kapal (Mekanikal dan Elektronik)	Industri Kapal Laut dan Galangan Kapal (Perawatan dan Perbaikan Kapal), Industri Komponen Kapal (Mekanikal dan Elektronik)
		Industri Kedirgantaraan		
		Industri <i>Ground Effect Aerodinamic Aircraft (Hover Ground)</i> , Industri Komponen Pesawat Terbang, Industri <i>MRO (Maintenance, Repair and Overhoul)</i> untuk Industri	Industri <i>Ground Effect Aerodinamic Aircraft (Wings and Ground Effect)</i> , Industri Komponen Pesawat Terbang, Industri <i>MRO (Maintenance, Repair and Overhoul)</i> untuk	Industri <i>Ground Effect Aerodinamic Aircraft (Wings and Ground Effect)</i> , Industri Komponen Pesawat Terbang, Industri <i>MRO (Maintenance, Repair and Overhoul)</i> untuk Industri

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Pesawat Udara (<i>Aerospace</i>)	Industri Pesawat Udara (<i>Aerospace</i>)	Pesawat Udara (<i>Aerospace</i>)
		Industri Kendaraan Bermotor		
		Industri Komponen / SparePart Otomotif	Industri Komponen / SparePart Otomotif	Industri Komponen / SparePart Otomotif
4	Industri Pangan	Industri Pengolahan Dan Pengwetan Ikan Dan Biota Air (KBLI 102)		
		Kolagen, Ikan Beku, Ikan Fillet, Ikan Kaleng, Surimi, Alginat, Nata de Seewed, Alkali Treated Cerragenant (ATC), Semi Refined Cerragenant, T e h Rumput Laut	Kolagen, Tepung Ikan, Ikan Fillet, Albumin, Hidrolisat Protein, Khitin dan Khitosan dr Kulit Crustasea, Gelatin, Semi Refined Cerragenant, Kappa Cerragenant	Kolagen, Albumin, Hidrolisat Protein, Kalsium dari Tulang Ikan, Glucosamine Hidroksiapatit dari Tulang Ikan, Agar, Semi Refined Cerragenant, Kappa Cerragenant, Iota Keragenan, produk pangan dengan bahan tambahan keragenan
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		CCO, VCO, Nata Decoco, Minyak goreng kelapa,	Minyak Makan Sehat (<i>Healthy Coconuts Oil</i>),	Minyak Makan Sehat (<i>Healthy Coconuts Oil</i>),
		Industri Produk Masak dari Kelapa (KBLI 10773)		
		High Fat / Low Fat Desiccated Coconut, Cuka Kelapa, Selai Kelapa, santan dalam kemasan, Kecap Kelapa	Cuka Kelapa, santan bubuk, santan dalam kemasan	Santan Bubuk, Cuka Kelapa, santan dalam kemasan
		Industri Kopra (KBLI 10421)		
		Kopra, Kopra Putih	Kopra Putih	Kopra Putih
		Industri Minuman Ringan (KBLI 11040)		
		Minuman Isotonik, Industri Minuman Kesehatan (Katevit) dari Gambir T e h Gambir	Minuman Isotonik, Industri Minuman Kesehatan (Katevit) dari Gambir, T e h Gambir	-

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Industri Sirup (KBLI 10723)		
		Sirup Kelapa	Sirup Kelapa	-
		Industri Tepung		
		Sagu Kasar, Sagu Kering, Tepung Sagu, Pati Tepung Sagu, Tapioka, Tepung Mocaf	Sagu Kasar, Sagu Kering, Tepung Sagu, Pati Tepung Sagu, Tepung Cengkeh dari Bunga, Tapioka, Maltodextrin dari Ubi Kayu, Tepung Mocaf	Tepung Cengkeh dari Bunga, Maltodextrin dari Ubi Kayu
		Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya (KBLI 10740)		
		Mi Sagu, Bihun dan Soun	Mi Sagu, Bihun dan Soun	Mi Sagu, Bihun dan Soun
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng (KBLI 10320)		
		Selai Nanas, Sirup Nanas, Jus/Puree Nanas, Keripik Buah Nanas, Nata de Pina, Manisan Buah, Buah Nanas Kalengan, Industri Manisan Pepaya, Sukade, Keripik Pepaya, Cocktail, Selai/Jam Pepaya	Selai Nanas, Sirup Nanas, Jus/Puree Nanas, Manisan Buah, Buah Nanas Kalengan, Olahan Pepaya Mentah (Enzim Papain Kasar), Cocktail, Selai/Jam Pepaya	Buah Nanas Kalengan, Olahan Pepaya Mentah (Enzim Papain Kasar), Cocktail
		Industri Makanan Sereal (KBLI 10615)		
		-	-	Serpihan (Flakes), Makanan Ringan
		Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan (KBLI 10772)		
		Lada Hitam, Lada Putih, Lada Hijau Kering,	Lada Hitam, Lada Putih, Lada Hijau Kering, Lada Hijau dalam Larutan Garam, Dehydrated Salted Green Paper	Lada Hijau Kering Beku, Lada Hijau Beku dan Lada Hijau Kemasan Kaleng

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
5	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 210)		
		Suplemen, Food Suplemen dari Mikro Alga, Pengolahan Obat dari Daun Cengkeh, Minyak Cengkeh menjadi Balsem, Obat Kumur Antiseptik, Lotion dan Gel Luka Bakar, Industri Gel dan Krim untuk Anti Jerawat, Ekstrak Gambir	Suplemen, Food Suplemen dari Mikro Alga, Pengolahan Obat dari Daun Cengkeh, Minyak Cengkeh menjadi Balsem, Pengolahan Daun Pepaya menjadi serbuk Pelancar ASI / AntiOksidan, Gel Luka, Ekstrak Gambir	Suplemen, Food Suplemen dari Mikro Alga, Obat Anti Inflamasi, Minyak Cengkeh menjadi Balsem, Pengolahan Daun Pepaya menjadi serbuk Pelancar ASI / AntiOksidan dan Produk Turunan lainnya, Industri Kapsul Haemorrhoid, Industri Tablet Anti Diare, Lotion dan Gel Luka Bakar, Gel Luka Permukaan, Pati Sagu Termodifikasi menjadi Siklodestrin
		Minyak Ikan, VCO dan Karbon Aktif (Activated Carbon) untuk produk Farmasi/Obat-obatan	Lektin dari Alga Merah, Minyak Ikan, VCO dan Karbon Aktif (Activated Carbon) untuk produk Farmasi/Obat-obatan, Minyak Cengkeh menjadi bahan sediaan Farmasi (eugenol), Minyak Lada menjadi sediaan Farmasi (Piperin), Katekin dan Tanin untuk Produk Farmasi,	Lektin dari Alga Merah, Industri Antibiotik dari Euganol Minyak Cengkeh menjadi Obat Kumur, Obat Gigi, dan Obat Antiseptik, Minyak Lada menjadi sediaan Farmasi (Piperin), Suplemen Bromelin dari Batang Nanas, Suplemen Papain (Refined Liquid Papain) dari Pepaya
		Industri Barang Kimia Lainnya (KBLI 202)		
		Pembuatan Sabun (NaOH), Minyak Kelapa Non Konsumsi utk bahan baku Kosmetik	Pembuatan Sabun (NaOH), Minyak Cengkeh menjadi Bahan Cream Kosmetik, VCO dan Minyak Kelapa Non Konsumsi utk bahan baku Kosmetik, Anti Ageing dan Anti Ketombe. Katekin dan	produk medis (bahan implan gigi dan <i>bone substitusion</i>) berbahan dasar Tulang ikan, Produk Kosmetik dan Farmasi berbahan dasar Kelapa Dalam, Pasta Gigi

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
			Tanin untuk Produk Kosmetik dari Gambir	
6	Industri Hulu Agro	Industri Serat Sabut Kelapa (KBLI 32905)		
		Coco Pot, Cocopeat untuk Media Tanam, Cocopeat Brick, Cocofiber, Cocofiber sheet, Cocofiber board	Cocopeat untuk Media Tanam, Cocopeat Brick, Cocofiber sheet, Cocofiber board, , Coco Mest / Coir geotextille	Coco (Coir) fiber Sheet / Coir Sheet, Coco Fiber Board, Coco Fiber Cement Board, Coco Mest / Coir geotextille,
		Industri Furniture Lainnya (KBLI 31009)		
		-	-	Matras sehat dari Sabut Kelapa, Jok Mobil Ramah Lingkungan dari Sabut Kelapa
		Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213)		
		-	Partikel Board dari Pengolahan Kulit Batang Sagu dan Limbah Batang Kelapa	Partikel Board dari Pengolahan Kulit Batang Sagu dan Limbah Batang Kelapa
		Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (KBLI 17099)		
		-	-	Kertas Tulis dan Kertas Cetak siap pakai
		Industri Konsentrat Makanan Hewan (KBLI 10802)		
		Konsentrat Pakan Organik Cair (IPPO)	Konsentrat Pakan Organik Cair (IPPO)	Konsentrat Pakan Organik Cair (IPPO)
		Industri Oleokimia		
		Minyak Atsiri dari Lada dan Cengkeh	Minyak Atsiri dari Lada dan Cengkeh	Oleoresin dan Mikro Kapsulasi Oleoresin Lada
		Industri Kemurgi		
		-	Bioetanol dari limbah Biomass/Seramping)	Bioetanol dari limbah Biomass/Seramping)
		Industri Pakan		
		Tepung Ikan untuk Pakan Ikan, Silase dari Biomass dan Rumput Laut, Suplemen Pakan Ternak dari Rumput	Tepung Ikan untuk Pakan Ikan, Silase dari Biomass dan Rumput Laut, Suplemen Pakan Ternak dari Rumput	Tepung Ikan untuk Pakan Ikan, Silase dari Biomass dan Rumput Laut, Suplemen Pakan Ternak dari Rumput

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Laut, Pakan Teripang, Pelet dari Manioc Ubi Kayu	Laut, Pakan Teripang, Pelet dari Manioc Ubi Kayu	Laut, Pakan Teripang, Pelet dari Manioc Ubi Kayu
7	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri pengolahan lain nya YTDL (KBLI 32909)		
		Briket Arang Kelapa (Coco Briquette)/ BioBricket,	Briket Arang Kelapa (Coco Briquette)/ BioBricket, Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) untuk Filter	Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) kegunaan lainnya
		Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet		
		Karet untuk Keperluan Umum	Karet untuk Keperluan Kesehatan, Otomotif dan Elektronik	Plastik untuk keperluan Umum, Plastik untuk keperluan Kesehatan, Otomotif dan Elektronik, Bioplastik, Sarung Tangan Karet
		Industri Tekstil		
		Serat Sabut Kelapa	Serat Tekstil dari Batang Nenas	Serat Tekstil dari Batang Nenas
8	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (KBLI 17022)		
		kertas kemasan atau kertas untuk industri, produk kertas cetak (karton)	kertas kemasan atau kertas untuk industri	kertas kemasan atau kertas untuk industri
		Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar (KBLI 19214)		
		-	Marine Fuel Oil (MFO) dan Solar	Marine Fuel Oil (MFO) dan Solar
		Industri Mesin dan Perlengkapan		
		Industri Mesin Perkapalan. Industri Perlengkapan Mesin/Alat-Alat Perkakas (<i>Industrial Tools</i>), Industri Otomatisasi Proses	Industri Mesin Perkapalan, Industri Perlengkapan Mesin/Alat-Alat Perkakas (<i>Industrial Tools</i>), Industri Otomatisasi Proses Produksi Elektronika	Industri Mesin Perkapalan, Industri Perlengkapan Mesin/Alat-Alat Perkakas (<i>Industrial Tools</i>), Industri Otomatisasi Proses

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Produksi Elektronika dan Pengolahan Pangan.	dan Pengolahan Pangan.	Produksi Elektronika dan Pengolahan Pangan.
		Industri Komponen		
		Industri Komponen dari Karet untuk Keperluan Industri dan Komponen Otomotif, Produk Peluruh Anti Karat dan pelapis logam berbahan dasar gambir. Dock Fender	Ban Vulkanisir, Industri Komponen dari Karet untuk elektrik, elektronik dan pemesian, Bahan AnOrganik (Natrium Chlorida atau Garam Industri, Sodium Silika, Mineral Laut lainnya, Produk Peluruh Anti Karat dan pelapis logam berbahan dasar gambir.	Ban Vulkanisir, Industri Komponen dari Karet untuk elektrik, elektronik dan pemesian, Bahan AnOrganik (Natrium Chlorida atau Garam Industri, Sodium Silika, Mineral Laut lainnya, Produk Perekat (Binding product) Kayu Lapis, Produk Karet Rumah Tangga.
		Jasa Industri		
		Perancangan Pabrik, Jasa Proses Industri, Jasa Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri	Perancangan Pabrik, Jasa Proses Industri, Jasa Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri	Perancangan Pabrik, Jasa Proses Industri, Jasa Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri
9	Industri Kimia Dasar	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer (KBLI 20121)		
		Pupuk Organik Cair (IPPO), Biokomposter, Kompos	Pupuk Organik Cair (IPPO), Biokomposter, Kompos	Pupuk Organik Cair (IPPO), Biokomposter, Kompos
		Industri Pupuk		
		Biostimulant dari Rumput Laut, Pupuk Organik dari Limbah (Biomass)	Biostimulant dari Rumput Laut), Pupuk Organik dari Limbah (Biomass)	Pupuk Tunggal Basis Nitrogen, fosfat, dan Kalium. Pupuk Majemuk, Pupuk Organik dari Limbah (Biomass)
10	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi (KBLI 19291)		
		Pellet Penguat Jalan Aspal (Green Asphalt) dari Limbah Plastik, Biji Plastik	Pellet Penguat Jalan Aspal (Green Asphalt) dari Limbah Plastik	Pellet Penguat Jalan Aspal (Green Asphalt) dari Limbah Plastik

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		Industri Petrokimia Hulu		
		-	-	Metanol, Etilen, Propilen, Ammonia, Benzene, Paraxylene
		Industri Kimia Organik		
		-	-	Kaprolaktam, Asam asetat
		Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik		
		-	-	Nylon, Akrilik
		Industri Karet Alam		
		Lateks Pekat, , Crumb Rubber, Ribbed Smoked Sheet Rubber	Lateks Pekat, Crumb Rubber, Ribbed Smoked Sheet Rubber	Lateks Pekat, Karet, Crumb Rubber, Ribbed Smoked Sheet Rubber
11	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Non Logam	Industri Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302)		
		Kaca Daur Ulang	Kaca Daur Ulang	Kaca Daur Ulang
		Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) (KBLI 24102)		
		Produk dari Logam Daur lainnya	Produk dari Logam Daur lainnya	Produk dari Logam lainnya
		Industri Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301)		
		Logam Daur Ulang	Logam Daur Ulang	Logam Daur Ulang
		Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 242)		
		Alumina Powder, Aluminium Ingot, Carbone Anode, Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina	Alumina Powder, Aluminium Ingot, Carbone Anode, Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina	Alumina Powder, Aluminium Ingot, Carbone Anode, Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina
		Industri Kaca dan Barang dari Kaca (KBLI 231)		
		Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca, kemasan dari kaca, kaca lembaran,	Alat – alat laboratorium dan kesehatan, kaca lembaran, kaca	Alat – alat laboratorium dan kesehatan, kaca lembaran, kaca pengaman dan barang lainnya dari kaca

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		kaca pengaman dan barang lainnya dari kaca	pengaman dan barang lainnya dari kaca	
		Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya (KBLI 2399)		
		Ubin, panel dinding, Bata Ringan Semeted	Ubin, panel dinding, Bata Ringan Semeted dan Calcinated	Ubin, panel dinding, Bata Ringan Semeted dan Calcinated

Sumber : RIPIN 2015

4.4 Program Pembangunan Industri

4.4.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Setelah penetapan sektor unggulan hingga produk industri unggulan terpilih Provinsi Kepulauan Riau di atas serta potensi industri-nya, selanjutnya dari masing-masing produk industri unggulan terpilih tersebut dijabarkan Sasaran, Strategi, Rencana Aksi serta Program Pembangunan Industri.

Program pembangunan industri untuk mengembangkan masing-masing industri unggulan provinsi sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sasaran, strategi dan rencana aksi mencakup seluruh program yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan daerah.

A. Industri Elektronik dan Telematika/ICT

Tabel 4.16 memuat rencana program pembangunan industri elektronika dan telematika/ICT :

Tabel 4.16 Program Industri Elektronik dan Telematika/ICT

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Mengembangkan industri elektronika berbasis digital/ICT yang ramah lingkungan/green product dan hemat energi;	a) Terjaminnya supply bahan baku untuk meningkatkan produksi komponen elektronik dan telematika;	a) Produk elektronika konsumsi mulai dikembangkan ke arah produk berbasis digital/ICT dan ramah lingkungan/ <i>green product</i> serta hemat energi terus dikembangkan
b) Tumbuhnya investasi industri elektronika.	b) Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk industri elektonik, telematika/ICT melalui	
c) Tumbuhnya pusat		

Sasaran		
pelatihan tenaga kerja elektronika. d) Industri elektronik sudah beralih dari OEM (Original Equipment Manufacturer) menjadi ODM (Own Design Manufacturer), yang memiliki nilai tambah. e) Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk industri elektronik, telematika/ICT melalui peningkatan pemanfaatan robotik.	peningkatan pemanfaatan robotik.	menggunakan teknologi nano; b) Berkembangnya Industri komponen berbasis ICT/digital menggunakan teknologi nano. c) Meningkatnya kolaborasi guna memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait untuk mengembangkan industri elektronika yang inovatif. d) Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja elektronika. e) Produk elektronika konsumsi dan komponen elektronika berteknologi nano telah menjadi basis produksi; f) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran industri elektronika; g) Menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menarik untuk tujuan investasi industri elektronika. h) Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk industri elektronik, telematika/ICT melalui peningkatan pemanfaatan robotik.
Strategi		
a) Memperkuat dan mengembangkan klaster elektronika; b) Menumbuhkan dan mengembangkan industri komponen/pendukung berbasis ICT/digital; c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research</i>		

<i>and development;</i> d) Meningkatkan penerapan Standardisasi (SNI) dan <i>safety standard</i>; e) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM Industri elektronik dan telematika/ICT; f) Meningkatkan iklim usaha dan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik; g) Menarik investor asing. h) Meningkatkan implementasi Robotics sebagai mesin otomasi guna meningkatkan produksi dan meningkatkan kecepatan produksi, memperkecil kesalahan pekerja atau <i>Human Error</i> di lapangan.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan klaster (<i>clustering industri</i>) agar dapat tercipta <i>supply chain</i> yang memiliki ketergantungan serta menciptakan iklim untuk berkembangnya sistem inovasi teknologi, b) Meningkatkan nilai tambah inovasi teknologi, melalui pengembangan soft infrastructure yaitu “Batam Techno Park”, yang akan menjembatani menuju industri yang memiliki nilai tambah lebih pada sisi contain design, c) Mengembangkan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno-park) mikro elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT; d) Meningkatkan kemampuan dan peran IKM dalam menghasilkan komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur, alat uji mekanis, kelistrikan	a) Mengembangkan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT; b) Mengembangkan <i>center of excellence</i> industri ICT; c) Fasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika; d) Merintis pengembangan produk-produk elektronika berdaya saing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal); e) Melakukan Pelatihan Tenaga Kerja agar memiliki sertifikasi dan lebih profesional serta kompetitif; f) Pendirian Pusat Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja Industri dengan kompetensi di Industri Elektronika dan Telematika/ICT; g) Meningkatkan pembuatan chips component untuk barang-barang elektronik <i>Smart Home Devices, Smart</i>	a) Mendirikan pabrik <i>foundry</i> penghasil material semi konduktor dengan volume kecil untuk keperluan khusus; b) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang industri elektronika; c) Mengembangkan produk-produk elektronika berdaya saing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal). d) Membangun pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies</i>. e) Mengembangkan desain dan industri produk dan komponen nano-bio elektronika untuk berbagai aplikasi kehidupan, kesehatan, dan hankam f) Memperbarui sistem informasi industri elektronika;

Rencana Aksi		
yang presisi, laboratorium penelitian dan pengembangan, sehingga mampu mensupport kebutuhan industri; e) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi; f) Melakukan promosi investasi dan produk; g) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standard</i> secara wajib; h) Mendorong pembukaan program studi dengan jurusan Manufacture of Electronics, merupakan pembukaan jurusan pembuatan komponen chips utk barang-barang elektronik untuk computer, handphone, mobil listrik, dan lain sebagainya. i) Meningkatkan pembuatan chips component untuk barang-barang elektronik <i>Smart Home Devices, Smart Phone Devices, Computer.</i> j) Meningkatkan pembuatan dan penggunaan robotik untuk industri elektronik, telematika/ICT.	<i>Phone Devices, Computer, Komputer dan mobil listrik.</i> h) Meningkatkan pembuatan dan penggunaan robotik untuk industri elektronik, telematika/ICT.	g) Melaksanakan penanganan masalah aktual industri elektronika; h) Mengembangkan pusat teknologi pembuatan <i>mould and dies.</i> i) Meningkatkan pembuatan chips component untuk barang-barang elektronik <i>Smart Home Devices, Smart Phone Devices, Computer, Komputer dan mobil listrik.</i> j) Meningkatkan pembuatan dan penggunaan robotik untuk industri elektronik, telematika/ICT.
Lokasi pengembangan: Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang		

B. Industri Pembangkit Energi.

Tabel 4.17 memuat rencana program pembangunan industri pembangkit energi:

Tabel 4.17 Program Industri Pembangkit Energi

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pendirian komponen pendukung pembangkit listrik tenaga surya;	a) Mengembangkan industri pembangkit energi berbasis tenaga surya;	a) Pengembangan Produk komponen pembangkit listrik tenaga surya;
b) Mengembangkan industri pembangkit energi berbasis pengolahan limbah dan sampah (<i>circular economy</i>);	b) Mengembangkan industri pembangkit energi berbasis pengolahan limbah dan sampah (<i>circular economy</i>);	b) Meningkatnya kolaborasi guna memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait untuk mengembangkan industri pembangkit energi yang inovatif.
c) Terjaminnya <i>supply</i> bahan baku untuk meningkatkan produksi komponen pembangkit energi;	c) Tumbuhnya investasi industri pembangkit energi.	c) Berkembangnya pusat pelatihan SDM Industri dengan kompetensi pembangkit energi;
d) Pengembangan riset untuk menghasilkan motor/generator listrik yang lebih efisien.	d) Berkembangnya pusat pelatihan SDM Industri dengan kompetensi pembangkit energi;	d) Produk pembangkit energi berteknologi nano telah menjadi basis produksi;
	e) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat;	e) Menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menarik untuk tujuan investasi industri pembangkit energi.
		f) Optimalisasi Pemanfaatan Migas untuk Kebutuhan Sumber Daya Energi Industri Kepulauan Riau.
Strategi		
a) Memperkuat dan mengembangkan klaster pembangkit energi;		
b) Menumbuhkan dan mengembangkan industri pembangkit energi berbasis tenaga surya;		
c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i> ;		
d) Meningkatkan penerapan Standardisasi (SNI) dan <i>safety standard</i> ;		
e) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM Industri;		
f) Meningkatkan iklim usaha dan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik;		

g) Menarik investor asing;
a) Menarik investor asing di bidang industri pembangkit energi;
b) Menyusun potensi alat-alat kelistrikan dalam negeri dengan melihat kebutuhan belanja modal badan usaha milik pemerintah dan swasta atau kebutuhan impor komponen alat-alat kelistrikan dalam negeri untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri dalam pembuatan alat-alat kelistrikan.

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;	a) Pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya (solar cell);	a) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang industri pembangkit energi;
b) Fasilitasi pendirian Kawasan industri yang mengolah daur ulang limbah dan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik;	b) Fasilitasi pendirian industri pembangkit listrik tenaga surya (Solar Cell) dan Battery;	b) Mengembangkan produk-produk pembangkit energi berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal);
c) Pengembangan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien;	c) Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi pengembangan produk solar cell untuk industri dan masyarakat;	c) Memperbarui sistem informasi industri pembangkit energi;
d) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standard</i> secara wajib;	d) Mendorong penggunaan komponen dalam negeri dalam pembuatan alat-alat kelistrikan;	d) Melaksanakan penanganan masalah aktual pembangkit energi;
e) Merintis pengembangan produk-produk pembangkit energi berbasis tenaga surya;	e) Mendorong negara-negara principal pengembang teknologi atau negara pemasok agar menjadikan Kepri sebagai basis supply chain industri alat kelistrikan/pembangkit energi;	e) Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.
f) Menyusun Kebutuhan Impor bahan baku/material pembuatan alat-alat kelistrikan untuk meningkatkan produksi bahan baku/komponen pembangkit energi dalam negeri;	f) Terwujudnya pusat pelatihan vokasi tenaga	

Rencana Aksi		
g) Melakukan upaya negosiasi agar Kepri mendapatkan alokasi gas untuk pengembangan industri baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku;	kerja industri alat kelistrikan/pembangkit energi;	
h) Penyusunan <i>feasibility study</i> /studi kelayakan untuk pemanfaatan gas natuna bagi pembangunan industri di Kepulauan Riau;	g) Melakukan upaya tindak lanjut hasil FS pemanfaatan gas Natuna bagi pembangunan.	
i) Mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga surya (Solar Cell).		
Lokasi pengembangan : Kabupaten Bintan, Kota Batam dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.		

C.Industri Alat Transportasi

Tabel 4.18 memuat rencana program pembangunan industri alat transportasi

Tabel 4.18 Program Industri Alat Transportasi

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Fasilitasi peningkatan industri pemesinan pada industri perkapalan;	a) Memperkuat sub sektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan;	a) Memperkuat sub sektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan;
b) Pendirian industri/pabrik yang mengolah material menjadi komponen kapal;	b) Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti.	b) Terjalinnya kerja sama dengan <i>buyer</i> , <i>supporting</i> dan <i>related industri</i> dalam klaster industri komponen perkapalan,
c) Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar,	c) Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transprtasi;	c) Terbangunnya akses permodalan yang luas,
d) Tercukupinya SDM ahli	d) Mengembangkan design	

Sasaran		
dan tenaga pembina/penyuluh industri komponen perkapalan,	center industri alat transportasi;	d) Terpenuhinya permintaan pasar domestik dan ekspor
e) Terjadi peningkatan kemampuan memenuhi standar SNI dan intenasional	e) Peningkatan akses informasi dan promosi;	e) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal,
f) Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;	f) Meningkatkan diversifikasi pembuatan kapal di Provinsi Kepri untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing (competitiveness);	f) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen pembangkit listrik.
g) Fasilitasi pengembangan pusat logistik bahan baku dan bahan penolong industri perkapalan di Provinsi Kepri untuk meningkatkan daya saing industri kapal nasional dan peningkatan pemanfaatan TKDN untuk industri kapal,	g) Pengembangan pusat logistik bahan baku dan bahan penolong industri perkapalan di Provinsi Kepri untuk meningkatkan daya saing industri kapal nasional dan peningkatan pemanfaatan TKDN untuk industri kapal.	g) Menjadi pemasok kebutuhan produk komponen perkapalan pada skala nasional,
		h) Terbangunnya kemitraan strategis antara pelaku usaha komponen perkapalan dengan perusahaan kapal skala nasional dan internasional.
		i) Terciptanya produk komponen kapal yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional,
		j) Semakin banyak industri komponen kapal menjadi supplier/pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti.
		k) Adanya galangan kapal regional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock

Sasaran		
		yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (World class industri). l) Terjadi peningkatan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. m) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal regional untuk mampu mensupply kebutuhan komponen kapal dalam negeri. n) Terciptanya industri aerospace/dirgantara dalam membangun pesawat terbang propeler yang mampu memenuhi standar dan mutu pesawat terbang internasional o) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen pesawat terbang untuk mampu mensupply

Sasaran		
		kebutuhan komponen pesawat terbang dalam negeri.
Strategi		
a. Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri perkapalan guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing; b. Memperkuat dan mengembangkan klaster industri kapal; c. Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar SNI dan internasional; d. Meningkatkan kompetensi SDM ahli komponen perkapalan dan dirgantara, tenaga penyuluh serta mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM; e. Meningkatkan peran stakeholder terutama UPT berkaitan dengan pengadaan mesin dan teknologi; f. Mengembangkan industri pendukung (industri bahan baku dan komponen kapal/pesawat terbang); g. Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok komponen yang berkualitas dan standar; h. Memperluas akses permodalan dan kerja sama; i. Memperkuat jaringan pemasaran; j. Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base load pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi / <i>docking repair</i> dalam negeri; k. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN); l. Melakukan promosi investasi; m. Melakukan perbaikan iklim usaha. n. Menyusun potensi kebutuhan komponen kapal dalam negeri dengan melihat kebutuhan belanja modal badan usaha milik pemerintah dan swasta atau kebutuhan impor komponen kapal dalam negeri untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri dalam pembuatan kapal maupun perawatan kapal.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) meningkatkan dan mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO 9000, ISO14000, ISO26000) dan Industri Hijau serta spesifikasi teknis dan pedoman tata	a) Meningkatkan dan mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO 9000, ISO14000, ISO26000) dan Industri Hijau serta spesifikasi teknis dan pedoman tata	a) Melakukan rekstrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua. b) Mengembangkan

Rencana Aksi		
cara di industri transportasi; b) Pendirian dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri komponen alat transportasi; c) Memfasilitasi pengembangan bahan baku lokal (karet, komposit), menjadi material maju dengan spesifikasi yang sesuai dengan industri alat transportasi; d) Mengembangkan Design Centre industri alat transportasi; e) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi; f) Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis; a) Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan	cara di industri transportasi; b) Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang alat transportasi untuk memenuhi standar internasional; c) Penguatan sentra IKM modern (logam, karet, komposit) pendukung industri transportasi, dan yang dilengkapi laboratorium penelitian dan pengembangan serta pengukuran presisi; d) memberikan akses <i>supply</i> bahan baku lokal (karet, komposit), menjadi material maju dengan spesifikasi yang sesuai dengan industri alat transportasi; e) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi; f) Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi; g) Mengembangkan design centre industri alat transportasi; h) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi;	kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) ataupun Design Centre Industri alat transportasi; c) Penguatan kluster industri kedirgantaraan kawasan ekonomi khusus (KEK) industri perawatan pesawat (MRO) dan pembuatan komponen pesawat udara; d) Penguatan dan pengembangan kluster industri kedirgantaraan di kawasan industri tertentu atau zona di dalam kawasan industri untuk pengembangan industri perawatan pesawat (MRO), pembuatan komponen pesawat udara dan kedirgantaraan (ground effect aerodynamic aircraft); e) Meningkatkan akses informasi dan promosi, industri komponen/spareparts kapal terutama bagi pasar domestik yang berdaya saing tinggi; f) Meningkatkan akses informasi dan promosi,

Rencana Aksi			
perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas);			
b) Meningkatkan akses informasi dan promosi, industri komponen/spareparts kapal terutama bagi pasar domestik;	i) Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis;	industri komponen/spareparts otomotif terutama bagi pasar domestic yang berdaya saing tinggi;	
c) Memfasilitasi percepatan proses ijin rancang bangun;	j) Penjaminan pinjaman bagi industri alat transportasi dalam rangka pengembangan dan pendirian industri;	g) Mengembangkan industri komponen kapal dan pesawat udara ke arah komponen berteknologi tinggi;	
d) Mengembangkan kebijakan penggunaan komponen kapal dalam negeri secara melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal;	k) Meningkatkan akses informasi dan promosi, industri komponen/spareparts kapal terutama bagi pasar domestik;	h) Peningkatan standardisasi produk industri komponen kapal dan komponen pesawat udara melalui penerapan SNI;	
e) Memfasilitasi alih daya dalam rangka pembentukan iklim usaha yang kondusif agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (outsourcing) proses, produk dan SDM;	l) Meningkatkan akses informasi dan promosi, industri komponen/spareparts otomotif terutama bagi pasar domestik;	i) Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM untuk komponen perkapalan dan dirgantara berbasis teknologi baru dengan presisi tinggi;	
f) Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) industri perawatan pesawat (MRO) dan pembuatan komponen pesawat udara;	m) Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) industri perawatan pesawat (MRO) dan pembuatan komponen pesawat udara;	j) Penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, karet and propelan) dengan spesifikasi yang sesuai dengan industri alat transportasi;	
g) Fasilitasi penelitian dan pengembangan kapal domestik menggunakan kapal standar sesuai perairan/karakteristik Indonesia;	n) Mengembangkan kawasan industri tertentu atau zona di dalam kawasan industri untuk pengembangan industri	k) Memfasilitasi perolehan insentif kredit perbankan serta mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal;	
h) Revitalisasi mesin dan			

Rencana Aksi		
peralatan industri kapal rakyat yang memproduksi kapal sesuai perairan/karakteristik perairan Indonesia; i) Melakukan pemberian bantuan peralatan pada industri dan sentra industri kapal rakyat.	perawatan pesawat (MRO) dan pembuatan komponen pesawat udara; o) Identifikasi sentra kapal rakyat potensial dan kajian studi kelayakan industri kapal dan <i>Ship Service</i> kapal rakyat.	l) Menjalin kerjasama kemitraan dan memfasilitasi terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer, supporting</i> dan <i>related industri</i> dalam klaster industri alat transportasi; m) Memfasilitasi peningkatan kerjasama dengan buyer luar negeri dalam memperluas pasar; n) Meningkatkan investasi/perluasan pengembangan industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal; o) Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus. p) Membangun kemitraan strategis antara pelaku Industri komponen perkapalan dan dirgantara (IKM) yang berstandar dengan perusahaan perkapalan berskala nasional dan internasional; q) Memfasilitasi kesinambungan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer,</i> dalam memperluas pasar.

Rencana Aksi		
		r) Melakukan pengembangan kajian dan studi kelayakan industri kapal rakyat dan <i>Ship Service</i> kapal rakyat; s) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan <i>Land Banking</i> untuk kawasan industri <i>Ship Service</i> dan penyediaan fasilitas sentra industri kapal rakyat. t) Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri (penyebaran dan konektivitas).
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau		

D.Industri Pangan

Tabel 4.19 memuat rencana program pembangunan Industri Pangan.

Tabel 4.19 Program Industri Pangan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui kooordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan	a) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Tertentu/Kawasan Industri Halal; b) Pengembangan Zona industri halal di Kawasan	a) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Tertentu/Kawasan Industri Halal; b) Meningkatkan

Sasaran		
produk industri unggulan provinsi; b) Menjalin kerjasama dengan kelompok budidaya, perikanan tangkap serta kelompok tani dalam meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan hilir; c) Pengembangan Zona industri halal di Kawasan Industri untuk pengembangan industri halal; d) Meningkatkan infrastruktur industri dalam mengolah produk setengah jadi maupun produk jadi; e) Penciptaan ekosistem halal; f) Meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi industri pangan dengan bekerjasama dengan universitas; g) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian; h) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practise (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan	Industri untuk pengembangan industri halal; c) Mendorong penerapan kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal untuk industri yang berlokasi di Kawasan Industri Halal dan zona halal; d) Pembangunan jasa pendukung industri dalam meningkatkan mutu dan pengembangan produk; e) Peningkatan sinergi dalam meningkatkan inovasi produk pangan/rekayasa produk antara Litbang industri, universitas dan pelaku usaha; f) Meningkatkan infrastruktur industri dalam mengolah produk setengah jadi maupun produk jadi; g) Penciptaan dan penguatan ekosistem halal; h) Meningkatkan penjaminan mutu produk, sertifikasi halal, dan sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; i) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; j) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri pangan	infrastruktur industri dalam mengolah produk setengah jadi maupun produk jadi; c) Mendorong penerapan kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal untuk industri yang berlokasi di Kawasan Industri Halal dan zona halal; d) Pembangunan jasa pendukung industri dalam meningkatkan mutu dan pengembangan produk; e) Peningkatan sinergi dalam meningkatkan inovasi produk pangan/rekayasa produk antara Litbang industri, universitas dan pelaku usaha; f) Penciptaan dan penguatan ekosistem halal. n) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practise (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan

Sasaran		
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan penyediaan laboratorium uji mutu; i) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik dengan penerapan manajemen rantai pasok (<i>supply chain management</i>) untuk meningkatkan efisiensi produksi, distribusi bahan baku dan produk pangan; j) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; k) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri pangan melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; l) Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan baik dalam dan luar negeri; m) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan;	melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; k) Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan baik dalam dan luar negeri; l) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; m) Penyediaan fasilitas inovasi dan pengembangan produk industri pangan.	mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; o) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; p) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri pangan melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; q) Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan baik dalam dan luar negeri; r) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; s) Penyediaan fasilitas inovasi dan pengembangan produk industri pangan.

Sasaran			
g)	Penyediaan fasilitas inovasi dan pengembangan produk industri pangan.		
Strategi			
a)	Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku melalui penerapan supply chain management (SCM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mensupply kebutuhan bahan baku untuk industri;		
b)	Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (<i>existing</i>);		
c)	Meningkatkan optimalisasi Kawasan Industri melalui penetapan Kawasan Industri tertentu / zona halal di dalam Kawasan Industri;		
d)	Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;		
e)	Mendorong peningkatan penyediaan fasilitas ekspor (<i>container</i>) bagi produk tertentu (bricket arang kelapa) dan melakukan uji kelayakan pengapalan/pengiriman (<i>pre-shipment inspection</i>) sesuai standar ASTM dan IMDG serta kelayakan uji produksi (<i>factory audit</i>) bagi industri bricket arang kelapa;		
f)	Mendorong pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan produksi bahan baku industri pangan yang terukur, melalui pendekatan klaster industri perikanan, klaster komoditas hortikultura unggulan (nenas dan pepaya), klaster komoditas hasil perkebunan unggulan (sagu, Cengkeh, Gambir dan Lada), dan klaster tanaman hasil pertanian (Ubi Kayu) di sentra produksi hasil perkebunan/pertanian terpilih;		
g)	Pengembangan klaster industri pangan melalui pendekatan kebijakan perwilayahan industri melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan Kawasan Industri);		
h)	Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan;		
i)	Mendorong pengembangan SDM industri pangan khususnya manajemen mutu dan teknik produksi;		
j)	Menguatkan kerjasama kemitraan dan pemasaran;		
k)	Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan perikanan sehingga produk sesuai standar (SNI dan <i>food safety</i>);		
l)	Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu dan keamanan produk;		
t)	Mendorong kebijakan pembatasan ekspor melalui penerapan bea keluar kelapa bulat, untuk meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan bahan baku didalam negeri, khususnya bahan baku bricket arang kelapa;		
g)	Mendorong kebijakan pembatasan ekspor ikan segar tertentu melalui bea keluar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan dan pengwetan ikan dan biota air dalam negeri.		

Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pemetaan produksi dan potensi bahan baku industri pangan dari produk industri unggulan provinsi;	a) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), ISO 22000 dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sertifikasi halal;	a) Meningkatkan penguatan rantai pasok industri pengolahan pangan;
b) Meningkatkan standar mutu produk pangan melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sertifikasi halal;	b) Pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu pada laboratorium pengujian produk pangan pada BPSMB (Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Barang);	b) Penumbuhan wirausaha baru industri pangan;
c) Pembangunan laboratorium pengujian produk pangan melalui pembangunan BPSMB (Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Barang);	c) Pembangunan Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI) dalam meningkatkan pengujian produk pangan dan standardisasi industri pangan;	c) Meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), ISO 22000 dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sertifikasi halal;
d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan industri pangan melalui bantuan mesin dan peralatan;	d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan industri pangan melalui bantuan mesin dan peralatan;	d) Meningkatkan kluster industri pangan melalui pembangunan sentra Industri Pangan, Kawasan Industri dan Kawasan industri kecil dan menengah industri pangan;
e) Revitalisasi mesin dan peralatan industri pangan;	e) Revitalisasi mesin dan peralatan industri pangan;	e) Terwujudnya pusat Pendidikan vokasi dengan kompetensi industri pangan di Kawasan Industri;
f) Diversifikasi pengolahan pangan untuk meningkatkan rantai nilai produk industri pangan;	f) Meningkatkan pengembangan kluster industri pangan melalui pembangunan sentra	f) Pusat inovasi/pengembangan produk dan pelatihan vokasi tenaga kerja industri pangan pada sentra-sentra industri pangan terpilih;
g) Peningkatan akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri		g) Meningkatkan

Rencana Aksi		
pangan skala kecil dan menengah yang berhasil menjadi mitra bagi industri besar; h) Mengembangkan sistem logistik dan distribusi yang efektif dan efisien sesuai karakteristik bahan baku dan produk yang dihasilkan untuk menjaga kualitas produk pangan lokal; i) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyedia <i>Land Banking</i> untuk pengembangan kawasan industri kecil dan menengah bagi industri pangan; j) Penyusunan Masterplan, FS dan Business plan pembangunan Sentra Industri pangan; k) Meningkatkan pengembangan klaster industri pangan melalui pembangunan sentra Industri Pangan dan Kawasan industri kecil dan menengah industri pangan; l) Identifikasi standar Keamanan Pangan pada Bahan Tambahan Pangan (BTP); m) Meningkatkan jaminan pemasaran dan mutu produk pangan yang berstandar nasional melalui penerapan SNI;	Industri Pangan dan Kawasan industri kecil dan menengah industri pangan; v) Peningkatan akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah yang berhasil menjadi mitra bagi industri besar; g) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); h) Mengembangkan <i>Centre of Excellent</i> dan pusat vokasi pengembangan SDM Industri pangan pada Lembaga penelitian / universitas. i) Melakukan diversifikasi dan pengembangan teknologi industri pangan melalui Kerjasama terintegrasi dengan lembaga penelitian/universitas; j) Meningkatkan jaminan pemasaran dan mutu produk pangan yang berstandar nasional melalui penerapan SNI; k) Meningkatkan kualitas mutu kemasan produk pangan; l) Memfasilitasi penyediaan kompetensi SDM Industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; m) Meningkatkan kompetensi pembina industri standardisasi produk	kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri Pangan melalui sinergi bersama litbang/universitas; h) Meningkatkan promosi dan investasi industri pangan; i) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; j) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; k) Memfasilitasi pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank; l) Menerapkan dan mengawasi produk pangan dengan SNI Wajib secara konsisten. m) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Pangan.

Rencana Aksi		
n) Pengembangan <i>Centre of Excellent</i> industri pangan pada Lembaga penelitian / universitas; o) Terjaminnya ketersediaan bahan baku penolong; p) Peningkatan Kerjasama kemitraan antara kelompok petani dan nelayan dengan industri pangan melalui kesepakatan kerjasama; q) Meningkatkan kualitas mutu kemasan produk pangan; r) Terwujudnya pusat inovasi/pengembangan produk dan pelatihan vokasi tenaga kerja industri pangan pada sentra-sentra industri pangan terpilih; s) Memfasilitasi penyediaan kompetensi SDM Industri pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; t) Meningkatkan kompetensi pembina industri standardisasi produk pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; u) Meningkatkan kompetensi penyuluh industri.	pangan melalui Pendidikan dan pelatihan; n) Meningkatkan kompetensi penyuluh industri.	
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.		

E. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.

Tabel 4.20 memuat rencana program pembangunan industri kosmetik dan farmasi.

Tabel 4.20 Program Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui kooordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan produk industri unggulan provinsi;	a) Terbangunnya layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industri serta memenuhi aspek keamanan pangan;	a) Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;
b) Menjalin kerjasama dengan kelompok budidaya, perikanan tangkap serta kelompok tani dalam meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan hilir;	b) Pengembangan Zona industri halal di Kawasan Industri untuk pengembangan industri farmasi dan kosmetik;	b) Peningkatan daya saing industri farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat;
c) Mendorong pengembangan industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan melalui pembangunan infrastruktur industri dalam mengolah produk setengah jadi maupun produk jadi;	c) Meningkatkan infrastruktur industri dalam mengolah produk setengah jadi maupun produk jadi;	c) Terjadi diversifikasi produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan dalam memenuhi pasar ekspor;
d) Penciptaan ekosistem halal produk farmasi dan kosmetik;	d) Penciptaan ekosistem halal produk farmasi dan kosmetik;	d) Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal;
e) Meningkatkan inovasi, pengembangan produk serta teknologi industri farmasi dan kosmetik dengan bekerjasama dengan lembaga penelitian/universitas;	e) Mendorong penerapan kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal untuk industri yang berlokasi di Kawasan Industri Halal dan zona halal;	e) Meningkatkan kemampuan uji klinik dengan membangun laboratorium Uji terakreditasi;
	f) Pembangunan jasa pendukung industri dalam meningkatkan mutu dan pengembangan produk;	f) Peningkatan pangsa pasar produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan;
	g) Peningkatan sinergi dalam meningkatkan inovasi	g) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di

Sasaran			
f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;	produk farmasi dan kosmetik antara Litbang industri, universitas dan pelaku usaha;	bidang industri farmasi dan kosmetik melalui Pendidikan dan pelatihan.	h) Penyediaan fasilitas Pendidikan vokasi bagi SDM Industri di sektor farmasi dan kosmetik.
g) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik dengan penerapan manajemen rantai pasok (<i>supply chain management</i>) untuk meningkatkan efisiensi produksi, distribusi bahan baku dan produk farmasi dan kosmetik;	h) Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi;		
h) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah dalam mengembangkan industri farmasi dan kosmetik;	i) Peningkatan pangsa pasar produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan;		
i) Meningkatkan Investasi di industri kosmetik dan farmasi;	j) Meningkatkan standar pengolahan dan penjaminan mutu produk farmasi dan kosmetik, Sertifikasi halal melalui peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;		
j) Menyiapkan SDM Industri yang ahli dan berkompeten di bidang industri farmasi dan kosmetik melalui Pendidikan dan pelatihan.	k) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri farmasi dan kosmetik skala kecil dan menengah;		
	l) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri farmasi dan kosmetik melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor;		
	m) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri farmasi dan kosmetik melalui Pendidikan dan pelatihan;		
	u) Penyediaan fasilitas inovasi dan pengembangan produk industri farmasi dan kosmetik.		

Strategi		
a) Memaksimalkan produksi dari potensi rumput laut, ikan, kelapa, cengkeh, pepaya dan Gambir dan penguatan Kerjasama antara sektor hulu dan hilir; b) Mengembangkan bahan baku terstandar dan bermutu; c) Distribusi bahan baku dan penolong yang terjaga kualitas dan mutu dalam meningkatkan rantai nilai hasil produksi; d) Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), pengembangan Sumber Daya Manusia; dan i) Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan perlindungan HKI produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pemetaan potensi dan produksi bahan baku industri biofarmaka dari produk industri unggulan provinsi; b) Memetakan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan pengembangan budidaya produk industri unggulan biofarmaka; c) Pengembangan klaster produksi bahan baku industri biofarmaka; d) Peningkatan penanganan kualitas pasca panen dan penjaminan mutu bahan baku industri biofarmaka yang sesuai standar melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung; e) Pengembangan klaster industri Biofarmaka melalui pembangunan Sentra IKM Industri Biofarmaka;	a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penanganan kualitas pasca panen dan penjaminan mutu bahan baku industri biofarmaka yang sesuai standar melalui penerapan Good Handling Practices (GHP); b) Pengembangan klaster industri Biofarmaka melalui pembangunan Sentra IKM Industri Biofarmaka dan Kawasan industri kecil dan menengah industri Biofarmaka; c) Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok industri pengolahan biofarmaka; d) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana	a) Peningkatan pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung distribusi bahan baku dan produk jadi industri biofarmaka; b) Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri produk biofarmaka; c) Pengembangan klaster industri Biofarmaka melalui pembangunan Sentra IKM Industri Biofarmaka, Kawasan industri kecil dan menengah dan pengembangan investasi industri biofarmaka di zona industri halal di kawasan industri tertentu; d) Peningkatan diversifikasi dan standardisasi produk Biofarmaka untuk kebutuhan ekspor dan pemasaran dalam negeri (berstandar

Rencana Aksi			
f) Peningkatan Kerjasama kemitraan antara kelompok petani dan nelayan dengan industri pangan melalui kesepakatan Kerjasama;	sentra industri Biofarmaka;	nasional dan internasional);	
j) Meningkatkan produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan yang berstandar farmakope Indonesia;	e) Meningkatkan produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan yang berstandar farmakope Indonesia;	e) Meningkatkan produk farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan yang berstandar farmakope Indonesia;	
k) Pengembangan Sistem Informasi rantai pasok Industri Biofarmaka dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas industri;	f) Meningkatkan promosi baik digital maupun non digital;	f) Peningkatan koordinasi penyediaan bahan baku terstandar dan memenuhi aspek keamanan pangan dengan stakeholder terkait;	
g) Melakukan promosi pemasaran produk Biofarmaka dalam dan luar negeri;	g) Pengembangan kompetensi uji mutu pada laboratorium pengujian produk pangan pada BPSMB (Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Barang);	g) Penguatan permodalan industri biofarmaka melalui pengembangan pola kemitraan dari hulu ke hilir yang kuat dan berkelanjutan;	
h) Meningkatkan jaminan pemasaran produk Biofarmaka ke pasar dalam negeri melalui penerapan SNI;	h) Pengembangan industri Biofarmaka melalui peningkatan investasi di zona industri halal;	a) Menerapkan dan mengawasi secara konsisten SNI untuk Industri farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan;	
i) Meningkatkan inovasi produk Biofarmaka melalui diversifikasi produk dan teknologi Industri melalui Kerjasama terintegrasi antara lembaga penelitian/universitas, pemerintah dan pelaku usaha;	i) Memfasilitasi kemudahan permodalan untuk industri yang sudah membangun pola kemitraan dengan industri besar dalam mengembangkan Industri Biofarmaka;	b) Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Industri farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan skala besar dengan orientasi ekspor;	
j) Memfasilitasi penyediaan SDM Industri Biofarmaka yang kompeten melalui Pendidikan dan pelatihan;	j) Meningkatnya kerjasama rekayasa teknologi, penelitian dan pengembangan produk Biofarmaka antara lembaga penelitian/universitas, pelaku usaha dan pemerintah daerah;	k) Meningkatkan implementasi dan penguasaan alih teknologi terkini industri biofarmaka;	
o) Meningkatkan kompetensi pembina industri			

Rencana Aksi		
biofarmaka melalui Pendidikan dan pelatihan; p) Meningkatkan kompetensi penyuluh industri.	k) Berdirinya pusat pelatihan vokasi tenaga kerja industri untuk kompetensi di industri farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan; l) Memfasilitasi penyediaan SDM Industri Biofarmaka yang kompeten melalui Pendidikan dan pelatihan; q) Meningkatkan kompetensi pembina industri biofarmaka melalui Pendidikan dan pelatihan; r) Pengembangan <i>Centre of Excellent</i> industri biofarmaka pada Lembaga penelitian / universitas.	h) Peningkatan fasilitasi lembaga sertifikasi penjaminan mutu produk biofarmaka, melalui pengembangan kompetensi laboratorium uji mutu produk pada BPSMB (Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Barang); maupun l) Pengembangan kompetensi uji mutu pada Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI); a) Memfasilitasi peningkatan penyediaan SDM Industri Biofarmaka yang kompeten melalui Pendidikan dan pelatihan; s) Meningkatkan kompetensi pembina industri biofarmaka melalui Pendidikan dan pelatihan; t) Pengembangan <i>Centre of Excellent</i> industri biofarmaka pada Lembaga penelitian / universitas;
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.		

F. Industri Hulu Agro.

Tabel 4.21 memuat rencana program pembangunan industri hulu agro.

Tabel 4.21 Program Industri Hulu Agro

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui program peningkatan produktifitas produk industri unggulan sektor perikanan, pertanian/perkebunan yang mendukung pengembangan industri hulu agro dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;	a) Terbangunnya kerjasama antar kelompok tani atau pemasok dan industri hulu agro melalui sistem informasi rantai pasok industri pengolahan Industri hulu agro yang efektif dan efisien di Provinsi Kepri;	a) Memfasilitasi pengembangan inovasi produk industri hulu agro di Provinsi Kepri;
b) Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri Hulu Agro di sentra-sentra industri potensial;	b) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri hulu agro melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor;	b) Memperkuat dan mempermudah pemodalan industri hulu agro di Provinsi Kepri;
c) Terwujudnya keseimbangan pasokan bahan baku komoditas cengkeh dan Lada sebagai bahan baku industri Oleokimia (minyak atsiri);	c) Bersama instansi terkait menciptakan usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri hulu agro;	c) Peningkatan pengawasan dan penerapan standardisasi (SNI) produk industri hulu agro;
d) Terwujudnya keseimbangan pasokan bahan baku industri hulu agro;	d) Meningkatkan fasilitasi pengujian produk industri hulu agro melalui pendirian Balai Pengujian Produk dan standardisasi Industri;	d) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan dari pengolahan limbah sisa hasil industri serta perluasan pasar;
e) Terwujudnya keseimbangan dan jaminan pasokan bahan baku tepung ikan sebagai bahan baku pembuatan pellet pakan ikan;	e) Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro ke dalam dan luar negeri;	e) Pengembangan kerjasama dan kemitraan antar industri pengolahan limbah sisa hasil industri di Provinsi Kepri;
	f) Terciptanya kerjasama penelitian/riset dan pengembangan produk dalam mengembangkan industri pengolahan limbah industri (sirkular ekonomi) antara lembaga	f) Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM industri di bidang Industri melalui Pendidikan dan pelatihan;
		g) Peningkatan Kerjasama bersama Lembaga penelitian/universitas, dalam pengembangan

Sasaran		
f) Terwujudnya keseimbangan dan jaminan pasokan bahan baku Manioc Ubi Kayu sebagai bahan dasar pembuatan pellet (pakan ikan); g) Terwujudnya keseimbangan dan jaminan pasokan bahan baku rumput laut dari sargassum s.p untuk diolah menjadi suplemen pakan ternak; h) Terwujudnya industri pembuatan pakan teripang dalam meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku industri kolagen dari hasil laut; i) Meningkatkan standar produk industri hulu agro; j) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk industri hulu agro; a) Memperkuat permodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses pembiayaan untuk industri hulu agro. k) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Hulu Agro melalui pendidikan dan pelatihan; l) Mengubah sisa hasil produksi menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi melalui	peneliti/universitas, pemerintah daerah dan pelaku usaha; g) Pengembangan ketersediaan SDM lokal yang kompeten di bidang Industri Pengolahan Limbah sisa hasil industri melalui Pendidikan dan pelatihan; h) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan limbah sisa hasil industri; i) Meningkatkan standar mutu produk dari hasil pengolahan limbah sisa hasil industri.	dan implementasi teknologi pengolahan industri hulu agro; h) Meningkatnya implementasi pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait untuk mengembangkan industri pengolahan hulu agro; i) Dukungan kebijakan dan iklim usaha industri pengolahan hulu agro.

Sasaran		
teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; m) Mendorong terciptanya industri pengolahan limbah industri dengan mewajibkan industri pengolahan agro unggulan (kelapa, sagu) untuk mendukung pengolahan limbah industri menjadi produk yang bernilai tambah tinggi; n) Mendorong sentra industri melakukan pengolahan terhadap limbah industri (sirkular ekonomi); o) Mendorong kerjasama dengan Industri pengolahan lainnya dalam mendapatkan sumber limbah industri sebagai bahan baku; p) Tumbuhnya investasi industri pengolahan Limbah dan Sampah (<i>circular economy</i>) baik skala Kecil, Menengah maupun besar; q) Dukungan kebijakan dan iklim usaha industri pengolahan limbah dan sampah.		
Strategi		
a) Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku untuk pengembangan industri hulu agro; b) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk industri hulu agro; c) Meningkatkan promosi dan Kerjasama investasi untuk industri hulu agro; d) Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur industri untuk pengembangan industri hulu agro di Provinsi Kepri;		

Strategi		
e) Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (IPTEK), pengembangan Sumber Daya Manusia; dan f) Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan industri hulu agro; Meningkatkan kerjasama, koneksi dan fasilitas dalam meningkatkan pemasaran dan menunjang pengiriman produk hasil industri hulu agro.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Menjamin ketersediaan bahan baku melalui pemetaan pengadaan bahan baku pengembangan industri hulu agro; b) Berkoordinasi dengan industri-industri berbasis agro dalam kerjasama pemanfaatan bahan baku industri hulu agro; c) Memfasilitasi pengembangan inovasi produk industri hulu agro di Provinsi Kepri melalui pemetaan kebutuhan bahan baku; d) Fasilitasi terwujudnya Industri pengolahan minyak atsiri dari komoditas lada dan cengkeh; e) Mendorong dan memfasilitasi pembangunan industri pellet (pakan ikan) dari sumber daya komoditas unggulan; f) Mendorong pengembangan industri suplemen pakan ternak	a) Mendorong industri hulu agro melalui PMDN dan pembangunan industri hulu di sentra-sentra industri potensial; b) Memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri hulu agro skala kecil dan menengah; c) Peningkatan fasilitas pengujian kualitas mutu dan standardisasi produk Industri Hulu Agro melalui pengembangan laboratorium uji mutu (Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Barang); d) Mendorong peningkatan standardisasi SNI bagi produk industri hulu agro; e) Meningkatkan inovasi produk industri hulu agro; f) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Hulu Agro melalui pendidikan dan pelatihan; g) Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro yang berwawasan lingkungan ke luar negeri.	a) Meningkatkan kerjasama Investasi di industri hulu agro melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; b) Meningkatkan inovasi produk industri hulu agro dari sumber hasil perikanan, hasil pertanian/perkebunan dan limbah sisa industri melalui Kerjasama dengan Lembaga penelitian/perguruan tinggi; c) Peningkatan merk dan branding produk lokal dari industri pupuk organik dan serat tumbuhan; d) Peningkatan pangsa pasar produk-produk pupuk industri hulu agro di provinsi kepri; e) Meningkatkan pengawasan standardisasi SNI bagi produk industri hulu agro; f) Meningkatkan kompetensi SDM

Rencana Aksi		
dari rumput laut; g) Mendorong pertumbuhan industri Pakan Ternak dari Silase sisa hasil pengolahan ikan dan hasil perikanan; h) Penerapan standardisasi untuk produk Industri Hulu Agro melalui pembangunan Balai Pengujian Produk dan standardisasi Industri; i) Meningkatkan hasil pemasaran produk industri hulu agro.		Industri Hulu Agro melalui pendidikan dan pelatihan.
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau		

G.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Tabel 4.22 memuat rencana program pembangunan industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.

Tabel 4.22 Program Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas Karet sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri; b) Meningkatkan bahan baku karet untuk keperluan umum; c) Peningkatan jumlah produktivitas karet, dan kualitas secara kontinyu; d) Optimalisasi potensi perkebunan melalui	a) Peningkatan jumlah produktivitas karet, dan kualitas secara kontinyu; b) Peningkatan infrastruktur saran dan prasarana industri pengolahan tekstil dari serat tumbuhan melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah; c) Pengembangan infrastruktur saran dan prasarana industri karet untuk keperluan otomotif	a) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan Karet menjadi sarung tangan karet, dan Bioplastik; b) Tersedianya pasokan bahan baku industri Karet, dan bioplastik secara berkelanjutan; i) Pengembangan Lembaga Uji standardisasi untuk produk Karet keperluan Kesehatan, Otomotif dan Elektronik,Biplastik dan

Sasaran			
intensifikasi dan ekstensifikasi lahan perkebunan karet dengan pemanfaatan lahan marjinal;	dan elektronik melalui pengembangan sentra industri kecil maupun menengah dan Kawasan industri kecil dan menengah;		Sarung Tangan Karet;
e) Berkembangnya perkebunan dan produktivitas karet rakyat;	d) Mendorong pengembangan inovasi dan teknologi industri pengolahan karet dan serat tumbuhan;	c) Peningkatan pangsa pasar produk Karet dan Turunannya dalam negeri;	d) Peningkatan nilai ekspor produk Karet, bioplastik serta turunannya;
f) Meningkatnya peran serta petani karet lokal dalam mensuplai kebutuhan bahan baku industri dengan jumlah dan kualitas (mutu) yang memenuhi standar baku mutu industri;	e) Meningkatnya Penerapan standar SNI terhadap bahan baku karet (lateks, crum rubber) dari petani untuk kebutuhan bahan baku industri;	e) Peningkatan mutu Karet dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;	f) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri Pengolahan Karet dengan petani yang saling menguntungkan;
g) Terbangunnya kerjasama antara Kelompok Tani atau pemasok dan industri melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Industri karet yang efektif dan efisien;	a) Mendirikan pusat penelitian dan pengembangan industri karet.	g) Mendorong penumbuhan dan pengembangan industri karet melalui Pengembangan sentra-sentra industri potensial maupun pengembangan Kawasan industri kecil dan menengah;	
h) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan karet di Kepri yang mampu mengolah produk karet untuk kepentingan umum;	b) Terwujudnya aturan pemerintah tentang dampak dan pengendalian produk olahan Karet, dan menciptakan kepastian usaha (legal standing);	h) Mendorong pengembangan Industri Bioplastik melalui Kerjasama investasi dan alih teknologi;	
i) Mendorong pengembangan inovasi dan teknologi industri pengolahan karet dan serat tumbuhan;	c) Peningkatan minat masyarakat dan petani karet dalam mendukung penumbuhan dan pengembangan industri karet;	i) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Karet;	
j) Menciptakan kepastian usaha (legal standing) bagi industri bahan baku karet di Provinsi Kepri;	d) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran dan penjualan komoditas karet dan menjalin kerjasama dengan industri pengolahan karet.	j) Meningkatnya produk-produk dari karet dan bioplastik yang berstandar SNI;	
		k) Produksi serat tumbuhan berbahan dasar serat batang nenas yang ramah lingkungan dan mampu	

Sasaran		
k) Mendorong penumbuhan industri Briket Arang Kelapa (Coco Briquette)/ BioBricket, dan terciptanya kerjasama antara pemasok dan industri melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Industri karet yang efektif dan efisien; l) Meningkatnya kualitas produk industri Briket Arang Kelapa (Coco Briquette)/ BioBricket.	e) Terbangunnya kelembagaan layanan teknologi dan pengembangan produk yang mendukung standardisasi produk melalui pendirian Balai Pengujian standardisasi dan Pengembangan Produk; f) Peningkatan pemasaran produk Karet dan Turunannya yang diproduksi dalam negeri; g) Mendorong peningkatan penggunaan bahan baku karet dalam negeri termasuk meningkatkan keterkaitan antara pelaku usaha perkebunan dengan industri besar dan industri kecil dan menengah; h) Meningkatnya kualitas dan nilai tambah industri pengolahan Arang Kelapa (Coco Briquette)/ BioBricket menjadi Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) untuk Filter.	memenuhi standar pasar dalam dan luar negeri; j) Meningkatnya kualitas dan nilai tambah industri pengolahan Arang Kelapa menjadi Karbon Aktif dan turunannya.
Strategi		
a) Menyeimbangkan tata pasokan bahan baku karet yang sesuai standard; b) Memaksimalkan potensi tanaman karet dan hortikultura nenas; c) Peningkatan pemanfaatan batang nenas menjadi serat tumbuhan sebagai bahan dari industri textile dari serat tumbuhan; d) Meningkatkan kualitas SDM, mutu bahan baku (lateks dan lainnya), kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri Karet dan serat tumbuhan menjadi bahan textile;		

Strategi		
e) Mengembangkan bahan baku Karet yang terstandar dan bermutu; f) Meningkatkan penguasaan teknologi pengembangan industri Karet serta pembuatan dan pengolahan serat tumbuhan menjadi produk tekstil; g) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan produk karet dan serat tumbuhan menjadi textile; h) Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan Sumber Daya Manusia pengolahan Karet dan Tekstil dari Serat Tumbuhan; i) Mewujudkan peraturan pemerintah yang mengatur pengendalian produk Karet yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha dan peningkatan minat masyarakat petani karet dalam mendukung penumbuhan dan pengembangan industri karet melalui penetapan harga beli karet ditingkat petani (lateks, dll); a) Mendorong dan memfasilitasi pendirian industri pengolahan arang kelapa (sirkular ekonomi); Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pensupply arang kelapa; Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; j) Mengembangkan teknologi proses, meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i> untuk meningkatkan nilai tambah produk pengolahan dari arang kelapa; k) Meningkatkan penerapan standardisasi (SNI) dan <i>safety standard</i> bagi produk olahan dari sirkular ekonomi (arang kelapa); l) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM industri; m) Meningkatkan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik; n) Menarik investor asing dan BUMD untuk berinvestasi.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034-2043
a) Melakukan kajian teknis pengembangan komoditas karet dalam rangka pengembangan industri karet untuk keperluan umum;	a) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana, distribusi, transportasi, dan pemasaran pengolahan Karet, melalui pengembangan sentra industri potensial, maupun Kawasan industri kecil dan menengah;	a) Menjamin keseimbangan pasokan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas industri;
b) Memetakan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan;	b) Meningkatkan kualitas SDM Perkebunan Rakyat melalui pelatihan budidaya Karet dan Pasca Panen;	b) Meningkatkan koordinasi dan penguatan <i>networking</i> pengembangan bahan baku karet dan serat tumbuhan yang terstandar dengan stakeholder terkait;
c) Membangun Sistem kemitraan berdasarkan Klaster perkebunan karet;	c) Mendorong penyediaan	c) Meningkatkan kemitraan
d) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas,		

Rencana Aksi		
kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait, strategi kemitraan dengan industri terkait serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir serta didukung oleh infrastruktur yang memadai; e) Mengembangkan kerjasama dengan instansi Lembaga peneliti/universitas untuk memperbaiki baku mutu tanaman dan bahan baku karet; f) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang pembinaan industri karet melalui diklat industri; g) Membuat SOP atau pedoman penanganan pasca panen karet berdasarkan standar baku; h) Revitalisasi dan bantuan peralatan untuk industri bahan baku karet (lateks, crum rubber dan jenis bahan baku lainnya); i) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet untuk keperluan umum melalui pengembangan sentra industri; j) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi Industri	fasilitas Sarana dan Prasarana sentra Industri dan Kawasan industri Pengolahan Karet untuk keperluan otomotif dan elektrik; d) Meningkatkan Kerjasama investasi dan alih teknologi industri pengolahan karet untuk keperluan Kesehatan; e) Meningkatkan Kerjasama antara industri elektrik, elektronik serta perkapalan di Provinsi Kepri untuk memanfaatkan produk komponen industri berbahan karet lokal; f) Meningkatkan kemampuan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri serat tumbuhan, industri karet untuk keperluan kesehatan, otomotif dan elektronik melalui Kerjasama penelitian yang terintegrasi antara pelaku usaha, Lembaga penelitian/perguruan tinggi dan pemerintah daerah; g) Meningkatkan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau; h) Peningkatan laboratorium uji mutu untuk meningkatkan standar produk dari serat	antar pengusaha perkebunan karet dengan industri pengolahan karet maupun sentra-sentra industri; d) Melakukan pembinaan pengembangan sarana distribusi dan produksi Karet dan serat tumbuhan; e) Memfasilitasi terjadinya pengembangan industri yang komprehensif dari Hulu ke Hilir; f) Meningkatkan mutu/standardisasi produk dan bahan baku Karet, Serat tumbuhan, dan Bioplastik g) Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan dalam meningkatkan produktifitas turunan industri Karet, Bioplastik, Serat tumbuhan; h) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk; i) Meningkatkan inovasi/diversifikasi produk dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan hasil penelitian dan pengembangan; j) Memfasilitasi peningkatan investasi turunan industri Karet, Serat tumbuhan dan Bioplastik yang ramah lingkungan; k) Mendorong Mengembangkan kluster

Rencana Aksi		
bahan baku karet (industri Lateks Karet, crum rubber dan jenis bahan baku lainnya) terutama bagi industri yang telah membangun pola kemitraan dengan petani, serta industri bahan baku dan industri hilirisasi karet lainnya; k) Menciptakan kepastian usaha (legal standing) bagi industri bahan baku karet di Provinsi Kepri; l) Terwujudnya sistem informasi rantai pasok industri karet dalam meningkatkan kepastian pasokan bahan baku karet, baku mutu serta industri pengolahan karet yang efektif dan efisien; m) Membangun Sistem Informasi <i>circular economy</i> dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok industri pengolahan arang kelapa; n) Mendorong penumbuhan industri pengolahan biobricket di sumber bahan baku melalui kerjasama antar industri kecil dan menengah dengan industri besar.	tumbuhan dan produk karet utk keperluan Kesehatan, otomotif dan elektronik melalui pengembangan fasilitas pengujian pada Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI) maupun Balai Pengujian dan standardisasi Mutu Produk (BPSMB) untuk meningkatkan pemasaran dalam dan negeri; i) Meningkatkan fasilitasi SNI produk bahan baku karet (lateks, crum rubber) dan produk-produk industri berbahan baku karet lainnya; j) Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk, melalui pengembangan sistem rantai pasok industri karet; k) Mendorong pertumbuhan industri karet untuk keperluan Kesehatan, otomotif dan elektronik di Kawasan Industri serta mewujudkan kemitraan dengan pelaku usaha perkebunan karet di Provinsi Kepri; l) Terwujudnya Pelatihan Pendidikan vokasi Industri dan penguasaan teknologi	industri Karet, Bioplastik, serat tumbuhan yang terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai melalui pengembangan sentra industri, Kawasan industri maupun Kawasan industri kecil dan menengah; l) Meningkatkan pengembangan diversifikasi produk industri Karet, Serat tumbuhan yang ramah lingkungan untuk memperluas dan meningkatkan pasar ekspor; m) Peningkatan Penerapan dan Pengawasan SNI pada industri karet dan turunannya, industri serat tumbuhan dan bioplastik; n) Peningkatan akses sumber -sumber penyediaan pembiayaan uang kompetitif untuk pengembangan industri karet dan turunannya, serat tumbuhan dan bioplastik; o) Meningkatkan perluasan pasar industri karet melalui promosi dan misi dagang; p) Mendirikan vokasi Industri karet untuk pengembangan SDM

Rencana Aksi		
	pengolahan karet; m) Membangun <i>pilot project</i> Industri Pengolahan BioBricket menjadi Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) untuk Filter; n) Meningkatkan Penerapan standar SNI terhadap Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) di Provinsi Kepri; o) Mendirikan pusat penelitian dan pengembangan industri arang aktif dan turunannya.	Industri; q) Mengembangkan turunan Industri Pengolahan Karbon Aktif (Coconut Shell Activated Carbon) menjadi karbon aktif; r) Meningkatnya Penerapan standar SNI terhadap Karbon Aktif dan turunannya; s) Mengembangkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan dari arang aktif.
Lokasi pengembangan: Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Anambas dan Kab. Karimun		

H.Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Tabel 4.23 memuat rencana program pembangunan industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.

Tabel 4.23 Program Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Pengembangan Industri Mesin Perkapalan, alat-alat perkakas (<i>Industrial Tools</i>) dan Industri mesin otomatisasi; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dari komoditas karet untuk pengembangan industri komponen; c) Memfasilitasi peningkatan	a) Pengembangan dan penerapan otomatisasi mesin pada industri elektronika dan industri pangan; b) Pengembangan Mesin Perkapalan dan Alat-alat perkakas (<i>Industrial Tools</i>); c) Pengembangan produk berbahan dasar Mineral laut (bahan anorganik)	a) Peningkatan pengembangan dan penerapan otomatisasi mesin pada industri elektronika dan industri pangan; b) Peningkatan pengembangan Mesin Perkapalan dan Alat-alat perkakas (<i>Industrial Tools</i>);

Sasaran		
sarana dan prasarana industri komponen dan bahan penolong; d) Pengembangan Industri Komponen Otomotif dan Dock Fender dari karet; e) Pengembangan produk berbahan dasar gambir untuk pembuatan bahan penolong; f) Meningkatkan pemasaran dalam negeri melalui penerapan standar (SNI) pada produk komponen industri/Alat-alat Perkakas (Industrial Tools) dan mesin perkapalan; g) Peningkatan Kerjasama antara pelaku usaha, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; h) Pengembangan kompetensi SDM Industri Jasa Industri perancangan pabrik, proses industri, pemeliharaan mesin/peralatan industri; i) Peningkatan Kompetensi SDM Industri bidang industri modal. Komponen, bahan penolong dan Jasa Industri melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi; j) Mendorong penumbuhan	dan turunannya; d) Pengembangan hilirisasi Sagu menjadi Binding product untuk industri kayu lapis; e) Pengembangan Produk Industri Pelapis Logam (peluntur karat) berbahan dasar gambir; f) Mendorong dan meningkatkan kemitraan antar petani/pelaku usaha perkebunan dengan industri dalam mengembangkan Industri komponen dan bahan penolong industri; g) Menciptakan Rantai pasok yang efektif dan efisien dalam produksi dan distribusi industri barang modal, komponen dan bahan penolong; h) Mendorong Industri komponen dan bahan penolong industri menjadi supplier industri hilir; i) Meningkatkan investasi Industri barang modal dan Jasa Industri, komponen industri, dan bahan penolong; j) Peningkatan peran sentra/industri dalam pengembangan industri komponen dan industri bahan penolong; l) Peningkatan Kerjasama antara pelaku usaha,	c) Peningkatan Pengembangan produk berbahan dasar Mineral laut (bahan anorganik) dan turunannya; d) Pengembangan hilirisasi Sagu menjadi Binding product untuk industri kayu lapis; k) Peningkatan jumlah Industri komponen dan bahan penolong industri menjadi supplier industri hilir; l) Peningkatan investasi Industri barang modal dan Jasa Industri, komponen industri, dan bahan penolong; m) Pengembangan sentra industri /kawasan industri kecil dan menengah dalam pengembangan industri komponen dan industri bahan penolong; e) Pemetaan potensi komoditas industri dan industri pengolahan karet yang terintegrasi dalam mengembangkan Produk Karet untuk keperluan rumah tangga; f) Peningkatan utilitas kapasitas pabrik industri komponen dalam negeri; g) Pemetaan Pemasaran produk dalam dan luar negeri untuk industri

Sasaran		
industri sirkular dari sisa hasl pengolahan sagu (batang sagu) menjadi industri kertas kemasan atau kertas untuk industri, produk kertas cetak (karton); k) Pengembangan Sistem Informasi <i>circular economy</i> dari sumber, dalam meningkatkan dan mendorong penumbuhan industri pengolahan sirkular yang lebih efisiensi dan efektifitas.	perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; m) Penerapan standar (SNI) pada produk komponen industri/Alat-alat Perkakas (Industrial Tools) dan produk mesin perkapalan; n) Peningkatan Kerjasama antara pelaku usaha, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; o) Pengembangan kompetensi Jasa Industri perancangan pabrik, proses industri, pemeliharaan mesin/peralatan industri; p) Peningkatan Kompetensi SDM Industri bidang industri modal. Komponen, bahan penolong dan Jasa Industri melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi; q) Pemetaan Pemasaran produk industri mesin perkapalan, komponen dan bahan penolong; r) Mendorong penumbuhan	komponen dari Karet untuk elektrik, elektronik dan pemesinan; h) Analisis kebutuhan produksi karet lokal dalam mengembangkan industri komponen elektrik, elektronik dan pemesinan dan Karet rumah tangga untuk kebutuhan industri dalam negeri dan ekspor. i) Penerapan standar dan sertifikasi (SNI) serta merk pada produk industri komponen, karet rumah tangga; j) Penerapan standar (SNI) dan merek pada produk turunan dari Mineral laut; k) Peningkatan pangsa pasar pakan produk turunan dari Mineral laut; l) Peningkatan Investai dan Kemitraan (join venture) pengembangan industri pengolahan industri anorganik (berbasis Mineral laut) di Provinsi Kepri; m) Meningkatkan Kerjasama penelitian (Research and Development) bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mengembangkan Industri anorganik (berbasis Mineral laut) di provinsi kepri.

Sasaran		
	industri sirkular dari sisa hasl pengolahan sagu (batang sagu) produk kertas kemasan atau kertas untuk industri; s) Pengembangan Sistem Informasi <i>circular economy</i> dari sumber, dalam meningkatkan dan mendorong penumbuhan industri pengolahan sirkular yang lebih efisiensi dan efektifitas.	n) Pengembangan klaster dalam rangka pengembangan hilirisasi karet keperluan rumah tangga melalui program pengembangan sentra industri; o) Terjaminnya pasokan bahan baku lateks karet untuk pengembangan industri karet Rumah Tanggal, industri karet komponen elektrik, elektronik dan pemesian. p) Memfasilitasi penerapan harga keekonomian bahan baku lateks untuk mendorog peningkatan Kerjasama industri; q) Fasilitasi pemberian insentif khusus bagi pengembangan industri karet alam; r) Meningkatnya kolaborasi dan kerjasama guna memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan industri hilirisasi karet sebagai industri komponen; s) Peningkatan kompetensi SDM Industri di industri pengolahan karet; t) Mendorong penumbuhan industri sirkular dari sisa hasl pengolahan sagu (batang sagu) produk

Sasaran		
		kertas kemasan atau kertas untuk industri.
Strategi		
a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku; b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (<i>existing</i>); c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri komponen dari karet serta penguatan rantai nilai Industri mesin dan perlengkapannya (alat-alat perkakas/Industrial tools); d) Mengembangkan kluster industri pengolahan karet dan kluster industri mesin dan perlengkapan serta alat-alat perkakas (industrial tools); e) Meningkatkan promosi dan investasi industri pengolahan karet; f) Mendorong pengembangan peningkatan kompetensi SDM industri; g) Mendorong pengembangan kemitraan dan pemasaran; h) Mengembangkan dan menguatkan Litbang (R&D) industri pengolahan karet; i) Meningkatkan penerapan standardisasi (SNI) untuk industri mesin dan perlengkapan dan industri komponen; j) Meningkatkan keterlibatan Jasa Industri dalam mendukung pengembangan industri mesin dan perlengkapannya serta industri komponen di Provinsi Kepri; k) Meningkatkan iklim usaha dan insentif dalam meningkatkan investasi; l) Mendorong penguatan strukturisasi industri dan penumbuhan industri zero waste dengan meningkatkan pemanfaatan limbah industri produk bernilai tambah.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034-2043
a) Melakukan kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i>) mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi terhadap industri pemesinan yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor; b) Mengembangkan industri pemesinan, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan)	a) Mengembangkan Kawasan industri tertentu/Sub Kawasan industri yang difokuskan kepada pengembangan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat Kesehatan); b) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Sentra IKM modern/kawasan industri kecil dan	a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pemesinan (barang modal), komponen industri dari karet untuk keperluan industri industri anorganik dan jasa industri melalui workshop dan pelatihan industri; b) Meningkatkan bantuan mesin dan peralatan utk IKM yang bergerak di industri vulkanisir ban; c) Meningkatkan

Rencana Aksi		
melalui Sentra Industri Logam secara terintegrasi; c) Mendorong investasi industri scrap besi/baja dalam memperoleh bahan baku industri /bahan penolong industri pemesinan; d) Mendorong terwujudnya peraturan yang mendukung pengembangan industri scrap besi/baja yang memperhatikan aspek keamanan dan pencemaran lingkungan; e) Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; f) Memfasilitasi penyediaan bahan baja dan non baja serta panduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; g) Memfasilitasi dalam meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi; h) Mengembangkan komponen logam dan bukan logam terstandar untuk efisiensi industri	menengah khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang Kawasan industri khusus pemesinan; c) Melakukan Kerjasama penelitian bersama Lembaga peneliti/ perguruan tinggi dalam mengidentifikasi pemanfaatan teknologi dan kapasitas industri pemesinan dalam mendorong penghematan penggunaan energi (industri hijau) dan memberikan rekomendasi; d) Menjamin pemenuhan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; e) Mendorong dan memfasilitasi penerapan dan pemanfaatan teknologi dari hasil penelitian dan kajian yang terintegrasi dalam mengembangkan industri komponen dari karet untuk keperluan industri dan bahan penolong berbahan dasar gambir dalam pengembangan industri; f) Mendorong penggunaan teknologi dan produk	pengembangan Industri pemesinan, industri komponen dari karet untuk keperluan industri dan industri anorganik melalui peningkatan sarana dan prasarana industri; d) Meningkatkan kerjasama penelitian dalam pengembangan produk dan teknologi industri bahan penolong (produk perekat/binding) berbahan dasar sagu dengan bekerjasama Lembaga penelitian/ perguruan tinggi; e) Melakukan study kelayakan pengembangan industri bahan penolong berbahan dasar sagu untuk keperluan industri; f) Meningkatkan kerjasama program plasma inti dalam meningkatkan kepastian bahan baku melalui integrasi perkebunan sagu rakyat dengan kebutuhan pengembangan industri produk binding (perekat) kayu lapis dari Sagu dan atau keperluan industri bahan penolong lainnya berbahan dasar sagu; g) Mendorong peningkatan kualitas lateks karet rakyat dalam meningkatkan

Rencana Aksi		
pemesinan dan industri lainnya;	dalam negeri serta pengurangan impor;	pendapatan petani;
i) Mengembangkan status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian leasing;	g) Memfasilitasi dalam meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi;	h) Meningkatkan pemasaran produk pemesinan, komponen industri dari karet, bahan penolong berbahan dasar sagu dan gambir serta produk anorganik baik didalam maupun ke luar negeri;
j) Peningkatan penerapan industri 4.0 dalam mengembangkan industri otomatisasi mesin proses produksi elektronika dan proses produksi pengolahan pangan;	h) Peningkatan peran sentra/industri dalam meningkatkan hilirisasi komoditas gambir menjadi produk pelapis logam dan sagu sebagai binding product;	i) Menyederhanakan rantai pasok penyaluran bahan baku dan bahan penolong karet (lateks) karet rakyat, sagu dan gambir sehingga lebih efisiensi dan efektif;
k) Pemetaan bahan baku karet untuk pengembangan industri dan komponen otomotif;	i) Memfasilitasi Pengembangan industri ban vulkanisir yang memenuhi standar proses produksi yang baik atau Good Manufacturing Practice (GMP) terutama industri kecil dan menengah;	j) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk;
l) Menjamin ketersediaan bahan baku karet (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) untuk keperluan pengembangan industri, komponen otomotif dan dock fender;	j) Melakukan study kelayakan pengembangan industri anorganik dari mineral laut dan diversifikasi produk anorganik dari mineral laut;	k) Peningkatan sarana dan prasarana logistik penyediaan bahan baku terpadu untuk mensupply kebutuhan industri pemesinan, industri komponen dan industri lainnya yang membutuhkan logam dan non logam dalam proses produksi di Provinsi Kepri;
m) Pemetaan bahan baku gambir untuk pengembangan industri bahan penolong (produk peluruh karat dan pelapis logam);	k) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian pengembangan produk dan teknologi industri anorganik dari mineral laut dengan Lembaga penelitian/perguruan	l) Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Logistik penyediaan bahan baku terpadu untuk mensupply kebutuhan industri pemesinan, industri komponen dan industri lainnya yang membutuhkan logam dan
n) Menjamin ketersediaan bahan baku gambir (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) untuk keperluan pengembangan industri bahan penolong (produk peluruh karat dan pelapis logam);		

Rencana Aksi		
o) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian pengembangan produk dan teknologi untuk pengembangan industri pemesinan, produk-produk komponen dari karet, pengembangan produk bahan penolong berbahan dasar gambir, serta penerapan industri 4.0 pada proses otomatisasi mesin elektronik dan mesin pengolahan di industri pangan dengan Lembaga penelitian/perguruan tinggi;	tinggi; l) Mendorong peningkatan Kerjasama investasi dan alih teknologi industri pengolahan anorganik dari mineral laut; m) Meningkatkan standar SNI produk vulkanisir ban, komponen, industri komponen dari karet untuk keperluan industri dan turunannya; n) Meningkatkan fasilitasi uji mutu produk pemesinan, industri komponen dari karet untuk keperluan industri dan vulkanisir ban, serta produk anorganik mineral dari laut, pada pengembangan Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI) maupun pengembangan BPSMB di daerah;	non logam dalam proses produksi di Provinsi Kepri; m) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk sirkular ekonomi, produk kertas kemasan atau kertas untuk industri; n) Meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk sirkular ekonomi di dalam dan luar negeri, produk kertas kemasan atau kertas untuk industri;
p) Memperkuat pemodal dan memfasilitasi kemudahan akses pembiayaan industri untuk pengembangan industri pemesinan dan penerapan industri 4.0 pada proses otomatisasi mesin elektronik dan mesin pengolahan di industri pangan;	o) Kerjasama peningkatan SDM Industri melalui program vokasi industri;	o) Mendorong Penumbuhan dan pengembangan industri sirkular ekonomi Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar di dalam kawasan industri;
q) Memfasilitasi study kelayakan pengembangan industri komponen dari karet dan bahan penolong berbahan dasar gambir serta mengadakan workshop pelatihan pembuatan industri komponen dan bahan penolong;	p) Peningkatan sarana dan prasarana logistik penyediaan bahan baku terpadu untuk mensupply kebutuhan industri pemesinan, industri komponen dan industri lainnya yang membutuhkan logam dan non logam dalam proses produksi di Provinsi	p) Mendorong penumbuhan kawasan industri sirkular ekonomi di Provinsi Kepri dalam menumbuhkan industri Marine Fuel Oil (MFO) dan Solar.
r) Memfasilitasi workshop		

Rencana Aksi		
perancangan pabrik, jasa proses industri, dan jasa pemeliharaan mesin / peralatan industri dalam mengembangkan Jasa Industri di Provinsi Kepri; s) Pengembangan dan pembangunan kluster industri barang modal, komponen industri dan bahan penolong dalam meningkatkan investasi di Provinsi Kepri; t) Meningkatkan kemampuan mesin dan peralatan pendukung melalui bantuan revitalisasi mesin dan bantuan peralatan/pemesinan pada industri barang modal dan komponen berbahan dasar karet lokal di Provinsi Kepri; u) Mendorong peningkatkan penyertaan modal swasta dan pemerintah dalam menumbuhkan kembangkan industri barang modal (pemesinan), industri komponen dan barang penolong; v) Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi dan mekatronik/robotika;	Kepri; q) Pengembangan Sistem Informasi Logistik penyediaan bahan baku terpadu untuk mensupply kebutuhan industri pemesinan, industri komponen dan industri lainnya yang membutuhkan logam dan non logam dalam proses produksi di Provinsi Kepri; r) Meningkatkan daya saing produk sirkular ekonomi, produk kertas kemasan atau kertas untuk industri; s) Meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk sirkular ekonomi, produk kertas kemasan atau kertas untuk industri; t) Mendorong Penumbuhan dan pengembangan industri sirkular ekonomi Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar di dalam kawasan industri; u) Mendorong penumbuhan kawasan industri sirkular ekonomi di Provinsi Kepri dalam menumbuhkan industri Marine Fuel Oil (MFO) dan Solar.	

Rencana Aksi		
w) Mendorong terbentuknya balai pengujian dan peningkatan fasilitasi pengujian standardisasi industri pemesinan dan komponen dalam meningkatkan pemasaran produk pemesinan dan bahan penolong ke dalam dan luar negeri; x) Peningkatan sarana dan prasarana logistik penyediaan bahan baku terpadu untuk mensupply kebutuhan industri pemesinan, industri komponen dan industri lainnya yang membutuhkan logam dan non logam dalam proses produksi di Provinsi Kepri; y) Mendorong Peningkatan penerapan industri 4.0 pada industri sirkular ekonomi dalam menumbuhkan industri sirkular yang efektif dan efisien; z) Bekerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi dalam menumbuhkan industri kertas kemasan atau kertas untuk industri, produk kertas cetak (karton) dari berbahan baku sisa limbah industri sagu (batang sagu); aa) Mendirikan pilot project		

Rencana Aksi		
industri produk kertas cetak (karton) dari berbahan baku sisa limbah industri sagu (batang sagu) di Provinsi Kepri.		
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau		

I. Industri Kimia Dasar

Tabel 4.24 memuat rencana program pembangunan Industri kimia dasar.

Tabel 4.24 Program Industri Kimia Dasar

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Mendorong dan memfasilitasi penumbuhan investasi industri di sektor industri pupuk di Provinsi Kepri; b) Meningkatkan investasi dan alih teknologi melalui promosi dan temu bisnis pembangunan industri pupuk di Provinsi Kepri; c) Melakukan kajian kebutuhan kuota hidrokarbon dan mendorong kebijakan pemberian kuota dari potensi hidrokarbon (DMO), untuk kebutuhan bahan baku pengembangan industri Pupuk di Provinsi Kepri; d) Memfasilitasi penumbuhan industri Pupuk berbasis hidrokarbon di dalam kawasan industri; e) Mendorong investasi penyediaan lahan untuk	a) Tercipta struktur Industri Pupuk dari Hidrokarbon (industri petrokimia) yang semakin kuat; b) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi industri petrokimia hulu melalui Kerjasama dengan industri pupuk dalam rangka penguatan dan pendalaman strukrur industri petrokimia; c) Mendorong dan memfasilitasi kajian investasi industri pupuk berbasis hidrokarbon dalam mengembangkan industri petrokimia; d) Memfasilitasi kajian pengembangan industri pupuk organik di Provinsi Kepri; e) Memfasilitasi kajian pengembangan industri intermediate untuk bahan	a) Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi industri pupuk berbasis hidrokarbon dan pupuk organik; b) Penguatan strukturisasi industri dengan meningkatkan keterkaitan antara kebutuhan bahanb baku dengan Industri pupuk; c) Terintegrasinya industri migas dengan industri pupuk berbasis hidrokarbon melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien; d) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan skala besar dengan orientasi ekspor;

Sasaran		
pembangunan Industri Pupuk Organik di Provinsi Kepri; f) Tercipta struktur Industri Pupuk yang semakin kuat; g) Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan industri pupuk berbasis hidrokarbon; h) Terwujudnya keseimbangan pasokan rumput laut, menjadi pupuk organik /Biostimulan; i) Meningkatkan produksi rumput laut untuk pengembangan industri Biostimulan; j) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pupuk organik, biostimulan untuk kebutuhan dalam negeri; k) Mendorong pengembangan industri pupuk organik melalui Program Manajemen Sampah <i>Zero</i> dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; l) Membangun industri dan mendorong peran serta perusahaan lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan Industri Pengolahan Sampah dan Limbah menjadi pupuk organik; m)Mendorong terciptanya industri pupuk dari	baku industri pupuk (Pupuk tunggal berbasis Nitrogen, Asam Phosphate, Kalium dan pupuk majemuk); f) Memfasilitasi investor dalam mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku hidrokarbon dan pasar dalam pendirian pabrik industri pupuk; v) Meningkatkan Kerjasama kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa industri pupuk organik dan industri pupuk berbasis hidrokarbon melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi antara Lembaga peneliti/ perguruan tinggi, investor dan pemerintah daerah; w) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; x) Mendirikan dan memfasilitasi pendirian lembaga pengujian produk pupuk melalui Balai Pengujian Produk dan standardisasi Industri; y) Pembinaan SDM lokal yang kompeten di bidang Industri pupuk melalui Pendidikan dan pelatihan.	e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi industri Pupuk Organik, berskala besar dengan orientasi ekspor; f) Pengembangan kerjasama antara produsen industri pupuk berbasis hidrokarbon sehingga terjamin keberlanjutannya; g) Harmonisasi tarif produk pupuk berbasis hidrokarbon; h) Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan oleh industri dengan pemberian insentif. i) Pengembangan iklim usaha yang lebih mendorong, dan melindungi kepada para pelaku usaha di Industri pupuk berbasis hidrokarbon maupun industri pupuk organik untuk tumbuh berkembang; j) Pengembangan pasar produk Industri pupuk anorganik berbasis hidrokarbon dan industri pupuk organik; k) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan produksi Senyawa Kimia sebagai bahan penolong industri

Sasaran		
pengolahan limbah dan sampah dengan mendorong sisa hasil perkebunan/pertanian untuk mendukung industri pengolahan limbah dan sampah menjadi produk pupuk organik; n) Masyarakat mampu melakukan pemilahan sampah organik dan mendistribusikan sampah terpilah ke industri pengolahan pupuk organik; o) Didirikannya Industri pengolahan pupuk organik dari pengolahan limbah dan sampah skala pilot; p) Mendorong Penyediaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Limbah dan Sampah Organik dari Kawasan Industri maupun di Sentra-sentra Industri potensial yang terintegrasi dengan industri pupuk organik dari pengolahan limbah dan sampah; q) Tumbuhnya investasi industri pupuk organik dari pengolahan Limbah dan Sampah (<i>circular economy</i>) baik skala Kecil, Menengah maupun besar; r) Dukungan Sistem Informasi dalam meningkatkan rantai pasok industri pupuk dari pengolahan limbah dan sampah;		pupuk; l) Pembinaan SDM lokal yang kompeten di bidang Industri pupuk melalui Pendidikan dan pelatihan.

Sasaran		
s) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; t) Pembinaan SDM lokal yang kompeten di bidang Industri pupuk melalui Pendidikan dan pelatihan; u) Dukungan kebijakan dan iklim usaha industri pupuk berbasis hidrokarbon dan industri pupuk organik dari pengolahan limbah dan sampah.		
Strategi		
a) Meningkatkan kapasitas produksi pupuk di Provinsi Kepri; b) Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku industri pupuk; c) Restrukturisasi usaha (merger dan akuisisi); d) Mengembangkan teknologi proses dan nilai tambah; e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan, rekayasa (engineering industri) dan restrukturisasi mesin dan peralatan pabrik pupuk di Provinsi Kepri; f) Menstimulasi investasi pada Industri pupuk berbasis hidrokarbon maupun pupuk organik (kimia dasar) serta memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk pengembangan industri kimia dasar, menjamin ketersediaan SDM dan peningkatan kandungan lokal; g) Meningkatkan kerjasama usaha dan integrasi industri migas dengan industri petrokimia; h) Memenuhi kebutuhan pasar; i) Mengembangkan dan membangun industri pupuk didalam kawasan industri dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, maupun di daerah klaster industri petrokimia yang berdaya saing; j) Menetapkan klaster-klaster pemasaran; k) Mengembangkan informasi pasar; l) Ikut berpartisipasi dan meningkatkan pameran produk industri pupuk di Provinsi Kepri; m) Melalui Kementerian Perindustrian meningkatkan koordinasi dengan kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Koordinator Bidang Keekonomian terkait pengembangan industri pupuk berbasis hidrokarbon (industri petrokimia) dengan menggunakan pipa gas Natuna.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Melakukan kajian	a) Mendorong pengembangan	a) Meningkatkan

Rencana Aksi		
kelayakan pembangunan industri pupuk di Provinsi Kepri dan penyusunan peta jalan; b) Memfasilitasi pembangunan industri pupuk berbasis hidrokarbon didalam kawasan industri petrokimia; c) Memfasilitasi kajian kelayakan pembangunan industri dan kelayakan lokasi pembangunan industri pupuk organik; d) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik pupuk (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll); e) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku dalam pembangunan industri pupuk; f) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Industri pupuk berbasis hidrokarbon melalui pembangunan komplek atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; a) Melakukan Kajian	industri pupuk berbasis hidrokarbon di Provinsi Kepri; l) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik pupuk (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll); m) Fasilitasi pengembangan Industri petrokimia melalui pembangunan komplek atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; n) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku; b) Mendorong Kerjasama inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas pupuk dengan Lembaga peneliti/ perguruan tinggi, pelaku usaha dan pemerintah daerah; c) Memperluas aplikasi pengembangan produk/ komoditi dan <i>engineering product</i>; d) Pengembangan Industri pupuk dengan memanfaatkan pipa gas Natuna; e) Peningkatan fasilitas	ketersediaan bahan baku untuk industri pupuk berbasis hidrokarbon; b) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku; c) Pengembangan industri pupuk yang terintegrasi dengan petrokimia hulu, dalam meningkatkan jaminan dan ketersediaan bahan baku; d) Fasilitasi pengembangan Industri pupuk berbasis hidrokarbon melalui pembangunan komplek atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; e) Memfasilitasi kerjasama dan terbukanya pasar industri pupuk baik dalam dan luar negeri; f) Mendorong kerjasama inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas produk pupuk dengan Lembaga peneliti/ perguruan tinggi, pelaku usaha dan pemerintah daerah; i) Pengembangan Industri pupuk dengan memanfaatkan pipa gas Natuna; j) Membangun Sistem informasi pemasaran

Rencana Aksi		
terhadap Penyertaan modal pemerintah daerah dalam ikut mendorong pengembangan industri pupuk berbasis hidrokarbon di Provinsi Kepri; b) Melakukan kajian identifikasi kebutuhan industri penunjang dalam pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan mendorong peran serta perusahaan lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra; c) Mendorong Pengintegrasian produk Petrokimia hulu menjadi produk petrokimia hilir (industri pupuk); g) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang link dan match dengan kebutuhan industri; h) Mendorong pembangunan pusat Pendidikan vokasi industri dan pengembangan SDM Industri dengan jurusan kimia dasar bekerjasama dengan universitas lokal dan kementerian perindustrian RI; i) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Lokal dengan mendorong ketersediaan jurusan kimia dasar setara D2/D3/S1 di universitas	pengujian kualitas mutu produk pupuk melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu pada laboratorium pengujian produk dan standarisasi Industri (BPPSI); f) Mendorong peningkatan standarisasi SNI bagi produk pupuk; g) Meningkatkan inovasi produk industri hulu agro (pupuk organik/biostimulan); h) Meningkatkan kompetensi SDM Industri kimia dasar melalui pendidikan dan pelatihan; o) Meningkatkan kerjasama antar DUDI dan Universitas dalam meningkatkan kesiapan SDM Lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja Industri.	pupuk dan pengembangan jaringan usaha di Provinsi Kepri dan meningkatkan kerjasama bersama asosiasi; k) Menciptakan <i>strategic partnership</i>; l) Meningkatkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri; m) Meningkatkan daya saing produk pupuk dengan cara meningkatkan kualitas produk dan harga yang bersaing; n) Memperbaiki pola pemasaran, distribusi dan pengawasan industri pupuk dan produk pupuk yang beredar; o) Melibatkan konsumen sebagai “saluran” untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas produk pupuk; p) Peningkatan Pangsa pasar produk pupuk, pupuk organik/biostimulan, dan meningkatkan pengawasan standarisasi SNI; q) Meningkatkan kompetensi SDM Industri kimia dasar melalui pendidikan dan pelatihan.

Rencana Aksi		
lokal dengan jurusan kimia dasar untuk dididik dan disalurkan ke industri; j) Menerapkan strategi pasar yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan luar negeri; k) Melakukan pengembangan Industri pupuk berbasis hidrokarbon dengan memanfaatkan pipa gas Natuna; j) Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya industri pupuk organik dan biostimulant; k) Meningkatkan kerjasama Investasi dalam mengembangkan industri biostimulan melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; l) Penerapan standardisasi untuk produk Pupuk Organik, biostimulan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitasi pengujian produk pupuk organik, melalui pendirian Balai Pengujian Produk dan standardisasi Industri; m) Mendorong kerjasama Program Manajemen Sampah <i>Zero</i> antar pemda kab/kota dan industri pupuk; a) Pengembangan dan pembangunan industri pupuk organik dari pengolahan limbah dan		

Rencana Aksi		
sampah dan sisa hasil perkebunan/pertanian; b) Melatih dan mengarahkan masyarakat agar melakukan pemilahan sampah dan mendistribusikan sampah organik ke industri pengolahan pupuk; c) Mendirikan dan menyusun study kelayakkan Industri pengolahan pupuk organik dari pengolahan limbah dan sampah skala pilot; d) Tumbuhnya investasi industri pupuk organik dari pengolahan Limbah dan Sampah (<i>circular economy</i>) baik skala Kecil, Menengah maupun besar; e) Membuat Sistem Informasi Manajemen sampah zero dalam meningkatkan rantai pasok industri pupuk organik dari pengolahan limbah dan sampah.		
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau		

J. Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara

Tabel 4.25 memuat rencana program pembangunan Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Tabel 4.25 Program Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Mendorong dan memfasilitasi penumbuhan investasi	a) Terjamin ketersediaan bahan baku; b) Tercipta struktur Industri	a) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi

Sasaran		
industri di sektor industri petrokimia hulu, kimia organik, dan industri resin sintetis dan plastik di Provinsi Kepri dengan memanfaatkan potensi migas di Provinsi Kepri; b) Memfasilitasi kajian pengembangan industri petrokimia hulu dan kimia organik dan melakukan kajian terhadap Penyertaan modal pemerintah daerah dalam ikut mendorong pengembangan industri petrokimia hulu dan kimia organik di Provinsi Kepri; c) Melakukan kajian kebutuhan kuota hidrokarbon dan mendorong kebijakan pemberian kuota dari potensi hidrokarbon (DMO), untuk kebutuhan bahan baku pengembangan industri Petrokimia hulu, kimia organik dan industri resin Resin Sintetik dan Bahan Plastik di Provinsi Kepri; d) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; e) Terjamin ketersediaan bahan baku; f) Menerapkan strategi pasar yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan luar negeri;	Petrokimia yang semakin kuat; c) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi petrokimia hulu melalui Kerjasama dengan industri antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia; d) Mendorong dan memfasilitasi kajian investasi petrokimia antara dan hilir dalam meningkatkan pemberdayaan industri khususnya dalam mengembangkan industri resin, sintetis dan bahan plastik; e) Memfasilitasi investor dalam mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku hidrokarbon dan pasar dalam pendirian pabrik industri petrokimia hulu, kimia organik, dan industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik; r) Meningkatkan Kerjasama kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri kimia dasar berbasis migas dari industri karet alam dan <i>green asphalt</i> melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi antara	nasional untuk mengembangkan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara; b) Penguatan strukturisasi industri dengan penguatan klaster industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara; c) Terintegrasinya industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien; d) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara skala besar dengan orientasi ekspor; e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi industri petrokimia hulu, kimia organik, Industri resin sintetis dan bahan plastik skala besar dengan orientasi ekspor; f) Pengembangan kerjasama antara produsen bahan kimia dan industri petrokimia hulu dan kimia dasar sehingga terjamin keberlanjutannya; g) Harmonisasi tarif produk

Sasaran		
g) Tercipta struktur Industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara yang semakin kuat;	Lembaga peneliti/ perguruan tinggi, investor dan pemerintah daerah;	petrokimia hulu-hilir;
h) Membangun infrastruktur pendukung pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara;	s) Pengembangan produksi karet alam menjadi crumb rubber, dan ribbed smoked sheet rubber untuk kebutuhan industri;	h) Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan oleh industri dengan pemberian insentif.
i) Meningkatkan kerjasama kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri kimia dasar berbasis migas, yaitu Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) dari Limbah Plastik, Biji Plastik dan industri karet alam melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi antara Lembaga peneliti/ perguruan tinggi, investor dan pemerintah daerah;	t) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten;	i) Pengembangan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pelaku usaha di Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk tumbuh berkembang;
j) Mendorong pengembangan industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) melalui Program Manajemen Sampah <i>Zero</i> dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;	n) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara melalui Pendidikan dan Pelatihan;	j) Pengembangan produk akhir industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara;
k) Mendorong terciptanya industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) dari pengolahan sampah, dan mendorong peran serta perusahaan	p) Meningkatkan kerjasama antar DUDI dan lembaga pendidikan (SMK dan Universitas) dalam meningkatkan kesiapan SDM Lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja Industri;	k) Pengembangan pasar produk Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara;
	q) Pengembangan Fasilitas Balai pengujian produk dan Standarisasi Industri produk Karet Alam dan produk Resin Sintetik dan Bahan Plastik menjadi berbagai jenis produk Karet Alam.	l) Peningkatan kemampuan produksi Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara;
		m) Peningkatan produk Resin Sintetik dan Bahan Plastik dan produk dari karet alam untuk kegunaan industri skala besar berorientasi ekspor dan dalam negeri.

Sasaran		
lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan Industri Pengolahan Sampah menjadi Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) dari Limbah Plastik, Biji Plastik; l) Tumbuhnya investasi industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) dari sampah plastik (<i>circular economy</i>) baik skala Kecil, Menengah maupun besar; m) Peningkatan status lokasi bagi perusahaan industri pengolahan karet alam yang berlokasi di Provinsi Kepri untuk berada di Kawasan Peruntukan Industri; n) Memfasilitasi pengendalian dampak sosial dan lingkungan dari pertumbuhan industri karet alam di Provinsi Kepri; o) Pengembangan difersifikasi dan produksi karet alam lateks pekat, crumb rubber, dan ribbed smoked sheet rubber untuk kebutuhan industri; p) Dukungan kebijakan dan iklim usaha industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara di Provinsi		

Sasaran		
Kepri; q) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten untuk mendorong pertumbuhan industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara.		
Strategi		
a) Meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk; b) Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku; c) Restrukturisasi usaha (merger dan akuisisi); d) Mengembangkan teknologi proses dan nilai tambah; e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan pabrik; f) Menstimulasi investasi pada Industri kimia dasar berbasis migas serta memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk pengembangan industri kimia dasar berbasis migas; Menjamin ketersediaan SDM dan peningkatan kandungan lokal; g) Meningkatkan kerjasama usaha dan integrasi industri migas dengan industri petrokimia; h) Memenuhi kebutuhan pasar; i) Mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah klaster industri petrokimia yang berdayasaing; j) Menetapkan klaster-klaster pemasaran; k) Mengembangkan informasi pasar; l) Meningkatkan pameran produk; m) Melalui Kementerian Perindustrian meningkatkan koordinasi dengan kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Koordinator Bidang Keekonomian terkait pengembangan industri petrokimia dengan menggunakan pipa gas Natuna.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Melakukan kajian kelayakan dan kelayakan lokasi dalam pengembangan Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, Petrokimia Hulu, Kimia Organik dan Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik di Provinsi Kepri dan penyusunan	a) Mendorong pengembangan industri Petrokimia Hulu, Kimia Organik dan Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik di Provinsi Kepri; b) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah	a) Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku untuk Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara; b) Melakukan pengembangan kerjasama kerjasama pembentukan perusahaan patungan antara BUMD/BUMN dengan

Rencana Aksi		
peta jalan; b) Meningkatkan investasi dan alih teknologi melalui promosi dan temu bisnis pembangunan industri Petrokimia Hulu dan Kimia Organik di Provinsi Kepri; c) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu, industri kimia organik dan industri pengolahan karet alam (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll); d) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMD/BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku; e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Industri Petrokimia melalui pembangunan kompleks atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; u) Melakukan kajian identifikasi kebutuhan industri penunjang dalam pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan mendorong peran serta	dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu, industri kimia organik dan industri pengolahan karet alam (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll); c) Melakukan kajian kelayakan dan kelayakan lokasi dalam pengembangan industri resin sintetik dan bahan plastik di Provinsi Kepri; d) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik resin plastik dan bahan plastik (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, Amdal, dll); e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Industri Petrokimia melalui pembangunan kompleks atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; f) Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama industri (barang plastik); g) Melakukan kerjasama atau pembentukan	perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku; c) Pengembangan industri Petrokimia hulu, kimia organik, industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik serta Industri Karet Alam di Provinsi Kepri; d) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi Industri Petrokimia hulu, kimia organik, industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik melalui pembangunan kompleks atau Kawasan Industri Petrokimia terpadu; e) Memfasilitasi terbukanya pasar industri petrokimia hulu, kimia organik, industri resin sintetik dan bahan plastik dan industri dari Karet Alam melalui kerjasama hulu dan hilir; f) Menciptakan <i>strategic partnership</i>; g) Mendorong Kerjasama inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas produk bahan Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara dengan Lembaga peneliti/perguruan tinggi, pelaku usaha dan pemerintah daerah; p) Pengembangan produk

Rencana Aksi		
perusahaan lokal untuk berpartisipasi sebagai industri penunjang; v) Mendorong Pengintegrasian produk kilang ke dalam Industri Petrokimia; f) Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>); g) Masyarakat mampu melakukan pemilahan sampah dan mendistribusikan sampah anorganik terpilah ke industri; h) Didirikannya Industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) skala pilot; i) Mendorong Penyediaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Sampah Anorganik dari Kawasan Industri maupun di Sentra-sentra Industri potensial yang terintegrasi dengan industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) skala pilot; j) Dukungan Sistem Informasi dalam meningkatkan rantai pasok industri Pellet Penguat Jalan Aspal (<i>Green Asphalt</i>) dari pengolahan sampah; k) Kajian kelayakan pengembangan industri dan produksi dari produk	perusahaan patungan antara BUMD/BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku; h) Mendorong Kerjasama inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas produk kimia dasar berbasis migas dengan Lembaga peneliti/perguruan tinggi, pelaku usaha dan pemerintah daerah; i) Memperluas aplikasi pengembangan produk/komoditi dan <i>engineering product</i>; j) Pengembangan industri karet alam menjadi lateks pekat, crumb rubber, dan ribbed smoked sheet rubber untuk kebutuhan industri; k) Mendorong peningkatan standardisasi SNI bagi produk kimia dasar berbasis migas dan batu bara; l) Meningkatkan produksi dan pemasaran industri kimia dasar berbasis migas dan batubara melalui peningkatan fasilitas Balai Pengujian Produk dan Standardisasi Industri; m) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang	karet alam menjadi lateks pekat, crumb rubber, dan ribbed smoked sheet rubber untuk kebutuhan industri. q) Membangun pusat informasi atau database untuk Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara dengan meningkatkan kerjasama dengan asosiasi Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara; r) Meningkatkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri melalui promosi dan temu bisnis; s) Mengembangkan <i>centre of excellence</i> Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara t) Membangun <i>refinery</i> yang berintegrasi dengan dalam satu kawasan industri petrokimia terpadu; u) Meningkatkan daya saing produk Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara dengan cara meningkatkan kualitas produk dan harga yang lebih murah; v) Memperbaiki pola pemasaran, distribusi dan pengawasan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara; w) Mengembangkan informasi pemasaran dan

Rencana Aksi		
karet alam menjadi lateks pekat, crumb rubber, dan ribbed smoked sheet rubber untuk kebutuhan industri dan memperbaiki kualitas produksi lateks dan crum rubber yang dihasilkan saat ini; o) Meningkatkan kerjasama Investasi dalam mengembangkan industri karet alam melalui alih teknologi dan akses pasar ekspor; p) Fasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran industri pengolahan Karet Alam dan Resin Sintetik dan Bahan Plastik, melalui pendirian Balai Pengujian Produk dan Standardisasi Industri; q) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang link dan match dengan kebutuhan industri; r) Mendorong kerjasama pengembangan pendidikan vokasi industri di lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di Provinsi Kepri; s) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Lokal dengan mendorong ketersediaan jurusan kimia dasar berbasis migas dan batubara yang setara D2/D3/S1 di universitas lokal untuk dididik dan	link dan match dengan kebutuhan industri; n) Mendorong kerjasama pengembangan pendidikan vokasi industri di lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di Provinsi Kepri; o) Meningkatkan kompetensi SDM Industri Lokal dengan mendorong ketersediaan jurusan kimia dasar berbasis migas dan batubara yang setara D2/D3/S1 di universitas lokal untuk dididik dan disalurkan ke industri.	pengembangan jaringan usaha; x) Melibatkan konsumen sebagai “saluran” untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas produk Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara; y) Peningkatan pengawasan standardisasi SNI produk Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara; z) Meningkatkan kompetensi SDM Industri kimia dasar berbasis Migas dan Batu Bara melalui pendidikan dan pelatihan.

Rencana Aksi		
disalurkan ke industri.		
Lokasi pengembangan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau		

K.Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Tabel 4.26 memuat rencana program pembangunan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Tabel 4.26 Program Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Non Logam

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034-2043
a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam berbasis alumina dalam memenuhi permintaan pasar; b) Meningkatnya investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina; c) Penguatan strukturisasi industri dengan terciptanya Kerjasama industri hulu dan hilir Industri berbasis logam dasar berbasis alumina; d) Didirikannya industri logam dasar dan bahan galian bukan logam di Kepulauan Riau yang difasilitasi kebijakan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus; e) Mendorong dan memfasilitasi kajian pengembangan industri pasir kuarsa; f) Mendorong dan memfasilitasi kajian	a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam berbasis alumina dalam memenuhi permintaan pasar; b) Meningkatnya investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina; c) Peningkatan strukturisasi industri dengan terciptanya Kerjasama industri hulu dan hilir Industri berbasis logam dasar berbasis alumina; d) Didirikannya industri logam dasar dan bahan galian bukan logam di Kepulauan Riau yang difasilitasi kebijakan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus; e) Pengembangan Industri berbasis pasir kuarsa; f) Pengembangan industri berbasis batu granit	a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam berbasis alumina dalam memenuhi permintaan pasar; b) Meningkatnya investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina; c) Penguatan struktur industri d) Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang memenuhi standar sertifikasi dalam memenuhi pasar dalam negeri; e) Peningkatan efisiensi penggunaan energi; f) Makin tingginya daya saing industri pengolahan logam dasar berbasis alumina di pasar domestik dan ekspor; g) Peningkatan pengembangan Industri berbasis pasir kuarsa; h) Peningkatan memfasilitasi penerapan industri hijau; i) Meningkatkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam

Sasaran		
pengembangan industri barag galian bukan logam lainnya menjadi industri Ubin, dan panel dinding; g) Memfasilitasi penerapan industri hijau; h) Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; i) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang link dan match dengan kebutuhan industri logam dasar bukan besi (alumina); j) Mendaur ulang limbah /sampah dari bahan galian non logam menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi melalui teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; k) Mendorong investasi dalam meningkatkan peran dan berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Industri Pengolahan Sampah/ Limbah bahan galian logam dan non logam; l) Tumbuhnya investasi industri pengolahan Limbah/Sampah (<i>circular economy</i>) berbahan galian non logam skala Kecil dan Menengah; m) Pembinaan SDM lokal	menjadi Ubin, dan panel dinding; g) Memfasilitasi penerapan industri hijau; h) Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; i) Dukungan regulasi dalam pengembangan Industri Pengolahan Limbah dari daur ulang logam; j) Didirikannya industri pengolahan sirkular ekonomi berbasis daur ulang logam dan bahan galian non logam, terutama di wilayah pusat pertumbuhan industri; k) Mendukung Dibangunnya infrastruktur pengelolaan limbah daur ulang logam melalui pembentukan kawasan industri; l) Pengembangan ketersediaan dan kompetensi SDM lokal yang kompeten di bidang Industri Pengolahan Limbah daur ulang logam, bahan galian logam dan non logam; m) Meningkatkan mutu standar produk dari hasil pengolahan limbah (sirkular ekonomi) di	negeri; j) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang link dan match dengan kebutuhan industri logam dasar bukan besi (alumina); k) Peningkatan dan pengembangan investasi kawasan Industri Pengolahan Daur Ulang (Sirkular Ekonomi) dan industri Pengolahan Daur Ulang (Sirkular Ekonomi) di Kawasan Industri; l) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan dari pengolahan pengolahan limbah daur ulang logam dan bahan galian non logam dan perluasan pasar; m) Penguatan rantai <i>supply-demand</i> antara industri daur ulang dengan penyedia bahan baku dan mengeliminasi kendala regulasi dalam pengembangannya; n) <i>Transfer knowledge</i> teknologi pengolahan limbah pengolahan daur ulang logam dan bahan galian non logam melalui peningkatan investasi; o) Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM industri di bidang Industri Pengolahan Limbah daur ulang logam dan bahan galian non logam

Sasaran		
yang kompeten di bidang Industri logam dan bahan galian non logam serta industri sirkular berbasis logam dan bahan galian non logam melalui Pendidikan dan pelatihan; n) Dukungan kebijakan dan iklim usaha pengembangan industri pengolahan limbah dari daur ulang logam di Provinsi Kepri.	Provinsi Kepri.	melalui Pendidikan dan pelatihan; p) Peningkatan Kerjasama bersama Lembaga penelitian/universitas, dalam pengembangan dan implementasi teknologi; q) Meningkatnya implementasi pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait untuk mengembangkan industri pengolahan limbah daur ulang logam, logam dan bahan galian non logam.
Strategi		
a) Memperkuat kelembagaan; b) Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM; c) Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik; d) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; e) Meningkatkan daya saing; f) Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan. g) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana. h) Mendorong investasi melalui kebijakan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus;		

Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034-2043
a) Memfasilitasi peningkatan investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina menjadi alumina powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; b) Peningkatan sarana dan	a) Memfasilitasi peningkatan investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina menjadi alumina powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; b) Peningkatan sarana dan	a) Memfasilitasi peningkatan investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar bukan besi berbasis alumina menjadi alumina powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade

Rencana Aksi		
prasarana pengembangan industri logam dasar bukan besi berbasis alumina menjadi alumina powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; c) Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan ekonomi khusus untuk industri pengolahan logam dasar non besi (alumina) dan infrastruktur pendukung dalam pengembangan Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; d) Meningkatkan kompetensi SDM industri meliputi peningkatan kemampuan dalam teknologi rekayasa <i>engineering</i> dan pengelolaan manajemen; e) Melakukan pendataan lokasi dan cadangan penambangan batu granit dan pasir kuarsa serta menghitung kelayanan ekonomis dalam mengembangkan industri dan investasi; f) Fasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan; g) Mendorong penyediaan	prasarana pengembangan industri logam dasar bukan besi berbasis alumina menjadi alumina powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; c) Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan ekonomi khusus untuk industri pengolahan logam dasar non besi (alumina) dan infrastruktur pendukung dalam pengembangan Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya powder, aluminium ingot dan carbone anode dan chemical grade alumina; d) Memperkuat kelembagaan dan payung hukum dan penyelesaian kelengkapan regulasi untuk daerah-daerah yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pengolahan sumber daya industri logam dasar dan bahan galian non logam di Provinsi Kepri; e) Peningkatan fasilitas pengujian produk logam dasar bukan besi dan bahan galian non logam pada pusat pengujian standardisasi produk; f) Meningkatkan aksesibilitas	alumina; b) Memfasilitasi penguatan struktur industri dengan Kerjasama antara industri intermediet dengan industri hilir berbasis industri logam dasar bukan besi; c) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk pengolahan logam dan bahan galian non logam; d) Menerapkan dan mengawasi produk SNI turunan alumina dan produk dari turunan industri bahan galian bukan logam; e) Pengembangan inovasi produk berbasis logam dasar bukan besi dan Industri Bahan Galian Non logam serta penerapan teknologi melalui Kerjasama dengan Lembaga penelitian/perguruan tinggi dan pelaku usaha; f) Memfasilitasi perluasan akses pasar bagi industri hilirisasi alumina dan bahan galian non logam; g) Kemudahan akses finansial/permodalan bagi industri yang memanfaatkan bahan baku lokal dalam mengembangkan industri berbasis

Rencana Aksi		
fasilitas pengujian standardisasi produk logam dasar bukan besi dan bahan galian non logam di Provinsi Kepri; h) Melakukan komunikasi secara intensif dengan para stakeholder, pelaku usaha industri dalam pengembangan industri pasir kuarsa dan batu granit di Provinsi Kepri; i) Mendorong pembangunan pusat Pendidikan dan pelatihan vokasi industri yang link dan match dengan pengembangan industri; j) Memfasilitasi kajian pembangunan pusat Pendidikan vokasi industri dan pengembangan SDM Industri dengan jurusan industri logam dasar bukan besi (alumina) dan turunannya; k) Peningkatan kompetensi SDM Industri pengolahan logam, pasir kuarsa dan industri pengolahan daur ulang logam; l) Mendorong dan memfasilitasi pembangunan industri scrapt besi dan baja sebagai industri pendukung bahan baku untuk industri daur ulang logam dasar menjadi besi ulir dan besi beton dan	pendanaan bagi pengembangan industri pengolahan pasir kuarsa dan batu granit; g) Mendorong peningkatan Kerjasama investasi dan alih teknologi industri pengolahan batu granit dan pasir kuarsa; h) Kerjasama penelitian pengembangan produk dan pengembangan teknologi dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi dalam mengembangkan industri pasir kuarsa dan batu granit; i) Memfasilitasi pengembangan desain rekayasa teknologi serta design fabrikasi industri bahan galian non logam yang hemat energi dan berwawasan lingkungan. j) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pabrik kaca dan bata ringan; k) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pabrik pengolahan granit; l) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui Pendidikan vokasi yang link dan match dengan kebutuhan industri logam dasar bukan besi (alumina);	alumina dan bahan galian non logam; h) Menjamin penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku untuk industri yang bekerjasama dengan industri smelter alumina dalam mengembangkan hilirisasi industri logam dasar non besi; i) Memfasilitasi branding untuk produk industri logam non besi dan bahan galian non logam dalam merk dan terstandar; j) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam penggunaan bahan baku, emisi debu/asap dan efisiensi energi; k) Pengembangan Balai Pengujian dan standardisasi (BPSMB) Industri Logam dasar dan Bahan Galian Non Logam; l) Memfasilitasi penyiapan zona kawasan untuk pengembangan industri pasir kuarsa dan batu granit; m) Penyiapan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industri pasir kuarsa dan batu granit;

Rencana Aksi		
turunan produk logam dasar lainnya; m) Mendorong peningkatan pemasaran dan memudahkan distribusi scrapt besi baja sebagai bahan baku industri logam dasar; n) Mendorong partisipasi investor asing di industri pengolahan daur ulang logam melalui alih teknologi.	m) Pembangunan pusat Pendidikan vokasi industri dan pengembangan SDM Industri dengan jurusan industri logam dasar bukan besi (alumina) dan turunannya; n) Peningkatan kompetensi SDM Industri pengolahan logam, pasir kuarsa dan industri pengolahan daur ulang logam; o) Meningkatkan pengolahan Industri logam dasar berbasis scrapt besi dan baja dengan mendorong dan memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (special steel) termasuk baja paduan untuk industri pemesinan, otomotif dan alat berat; p) Mengembangkan dan meningkatkan pemasaran produk hasil pengolahan limbah bahan galian non logam melalui e-commerse; q) Mendorong industri daur ulang untuk bekerjasama dalam hal <i>recycle</i> bahan galian non logam; r) Bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mengembangkan industri kerajinan dari sampah daur ulang bahan galian non logam; s) Mendorong terciptanya	n) Mendorong pengembangan produk dan alih teknologi industri pasir kuarsa dan granit melalui investasi; o) Fasilitasi untuk ikut pameran nasional dan internasional. p) Pengembangan desain rekayasa teknologi serta design fabrikasi yang hemat energi dan berwawasan lingkungan; q) Peningkatan pusat Pendidikan vokasi industri dan pengembangan SDM Industri dengan jurusan industri logam dasar bukan besi (alumina) dan turunannya; r) Membangun ekosistem industri daur ulang logam dan bahan galian non logam yang terintegrasi; s) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk (standardisasi) hasil pengolahan daur ulang bahan galian non logam; t) Mengintegrasikan jejaring pasokan bahan baku dan pemasaran meliputi; 1) Penyiapan branding untuk produk industri daur ulang

Rencana Aksi		
	inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas dan variasi produk industri daur ulang; t) Meningkatkan kerjasama riset dan inovasi pengembangan produk hilirisasi industri daur ulang bahan galian non logam, bersama Lembaga peneliti/universitas; u) Mendorong partisipasi investor asing di industri pengolahan limbah daur ulang logam melalui alih teknologi; v) Menyiapkan SDM Industri yang kompeten dalam mendukung pengembangan industri pengolahan daur ulang bahan galian logam dan bahan galian non logam melalui pendidikan dan pelatihan.	(produk hasil sirkular ekonomi); 2) Meningkatkan dan memperluas pemasaran produk dari hasil pengolahan limbah baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui promosi dan misi dagang; 3) Mendorong peningkatan akses pembiayaan dan sumber-sumber investasi melalui Kemudahan akses finansial/permodalan ; 4) Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dari limbah industri maupun domestik; u) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana, melalui 1) Penyiapan zona TPS yang terintegrasi dengan industri daur ulang; 2) Penyiapan showroom produk untuk memperluas pasar. v) Menciptakan <i>strategic partnership</i>; w) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset

Rencana Aksi		
		dan pengembangan teknologi industri pengolahan daur ulang; x) Pengembangan inovasi produk-produk hasil pengolahan daur ulang (sirkular ekonomi) dengan bekerjasama dengan Lembaga penelitian/universitas.
Lokasi pengembangan: Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Lingga		

4.4.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Di samping itu dilakukan pula melalui pengembangan kawasan strategis provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan RIPIN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki WPPI yang terdiri dari wilayah Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Melihat kondisi pertumbuhan industri di Kepulauan Riau maka diusulkan empat wilayah tambahan yang direkomendasikan, yakni Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Kepulauan Riau memiliki kawasan strategis provinsi, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Terdapat 4 kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi:

- a. Kawasan strategis Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis, industri logistik, dan transportasi Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang di fokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, pariwisata bahari, industri logistik dan transportasi (*Ship Service*);

- c. Kawasan strategis di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan industri pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan serta perikanan;
- d. Kawasan strategis di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan industri yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan, perindustrian global.

Sesuai dengan arahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dimana wilayah Kepulauan Riau tercakup dalam KSN sudut kepentingan ekonomi yang dibagi menjadi Kawasan FTZ BBK dan Kawasan Perbatasan.

a. Kawasan FTZ BBK

1. Wilayah Batam yang berdasarkan PP No 46 Tahun 2017 meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru dimana kegiatan ekonomi strategis dikawasan tersebut meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya
2. Kawasan Bintan yang berdasarkan PP No 47 Tahun 2007 meliputi Kabupaten Bintan, Kawasan Industri GalangBatang, Kawasan Industri Maritim, Pulau Lobam, Kawasan Industri Senggarang, dan Kawasan Industri Dompok Darat dimana kegiatan ekonomi strategis kawasan tersebut meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya
3. Wilayah Karimun yang berdasarkan PP No 48 Tahun 2007 meliputi Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak dimana kegiatan ekonomi strategis kawasan tersebut meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya

b. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan yang menjadi cakupan Kawasan Strategis Nasional (KSN) juga termasuk kawasan Perbatasan Negara di lingkup Kepulauan Riau yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun meliputi:

1. Sebagian Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam;
2. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan; dan
3. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Belat di Kabupaten Karimun.

Tabel 4.27 Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Tahun 2023 – 2043

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
A	Pengembangan WPPI			
	UMUM	1. Pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus;		
		2. Penyusunan program khusus WPPI, Penyusunan potensi dan Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan;		
		3. Pengusulan Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang sebagai perluasan WPPI di Provinsi Kepri (Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Penetapan KSN Perbatasan di Pulau Parit, Pulau Lumut dan Pulau Tulang);		
		4. Survey dan pemetaan potensi sumber daya industri dalam WPPI (Kabupaten Bintan dan Kota Batam).		
		5. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota;		
		6. Penyusunan Masterplan pengembangan WPPI di Kabupaten Bintan dan Kota Batam.		
		7. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyediaan bahan baku industri;		
		8. Pemetaan penyediaan kebutuhan bahan baku produk industri unggulan provinsi di Kabupaten Karimun (Kec. Kundur) dan wilayah WPPI sebagai penguatan rantai pasok Industri;		
		9. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur di Kab. Bintan dan Batam;		
		10. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan kebutuhan energi (gas) untuk pengembangan industri di Kab. Bintan dan Kota Batam;		
		11. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI (peneraparan super deduction tax untuk industri yang mendukung pengembangan SDM Industri dan pelaku usaha industri manufactur yang melakukan kegiatan litbang) dan pemberian insentif pajak (tax holiday);		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		12. Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung WPPI (Jalan, Pelabuhan, jaringan listrik, jaringan air);		
		13. Pembangunan infrastruktur jaringan energi (gas) untuk mendukung WPPI : a. Jaringan pipa melalui Grissik (pipanisasi gas Grissik (sumsel) – Batam – Singapura); b. Rencana jaringan pipa WNTS (West Natuna Transportation System) dari laut Natuna (Conoco Philips, Premier Oil dan Star Energy) – Singapura melalui WNTS Tie in (Hot Tap) ke P. Pemping - PLTG Tj Ucang, Batam; c. Rencana jaringan pipa gas Natuna D Alpha – Batam – Duri (Riau) yang sumber gas dari blok Natuna D Alpha; d. Jaringan distribusi gas bumi Batam – Bintan – Tanjungpinang;		
		e. Jaringan Distribusi gas Bumi Batam – Karimun; f. Rencana Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal di Batam, Bintan dan Tanjungpinang, yang dapat diangkut dengan kapal tanker, pipa dan truk untuk kebutuhan Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna; g. Pengembangan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) di Batam, Bintan, Tanjungpinang, Lingga dan Karimun yang dapat diangkut dengan tanker atau truk; h. Pembangunan pipa gas ke Kawasan Industri di P. Bintan untuk mendukung ketersediaan Supply Gas untuk mendorong investasi di zona industri halal di Provinsi Kepri sebanyak;		
		14. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM Industri melalui pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi Industri yang Link dan Match dengan kebutuhan Industri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPK) di Kawasan Industri atau di sentra industri potensial, dan <i>Centre of Excellent</i> pengembangan SDM Industri, produk dan teknologi di perguruan tinggi dan Pembangunan Politeknik Industri di Kabupaten Bintan melalui skema (PSDKU);		
		15. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi.		
		16. Pembangunan Balai Pengujian standardisasi Mutu dan standardisasi Barang (BPSMB) di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI);		
		17. Penguatan kerjasama antar WPPI di Provinsi Kepri.		
		18. Melakukan promosi investasi untuk masuk ke dalam WPPI.		
		19. Mendorong pemberian insentif (fiskal) bagi investasi industri halal di Provinsi Kepri;		
		20. Penguatan konektifitas antar WPPI antara lain melalui : a. Major proyek integrasi pembangunan wilayah Batam-Bintan; b. Pengembangan Bintan dan Karimun sebagai wilayah pendukung (spoke) Batam, yaitu Karimun kearah pengembangan Shipyard, Bunkering Services dan supporting industri, Bintan kearah pengembangan Shipyard, Manufacturing dan Supporting Industri;		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		c. dan dukungan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas antar WPPI tersebut melalui peningkatan domestic seaport dan domestic inlet / outlet dan logistic centre;		
		21. Meningkatkan pengelolaan sampah industri di Kawasan Peruntukan Industri yang telah di tetapkan didalam WPPI;		
		22. Penguatan logistik dan sarana prasarana pendukung industri perikanan melalui Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Terpadu.		
B	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri			
	UMUM	1. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengusulan dan penetapan rencana perluasan dan penambahan Kawasan Peruntukan Industri yang akan dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.		
		1. Melakukan review/evaluasi terhadap rencana aksi pengembangan/perluasan KPI dalam penyelenggaraan program pembangunan industri di Kawasan Peruntukan Industri yang telah diusulkan.		
		2. Menyusun perencanaan kebutuhan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan maupun perluasan Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepri.		
		3. Pembangunan infrastruktur pendukung industri (penyediaan energi/listrik, jaringan listrik, jalan, Pelabuhan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepri.		
		4. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan dan perluasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan.		
		5. Melakukan koordinasi dan pembahasan terhadap pengusulan perluasan KPI dan rencana pengembangan KPI dan Penetapan kedalam RTRW Kabupaten Kota dan Provinsi, dari rencana yang telah disetujui.		
		6. Melakukan review terhadap kelayakan teknis KPI yang telah ditetapkan maupun yang akan direncanakan meliputi : kontur/kemiringan lahan, luas maupun letak/lokasi masing-masing KPI terhadap perkembangan industri di masing-masing Kabupaten/Kota.		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		7. Penyusunan Masterplan/Rencana Rinci dan Rencana Aksi dari setiap usulan/rencana pengembangan KPI dan perluasan KPI serta kebutuhan infrastruktur pendukung (penyediaan kebutuhan listrik, jaringan listrik, jaringan air, jalan, dsb) industri di KPI.		
		8. Penyiapan instrumen legalisasi/dukungan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan Industri di dalam KPI.		
	Kabupaten Karimun	➤ Rencana Penambahan KPI di Pulau Combol Kecamatan Moro seluas 100,09 Ha dan Perluasan Senta IKM Moro di Kecamatan Moro seluas 0,76 Ha; ➤ Pengembangan Industri Manufaktur, Pembuatan Kapal dan Galangan Kapal serta Industri Bahan Galian Non Logam (Granit) dapat dikembangkan di Kawasan Peruntukan Industri Meral I, II, III dan IV di Kec. Kundur. ➤ Pengembangan Industri Agro berbasis hasil perikanan, pekebunan, pertanian dan hortikultura dapat dikembangkan di KPI Kundur Barat I, II dan III dan Pulau Buru.		
	Kabupaten Lingga	1. Rencana Perubahan Kawasan Peruntukan Industri Sungai Tenam seluas 142.91 Ha; 2. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Keruing seluas 1.037,22 Ha; 3. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Sebayur seluas 3.027,59 Ha; 4. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Ayam seluas 382,04 Ha; 5. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Temiang Pesisir seluas 456,89 Ha; 6. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Jagoh seluas 829,36 Ha; 7. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Nyang seluas 124,14 Ha; 8. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Sebangka seluas 52,24 Ha; 9. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Sentra IKM sagu di Nerekeh seluas 4,22 Ha; 10. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Sentra IKM Kelapa di Resang seluas 3,70 Ha; 11. Rencana Perubahan/Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Temiang Pesisir seluas 456,89 Ha dan Sebangka seluas 52,24 Ha.		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
	Kabupaten Anambas	1. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Sentra IKM seluas 11,50 Ha; 2. Rencana Perubahan Kawasan Peruntukan Industri Jemaja Utara menjadi Jemaja Timur seluas 50,89 Ha.		
	Kabupaten Natuna	1. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Sentra IKM Keripik dan Kerupuk seluas 0.50 Ha; 2. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Kelapa seluas 1 Ha; 3. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Hasil Laut (Bunguran Timur) seluas 1 Ha.		
	Kabupaten Bintan	1. Pengembangan dan penetapan Pelabuhan Sri Udana Lobam menjadi Pelabuhan ekspor dengan kewenangan pengelolaan ke BUP; 2. Penambahan jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) alternatif yang berlokasi di Bintan Utara/Seri Kuala Lobam, untuk menampung sampah industri dan domestik lainnya dari TPS di Kawasan Industri. 3. Pembangunan Pusat Vokasi Industri dan Politeknik Industri di Galang Batang; 4. Pengembangan kompetensi LPK di Kawasan Industri Bintan Inti di Kabupaten Bintan; 5. Pengembangan Industri MRO (<i>Maintenance Repair and Overhaul</i>) di Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate; 6. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai alternatif pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur bandara antara PT. Angkasa Pura dan PT. Bintan Aviation di Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate; 7. Peningkatan Kerjasama penguatan rantai pasok pengembangan industri halal di Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate.		
	Kota Tanjungpinang	1. Rencana Perubahan Kawasan Peruntukan Industri Dompok Darat seluas 859,17 Ha; 2. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Wonosari seluas 2,01 Ha; 3. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Kota Piring seluas 0,57 Ha; 4. Rencana Penambahan Kawasan Peruntukan Industri Kampung Bulang II seluas 4,19 Ha.		
		5. Membangun dan mengembangkan Kawasan FTZ Dompok sebagai Kawasan Industri modern dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan memiliki akses ke pasar internasional; 6. Memberikan fokus kepada jenis-jenis industri yang memiliki nilai tambah tinggi, kompetitif dan memiliki prospek pasar ekspor untuk jangka panjang; 7. Pembangunan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Moco; 8. Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Batu Sawah; 9. Pembangunan Kawasan Perumahan Pekerja Industri;		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		10. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa; 11. Pembangunan Infrastruktur Dasar (jaringan transportasi, instalasi pembangkit listrik dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, instalasi pengelolaan air baku dan jaringan sumber daya air, instalasi pengolahan jaringan sanitasi); 12. Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung (fasilitas perumahan, fasilitas Pendidikan dan pelatihan, fasilitas penelitian dan pengembangan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas Kesehatan dan fasilitas tempat pembuangan sampah); Perencanaan dan pembangunan aksesibilitas energi (gas) ke Kawasan Industri Halal yang terencana berdasarkan rencana investasi yang akan dikembangkan.		
	Kota Batam	1. Pengembangan Sumber Daya Air Baku baru (Dam Laut);		
		2. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM Industri melalui pembangunan pusat Pendidikan vokasi industri / Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta fasilitasi TUK (Tempat Uji Kompetensi);		
		3. Pengembangan Gudang Pendukung Material Industri Shipyard dalam meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada industri shipyard di Kota Batam;		
		4. Pengembangan bandara dan Pelabuhan menjadi Logistik Hub (transshipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link) : Logistic Aerocity/Airport City, pengembangan Batu Ampar Container Port menjadi 2 Juta TEUs, Kabil Transshipment Hub dan pengembangan Pelabuhan Container Tg Sauh (Tg Sauh Container Port) sebagai terminal container transshipment dengan kapasitas lebih dari 18 Juta TEUs;		
		5. Pengembangan Batam Aeromaritropolis, dengan menghubungkan Bandara Int Hang Nadim dengan Pelabuhan Kabil dalam satu area Kawasan terpadu serta pusat pengembangan ekonomi (cargo udara, logistik, perkantoran dan jasa);		
		6. Pengembangan Rempang-Nipah-Tonton dan Setokok menjadi Technopark, Science Centre dan Research Centre, incubator industri, dan pengembangan High Tech Industri Rempang;		
		7. Pengembangan Industri Kreatif di Barelang;		
		8. Pengembangan Industri Dirgantara (Aerospace Park);		
		9. Pengembangan Galang dan Galang Baru menjadi Maritim City, Pelabuhan Perikanan/Aquaculture, dan Industri Halal;		
		10. Terbangunnya pengelolaan limbah B3 dan Energi Baru Terbarukan (1500 MW); 11. Pengembangan infrastruktur Jalan dari Batu Ampar – Muka Kuning, ruas jalan jembatan I Barelang – Tj Piayu – Punggur, ruas jalan Patam lestari – Jodoh, ruas jalan Tiban – Tembesi dan ruas jalan Batam Centre – Nongsa.		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
	Pengembangan Kawasan Industri			
	UMUM	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Industri;		
		2. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri;		
		3. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek pertanahan;		
		4. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Penyediaan Energi (gas dan listrik) untuk mendukung Kawasan Industri;		
		5. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Penyediaan SDM dan Teknologi untuk mendukung Kawasan Industri;		
		6. Pembangunan Kawasan Industri;		
		7. Peningkatan ketersediaan lahan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengoperasian Bank Tanah (Land Banking) untuk pembangunan Kawasan Industri;		
		8. Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri (Jalan, Pelabuhan, Jaringan Listrik, Energi, Jaringan Air, Waduk dan bandara);		
		9. Pembangunan infrastruktur Energi (Pipa gas) untuk mendukung Kawasan industri;		
		10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM Industri di Kawasan Industri melalui pembangunan pusat Pendidikan vokasi industri / Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta fasilitasi TUK (Tempat Uji Kompetensi);		
		11. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN);		
		12. Revitalisasi Kawasan Industri;		
		13. Pembentukan Lembaga Pengelolaan Kawasan Industri (Pemerintah melakukan investasi langsung);		
		14. Insentif khusus untuk Industri yang berlokasi didalam Kawasan Industri Tertentu (KI Halal);		
		15. Penerapan konsep Pengembangan berkelanjutan untuk KI melalui penerapan konsep Eco Industrial Park di Provinsi Kepri dalam rangka pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan, melalui :		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		➤ Pengembangan Smart Industrial Park dalam mengembangkan Kawasan Industri berbasis teknologi digital serta berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri didalam Kawasan Industri secara optimal; ➤ Mendorong dan memperkuat Kerjasama dalam program Global Eco-Industrial Park Programme (GEIPP) dari UNIDO (United Nations for Industrial Development) yang berfokus pada peningkatan produktivitas sumber daya, kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial; ➤ Berkoordinasi antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan menerapkan proyek GEIPP antara Kementerian dan Lembaga pemerintah terkait, UNIDO dan tim ahli, pengelola Kawasan industri dan perusahaan industri didalam Kawasan, dan Asosiasi; ➤ Mendorong dan mendukung Kerjasama penerapan implementasi industri 4.0, pengembangan industri Biodegradable plastic technology, resource efficiency and cleaner production, serta bentuk Kerjasama lainnya.		
		16. Mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal melalui Penerapan konsep Kawasan Industri tertentu maupun penerapan konsep Zona Industri Halal di dalam Kawasan Industri untuk memperkuat daya saing industri halal; 17. Memetakan dan merencanakan kebutuhan infrastruktur pendukung (kebutuhan gas) dalam mengembangkan Kawasan Industri Halal; 18. Pengelola Kawasan Industri menyusun Masterplan Kawasan Industri dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang meliputi Rencana Investasi penyediaan infrastruktur industri dan Kawasan Industri; 19. Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri untuk memetakan Potensi Investasi Sektor Industri yang akan dikembangkan di dalam pengembangan Kawasan Industri maupun Kawasan Industri tertentu di Provinsi Kepri; 20. Pemerintah melalui koordinasi antar Stakeholder terkait akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi dan Masterplan Kawasan Industri yang telah disusun, untuk memantau perkembangan investasi industri di dalam Kawasan Industri; 21. Mendorong dan melakukan koordinasi dalam upaya percepatan penuntasan permasalahan, dukungan regulasi dalam pengembangan Kawasan Industri prioritas di Provinsi Kepri; 22. Berkoordinasi dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan Pengembangan Kawasan Industri Prioritas; 23. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah seluas minimal 5 Ha yang berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan berperan sebagai Industri Pendukung Kawasan Industri yang memiliki luas minimal 50 Ha; 24. Mendorong pemberian insentif khusus untuk Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KI IKM) di Povinsi Kepri;		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
	Kab. Bintan	25. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Bintan Eja Industri di Kecamatan Bintan Timur;		
		26. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur kepelabuhanan melalui skema pendanaan pembebasan lahan, pembiayaan Sebagian kontruksi atau pemberian viability gap fund.		
		27. Pengembangan distribusi sambungan pipa gas ke Kawasan Industri Bintan Inti untuk mendukung ketersediaan energi (gas) dan meningkatnya investasi di sektor industri halal.		
		28. Pengembangan Wilayah Usaha Kelistrikan di Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate dalam meningkatkan pasokan listrik di Kawasan Industri;		
		29. Pengembangan Klaster Aerospace Industry Park dan MRO Centre.		
	Kabupaten Karimun		30. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Oil dan Gas Storage Pulau Asam. ➤ pengembangan infrastruktur energi melalui pembangunan Terminal LNG Pulau Asam dan pembangunan jaringan transmisi market energi; ➤ Pulau Asam menjadi basis Penyimpanan (storage) migas dan Terminal LNG yang memadai; ➤ Kawasan Industri Pulau Asam menjadi supporting energi untuk pengembangan industri di Karimun pada khususnya. 31. Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Gunung Papan, P. Lumut, P. Parit dan P. Tulang.	

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
	Kota Batam	32. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kepala Jeri Industrial Park; 33. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3 di Pulau Ladi; 34. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tunas III di Kabil; Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Sauh di Kec. Tanjung Sauh.		
	Kota Tanjungpinang	35. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Halal di Dompok, Kec. Bukit Bestari; 36. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur dan Elektronik di Dompok dan Air Raja; 37. Pembangunan Infrastruktur Dasar oleh Kawasan Industri (jaringan jalan, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah).		
	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SENTRA IKM)			
1	Umum	1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM.		
		2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Sentra IKM melalui penyusunan Pola Pengembangan Sentra, Study Kelayakan, Masterplan Sentra IKM dan Rencana Aksi pembangunan Sentra IKM;		
		3. Menyusun Tata Kelola Strukturisasi Pengembangan Sentra Industri Industri Kecil dan Menengah berbasis produk industri unggulan provinsi di Provinsi Kepri;		
		4. Berkoordinasi bersama stakeholder terkait dalam merencanakan kebutuhan pembangunan Infrastruktur pendukung Sentra IKM;		
		5. Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Sentra IKM;		
		6. Penetapan SK pembangunan Sentra IKM;		
		7. Pembangunan, Pembinaan dan Pengembangan Sentra IKM;		
		8. Mendukung pengembangan pusat pengembangan inovasi produk dan peningkatan kompetensi SDM industri di sentra IKM;		
		9. Mendorong pemberian insentif untuk IKM yang memproduksi di Sentra IKM		
2	Kota Batam	10. Pengembangan Sentra Industri Rumput Laut di Kelurahan Granting, Pulau Terong, Teluk Sunti dan Teluk Bakau Kec. Belakang Padang; 11. Pengembangan Sentra IKM Kreatif Kerajinan Kayu (Gasing), Tenun dan Batik di Pulau Ngenang, Kec. Nongsa, Kota Batam; 12. Pengembangan Sentra IKM Industri Komponen, Alat-alat Perkakas (Industrial Tools), Pemesinan dan Peralatannya;		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		13. Pengembangan Sentra IKM Kreatif (Kerajinan Batik) di Pulau Ngenang, Kec. Sekupang, Kota Batam; 14. Pengembangan Sentra IKM Kerajinan (Enceng Gondok) di Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk.		
3	Kab Bintan	15. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Perikanan di Sei Enam Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan; 16. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah di Kawasan Industri Bintan Eja di Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan; 17. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Kerupuk di Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan; 18. Farmasi dan Kosmetik berbasis Hasil Perikanan (Colagen dan Hidrolisat Protein) di Kec. Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan; 19. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) hasil pertanian/perkebunan di Kecamatan Toapaya; 20. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Industri Pengolahan Karet di Kec. Bintan Pesisir; 21. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Kelapa di Kec. Teluk Sebong (Desa Pegudang); 22. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Perikanan di Kec. Tembelan Kabupaten Bintan; 23. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pangan di Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.		
4	Kota Tanjungpinang	24. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah di Kawasan Industri Dompok Darat, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang; 25. Pengembangan sentra by design Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Industri pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan di KPI Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; 26. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pengolahan Tahu Tempe Batu Hitam, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat; 27. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Makanan Ringan Kota Piring, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur; 28. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Makanan Ringan Kampung Lembah Merpati, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur; 29. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Kerupuk Senggarang, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota; 30. Pengembangan Sentra Industri Makanan Kelurahan Penyegat, Kecamatan Tanjungpinang Kota; 31. Sentra Batu Bata, di Kelurahan Batu Sembilan, Kec. Tanjungpinang Timur; 32. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pengolahan Limbah dan Sampah (circular economy) di Kec. Tanjungpinang Timur.		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
5	Kabupaten Karimun	33. Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun; ➤ Mendorong peralihan asset Gudang Rumput Laut di Kecamatan Moro; ➤ Peningkatan aksesibilitas jalan daerah dan jalur laut ke Sentra Industri Rumput Laut melalui pembangunan dermaga; ➤ Peningkatan infrastruktur tampungan air, jaringan air, serta listrik ke sentra industri; 34. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Industri Kapal Rakyat (Kapal Perikanan, dan Kapal Penumpang) di Desa Selat Mie (Pulau Sugi) di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun; 35. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Industri Pengolahan Kelapa di Kec. Kundur, Kabupaten Karimun; 36. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pengolahan komoditas agrikultur unggulan provinsi di Kec. Kundur, Kabupaten Karimun; 37. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) hasil Perikanan di Kec. Durai, Kabupaten Karimun; 38. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Sagu di Belat, Kec. Belat, Kabupaten Karimun		
6	Kabupaten Natuna	39. Pengembangan Sentra Industri Hasil Laut di Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna; 40. Pengembangan Sentra Industri Keripik dan Kerupuk, di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; 41. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SENTRA IKM) Pengolahan Kelapa di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna; 42. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Hasil Laut di Kec. Pulau Tiga, Kabupaten Natuna; 43. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Hasil Laut di Kec. Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna.		
7	Kabupaten Lingga	44. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pengolahan Sagu di Desa Nerekeh Kec. Lingga, Kabupaten Lingga; 45. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Pengolahan Kelapa di Desa Resang, Marok Tua, Kecamatan Lingga; 46. Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) Kapal Rakyat di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.		
8	Kabupaten Anambas	47. Pengembangan Sentra (By Design) Industri Pengolahan Hasil Laut (Ikan) di Desa Piabung Kec. Matak Kabupaten Anambas; 48. Pembangunan Sentra (By Design) Industri Pengolahan Hasil Laut di Kec. Siantan Selatan dan Kec. Siantan Timur; 49. Pembangunan Sentra Pengolahan Kelapa dan Penguatan Rantai Pasok komoditas hasil perkebunan (Kelapa, Cengkeh) di Kec. Jemaja; 50. Pembangunan Sentra Industri pembuatan Kapal dan Ship Service Kapal Penumpang dan Kapal Nelayan (Kapasitas Kecil) di Desa Bayat, Kec. Palmatak;		

No	Kab/Kota	Program		
		2023-2028	2029-2033	2034-2043
		51. Pembangunan dan Pengembangan Sentra (Revitalisasi) Ikan Bilis di Kamp. Dusun Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan; 52. Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Hasil Laut (Revitalisasi) di Desa Kuala Maras Kec. Jemaja timur; 53. Pembangunan dan Pengembangan Sentra (Revitalisasi) Kapal Penumpang dan Ship Service di Kec. Siantan Timur Desa Batu Belah; 54. Pembangunan dan Pengembangan Sentra (Revitalisasi) Kapal Rakyat Air Asuk, di Kamp. Air Asuk, Kec. Siantan Tengah; 55. Pembangunan dan Pengembangan Sentra (Revitalisasi) Industri pengolahan hasil laut di Desa Nyamuk, Desa Munjan dan Desa Serat, Kec. Siantan Timur; 56. Pembangunan dan Pengembangan Sentra (By Design) industri pendukung (supporting industri) Kimia Dasar berbasis Migas di Kec. Palmatak; 57. Pembangunan pengembangan aspal/beton untuk meningkatkan akses ke Pelabuhan roro (PL) sepanjang Jarak ± 1 KM dari Gudang Sentra Pengolahan Hasil Laut, Piabung-Matak ke Gudang Pengumpul; 58. Pembangunan aspal/beton jalan untuk meningkatkan akses ke Pelabuhan PP ke Sentra sepanjang Jarak ± 2 KM dari Pelabuhan lokal ke Gudang Sentra IKM Pengolahan Hasil Laut, Piabung-Matak; 59. Pembangunan Peningkatan pemasangan jaringan listrik dari PLN Pasir Manang-Temburun-Sentra) dgn Jarak ± 1 Km ke Sentra Industri Pengolahan Hasil Laut di Kec. Siantan Selatan dan Kec. Siantan Timur; 60. Pembangunan peningkatan akses jalan dan listik ke Sentra Pengolahan Kelapa dan Penguatan Rantai Pasok komoditas hasil perkebunan (Kelapa, Cengkeh) di Kec. Jemaja; 61. Pembangunan peningkatan akses jalan dan listrik ke Sentra Industri pembuatan Kapal dan Ship Service Kapal Penumpang dan Kapal Nelayan (Kapasitas Kecil) di Desa Bayat, Kec. Palmatak; 62. Pembangunan peningkatan akses jalan ke Sentra (Revitalisasi) Ikan Bilis di Kamp. Dusun Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan; 63. Pembangunan peningkatan akses jalan ke Sentra Industri Hasil Laut (Revitalisasi) di Desa Kuala Maras Kec. Jemaja timur; 64. Pembangunan peningkatan akses jalan dan jaringan listrik ke Sentra (By Design) industri pendukung (supporting industri) Kimia Dasar berbasis Migas di Kec. Palmatak.		

Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017, perwujudan dari pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan tersebut antara lain melalui pemantapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu kawasan-kawasan perkotaan di pulau-pulau kecil didorong pengembangannya sebagai kota pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai

leading sector dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, serta menjadikan laut sebagai halaman depan dan orientasi pembangunan.

Usulan program utama untuk setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pengembangan Industri-Industri Unggulan dengan penerapan teknologi dan lokasi yang ramah lingkungan;
2. Prioritas pengembangan industri kecil dan menengah tertentu;
3. Peningkatan Iklim Investasi;
4. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
5. Pengembangan jasa pendukung industri yang meliputi Jasa Telematika, Jasa Industri Pembangkit Energi, Jasa Riset Rekayasa dan Desain, Jasa Proses Industri, Jasa Perawatan dan Preparasi, Jasa Konsultasi dan Manajemen Industri, Jasa Logistik, Jasa Kalibrasi, Jasa Pengemasan, Jasa Pendukung Industri 4.0, Jasa Rancang Bangun, Jasa Instalasi, dan Jasa Konsultasi;
6. Pengembangan tenaga kerja industri yang trampil dan profesional;
7. Pengembangan infrastruktur yang modern dan didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Pengembangan, pembentukan dan pembangunan *Techno Park*, Pusat Pendidikan Vokasi Industri yang link dan match dengan kebutuhan industri; serta
9. Meningkatkan fasilitasi SNI dan Pengembangan Produk melalui pendirian Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI) di Provinsi Kepri.

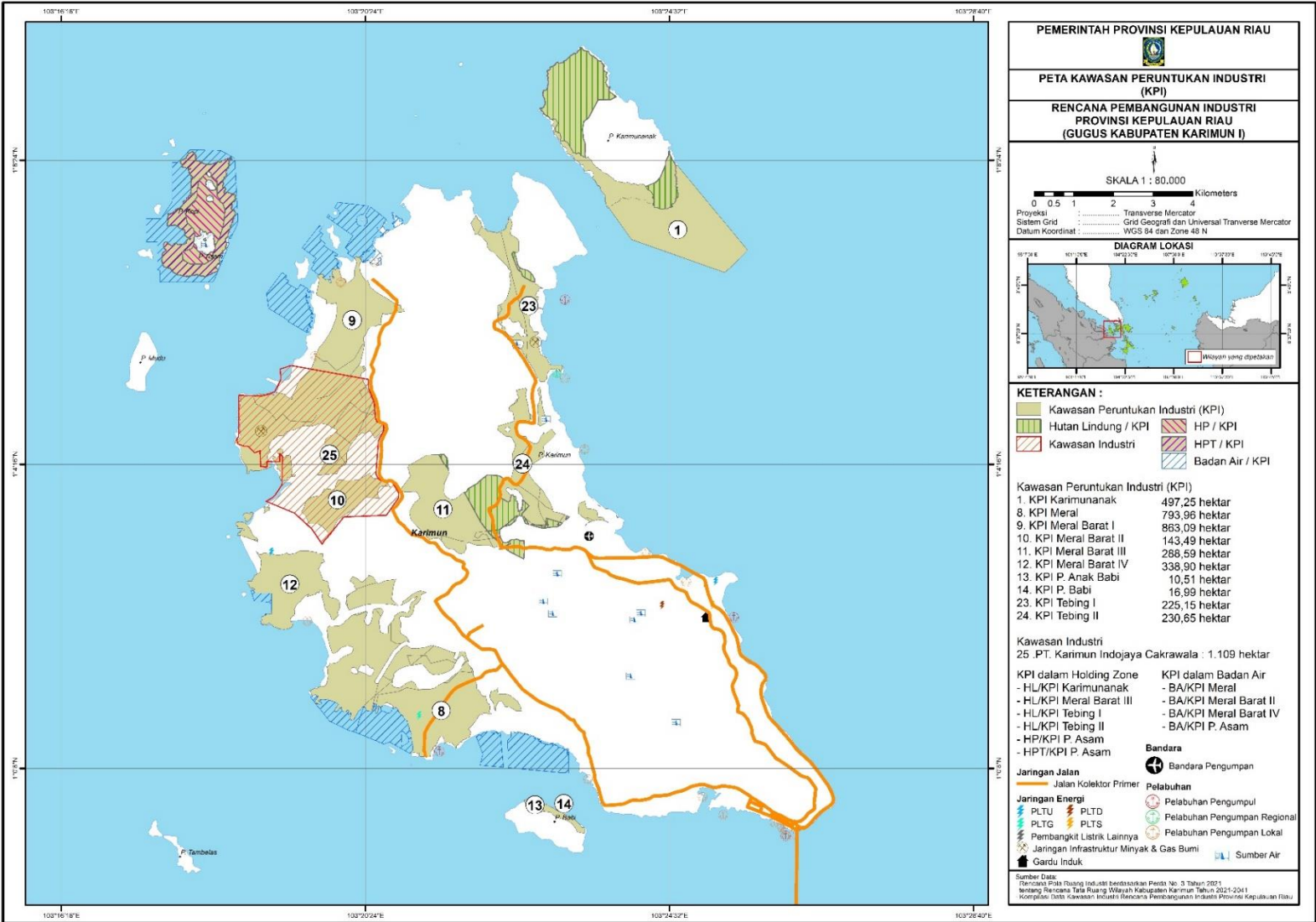
Penyebaran Industri akan dilakukan berbasis perwilayahan industri, hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri diseluruh wilayah Provinsi Kepri untuk mencapai sasaran dan target pertumbuhan industri Provinsi Kepri, yaitu pengembangan dan menumbuhkan industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Berikut peta Kawasan Peruntukan industri (KPI) yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku, Kawasan Industri (KI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Perluasan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Riau.

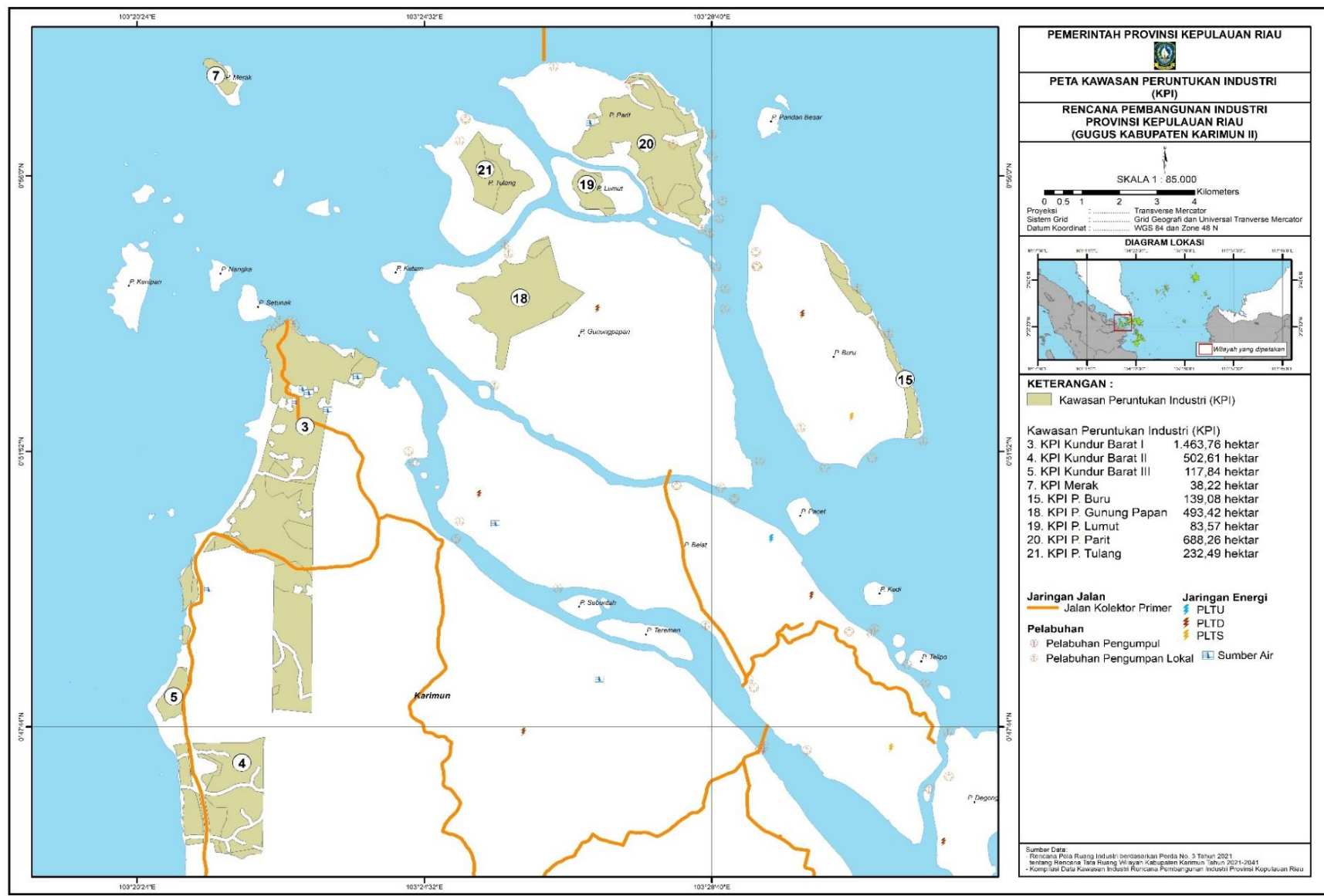
A. Kabupaten Karimun.

Untuk Kabupaten Karimun, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

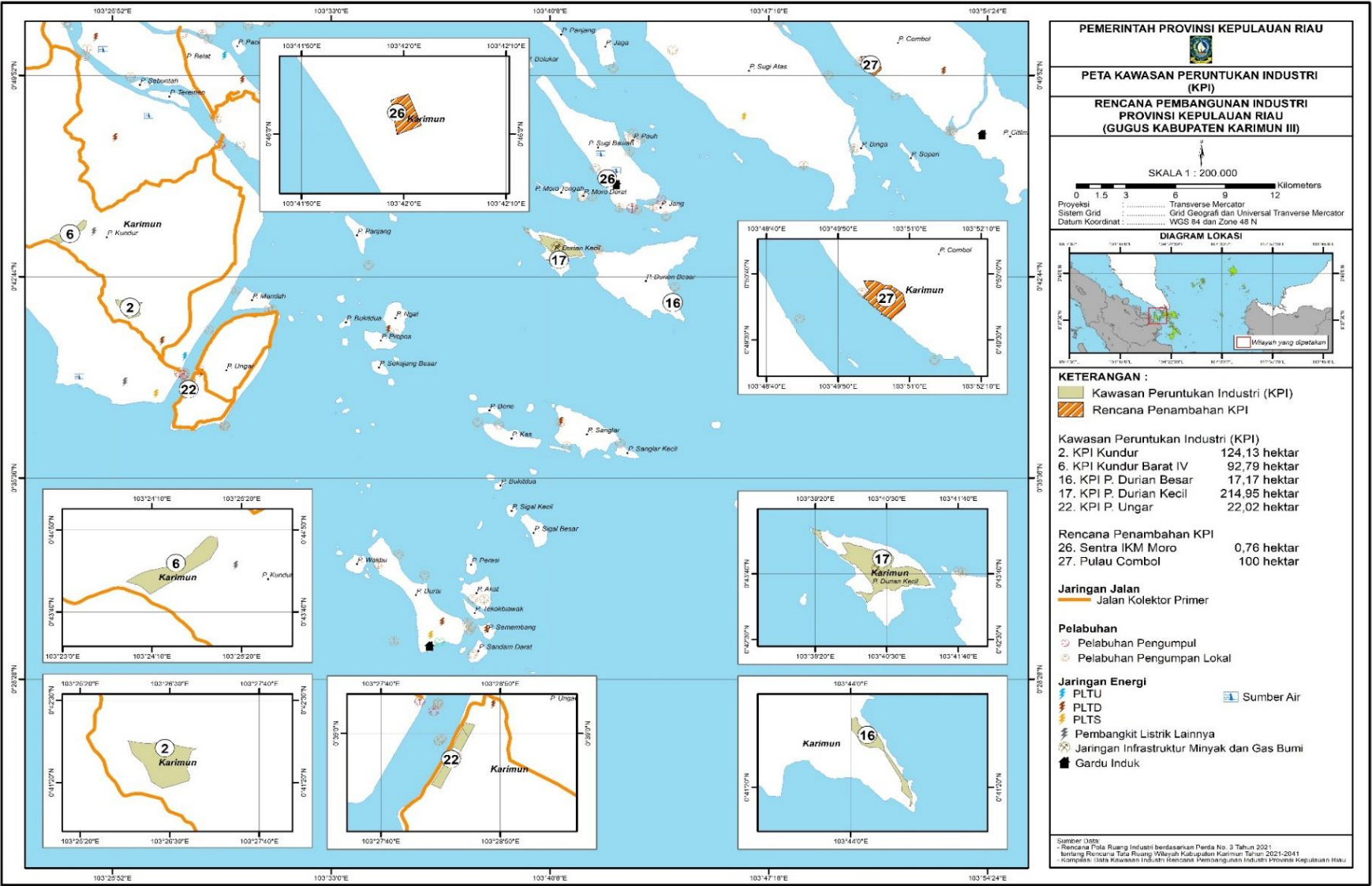
**Gambar 4.1 Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
di Kabupaten Karimun**



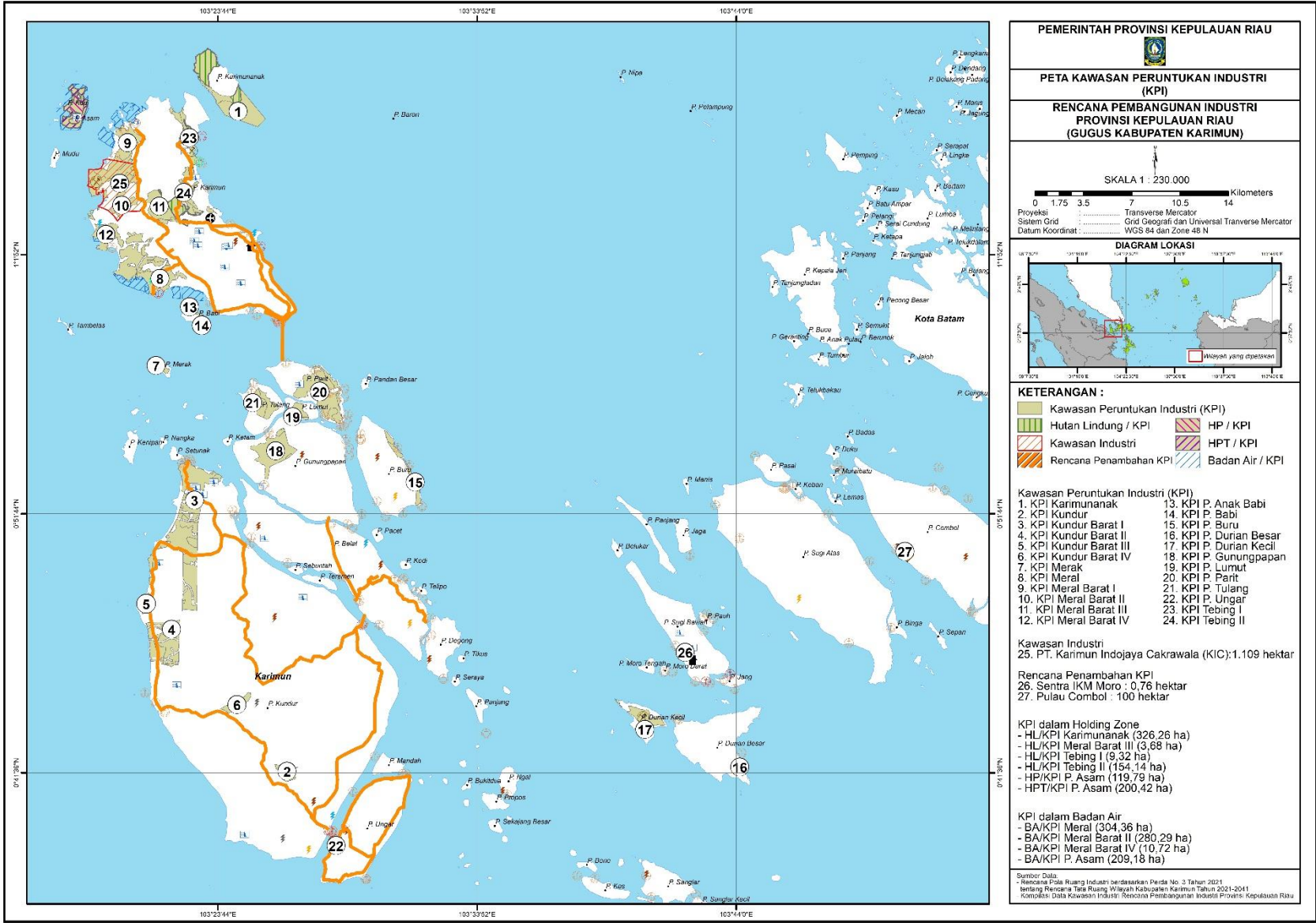
Gambar 4.2 Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun



Gambar 4.3 Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Karimun



**Gambar 4.4 Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
di Kabupaten Karimun**



B. Kabupaten Bintan

Untuk Kabupaten Bintan, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

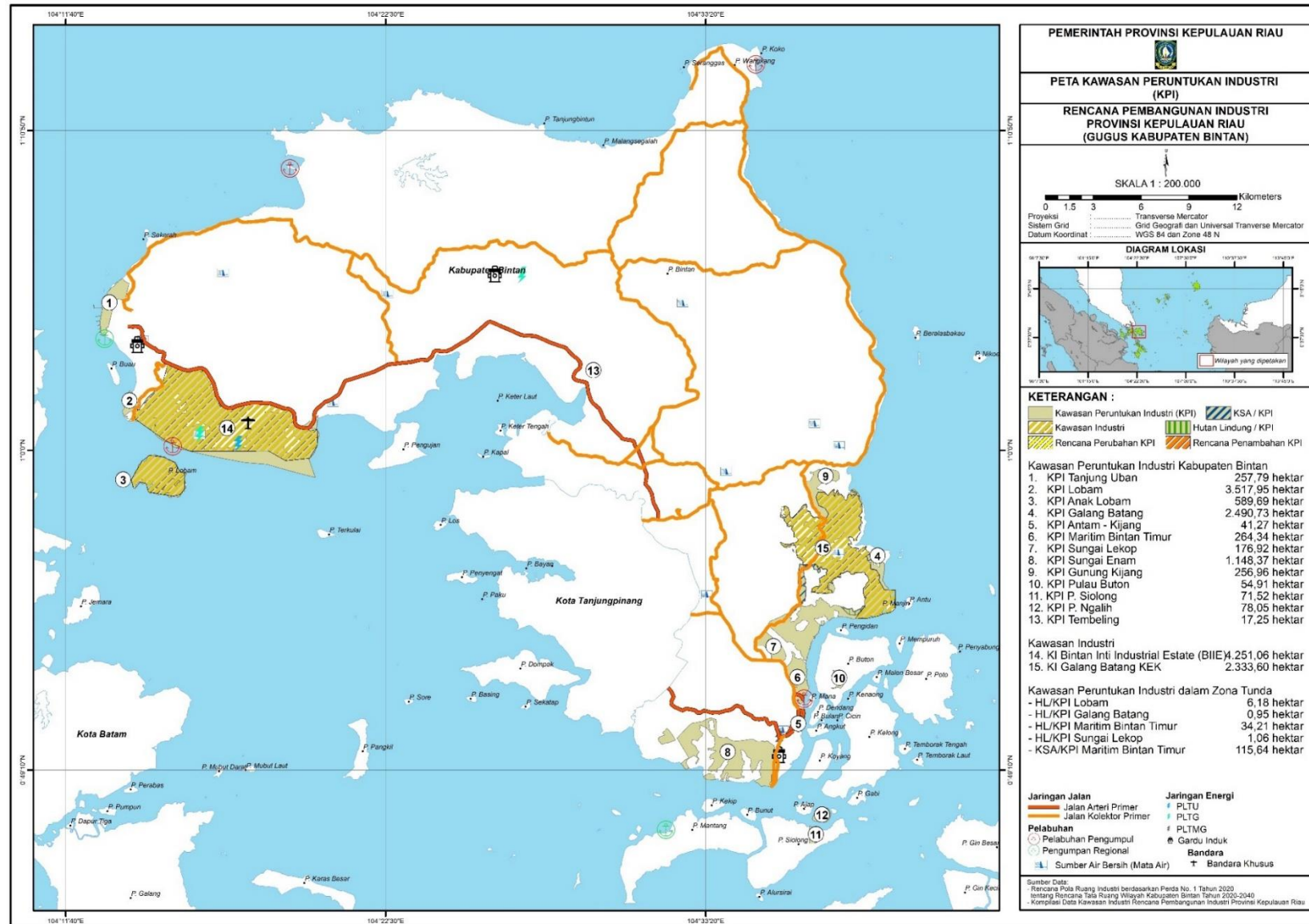
Pengembangan industri dan jasa yang sekarang berada di Kabupaten Bintan cenderung lebih bersifat *capital intensive* maupun *labor intensive*. Sebagian di antaranya merupakan industri hulu namun tidak bersifat *technological intensive*.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017, seluas 2.333,6 Ha dengan PT. Bintan Alumina sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Galang Batang.

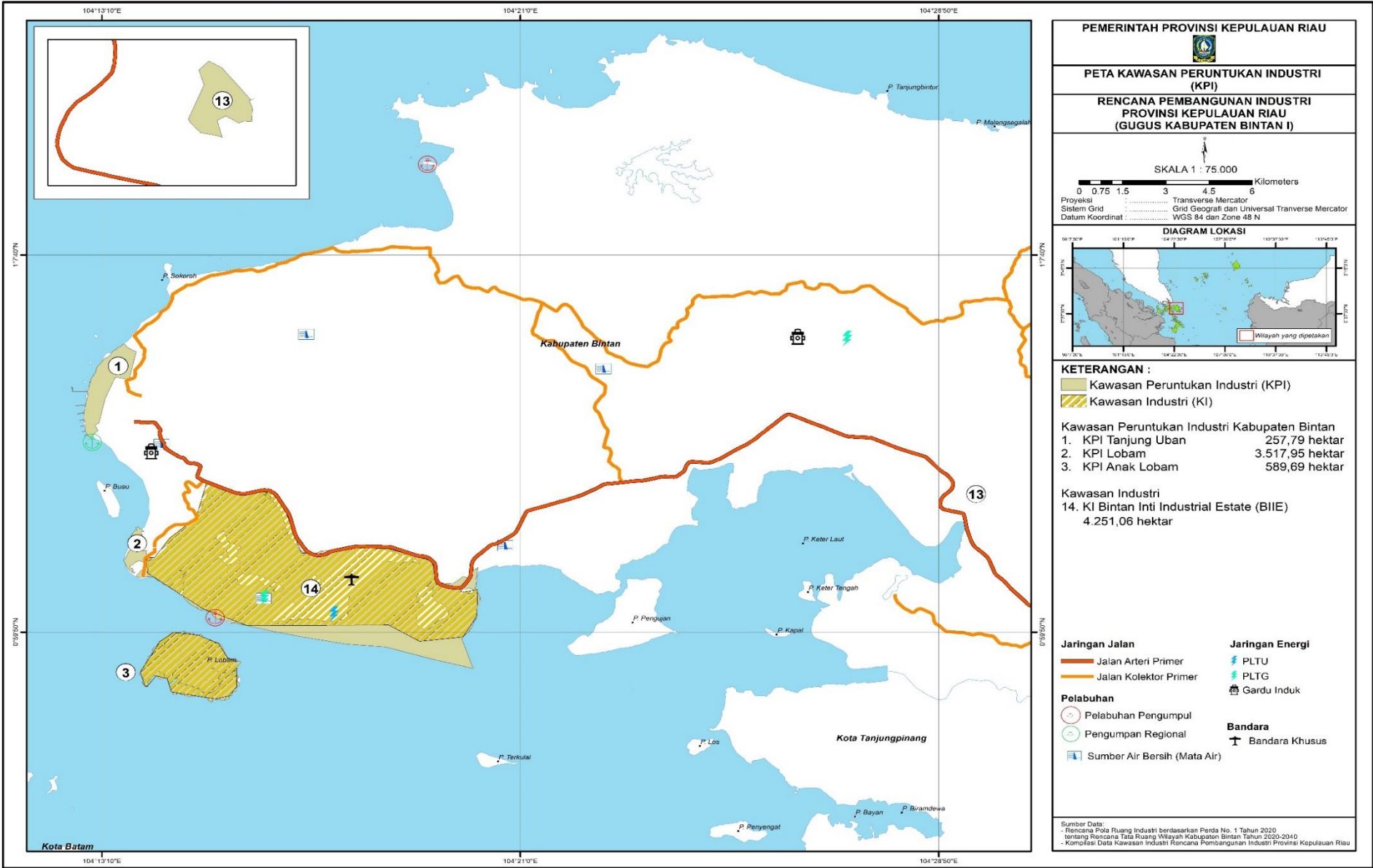
KEK akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (*refining*) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (*smelting*), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistic, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan lainnya.

KEK Galang Batang terdiri dari 4 zona, yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri dan Zona Energi dan diperkirakan akan menarik investasi sebesar Rp.36,25 Triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang dengan orientasi pasar internasional.

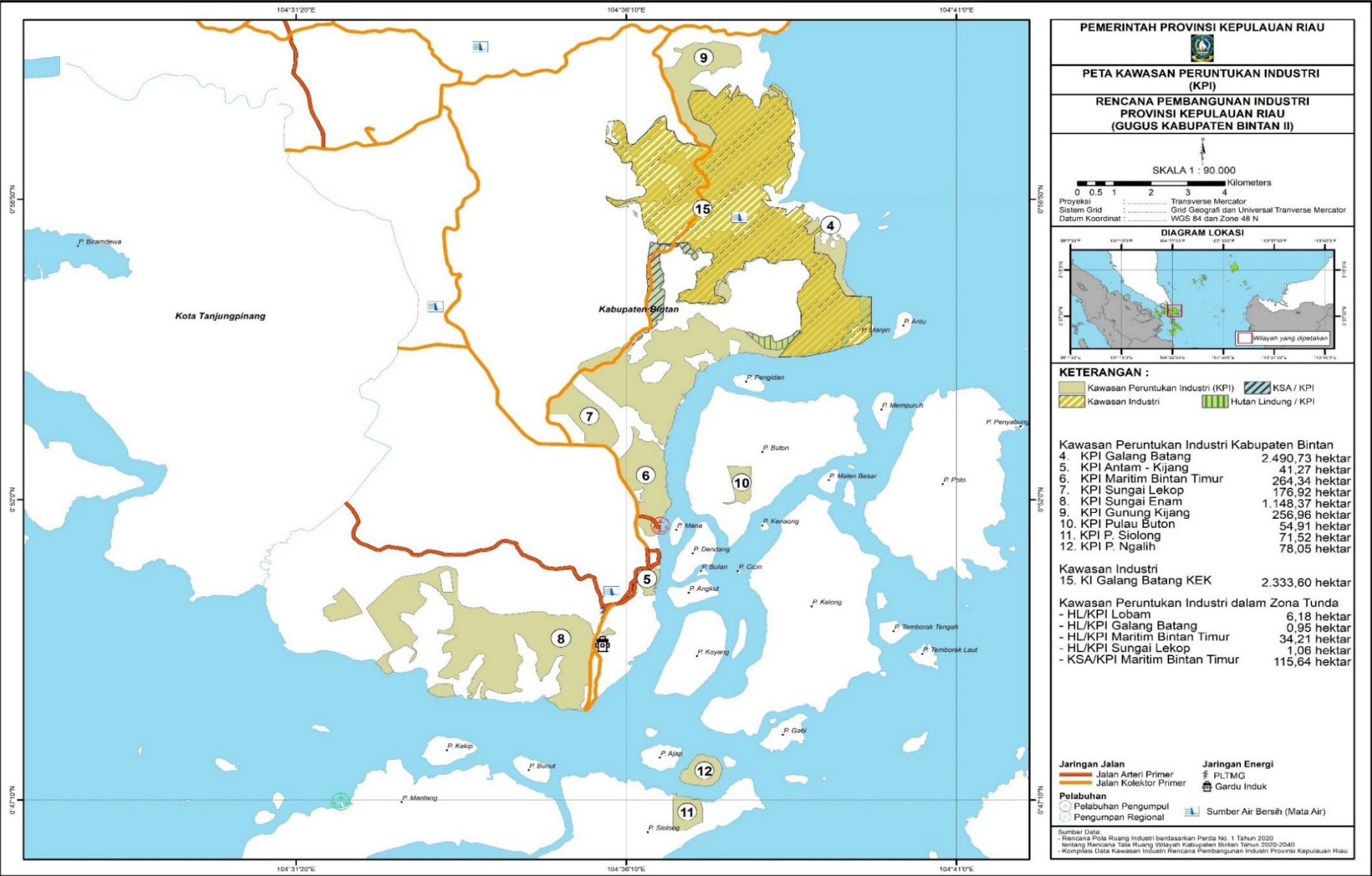
Gambar 4.5 Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri di Kabupaten Bintan



Gambar 4.6 Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri di Kabupaten Bintan



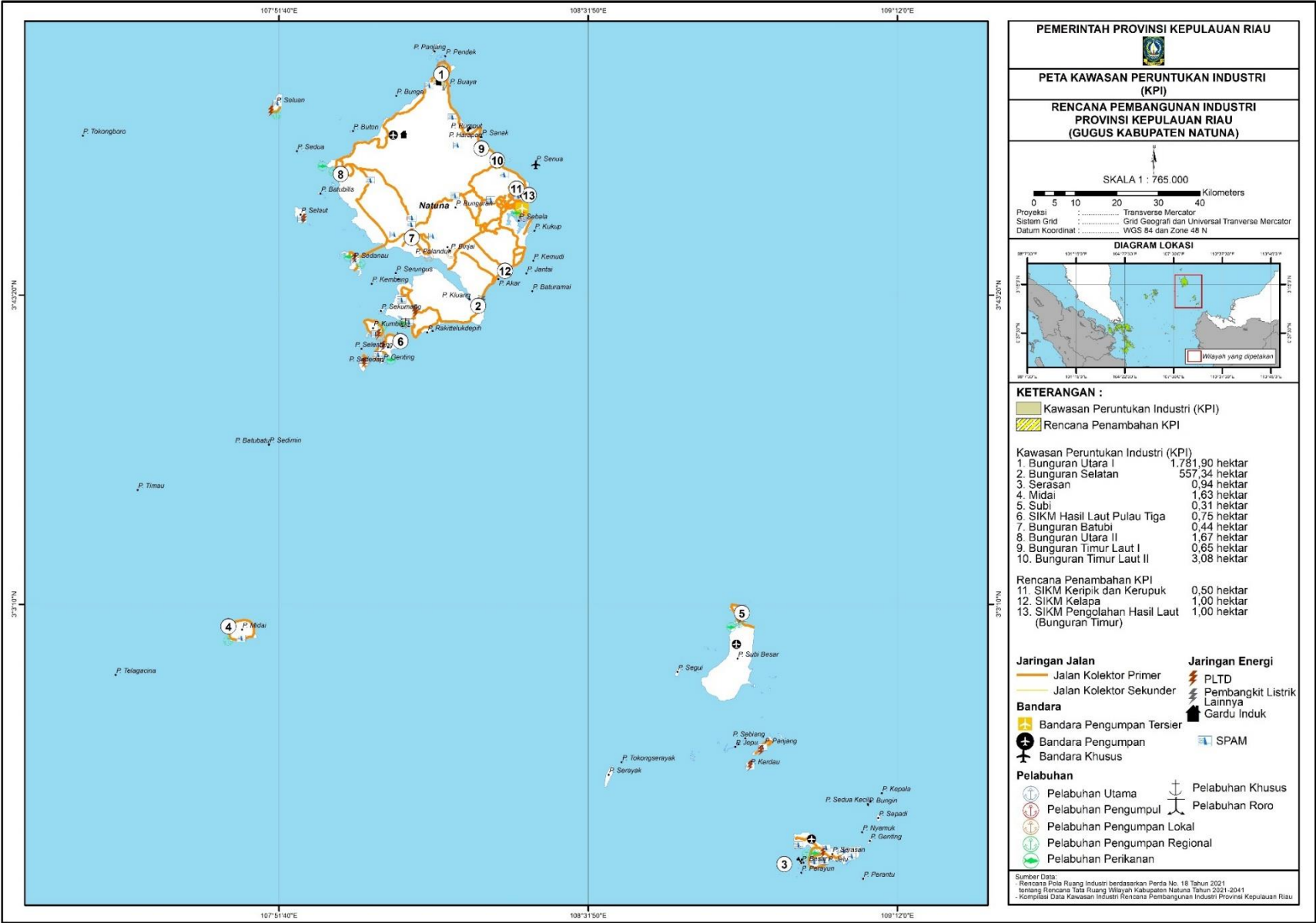
Gambar 4.7 Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri di Kabupaten Bintan



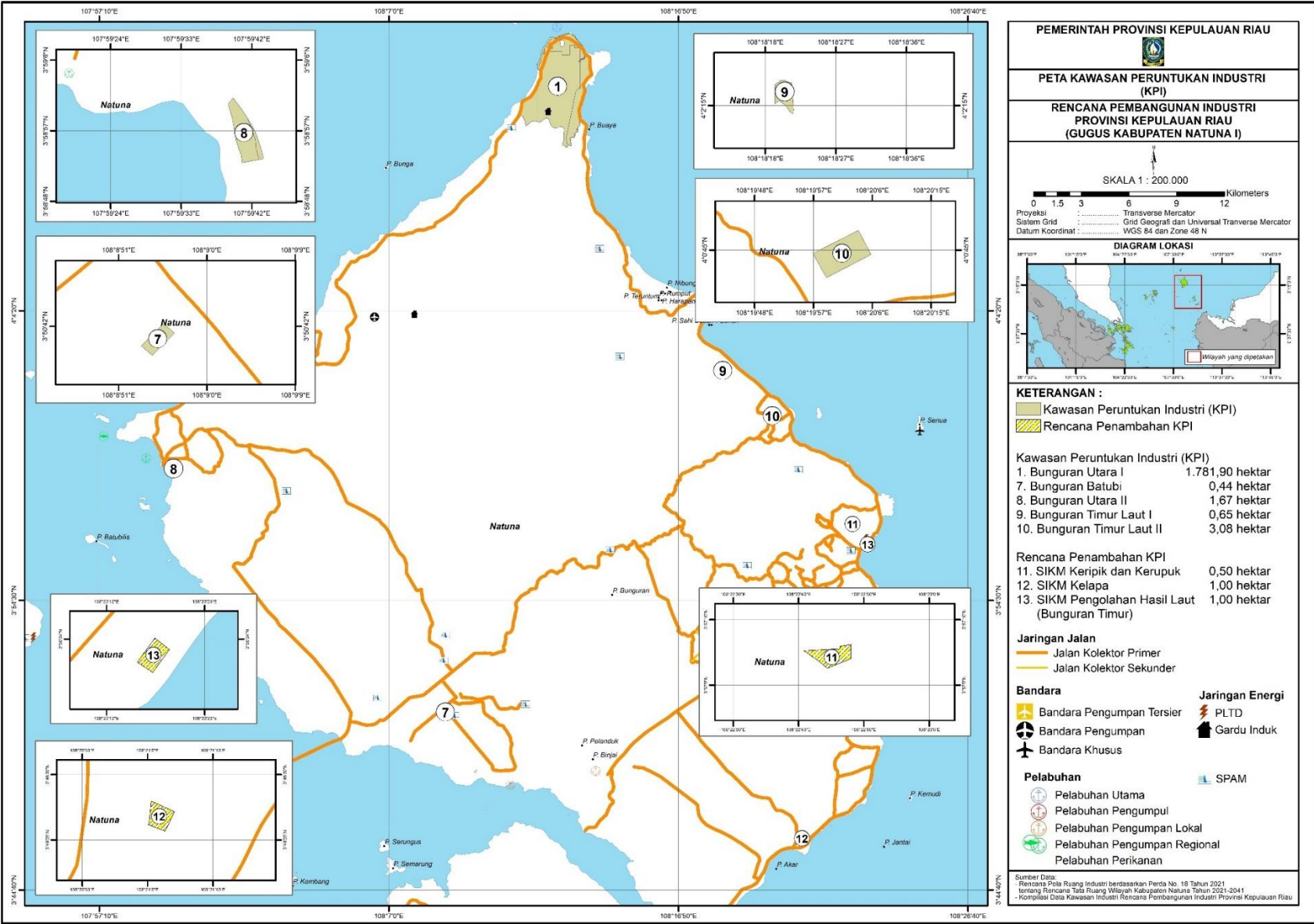
C. Kabupaten Natuna

Untuk Kabupaten Natuna, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

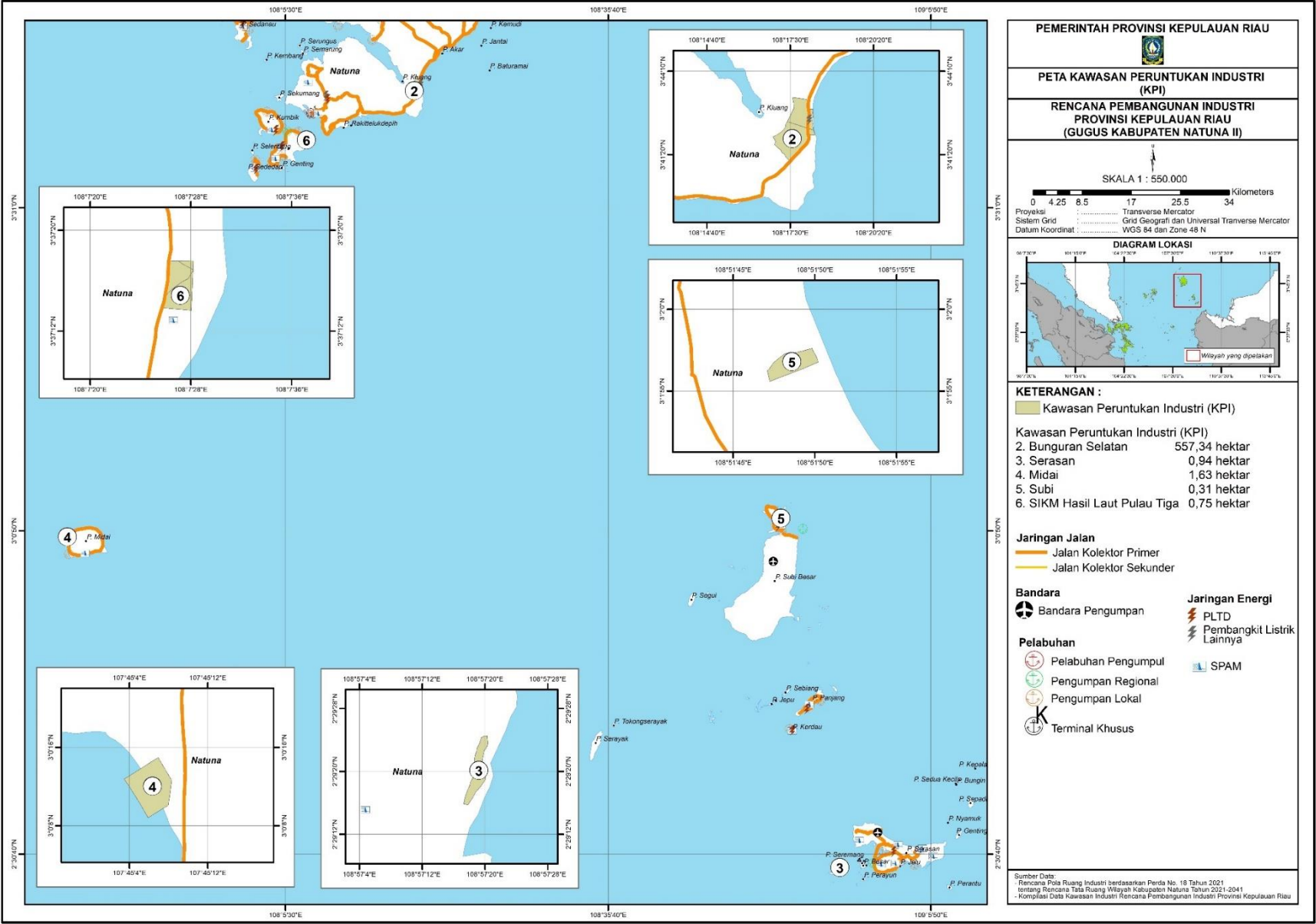
Gambar 4.8 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Natuna



Gambar 4.9 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Natuna



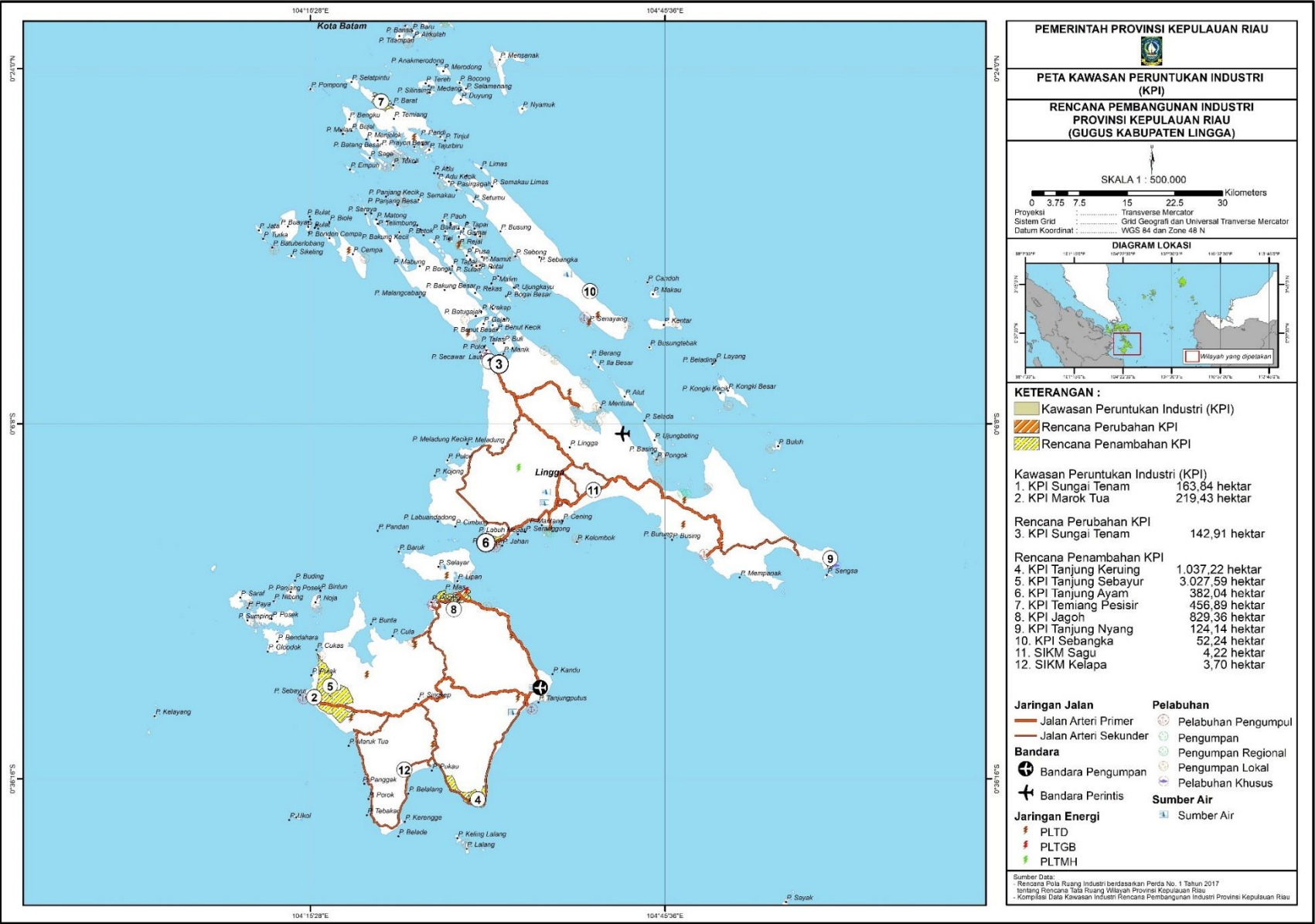
Gambar 4.10 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Natuna



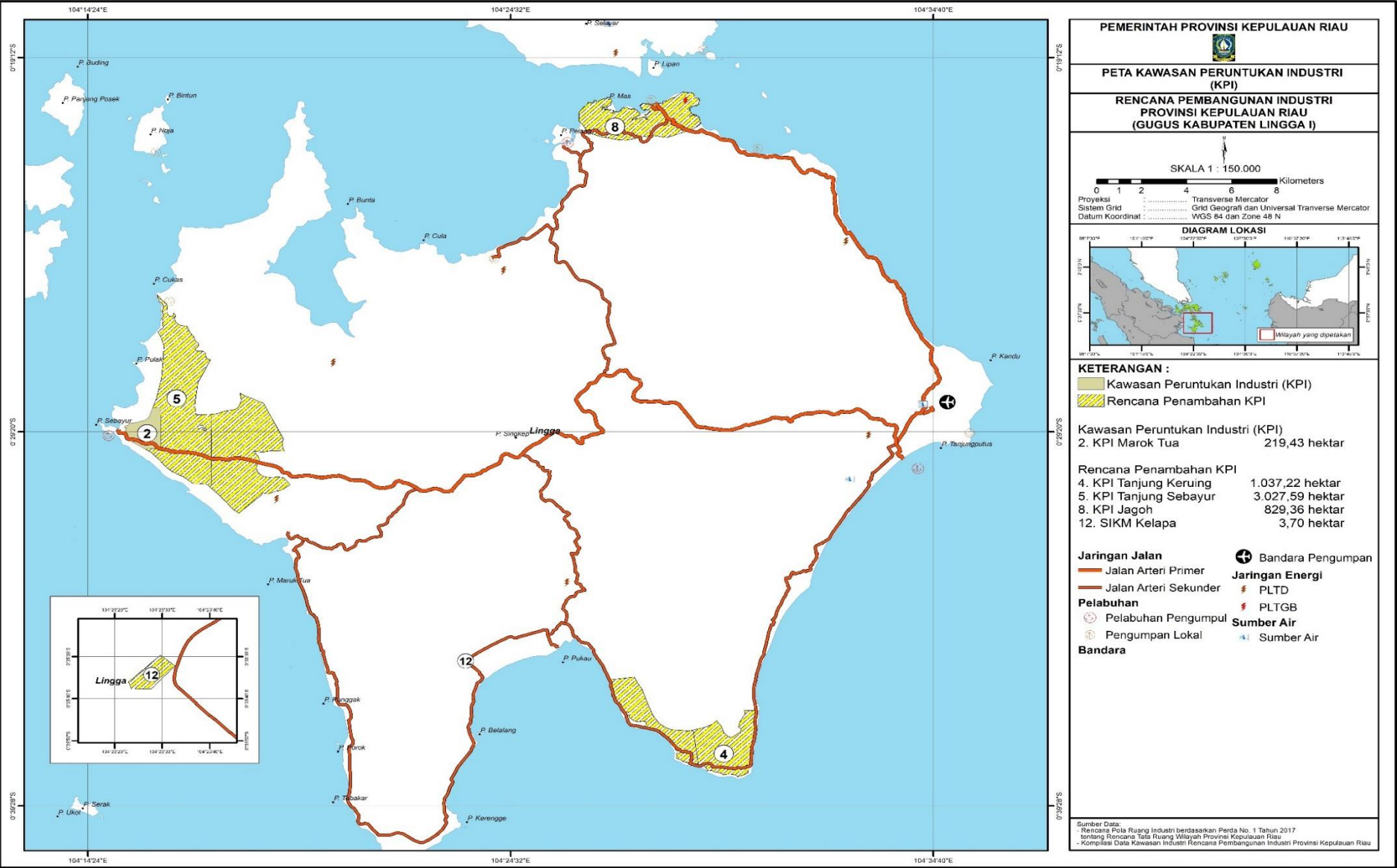
D. Kabupaten Lingga

Untuk Kabupaten Lingga, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

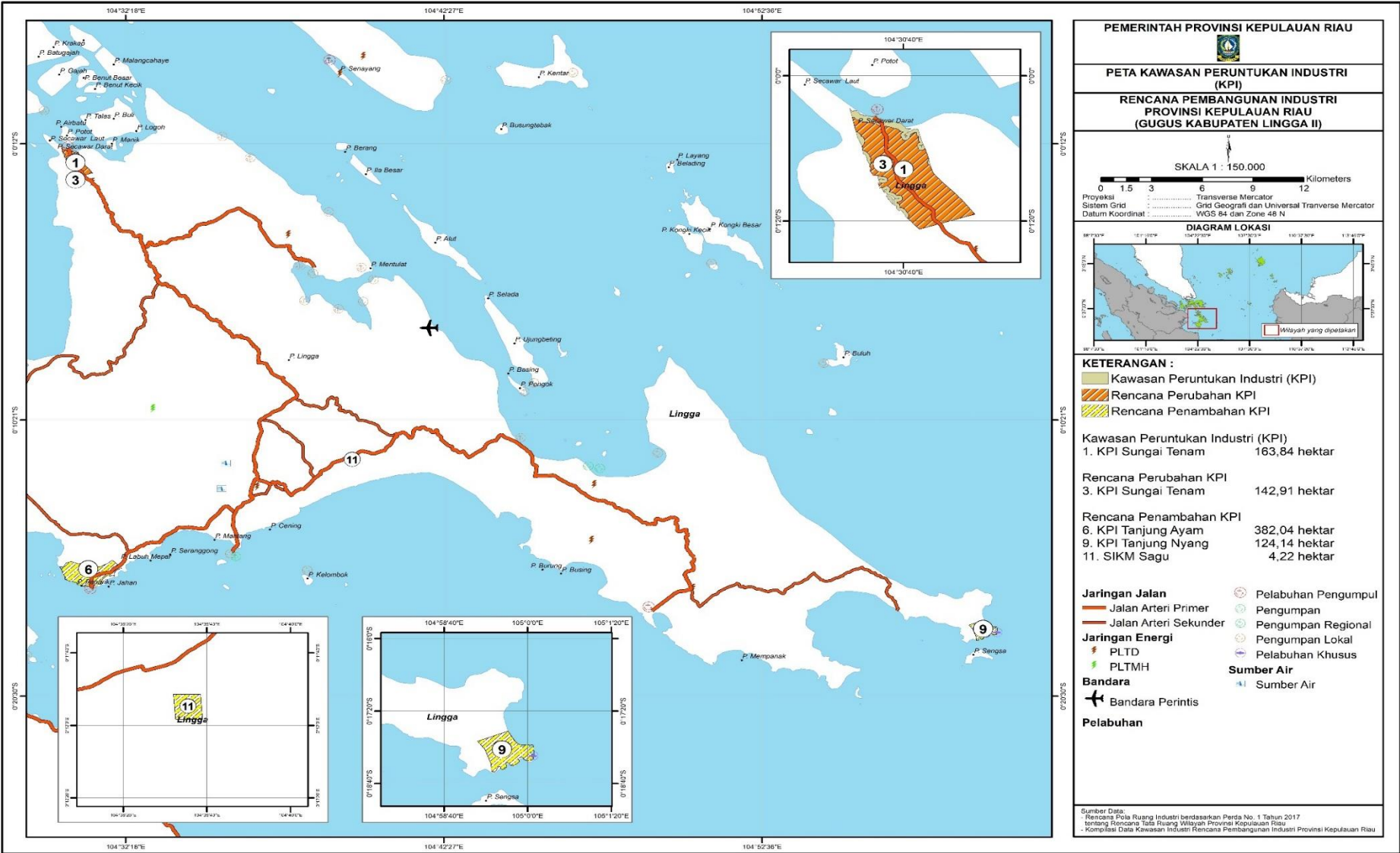
Gambar 4.11 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga



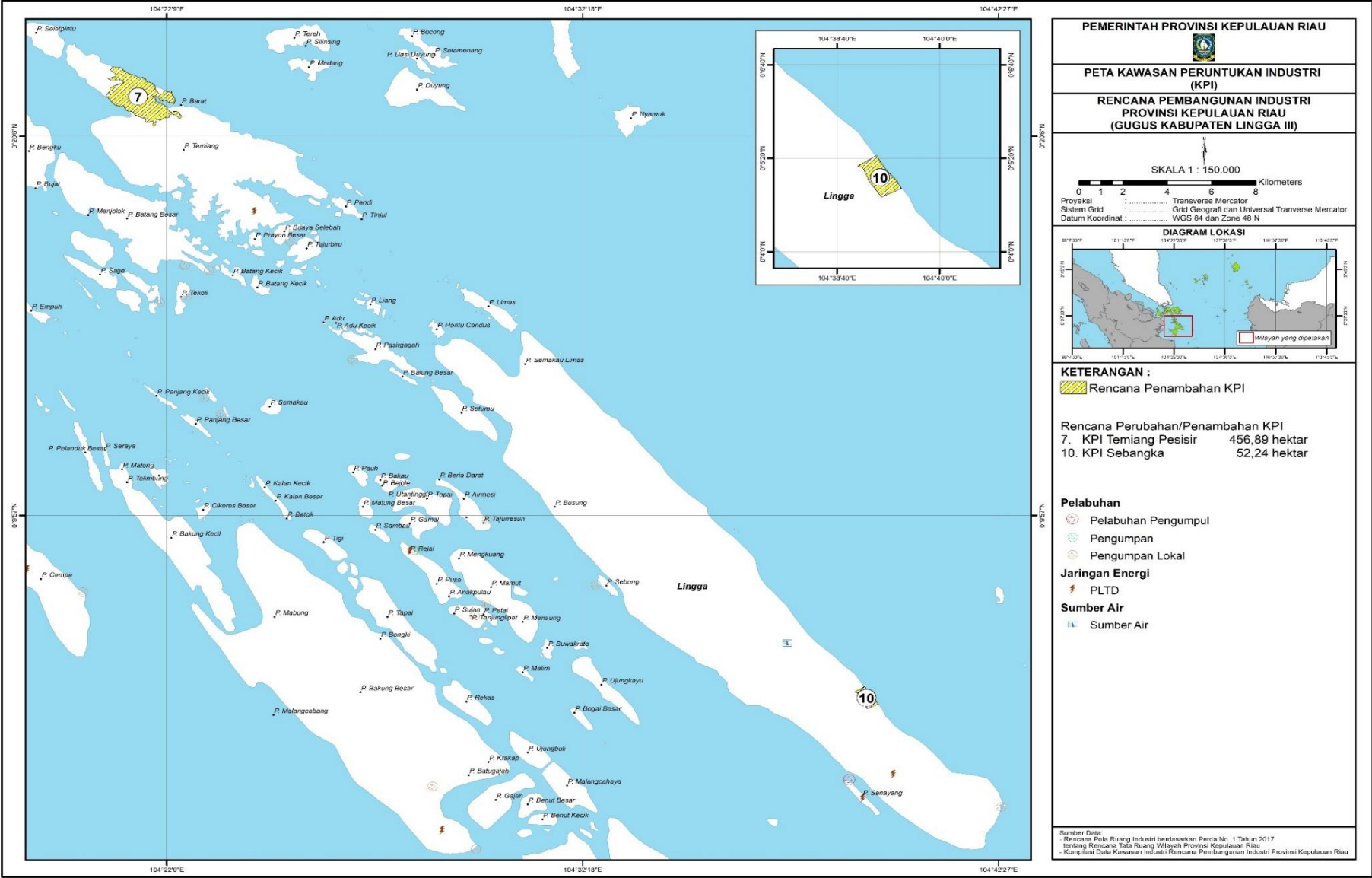
Gambar 4.12 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga



Gambar 4.13 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga



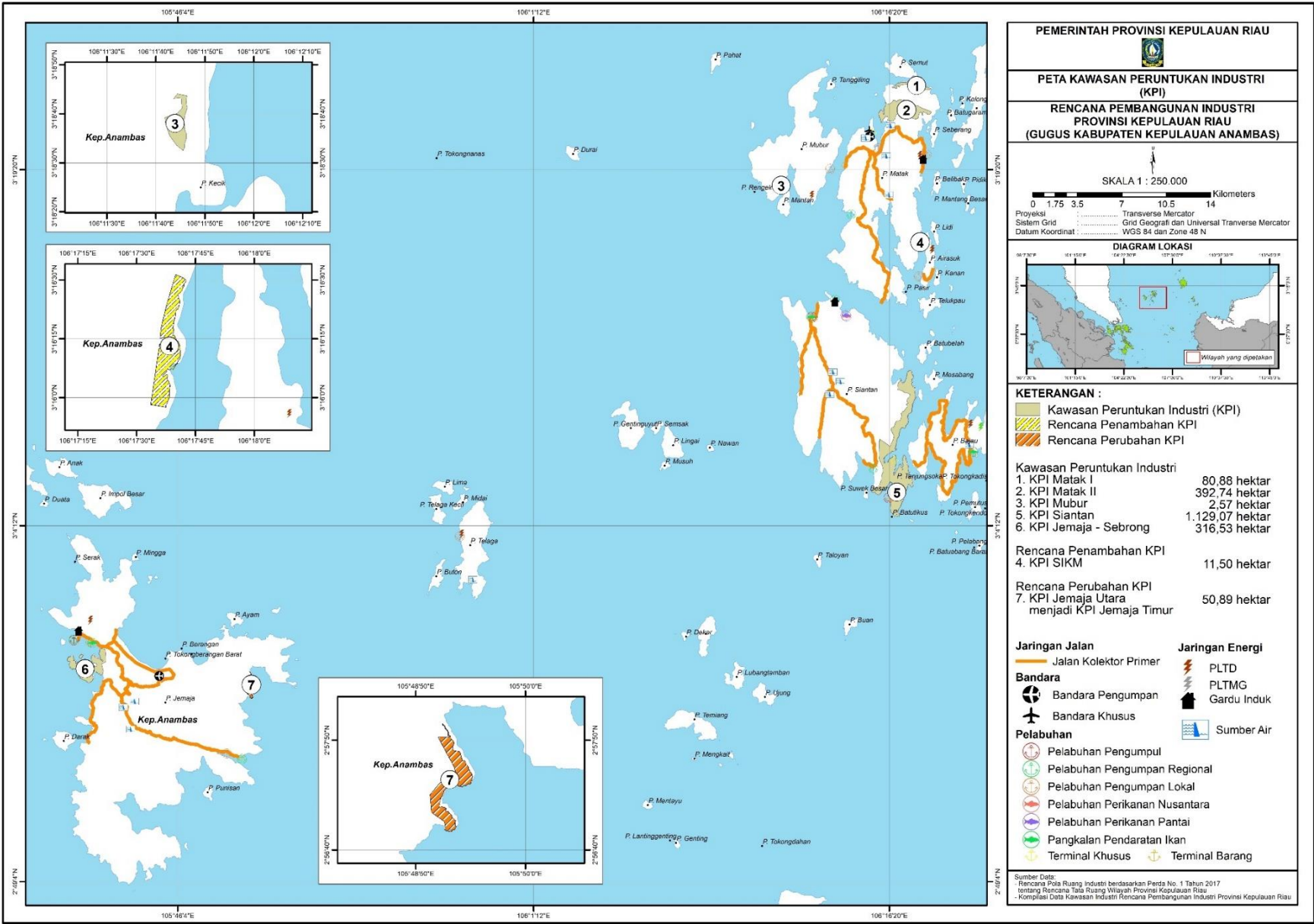
Gambar 4.14 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lingga



E. Kabupaten Kepulauan Anambas

Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas , pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

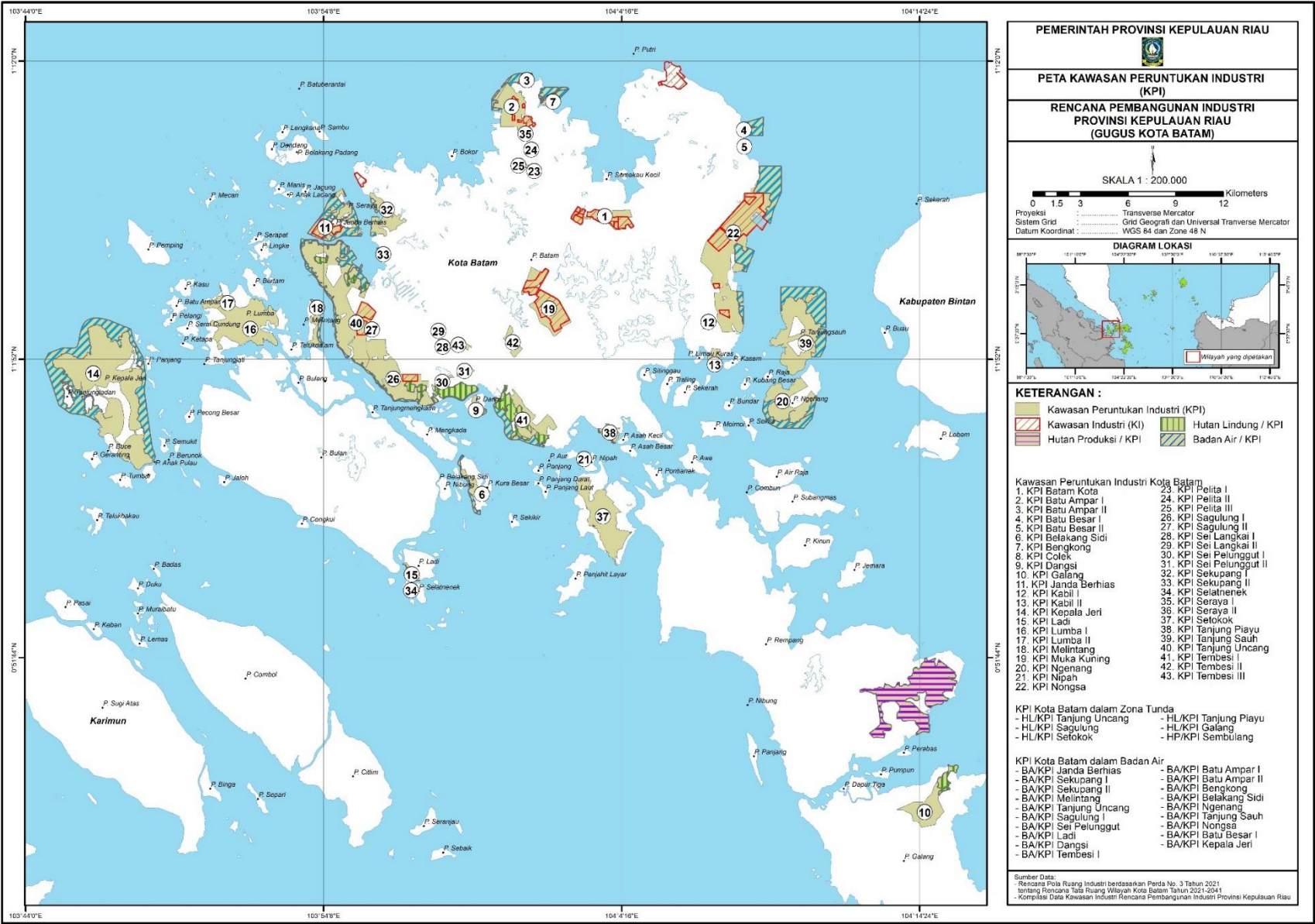
Gambar 4.15 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kepulauan Anambas



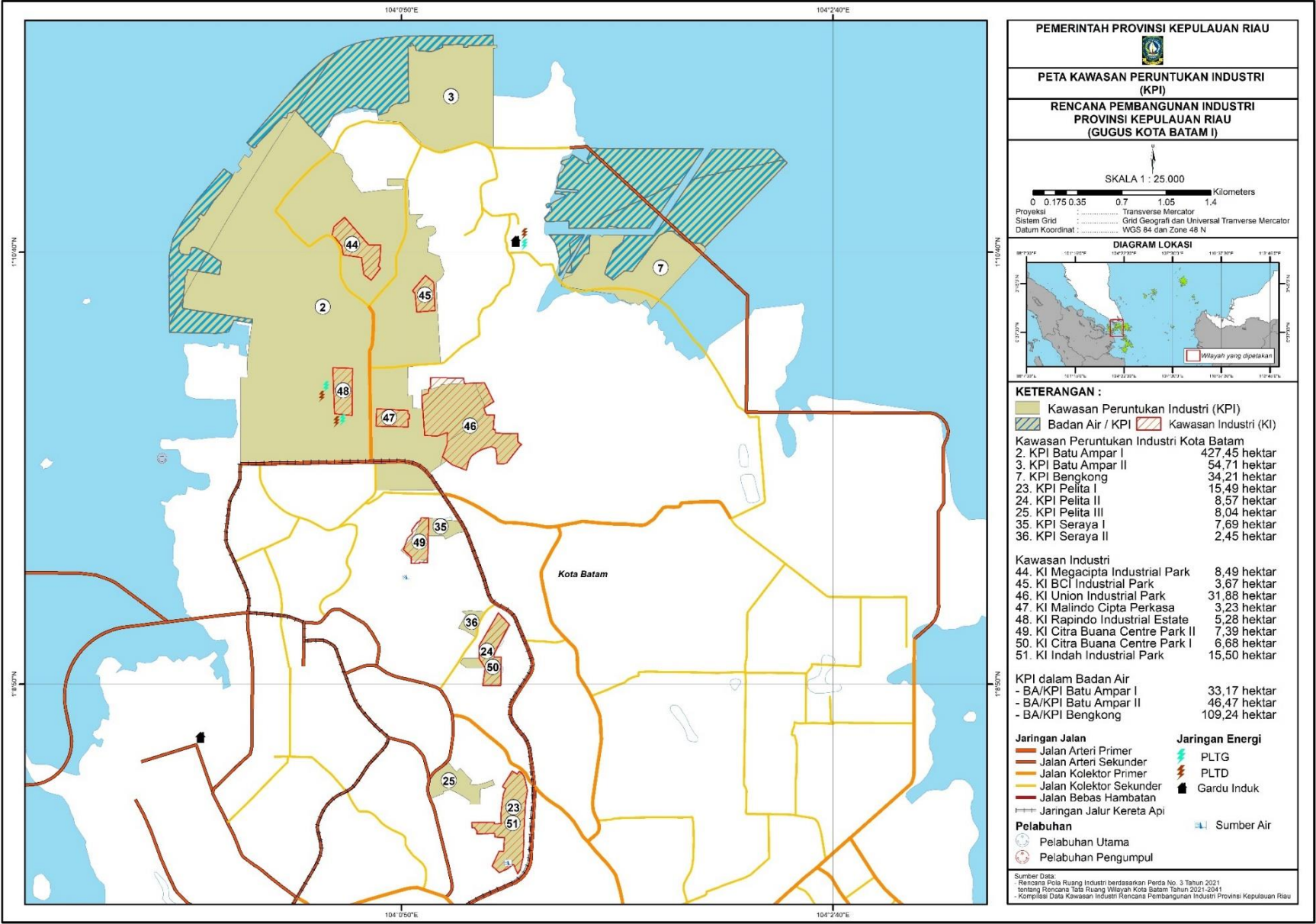
F. Kota Batam

Untuk Kota Batam, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

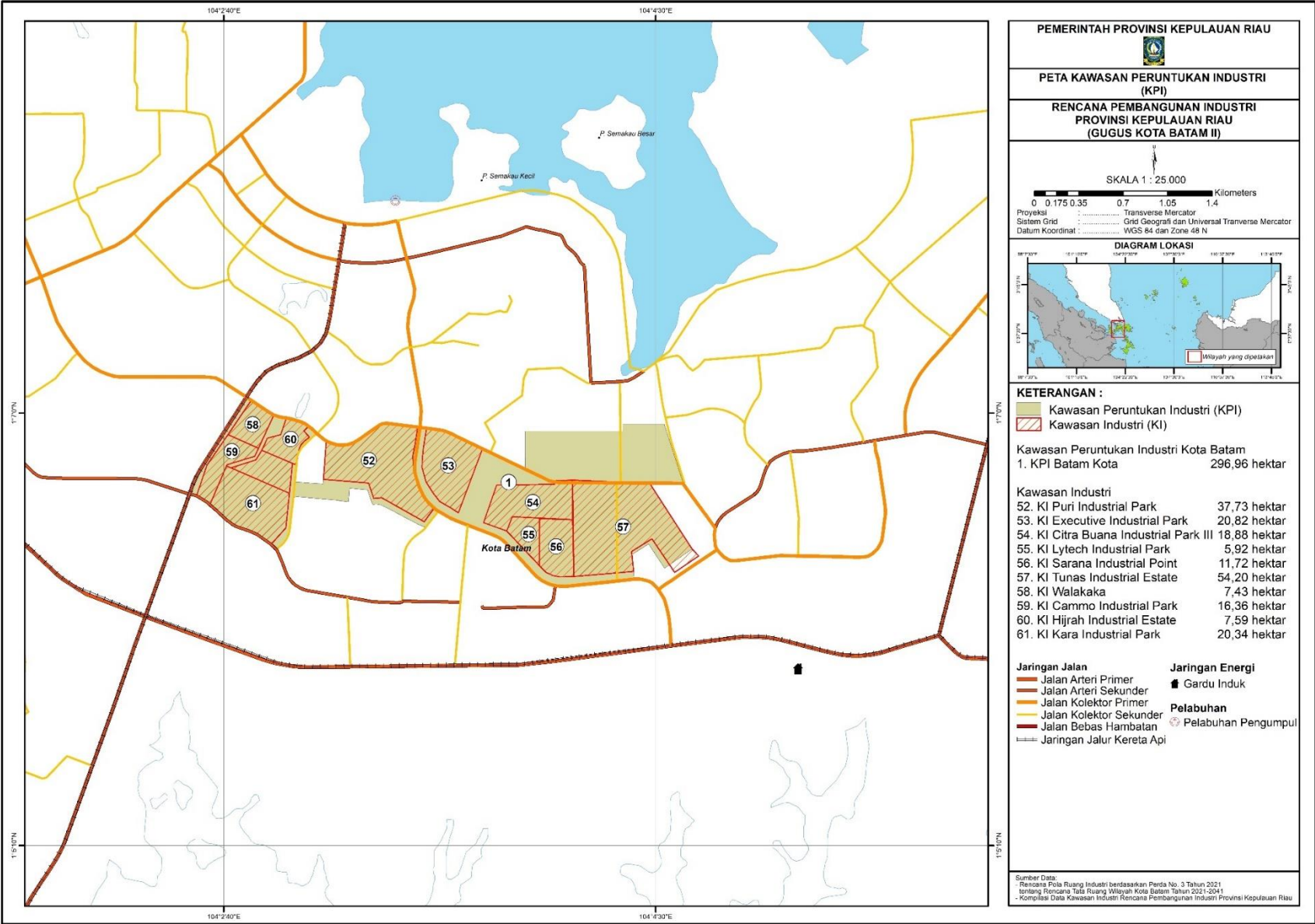
Gambar 4.16 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



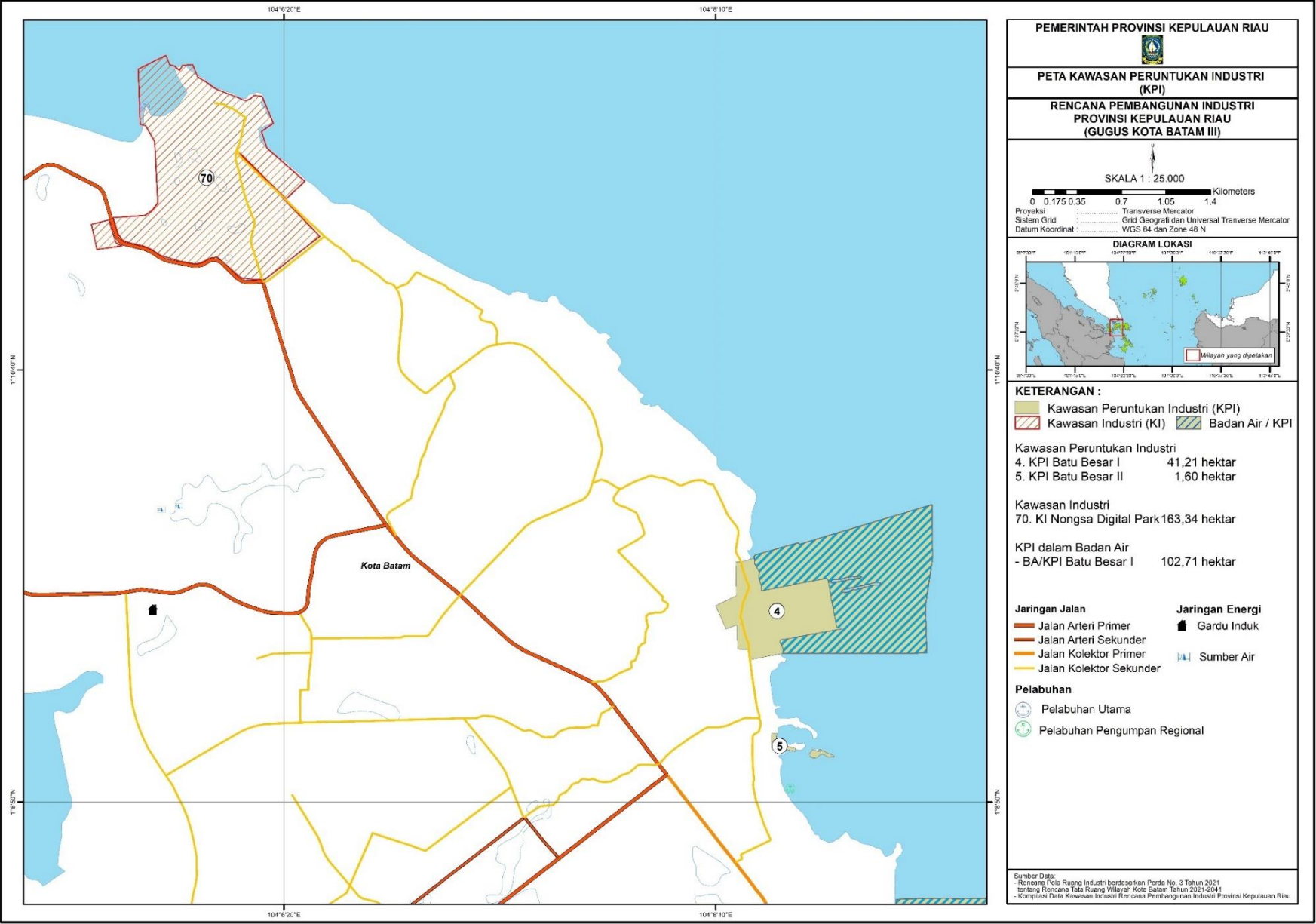
Gambar 4.17 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



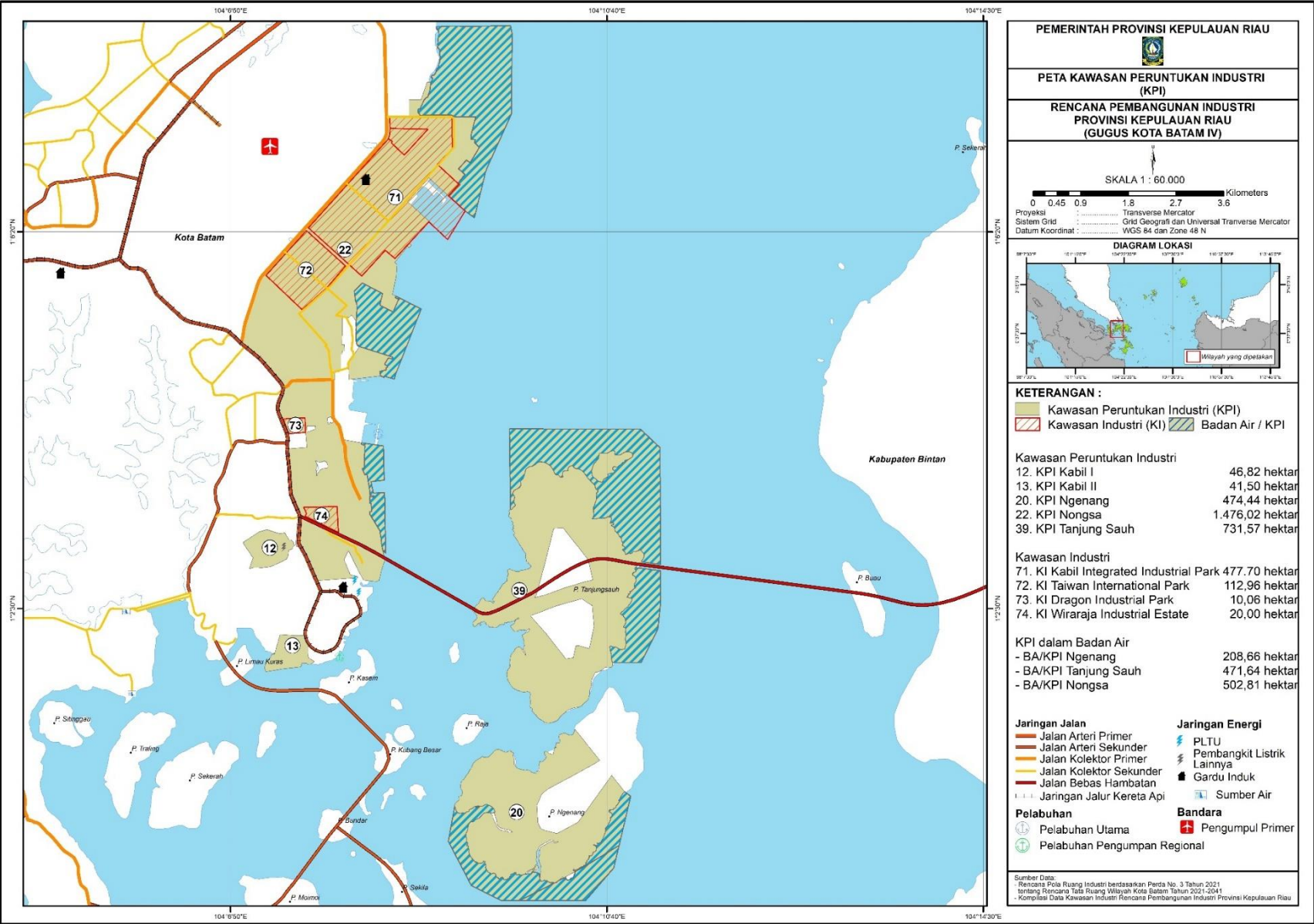
Gambar 4.18 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



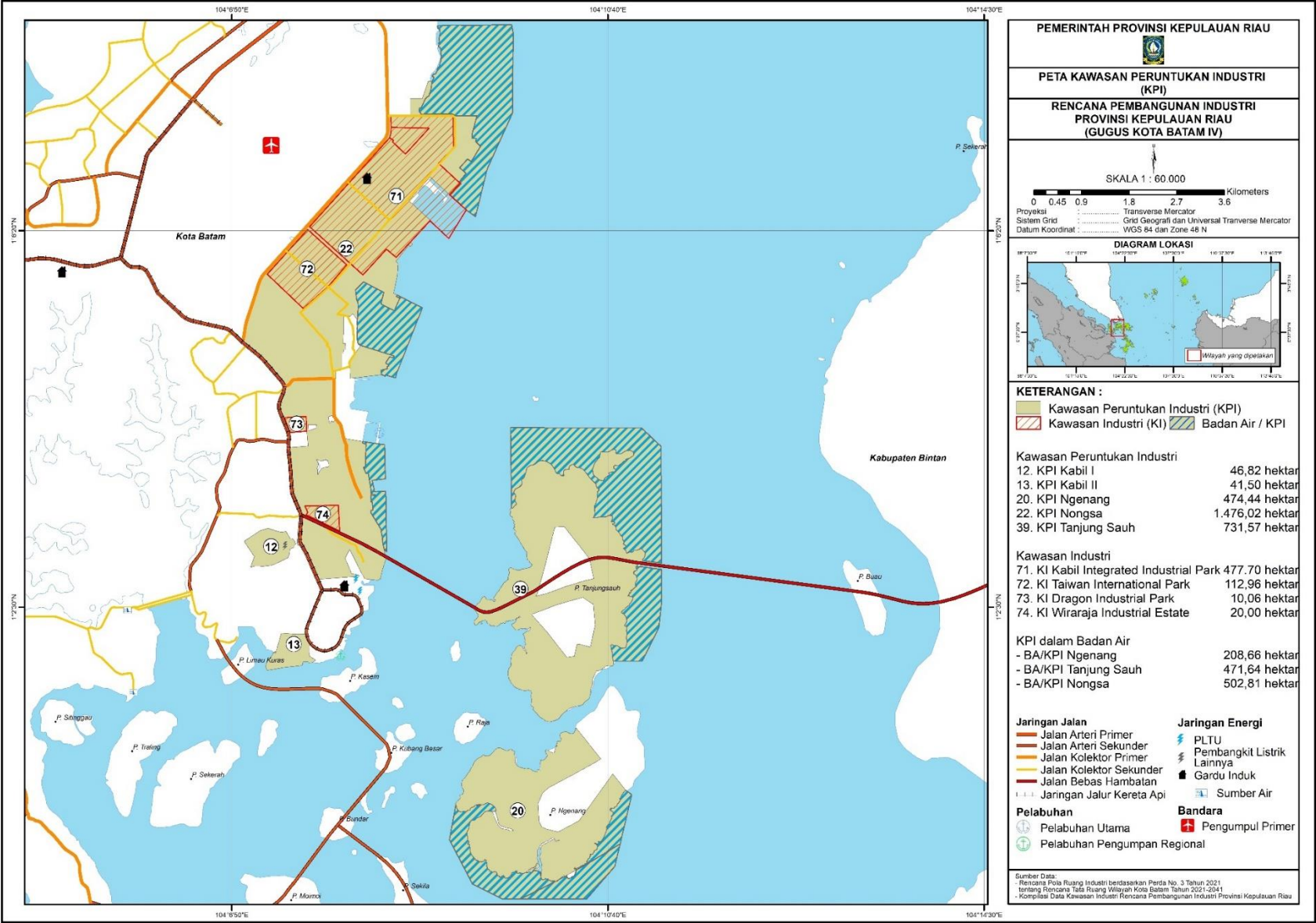
Gambar 4.19 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



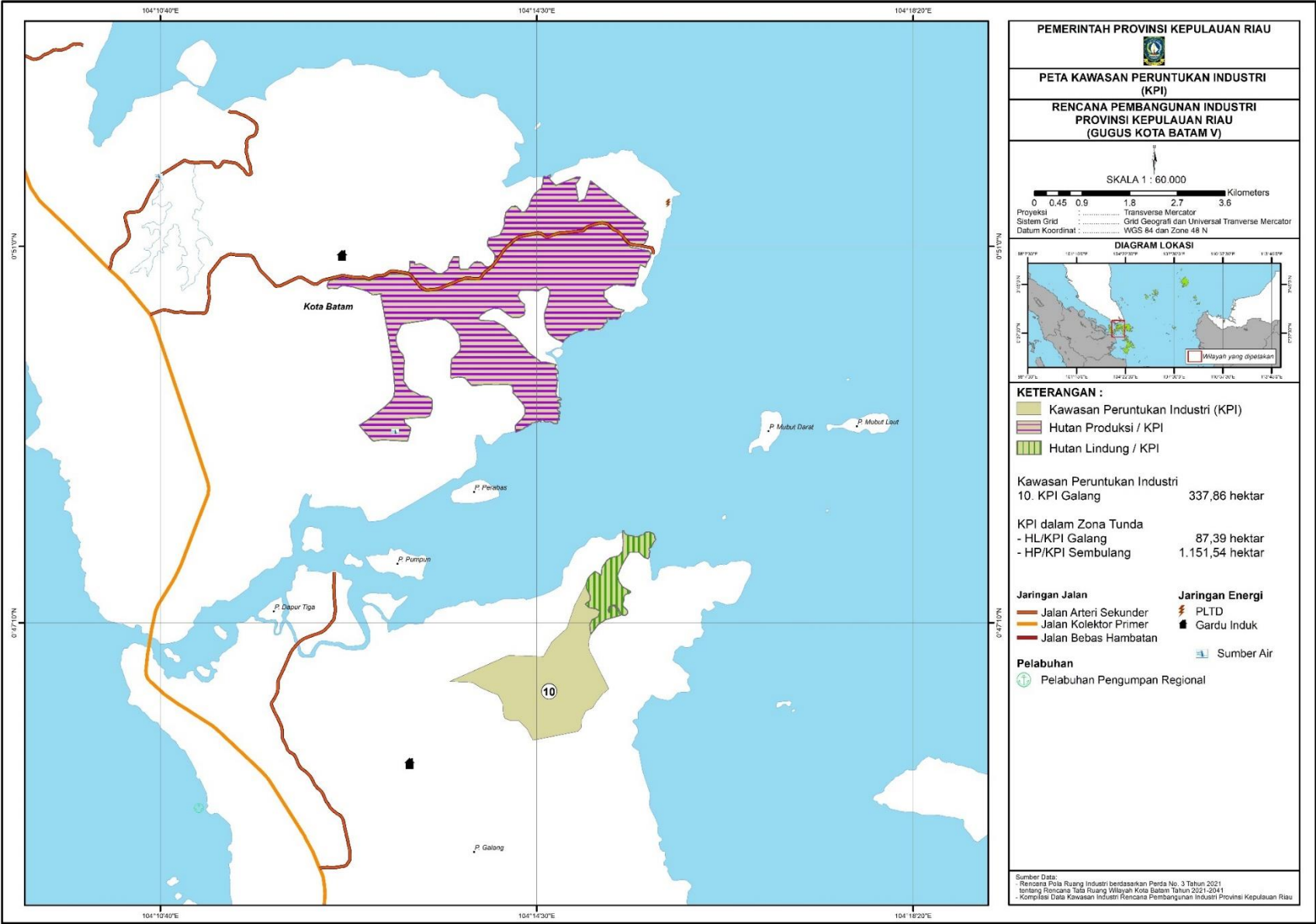
Gambar 4.20 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



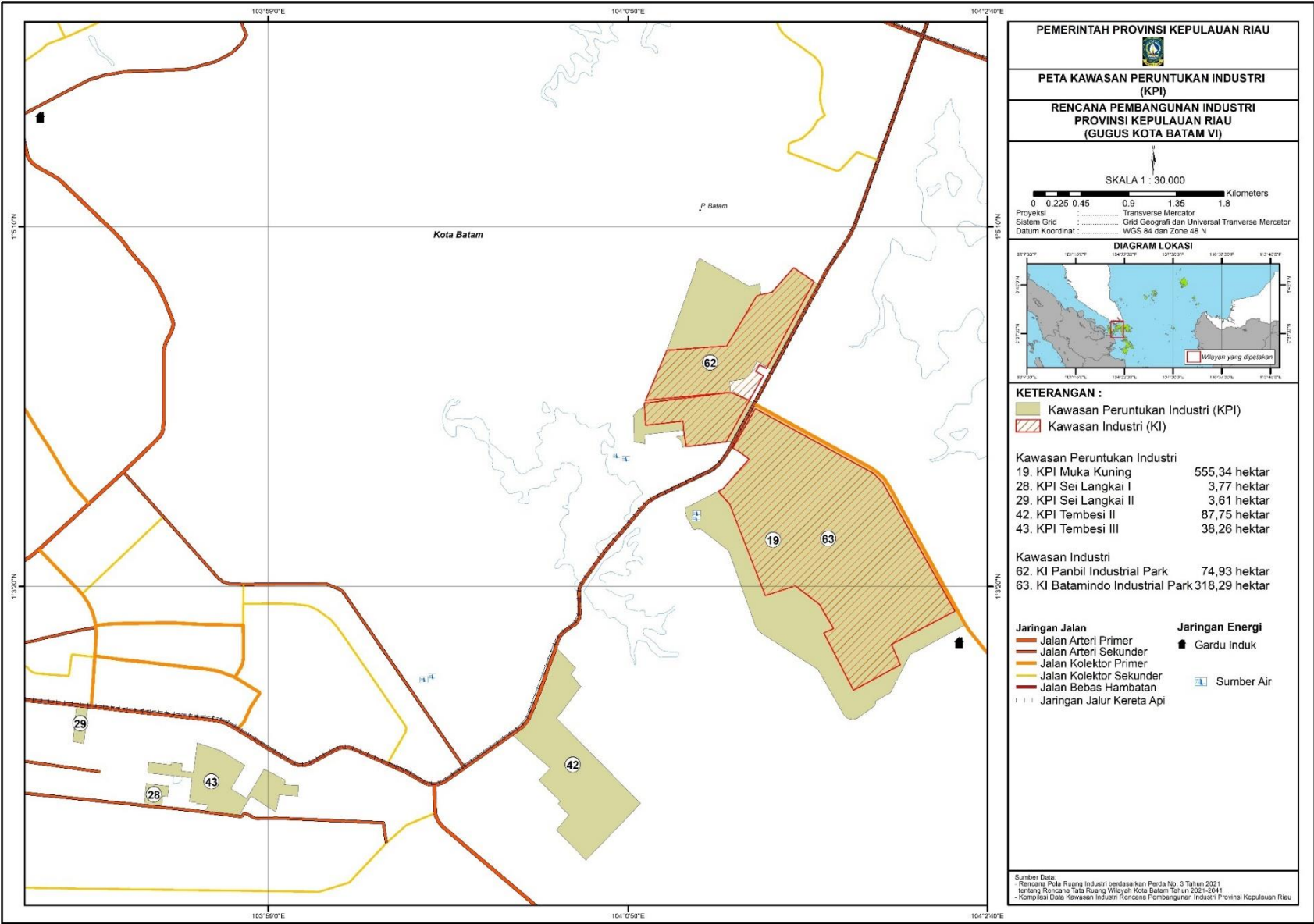
Gambar 4.21 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



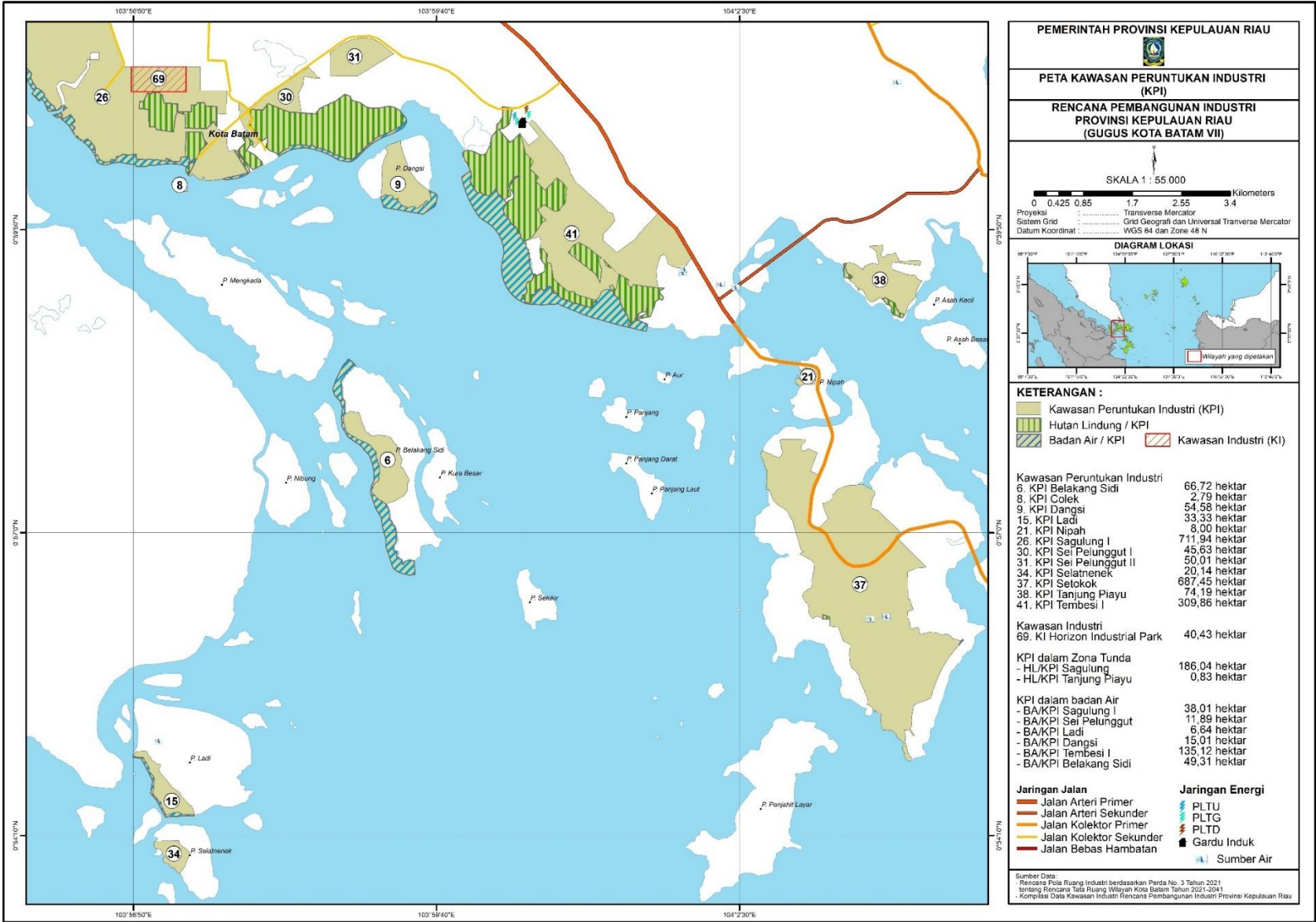
Gambar 4.22 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



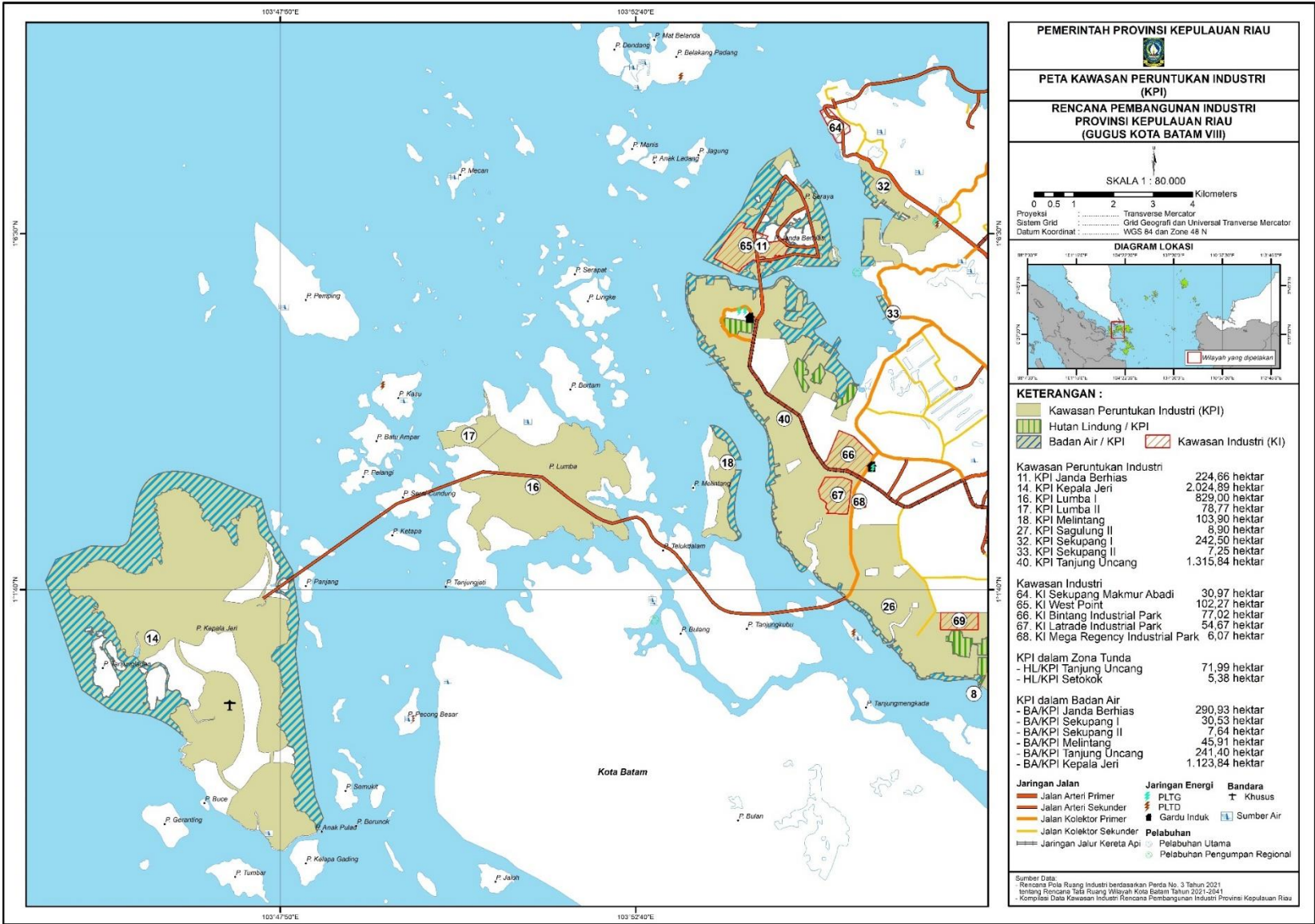
Gambar 4.23 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



Gambar 4.24 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



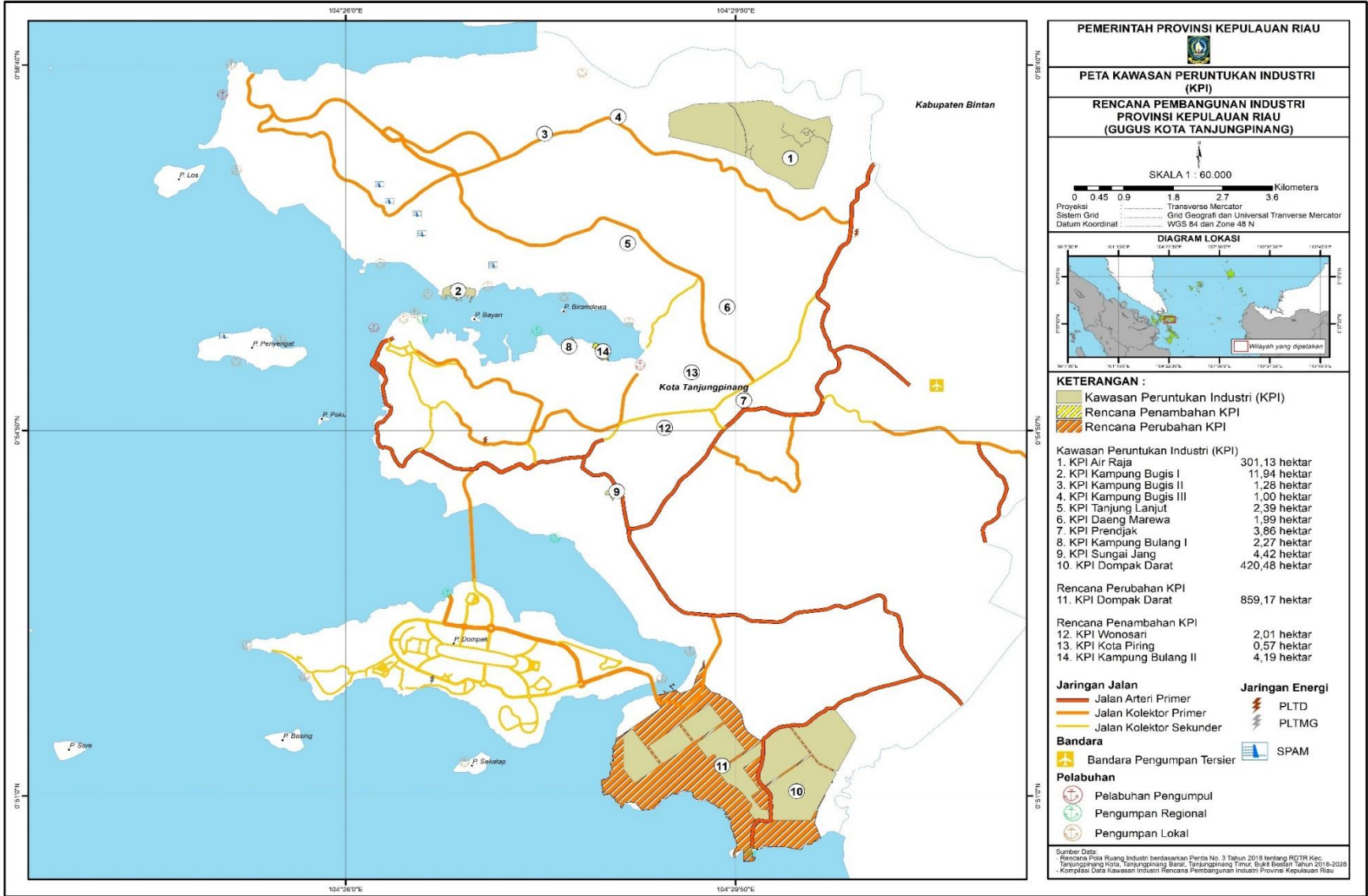
Gambar 4.25 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Batam



G. Kota Tanjungpinang

Untuk Kota Tanjungpinang, pengembangan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri pada lokasi sebagaimana peta terlampir.

Gambar 4.26 Kawasan Peruntukan Industri dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Tanjungpinang



4.4.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.4.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan sumber daya Manusia (SDM) industri menitikberatkan peningkatan peranan Penelitian dan Pengembangan beserta Perguruan Tinggi; Pelatihan Ketenakan Sumber Daya Manusia dibidang teknologi agro-industri; Pelatihan Sumber Daya Manusia dibidang industri pengolahan perikanan dan hasil laut, Pelatihan wirausaha, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan industri dan pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan.

Untuk dapat mengembangkan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, dapat dikembangkan melalui Program Pengembangan Industri Unggulan, Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri tersebut dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut.

Tabel 4.28 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2023 – 2043

Program	Kegiatan	Tahun		
		2023 – 2028	2029 – 2033	2034 – 2043
Pembangunan Infrastruktur Tenaga Kerja Industri berbasis Kompetensi	- Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi melalui skema PSDKU.	√	√	-
	- Pembangunan Lembaga Pendidikan vokasi /Politeknik Industri.	√	√	-
	- Menyesuaikan Kebutuhan kompetensi dan skill SDM Industri melalui penyalarsan jurusan/prodi dan kurikulum.	√	√	√
	- Pembentukan LSP dan TUK	√	√	√
	- Pembentukan Aksesor Kompetensi dan Aksesor Lisensi.	√	√	√
	- Program <i>Link and Match</i> antara DUDI dan SMK.	√	√	√

Program	Kegiatan	Tahun		
		2023 – 2028	2029 – 2033	2034 – 2043
Pembangunan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	- Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan SDM sektor Industri	√	√	√
	- Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Kompetensi SDM Industri melalui pemetaan Kebutuhan Pelatihan Skilling, UpSkilling dan ReSkilling.	√	√	√
	- Pelaksanaan Pelatihan Vokasi dengan sistem 3 in 1 bekerjasama dengan BLK, BDI dan LPK.	√	√	√
	- Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi, Praktek dan Pemagangan Industri.	√	√	√
	- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan SMK dalam melakukan rekrutmen peserta pelatihan Skilling melalui bursa kerja khusus (BKK).	√	√	√
	- Berkoordinasi dengan DUDI dalam melakukan rekrutmen peserta pelatihan UpSkilling dan ReSkilling.	√	√	√
	- Berkoordinasi dengan DUDI dalam rangka penempatan lulusan pelatihan.	√	√	√
	- Mendapatkan informasi evaluasi produktivitas lulusan pelatihan vokasi dengan sistem 3 in 1 yang telah ditempatkan/bekerja di perusahaan industri.	√	√	√
	- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan sistem 3 in 1.	√	√	√
	- Sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Industri	√	√	√
Pennyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	- Pembangunan Laboratorium, Teaching Factory dan Workshop/Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK)	√	√	√
	- Pembangunan Balai Diklat Pengembangan SDM Industri.	√	√	-
	- Bantuan Prasarana Workshop, Laboratorium. Teaching Factory dan LPK di Provinsi Kepri.	√	√	√

4.4.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Untuk dapat mengembangkan Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat dikembangkan melalui Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Industri Unggulan, Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi.

Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri tersebut dapat dilihat pada tabel 4.29 berikut.

Tabel 4.29 Program Pemanfaatan SDA Industri Tahun 2023 – 2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 – 2033	2034- 2043
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√
		Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah (<i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i>)	√	√	√
		Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√	√
		penggunaan teknologi efisien dan optimasi kinerja proses produksi	√	√	√
		Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Stakeholder dalam Pengembangan produk industri unggulan Daerah	√	√	√
		Pendampingan Industri pada Sentra Industri Kecil dan Menengah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara terpadu (zero waste) se- Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri	√	√	√
		Mendorong pengembangan Industri berkelanjutan berbasis produk industri unggulan Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	√	√	-
		Partisipasi BUMD pada pengembangan industri Unggulan Provinsi Kepri melalui penyertaan Modal	-	-	√

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		Mendorong pengembangan Industri berkelanjutan berbasis produk industri unggulan Provinsi melalui konsep Kerjasama (Join Venture)	√	√	√
		Penyusunan Masterplan, <i>Feasibility Study</i> dan DED Pengembangan Industri berbasis produk industri unggulan Provinsi Kepri	√	√	√
		Perencanaan Rantai Pasok Industri Pengolahan berbasis produk industri unggulan Provinsi Kepri yang efektif dan efisien,	√	√	√
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√
		Penetapan bea keluar	√		
		Penetapan kuota ekspor		√	√
		Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri	√	-	-
		Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam	√	-	-
		Pengawasan bea keluar	-	√	√
		Pengawasan kuota ekspor	-	√	√
		Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri	-	√	√
		Pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam	-	√	√
3	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
		Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	√	√	√
		Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	√	√	-
		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	-
		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
		Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan	-	√	√
		Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah	-	√	√

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		Kerjasama R&D pengembangan produk industri unggulan Provinsi melalui Penelitian dan Pengembangan antara Industri, Universitas dan Lembaga Penelitian	√	√	√
		Identifikasi kebutuhan infrastruktur pendukung dalam penyaluran produk industri unggulan Provinsi ke perusahaan industri dan Kawasan industri	√	√	√
		Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu (Migas) di Provinsi Kepri	√	√	√
4	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√	-
		Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√	√	-
		Monitoring hasil dan standardisasi	√	√	√

4.4.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan.

Untuk dapat mengembangkan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, dapat dikembangkan melalui Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Industri Unggulan, Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2023 - 2043 dapat dilihat pada Tabel 4.30 berikut.

Tabel 4.30 Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2023 – 2043

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 – 2033	2034- 2043
1	UMUM	1. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√
		2. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√
		3. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	√	√	√
		4. Melaksanakan pemetaan kemampuan mesin, menerbitkan sertifikasi serta melaksanakan registrasi mesin.	√	√	√
2	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	5. Micro electronics (Fast Processing) components	√	-	-
		6. Integrated smart telecommunication & processing device	-	√	√
		7. Creative design	√	-	-
		8. Wireless & optical communication	-	√	√
		9. Precision engineering	√	-	-
		10. Rapid prototyping and Precision Engineering's smart	-	√	√
		11. Aplikasi Cerdas pada perangkat telepon genggam	√	-	-
		12. Integrasi peralatan komputasi & Telekomunikasi	-	√	√
		13. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan Perkantoran	√	-	-
		14. Komponen elektronika Micro-nano-bio-Cogno	-	√	√

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		15. Komunikasi Mikro Eletronika Fast Processing	√	-	-
		16. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga & Perkantoran dengan Kendali Pikiran (Mind Control)	-	√	√
		17. Komunikasi nirkabel & Optikal	√	-	-
		18. Komunikasi Nir Kabel & Optical Berkapasitas besar	-	√	√
		19. Digital Marketing Application/program	√	√	√
3	Industri Pembangkit Energi	20. Precision engineering	√	-	-
		21. Durable & super conductivity material	-	√	√
		22. Creative design	√	√	√
		23. Precision engineering For Support Manufacturing and Vessel Machine	√	√	√
		24. Chemical battery & solar cell material	√	√	√
		25. Bahan Baku Konduktor dengan Ketahanan Tinggi & Daya Hantar Listrik	√	√	√
		26. Pengendali Konsumsi Daya Listrik Cerdas dan Efisien	√	√	√
		27. Daya Hantar Listrik Nir Kabel	√	√	√
		28. Sistem untuk PLTS	√	-	-
		29. Smart efficiency control	-	√	√
		30. Retrofitting mesin perkakas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi	√	-	-
		31. Numerical Controlled (NC), Flexible Manufacturing Centre, Machining Centre	-	√	√
		32. Heating, Cooling dan Pressuring yang efisien	√	√	√

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		33. Bahan Baku berkemampuan Tinggi (Durable)	√	√	√
		34. Hirolika & Pneumatic yang efisien	√	√	√
		35. Material Konduktor Listrik yang efisien	√	-	-
		36. Material Konduktor Listrik dan Panas yang efisien	-	√	√
4	Industri Transportasi	Alat			
		37. Creative Design Industri Kapal Laut	√	-	-
		38. Creative Design Industri Kapal Laut dan Aerospace	-	√	√
		39. Precision engineering Part untuk Industri Komponen Transportasi Laut dan Aerospace, alat-alat perkakas Transportasi Laut dan Udara.	√	-	-
		40. Precision engineering Part untuk Industri Komponen Otomotif	√	-	-
		41. Precision engineering untuk Industri Transportasi Laut dan Udara	√	-	-
		42. Precision Engineering's smart factory providing companies with industri-specific help to digitalise, invest in new technologies	-	√	√
		43. Mesin (Engine) Kapal propilsi yang efisien	√	-	-
		44. Mesin Kapal Water Jet Efisien & Penggerak Kapal	-	√	√
		45. Pengendalian Keselamatan pada Alat Transportasi	√	-	-
		46. Pengendalian Keselamatan pada Alat Transportasi secara cerdas (smart)	-	√	√
		47. Pemurnian Air Laut untuk Kapal	√	-	-

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		48. Pemurnian Air Laut untuk Kapal Kapasitas Besar untuk Kapal	-	√	√
		49. Komunikasi GPS Via Satelit	√	√	√
		50. Perancangan Produk CAD/CAM	√	-	-
		51. Perancangan Produk CAD/CAM, Intelligent Production	-	√	√
		52. Otomasi pada Proses Produksi	√	-	-
		53. Otomasi dan Robotika pada Proses Produksi	-	√	√
		54. Material Coating tahan air laut untuk Kapal	√	-	-
		55. Material Komposit Keramik yang ringan dan Kuat	√	-	-
		56. Material ringan, kuat, tahan air laut & Temperatur Tinggi	-	√	√
		57. Material treatment	√	-	-
		58. Smart efficiency control	-	√	√
5	Industri Pangan	59. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi	√	-	-
		60. Teknologi bioteknologi dan nanoteknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi/suplemen	-	√	√
		61. Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi	√	√	√
		62. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam)	√	-	-
		63. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro	-	√	√
		64. Teknologi preservasi (Pengalengan)	√	-	-
		65. Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi	√	-	-

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		66. Teknologi kemasan	√	-	-
		67. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal	√	-	-
		68. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro	√	-	-
		69. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	-	√	√
		70. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen dan pangan kesehatan	√	-	-
		71. Teknologi preservasi (Pengalengan)	-	√	√
		72. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen dan pangan kesehatan	-	√	√
		73. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/pangan fungsional	√	√	√
6	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	74. Teknologi Produksi Bahan Baku Farmasi (Sintesa Kimia)	√	√	√
		75. Teknologi Produksi Produk Biologik (Sediaan Tertentu)	√	√	√
		76. Teknologi ekstrasi Minyak Atisiri dan Bahan Alam Lainnya	√	-	-
		77. Teknologi ekstrasi Minyak Atisiri dan Bahan Alam Lainnya yang lebih efisiensi dan ramah lingkungan	-	√	√
8	Industri Hulu Agro	78. Teknologi Produksi Pupuk Majemuk (Lisensi dan Reverse Engineering)	√	-	-
		79. Pilot Plant Teknologi Nasional untuk Pupuk Majemuk	-	√	√

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		80. Teknologi Peningkatan Efisiensi Pabrik Pupuk Eksisting	√	√	√
		81. Teknologi Slow Release Fertilizer	√	-	-
		82. Teknologi Nasional Skala Besar Untuk Industri Pupuk Majemuk	-	√	√
		83. Logistik dan Teknologi Penyimpanan Bahan Baku Pakan	√	√	√
		84. Teknologi Formulasi dan Granulasi Pakan	√	√	√
		85. Teknologi Kemasan	√	√	√
		86. Teknologi Ekstraksi, Isolasi dan Purifikasi Komponen Bioaktif dari Biomassa untuk Suplemen Pakan	√	√	√
		87. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending) Minyak Atisiri skala mini dan medium	√	-	-
		88. Teknologi maju untuk produksi MikroKapsulasi Oleoresin	-	√	√
		89. Teknologi Hidrolisis dan Biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi Bioetanol	-	√	√
9	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	90. Teknologi Produksi Serat Alami	√	-	-
		91. Teknologi Produksi Serat Alami menjadi Bahan Baku Tekstil	-	√	√
		92. Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	√	-	-
		93. Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum			
10	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	94. Teknologi komponing engineering, Design Mold dari rubber	√	-	-
		95. Efisiensi Produksi Berbasis Teknologi Bersih dan Hemat Energi	-	√	√

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		96. Teknologi komponing engineering, Design Mold Plastik	√	-	-
11	Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara	97. Teknologi Produksi Kimia Organik untuk Produksi Pupuk Cair Organik, Konsentrat Pakan Ternak	√	-	-
		98. Teknologi Produksi Kimia Organik menjadi Kaprolaktam dan Asam Asetat	-	√	√
		99. Pengembangan pilot plant kimia organik dengan teknologi lokal	√	-	-
		100. Teknologi konversi gas ke olefin	-	√	√
		101. Pengembangan katalis untuk produksi kimia organik	√	-	-
		102. Pengembangan pilot plat resin plastik	-	√	√
		103. Teknologi Resin Sintetik dan Bahan Plastik (Lisensi dan Reverse Engineering)	√	-	-
		104. Teknologi Peningkatan Efisiensi Pabrik Ekstisting	√	-	-
		105. Teknologi Pembuatan Katalis untuk Industri Petrokimia dan Lainnya	√	-	-
		106. Teknologi Nasional Skala Besar Untuk Industri Kimia Organik, Resin Sintetik dan Bahan Plastik	-	√	√
		107. Teknologi Produksi Senyawa Kimia untuk Produk Anti Kerak, Pelapis Logam, dan Anti Karat pada Logam	√	-	-
		108. Teknologi Produk Senyawa Kimia dari Pati Tepung Sagu dan Bahan Berbasis Agro lainnya.	√	-	-

No	Jenis Industri	Program/Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034- 2043
		109. Teknologi Nasional Skala Besar untuk Industri Senyawa/Bahan Kimia untuk Industri Komponen dan Bahan Penolong	-	√	√
		110. Teknologi Produksi Senyawa Kimia untuk Produk Anti Kerak, Pelapis Logam, dan Anti Karat pada Logam	√	-	-
		111. Teknologi Nasional Skala Besar untuk Industri Senyawa/Bahan Kimia untuk Industri Komponen dan Bahan Penolong	-	√	√
12	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	112. Teknologi Produksi Alumina Chemical Grade	√	-	-
		113. Teknologi Produksi Alumina: Bayer (CGA)	-	√	√
		114. Teknologi Produksi Alumina Smelter Grade	√	-	-
		115. Teknologi Produksi Alumina: Bayer (SGA)	-	√	√
		116. Teknologi Smelter Alumunium: Hall-Heroult	-	√	√
		117. Teknologi produksi silika murni	-	√	√

4.4.3.4 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk dapat mengembangkan Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri, dapat dikembangkan melalui Program Pengembangan Industri Unggulan, Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Adapun Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2023-2043 dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut.

**Tabel 4.31 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi
Tahun 2023-2043**

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi	Penyediaan Lahan Pembangunan Technopark	√	√	-
		Pembangunan Technopark Industri Unggulan Provinsi	√	√	√
		Pendirian Pusat Inovasi / Industry Centre of Excellent Industri Unggulan Provinsi	√	√	√
		Pembangunan Pusat Animasi dan Digital Park	√	√	-
2	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong	√	√	√
		Bimbingan dan faslitasi pembentukan Kelembagaan dan Tata Kelola Sentra Industri di Provinsi Kepri	√	√	√
		Bantuan Penyediaan Tenaga Ahli Design	√	√	√
		Fasilitasi Pembiayaan Pengembangan Sentra Industri Kreatif di Provinsi Kepri	√	√	√
3	Pelatihan Teknologi dan Desain	Pelatihan Teknologi dan Desain	√	√	√
		Bantuan tenaga ahli	√	√	√
		Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	√	√	√
		Pengembangan Industri Kreatif berbasis Teknologi Informasi dan Desain	√	√	√
		Pelatihan Animasi dan Telematika	√	√	√
		Pelatihan digital marketing	√	√	√
4	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI	√	√	√
		Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri	√	√	√
		Pengembangan produk “branded” Kepulauan Riau	√	√	√
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran Produk Industri Kreatif	Promosi dan pameran di dalam negeri	√	√	√
		Promosi dan pameran di luar negeri	√	√	√
		Feasibility Study (FS) dan Penyusunan DED Pembangunan Trading House	√		
		Pembangunan Trading House	√	√	
		Penyediaan fasilitas Prasarana trading house di dalam dan luar negeri			√
		Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan industri dan asosiasi)	√	√	√
		Promosi digital (sosial media, website, marketplace, dll)	√	√	√

4.4.4 Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan.

Untuk dapat mengembangkan Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri, dapat dikembangkan melalui Program Pengembangan Industri Unggulan, Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2023-2043 dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut.

Tabel 4.32 Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 – 2033	2034 -2043
1	Fasilitasi Investasi	Fasilitasi dan insentif PMDN (456 Miliar Rupiah)	√	-	-
		Fasilitasi dan insentif PMDN (912 Miliar Rupiah)	-	√	-
		Fasilitasi dan insentif PMDN (1391 Miliar Rupiah)	-	-	√
		Fasilitasi dan insentif PMA (316 juta dolar)	√	-	-
		Fasilitasi dan insentif PMA (632 juta dolar)	-	√	-
		Fasilitasi dan insentif PMA (963 juta dolar)	-	-	√
2	Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Industri	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
		Fasilitasi Lembaga Pembiayaan Industri (LPI) maupun Lembaga Keuangan Lainnya dalam rangka Meningkatkan Permodalan Pelaku Usaha Industri	√	√	√
3	Pendidikan manajemen keuangan	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	√	√	√

4.4.4.1 Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan lembaga Pendidikan (perguruan tinggi) baik di dalam maupun di luar negeri dalam pengembangan industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2023-2043 dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut.

Tabel 4.33 Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2023-2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah	√	√	√
		Kerjasama Riset dalam Penelitian dan Pengembangan Produk	√	√	√
		Riset Rekayasa Teknologi dan Penguasaan Teknologi	√	√	√
		Implementasi pengembangan hasil penelitian	√	√	√
		Peningkatan Kerjasama dan Pembuatan paten	√	√	√

4.4.4.2 Perijinan dan Pajak Daerah Yang Menunjang Pembangunan Industri

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Berikutnya, penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 4.34 Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2022 - 2027	2028 – 2032	2033 – 2042
1	Program Perijinan dan Pajak Daerah	Penyederhanaan proses perizinan	√	√	√
		Pengembangan Insentif fiskal dan non fiskal	√	√	√
		Penyederhanakan prosedur izin ekspor dan fasilitasi izin ekspor	√	√	√
		Peningkatan pendapatan pajak daerah	√	√	√

4.4.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi; sistim informasi industri dan infra struktur penunjang standardisasi industri.

4.4.5.1 Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Tabel 4.35 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan
Tahun 2023-2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu	√	√	√
		Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa	√	√	√
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA untuk Industri	√	√	√
		Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna	√	√	√
		Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
3	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Industri Hijau	Konsepsi dan sosialisasi Industri Hijau, dan pemberian insentif fasilitas fiskal dan non fiskal untuk Industri Hijau	√	√	-
		Audit PROPER	-	-	√
		Mengembangkan dan meningkatkan penerapan industri hijau	√	√	√
		Membangun dan Mengembangkan Industri Hijau pada Industri Unggulan Daerah	√	√	√
		Pembinaan Industri Hijau pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)	√	√	√
		Peningkatan Pemanfaatan non fiskal untuk Industri Hijau	√	√	√
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media	√	√	√
5	Industri Pengolahan Limbah dan Sampah (Sirkular Ekonomi)	1. Teknologi Konversi Sampah Organik dan Anorganik Non Daur Ulang ke Pupuk, Konsentrat Pakan, Biokomposter, Bahan Bakar Minyak, Pestisida, Pellet dan Penguat Jalan Aspal	√	-	-
		2. Teknologi Konversi Daur Ulang dari Bahan Plastik, Logam dan Kaca ke Bahan Bakar Minyak, Pellet dan Penguat Aspal	-	√	√
		3. Teknik Design Furnitur Lantai dengan Partikel Board, Teknologi Moulding dan Finishing Komponen berbasis Kayu dan Limbah Pengolahan Agro lainnya	√	-	-
		4. Teknologi Moulding dan Finishing Komponen berbasis Kayu, Teknologi Produksi Serat, Pulp dan Kertas, serta Limbah Pengolahan Agro lainnya	-	√	√
		5. Teknologi Konversi Biobriket ke Aktivated Carbon untuk Filter Sistem Rottary	√	√	√
		6. Teknologi Produksi Serat Serabut Kelapa efektif dan efisien	√	√	√
		7. Efisiensi Produksi berbasis Teknologi Bersih, Hemat Bahan Baku dan Energy	√	√	√
		8. Teknologi produksi Biobricket yang berkualitas tinggi	√	√	√
		9. Teknologi Konversi (Fisik/Kimia/Biologis) limbah Biomassa untuk Pakan	√	√	√

4.4.6 Pengelolaan Lahan

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar. Untuk dapat mengembangkan Program pengelolaan lahan dapat dikembangkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pemanfaatan aset daerah (lahan) untuk pembangunan industri. Dalam pembangunannya, pengelolaan lahan untuk industri skala besar dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% sebagai pemenuhan penyediaan RTH Publik.

Tabel 4.36 Program Penyediaan Lahan untuk Industri tahun 2023 – 2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Penetapan kawasan pengembangan industri	Penyusunan Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri.	√	√	√
		Penyusunan Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√
		Pembebasan lahan KI	√	√	√
2	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√
		Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√
3	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maksimal 20% untuk industri skala besar	√	√	√

4.4.7 Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi.

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 10,4% pertahun dalam periode 20 tahun ke depan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 7,3%. Berdasarkan proyeksi tersebut kebutuhan listrik yang mencapai 754 GWh pada tahun 2022 akan meningkat hingga 5.353 GWh pada tahun 2035. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka diperlukan penambahan kapasitas sebesar 214 MW pada periode tahun 2022-2032 dan penambahan kapasitas selanjutnya sebesar 692 MW pada periode 2033-2042.

Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas pendukung industri ini juga akan terkait langsung dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM maupun Telkom sehingga diperlukan kerjasama/koordinasi terpadu.

Untuk dapat mengembangkan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri khususnya dalam Pengelolaan Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait.

Tabel 4.37 Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2023-2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Pengembangan Pembangkit Listrik untuk kebutuhan Industri di Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pengembangan Pembangkit Listrik sampai dengan 135.748 MW			
		a. Pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD) Air Raja dan Suka Berenang sebesar 43 MW	√	√	-
		b. Pembangkit listrik Galang Batang dan Sungai Lekop sebesar 30 MW;	√	√	-
		c. Pembangunan pembangkit Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar Compress Natural Gas (CNG) berkapasitas 20 MW berlokasi di P. Dompok.	√	√	-
		d. Pengembangan Pembangkit Listrik untuk pembangunan industri sampai dengan 135.655 MW	√	√	√
2	Pembangunan Jaringan Listrik	Pengembangan Gardu Induk :			
		- Pembangunan Gardu Industri berkapasitas Total 360 MVA	√	√	√
		- Pembangunan Gardu Induk berkapasitas 60 MVA di P. Dompok;	√	-	-
		Pembangunan SUTT ;	√	√	√
		- Pengembangan Transmisi listrik 150 kV di Kabupaten Bintan	√	√	-
		Perluasan Jaringan Distribusi :			
		- Pengembangan jaringan interkoneksi antar pulau	√	√	√
		- Pengembangan jaringan listrik di Kawasan Peruntukan Industri.	√	√	√
		- Pengembangan jaringan interkoneksi antar pulau	√	√	√
3	Pembangunan Jaringan Air	Pengerukan dan pendalaman waduk :			
		Waduk Sungai Jago, lokasi di Kab. Bintan (Kec. Tanjung Uban)	√	√	-
		Waduk Sungai Gesek, lokasi Kab. Bintan (Kec. Toapaya)	√	√	-

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
		Pembangunan tampungan air baku waduk :			
		- Waduk Kawal, lokasi di Kab. Bintan (Kec. Gunung Kijang)	√	√	-
		- Waduk Galang Batang, lokasi di Kab. Bintan (Kec. Gunung Kijang)	√	√	-
		- Waduk Sei Busung di Kabupaten Bintan.	√	√	-
		- Waduk Pongkar I dan Waduk Pongkar II di Kab. Karimun	√	√	-
		Pembangunan DAM :			
		- Pembangunan DAM Busung, lokasi di Kab. Bintan (Kec. Seri Kuala Lobam)	√	√	-
		- Bendungan Air Dompok di Kota Tanjungpinang, diestimasi memiliki volume tamping sebesar 15.61 Juta M3 dengan debit air mencapai 1.600 lt/dtk.	√	√	√
		- Pembangunan DAM Teluk Bintan, lokasi Kab. Bintan (Kec. Teluk Bintan)	√	√	-
		Peningkatan persentase cakupan layanan :			
		- 900 sambungan baru	√	√	-
		- 4500 sambungan baru	-	-	√
		Kebutuhan Air Bersih untuk Pengembangan dan Pembangunan Industri (150.900 liter/detik/hektar)	√	√	√
4	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Pengembangan Jaringan :			
		- Jaringan Mikro Digital	√	√	√
		- Jaringan Serat Optik	√	√	√
		- Jaringan Mikro Analog	√	√	√

4.4.8 Transportasi (Darat, Laut dan Udara)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara merupakan bagian utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditi industri. Pengembangan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait.

Tabel 4.38 Program Pengembangan Transportasi Tahun 2023 – 2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara	Bandara Kijang (Raja Haji Fisabilillah), Bandara Hang Nadim, Bandara Sei Bati, Bandara Dabo Singkep, Bandara Ranai, dan Bandara Matak, Letung Kepulauan Anambas	√	√	-
2	Pembangunan bandara	Tambelan Bintan	√	√	-

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
3	Pembangunan jembatan antar pulau	Batam - Bintan	√	-	-
4	Penyediaan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP	Pembangunan jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim	√	-	-
5	Penyediaan angkutan darat yang murah dan efisien	- Pengembangan KA dan BRT	√	-	-
6	Peningkatan Jaringan Jalan	- Pemeliharaan Jalan-jalan Eksisting.	√	√	√
		- Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri).	√	√	√
		- Jalan Akses yang menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan;	√	√	√
		- Peningkatan Jalan dari jalur utama ke KPI Bintan Timur (Jalan Bukit Piatu – Galang Batang), lokasi di Kab. Bintan (Kec. Sei Enam);	√	√	-
		- Peningkatan Jalan Sp. Wacopek – Kijang (Sei Enam) sekitar 7,84 Km (Lebar 11 Meter), lokasi di Kab. Bintan (Kec. Sei Enam);	√	√	-
		- Peningkatan Peningkatan jalan Berdikari sekitar 0,14 Km, lokasi Kab. Bintan (Kec. Bintan Utara);	√	√	-
		- Peningkatan jalan kebun nenas sekitar 0,48 Km (lebar 11 Meter), lokasi Kab. Bintan (Kec. Bintan Timur);	√	√	-
		- Peningkatan jalan tanah kuning sekitar 0,71 Km (lebar 11 Meter), lokasi Kab. Bintan (Kec. Bintan Timur);	√	√	-
		- Peningkatan jalan Sribayintan – Pelabuhan sekitar 0,59 Km (Lebar 11 Meter), lokasi Kab. Bintan (Kec. Bintan Timur);	√	√	-
		- Pembangunan jalan Tanjung Uban – Mengkulu Bintan Bayu – Sp. Gesek, lokasi Kab. Bintan (Kec. Tanjung Uban – Kec. Topaya);;	√	√	-
		- Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan, lokasi Kab. Bintan (Kec. Bintan Timur);	√	√	-
		- Jalan akses / blok sepanjang 3.8 Km atau seluas 68.679 M2 (perkerasan) untuk pengembangan KI Dompok di Kota Tanjungpinang;	√	√	-
		- Jalan akses penghubung di dalam blok yang menghubungkan antar kapling dengan Panjang 4.04 Km atau seluas 48.488 Km2 (perkerasan) untuk pengembangan KI Dompok di Kota Tanjungpinang;	√	√	-
		- Rencana pembangunan ruas jalan SP Dompok lama – Pelabuhan RoRo 1,7 Km	√	√	-
		- Pembangunan ruas jalan SP. Mocoh – SP Kelam Pagi 3.6 Km;	√	√	-
		- Pembangunan Ruas Jalan Sei Ungar 3.6 Km	√	√	-
		- Pembangunan Ruas Jalan SP.Wacopek – SP Tg. Mocoh 3.05 Km.	√	√	-

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
7	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan	- Pembangunan Pelabuhan Pulau Mubur dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Sebangka dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Air Bini dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko sebagai Pelabuhan Utama	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Parit dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Tulang dengan Hirarki Pelabuhan Pengumpul	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Baru dengan Hirarki Pelabuhan Pengumpul	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Baru dengan Hirarki Pelabuhan Pengumpul	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Pulau Kundur dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Ungar dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh dengan Hirarki Pelabuhan Utama	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Kepala Jeri dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Lumba dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Melintang dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Rempang dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Ngenang dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Teluk Buton dengan Hirarki Pelabuhan Utama	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Tiga dengan Hirarki Pengumpan Lokal	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Laut dengan Hirarki Pengumpan Lokal	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Penagi dengan Hirarki Pengumpan Lokal	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Ranai dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Subi dengan Hirarki Pengumpan Regional	√	√	√

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
		- Pembangunan Pelabuhan Tanjung Moco dengan hirarki Pelabuhan Pengumpul;	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Pulau Lumut dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pembanguna Pelabuhan Tarempa dengan Hirarki Pelabuhan Perikanan Pantai	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Bunguran Barat dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa dengan Hirarki Pelabuhan Perikanan Nusantara	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Batu Duyung dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Moro dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pembangunan Barelang dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pembangunan Telaga Punggur dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan	√	√	√
		- Pembangunan Pelabuhan Tg Batu Sawah, KPI Dompok dengan Hirarki Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).	√	√	√

4.4.9 Sistem Informasi Industri

Penyediaan *software* dan *hardware* Sistem Informasi Industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan penyediaan s.d pemasaran komoditi industri.

Tabel 4.39 Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri
Tahun 2023 – 2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2043
1	Pengembangan Sistem Informasi Industri	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Industri berbasis perwilayahan.	√	√	-
		Informasi potensi investasi sektor industri	√	√	-
		Update berkala	√	√	√
2	Peningkatan pengolahan dan Penyajian Data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Peningkatan Kualitas Penyajian Data SIINas untuk Menunjang Pengambilan Keputusan di Provinsi Kepri	√	√	
		Update berkala	√	√	√
3	Pengembangan Sistem Informasi Rantai Pasok Industri	Pengembangan Sistem Informasi Rantai Pasok Industri	√	√	-
		Update berkala	√	√	√
4	Pembangunan Data Centre	a. Pembangunan 3 Data Centre di Nongsa Digital Park;	√	√	-
		b. Pembangunan 1 Data Centre di KPI Dompak;	√	√	√
		c. Pembangunan 2 Data Centre di Kabupaten Bintan.	√	√	√

4.4.10 Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Penyediaan infrastruktur penunjang standardisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Untuk dapat mengembangkan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dapat dikembangkan melalui Program Strukturisasi Industri, Program Pengembangan Industri Unggulan, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Prioritas strategis dalam konektivitas di Kawasan Industri adalah dengan membangun dan mengembangkan Bandara, sarana jalan dan jembatan, pelabuhan. Kawasan industry di Kepulauan Riau tersebar di beberapa pulau berukuran besar dan kecil. Untuk mengatur konektivitas Industri antar pulau tersebut diperlukan Pelabuhan-pelabuhan yang berdaya saing regional. Hal tersebut diperlukan karena secara umum Kawasan Industri di Kepulauan Riau beroreantasi ekspor.

Dari beberapa forum komunikasi dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Kepulauan Riau, para pelaku HKI menyatakan sangat diperlukannya pelabuhan yang berdaya saing regional karena rantai logistic di Kawasan Industri didukung oleh Pelabuhan. Mengakomodir kepentingan pelaku usaha dan rencana pengembangan industry maka diperlukan perencanaan Pelabuhan. Perencanaan tersebut meliputi

pembangunan pelabuhan baru sebagai penunjang Kawasan Industri baru dan pengembangan pelabuhan melalui peningkatan hirarki.

Salah satu Kawasan prioritas ada di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi besar sebagai Kawasan Industri dengan perencanaan yang sesuai dengan perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kemaritiman di Natuna. untuk mewujudkan Kawasan Industri KEK yang besar maka diperlukan Pelabuhan Samudera berhirarki Pelabuhan Utama. Perencanaan tersebut berada pada Tabel 4.40.

**Tabel 4.40 Program Penyediaan Infrastruktur Standardisasi Industri
Tahun 2023 – 2043**

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Pengembangan Standardisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal	√	√	√
		Penerapan standardisasi industri	√	√	√
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan permintaan dan pasar	Pengembangan pengawasan standar	√	√	√
		pendirian Balai Pengembangan Produk dan standardisasi Industri (BPPSI)	√	√	-
		Peningkatan kompetensi auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, ppsi dan ppns Industri	√	√	√
		Pembangunan UPT Pengujian dan Sertifikasi Produk	√	-	-
		Pengembangan lembaga penilai kesesuaian	-	-	√

4.4.11 Pemberdayaan Industri

Keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang keberadaan dan perkembangannya tersebar diseluruh wilayah dan mayoritas diusahakan oleh masyarakat luas menjadikan IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi industri menengah besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan *stakeholders* lainnya melalui kegiatan Pemberdayaan IKM.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 4.40 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023 - 2043

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023-2028	2029-2033	2034-2043
1	Penguatan Kelembagaan	- Penguatan Sentra IKM (Pendataan dan mapping potensi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM), Fasilitasi Pengembangan Sentra Industri By Design dan Sentra Revitalisasi di Kab/Kota)	√	√	√
		- Revitalisasi dan Pembangunan Unit Pelayanan Teknis atau Bentuk Kelembagaan Usaha Sentra lainnya (Meningkatkan kemampuan kelembagaan Sentra IKM)	√	√	√
		- Penyediaan Tenaga Penyuluh Industri	√	√	√
		- Penyediaan Konsultan IKM	√	√	√
2	Pemberian Fasilitas	- Peningkatan kompetensi SDM IKM dan sertifikasi kompetensi (Fasilitasi Magang bagi wirausaha baru, Fasilitasi pengurusan perizinan bagi IKM melalui Sistem Perizinan berbasis Elektronik (OSS Rba) dan Pelaporan Industri melalui SIINas,	√	√	√
		- Pemberian Bantuan dan Bimbingan Teknis (Pelatihan dan Bimbingan Penerapan GMP bagi Pelaku IKM, Pelatihan Diversifikasi Produk, Pelatihan Aneka Kerajinan dan Produk Khas Daerah, Pelatihan Pengolahan Limbah menjadi Aneka Produk Kerajinan bernilai tambah tinggi, Pelatihan Pembuatan Cenderamata berbahan baku lokal, Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan CEFE dan AMT bagi pelaku IKM, dll)	√	√	√
		- Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong industri	√	√	√
		- Pemberian bantuan mesin atau peralatan	√	√	√
		- Pengembangan Produk	√	√	√
		- Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√
		- Fasilitasi akses pembiayaan industri (fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM,	√	√	√
		- Penyediaan dan Pembangunan Kawasan Industri IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan	√	√	√
		- Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, pemasaran dan Penguatan fasilitasi literasi digital (Sayembara Produk Unggulan IKM, Fasilitasi Galery/Showroom/Display Produk bagi pelaku IKM, Partisipasi Pameran dalam Negeri dan luar Negeri,	√	√	√

No	Program	Kegiatan	Tahun		
			2023-2028	2029-2033	2034-2043
		- Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui Standardisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama), Penguatan Infrastruktur, Fasilitasi serta dukungan Operasional Pengembangan Klinik Kemasan & Design), Temu Bisnis Pelaku Industri Kecil dan Menengah), Fasilitasi Sertifikasi Halal dan PIRT Produk IKM).			
		- Fasilitasi kemitraan antara Industri Kecil, Menengah dan Besar	√	√	√
		- Fasilitasi HKI terhadap IKM	√	√	√
		- Fasilitasi Bimtek dan Pelatihan penerapan standar mutu produk bagi IKM (Pelatihan Peningkatan Mutu Kerajinan berbasis bahan baku lokal, Pelatihan peningkatan Mutu produk olahan Pangan,	√	√	√
		- Pendataan dan revitalisasi IKM	√	√	√

BAB V

PENUTUP

Demikianlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Riau Tahun 2023 - 2043. Keterkaitan antar bab telah diawali dalam Bab 1 yang telah memberikan gambaran awal dan kerangka dokumen. Bab 2 berisi data dan informasi berbagai aspek Kepulauan Riau sedangkan Bab 3 menjabarkan informasi target atau capaian yang perlu dituju. Kedua bab tersebut menjadi dasar-dasar penentuan atau penetapan yang dilakukan dalam Bab 4.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Riau Tahun 2023 - 2043 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Kepulauan Riau, merupakan penjabaran detail dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2027 khususnya terkait dengan pembangunan industri.

Program-program untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ini meliputi :

- 1. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
- 2. Pengembangan Perwilayahan Industri.
- 3. Pembangunan Sumber Daya Industri.
- 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- 5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Riau Tahun 2023 -2043 ini ditetapkan industri unggulan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Industri Unggulan Provinsi

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika Industri Komputer Industri Peralatan Komunikasi
2	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan
3	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan Industri Kedirgantaraan Industri Kendaraan Bermotor
4	Industri Pangan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (KBLI 102)

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
		Industri Pengolahan Minyak Nabati Industri Produk Masak dari Kelapa (KBLI 10773) Industri Korpra (KBLI 10421) Industri Minuman Ringan (KBLI 11040) Industri Sirop (KBLI 10723) Industri Tepung Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya (KBLI 10740) Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng (KBLI 10320) Industri Makanan Sereal (KBLI 10615) Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan (10772)
5	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 210) Industri Barang Kimia Lainnya (KBLI 202)
6	Industri Hulu Agro	Industri Serat Sabut Kelapa (KBLI 32905) Industri Furniture Lainnya (KBLI 31009) Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213) Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (KBLI 17099) Industri Konsentrat Makanan Hewan (KBLI 10802) Industri Oleokimia Industri Kemurgi Industri Pakan
7	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Pengolahan lainnya YTDL (KBLI 32909) Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet Industri Tekstil
8	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (KBLI 17022) Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar (KBLI 19214) Industri Mesin dan Perlengkapan Industri Komponen Jasa Industri
9	Industri kimia dasar	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer (KBLI 20121) Industri Pupuk
10	Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi (KBLI 19291) Industri Petrokimia Hulu Industri Kimia Organik Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik Industri Karet Alam

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
11	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302) Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) (KBLI 24102) Industri Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301) Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 242) Industri Kaca dan Barang dari Kaca (KBLI 231) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya (KBLI 2399)

Sumber : RIPIN 2015

Rencana ini diharapkan untuk menjadi pedoman:

- Penjabaran ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD guna mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau.
- Bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi.
- Pendamping Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK).

Akhir kata, semoga usaha perwujudan dari rencana pembangunan industri provinsi Kepulauan Riau selama 20 tahun ke depan terjadi dalam sinergi dan keharmonisan seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Diharapkan realisasi program-program pembangunan dapat selesai tepat pada waktunya serta bebas dari unsur KKN sehingga berkontribusi bagi elemen-elemen regional dan bahkan nasional.